



# RPKD

## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

**KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026**



**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur**

## KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dilaksanakan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan tugas, melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah.

Selanjutnya, TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi di antaranya, “Penyusunan Rencana Penggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)”. Penyusunan RPKD dimaksudkan untuk membentuk komitmen dan sinergitas lintas sektoral dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, dan menjadi bahan untuk disinergikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah secara menyeluruh.

RPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah RPKD yang seharusnya menjadi dokumen lima tahunan sesuai dengan periode RPJMD, namun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 maka TKPKD Kabupaten Luwu Timur menganggap perlu menyusun RPKD agar bisa berkontribusi dalam mewujudkan cita politik kepala daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan secara substansi penyusunan RPKD ini memperhatikan dokumen RPJMD hingga RPKD yang minimal memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan, prioritas program, dan lokasi program menjadi bagian yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyusunan dan penyelesaian dokumen ini. Terutama penajaman aspek sasaran, program dan sinergi program, monitoring dan evaluasi, efektifitas anggaran, dan penguatan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

Semoga kontribusi masing-masing pihak dapat menjadi sumbangsih dalam penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, “**Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**”

Luwu Timur, November 2022

**Drs. DOHRI AS'ARI**

Kepala BAPPELITBANGDA  
Kabupaten Luwu Timur

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.2.1 Maksud .....	5
1.2.2 Tujuan .....	5
1.3 Sasaran .....	6
1.4 Landasan Kebijakan .....	6
1.5 Sistematika RPKD .....	7
<b>BAB II KONDISI UMUM DAERAH.....</b>	<b>10</b>
2.1 Geografis .....	10
2.2 Iklim Dan Musim .....	11
2.3 Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	13
2.4 Pendidikan.....	21
2.4.1 Angka Melek Huruf .....	21
2.4.2 Angka Partisipasi Sekolah .....	22
2.4.3 Angka Partisipasi Kasar APK .....	23
2.4.4 Angka Partisipasi Murni APM.....	24
2.5 Kesehatan .....	25
2.6 Pembangunan Manusia Dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..	27
2.7 Pertumbuhan Ekonomi.....	30
2.8 Kemiskinan .....	36
2.9 Tingkat Pengangguran .....	44
2.10 Gini Rasio .....	45
2.11 Program Penanggulangan Kemiskinan .....	46

<b>BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH .....</b>	<b>54</b>
3.1 Bidang Konsumsi Pengeluaran .....	55
3.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0).....	56
3.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).....	60
3.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	63
3.1.4 Jumlah Penduduk Miskin.....	66
3.1.5 Garis Kemiskinan.....	69
3.1.6 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem .....	72
3.1.7 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio).....	75
3.2 Bidang Ketenagakerjaan .....	78
3.2.1 Angkatan Kerja .....	78
3.2.2 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja.....	81
3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka .....	84
3.3 Bidang Pendidikan .....	87
3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI .....	87
3.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs .....	90
3.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.....	93
3.3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs .....	96
3.3.5 Harapan Lama Sekolah .....	99
3.3.6 Angka Buta Huruf 15+.....	102
3.3.7 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Yang Sudah Tidak Bersekolah Lagi .....	105
3.4 Bidang Kesehatan.....	108
3.4.1 Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih.....	108
3.4.2 Angka Kematian Bayi.....	111
3.4.3 Angka Kematian Balita .....	114
3.4.4 Angka Kematian Ibu .....	116
3.4.5 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk .....	118
3.4.6 Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Selama Terakhir .....	121
3.5 Bidang Infrastuktur Dasar .....	123
3.5.1 Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak.....	123
3.5.2 Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak .....	126
3.5.3 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik.....	129

3.6 Bidang Ketahanan Pangan .....	132
3.6.1 Perkembangan Harga Beras .....	132
3.6.2 Persentase Rumah Tangga Dengan Penerima Program Raskin/BPNT.....	135
3.6.3 Perkembangan Harga Bahan Pokok Utama .....	138
3.7 Analisis Data Terpadu .....	143
3.7.1 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Demografi. ....	143
3.7.2 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Pendidikan. ....	146
3.7.3 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Kesehatan.....	150
3.7.4 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Ketenagakerjaan. ....	156
3.7.5 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Perumahan. ....	159
3.7.6 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Kepemilikan Aset. ....	167
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM .....</b>	<b>170</b>
4.1 Prioritas Intervensi .....	170
4.1.1 Teori Perubahan / <i>Theory Of Change</i> .....	170
a) Bidang Konsumsi / Pengeluaran .....	170
b) Bidang Ketenagakerjaan .....	172
c) Bidang Pendidikan. ....	173
d) Bidang Kesehatan.....	174
e) Bidang Infrastruktur Dasar. ....	175
f) Bidang Ketahanan Pangan. ....	176
4.2 Analisis Keterkaitan ( <i>Causal Relationship</i> ).....	177
a) Bidang Konsumsi. ....	178
b) Bidang Ketenagakerjaan. ....	179
c) Bidang Pendidikan. ....	180
d) Bidang Kesehatan.....	181
e) Bidang Infrastruktur Dasar.....	182

f) Bidang Ketahanan Pangan.....	183
4.3 Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan.....	184
4.3.1 Analisis Pendapatan Daerah.....	184
4.3.2 Analisis Belanja Daerah.....	186
4.3.2.1 Struktur Belanja Daerah.....	186
4.3.2.2 Analisis Belanja Kesejahteraan.....	188
4.3.2.3 Analisis Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.....	189
4.3.2.4 Analisis Belanja Pendidikan.....	190
4.3.2.5 Analisis Belanja Kesehatan.....	191
4.3.2.6 Analisis Belanja Infrastruktur.....	192
<b>BAB V PRIORITAS WILAYAH.....</b>	<b>195</b>
5.1 Bidang Konsumsi/Pengeluaran.....	195
5.1.1 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Dengan Persentase Ketepatan Bantuan Pangan (Raskin/BPNT).....	195
5.1.2 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin (DTKS) Kab Luwu Timur.....	197
5.1.3 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin dengan Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	198
5.2 Bidang Ketenagakerjaan.....	200
5.2.1 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Setengah Penganggur.....	200
5.2.2 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	201
5.2.3 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Pencari Kerja Terhadap Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) Kabupaten Luwu Timur.....	203
5.3 Bidang Pendidikan.....	205
5.3.1 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.....	205
5.3.2 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.....	207
5.3.3 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi.....	208

5.3.4 Analisis Prioritas Wilayah Angka Putus Sekolah SD/MI dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A.....	210
5.4 Bidang Kesehatan.....	211
5.4.1 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Prevalensi balita Stunting.....	211
5.4.2 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Angka Kematian Balita. ....	213
5.4.3 Analisis Prioritas Wilayah Angka Kematian Bayi (Jiwa) Terhadap Jumlah Kematian Neonatal (0-28 hari). ....	215
5.5 Bidang Infrastruktur Dasar. ....	216
5.5.1 Analisis Prioritas Wilayah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Terhadap Rumah Layak Huni. ....	216
5.5.2 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak.....	218
5.5.3 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Persentase Rumah tangga dengan Akses Listrik.....	220
5.5.4 Analisis Prioritas Wilayah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Rumah dengan Akses Jamban di Kabupaten Luwu Timur. ....	221
5.6 Bidang Ketahanan Pangan.....	223
5.6.1 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indeks Ketahanan Pangan.....	223
5.6.2 Analisis Prioritas Wilayah Indeks Ketahanan Pangan Terhadap Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT. ....	225
5.7 Kemiskinan Ekstrem.....	227
5.7.1 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Pusat dan Daerah.....	229
5.7.2 Prioritas Wilayah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Provinsi Sulawesi Selatan.....	239
5.5.3 Prioritas Wilayah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Luwu timur.....	242

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Luwu Timur.....	4
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur .....	10
Gambar 3. 1	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Prov Sulsel Tahun 2021 .....	56
Gambar 3. 2	Perkembangan antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 .....	56
Gambar 3. 3	Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	57
Gambar 3.4	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	57
Gambar 3.5	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Prov Sulsel Tahun 2021 .....	60
Gambar 3.6	Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021.....	60
Gambar 3.7	Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	61
Gambar 3.8	Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	61
Gambar 3.9	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Prov Sulsel Tahun 2021 .....	63
Gambar 3.10	Analisis Perkembangan antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021.....	64
Gambar 3.11	Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	64
Gambar 3.12	Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	65
Gambar 3.13	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Prov Sulsel Tahun 2021 .....	66
Gambar 3.14	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	67
Gambar 3.15	Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	67
Gambar 3.16	Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu	

TimurTahun 2017-2021 .....	68
Gambar 3.17 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Prov Sulsel Tahun 2021 .....	69
Gambar 3.18 Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	70
Gambar 3.19 Analisis Efektivitas Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	70
Gambar 3.20 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	71
Gambar 3.21 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021 .....	72
Gambar 3.22 Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2021.....	73
Gambar 3.23 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu TimurTahun 2020-2021 .....	73
Gambar 3.24 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2021 .....	74
Gambar 3.25 Posisi Relatif Indeks Gini Ratio Prov Sulsel Tahun 2021 .....	75
Gambar 3.26 Perkembangan Antar Waktu Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu TimurTahun 2018 – 2021 .....	76
Gambar 3.27 Analisis Efektivitas Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu TimurTahun 2018 – 2020.....	76
Gambar 3.28 Analisis Relevansi Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu TimurTahun 2018 – 2020.....	77
Gambar 3.29 Posisi Relatif Angkatan Kerja Provinsi Sulsel Tahun 2021 .....	78
Gambar 3.30 Perkembangan Antar Waktu Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021 .....	79
Gambar 3.31 Analisis Efektivitas Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021 .....	79
Gambar 3.32 Analisis Relevansi Angkatan Kerja dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021.....	80
Gambar 3.33 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaProvinsi Sulsel Tahun 2021 .....	81

Gambar 3.34 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021.....	82
Gambar 3.35 Analisis Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	82
Gambar 3.36 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	83
Gambar 3.37 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulsel Tahun 2021 .....	84
Gambar 3.38 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	85
Gambar 3.39 Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	85
Gambar 3.40 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	86
Gambar 3.41 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Prov Sulsel Tahun 2021 .....	87
Gambar 3.42 Perkembangan Antar Waktu Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	88
Gambar 3.43 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	88
Gambar 3.44 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	89
Gambar 3.45 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) <b>SMP/MTs</b> Prov Sulsel Tahun 2021.....	90
Gambar 3.46 Perkembangan Antar Waktu Partisipasi Kasar (APK) <b>SMP/MTs</b> Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021.....	91
Gambar 3.47 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) <b>SMP/MTs</b> Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021.....	91
Gambar 3.48 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) <b>SMP/MTs</b> Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021.....	92
Gambar 3.49 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.....	93

Gambar 3.50 Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	94
Gambar 3.51 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	94
Gambar 3.52 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	95
Gambar 3.53 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) <b>SMP/MTs</b> Kabupaten Luwu TimurTahun 2021 .....	96
Gambar 3.54 Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) <b>SMP/MTs</b> Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	97
Gambar 3.55 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) <b>SMP/MTs</b> Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	97
Gambar 3.56 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) <b>SMP/MTs</b> Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	98
Gambar 3. 57 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Prov Sulsel Tahun 2021 .....	99
Gambar 3. 58 Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	100
Gambar 3. 59 Analisis Efektivitas Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	100
Gambar 3.60 Analisis Relevansi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	101
Gambar 3. 61 Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Prov Sulsel Tahun 2021 .....	102
Gambar 3. 62 Perkembangan Antar Waktu Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021 .....	103
Gambar 3.63 Analisis Efektivitas Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021 .....	103
Gambar 3.64 Analisis Relevansi Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021 .....	104
Gambar 3.65 Posisi Relatif Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Prov Sulsel Tahun 2021 .....	105
Gambar 3.66 Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun	

Yang Tidak Bersekolah Lagi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	106
Gambar 3.67 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	106
Gambar 3.68 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi dan Persentase Rumah Tangga yang Menerima PIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	107
Gambar 3.69 Posisi Relatif Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 .....	108
Gambar 3.70 Perkembangan Antar Waktu Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020 .....	109
Gambar 3.71 Analisis Efektivitas Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020 .....	109
Gambar 3.72 Analisis Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020 .....	110
Gambar 3.73 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	111
Gambar 3.74 Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020 .....	112
Gambar 3.75 Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020 .....	112
Gambar 3.76 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	114
Gambar 3.77 Analisis Efektivitas Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	114
Gambar 3.78 Analisis Relevansi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dengan Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	115
Gambar 3.79 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	116
Gambar 3.80 Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000	

	Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	116
Gambar 3.81	Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	117
Gambar 3.82	Perkembangan Antar Waktu Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	118
Gambar 3.83	Analisis Efektivitas Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	119
Gambar 3.84	Analisis Relevansi Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	119
Gambar 3.85	Perkembangan Antar Waktu Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	121
Gambar 3.86	Analisis Efektivitas Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	121
Gambar 3.87	Analisis Relevansi Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir dengan Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	122
Gambar 3.88	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021 .....	123
Gambar 3.89	Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021 .....	124
Gambar 3.90	Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021 .....	124
Gambar 3.91	Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021 .....	125
Gambar 3.92	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021 .....	126
Gambar 3.93	Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021 .....	127
Gambar 3.94	Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	

Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021.....	127
Gambar 3.95 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021.....	128
Gambar 3.96 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021 .....	129
Gambar 3.97 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021 .....	130
Gambar 3.98 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021.....	130
Gambar 3.99 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021.....	131
Gambar 3.100 Posisi Relatif Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu TimurTahun 2021.....	132
Gambar 3.101 Perkembangan Antar Waktu Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	133
Gambar 3.102 Analisis Efektivitas Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	133
Gambar 3.103 Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	134
Gambar 3.104 Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021 .....	135
Gambar 3.105 Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga PenerimaProgram Raskin/BPNT Kabupaten Luwu TimurTahun 2018- 2021 .....	136
Gambar 3.106 Analisis Efektivitas Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu TimurTahun 2018-2021 .....	136
Gambar 3.107 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu TimurTahun 2017-2021 .....	137
Gambar 3.108 Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kelompok Usia Anak yang Bersekolah dan yang.....	148
Gambar 3.109 Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	

Menurut Pendidikan yang Ditamatkan.....	149
Gambar 3.110 Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan .....	150
Gambar 3.111 Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar .....	151
Gambar 3.112 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja .....	153
Gambar 3.113 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Disabilitas.....	154
Gambar 3.114 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Penyakit Kronis/Menahun .....	156
Gambar 3.115 Jumlah dan Persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Bekerja dan Tidak Bekerja.....	156
Gambar 3.116 Jumlah dan Persentase ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Bekerja dan Tidak Bekerja.....	157
Gambar 3.117 Jumlah dan Persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut lapangan usaha dari pekerjaan utama KRT .....	158
Gambar 3.118 Jumlah dan Persentase ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Lapangan Usaha .....	159
Gambar 3.119 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal.....	160
Gambar 3.120 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Lantai .....	161
Gambar 3.121 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Dinding Tempat Tinggal .....	162
Gambar 3.122 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Atap Tempat Tinggal.....	163
Gambar 3.123 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Sumber Air Minum.....	164
Gambar 3.124 Jumlah dan Persentase RumahTangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Sumber Penerangan Utama .....	165
Gambar 3.125 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan	

Sosial Menurut Bahan Bakar/Energi Utama Untuk Memasak.....	166
Gambar 3.126 Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kepemilikan Aset Bergerak .....	168
Gambar 4.1 Teori Perubahan/ <i>ToC</i> Bidang Konsumsi/Pengeluaran.....	171
Gambar 4.2 Teori Perubahan/ <i>ToC</i> Bidang Ketenagakerjaan .....	172
Gambar 4.3 Teori Perubahan/ <i>ToC</i> Bidang Pendidikan .....	173
Gambar 4.4 Teori Perubahan/ <i>ToC</i> Bidang Kesehatan.....	174
Gambar 4.5 Teori Perubahan/ <i>ToC</i> Bidang Infrastruktur Dasar .....	175
Gambar 4.6 Teori Perubahan/ <i>ToC</i> Bidang Ketahanan Pangan .....	176
Gambar 4.7 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Konsumsi/Pengeluaran .....	178
Gambar 4.8 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan .....	179
Gambar 4.9 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan .....	180
Gambar 4.10 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan.....	181
Gambar 4.11 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar/Perumahan .....	182
Gambar 4.12 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan .....	183
Gambar 4.13 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 – 2020.....	184
Gambar 4.14 Pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020.....	185
Gambar 4.15 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020 .....	187
Gambar 4.16 Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020 .....	188
Gambar 4.19 Perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Kesejahteraan Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020 .....	188
Gambar 4.20 Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020 .....	189
Gambar 4.21 Perkembangan Belanja Pendidikan dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020 .....	190
Gambar 4.22 Perkembangan Belanja Kesehatan dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020 .....	192

Gambar 4.23 Perkembangan Belanja Infrastruktur dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020 .....	193
Gambar 5.1 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin terhadap Persentase ketepatan penerima bantuan pangan (Raskin/BPNT).....	195
Gambar 5.2 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin (DTKS) Kab Luwu Timur Tahun 2021 .....	197
Gambar 5.3 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Setengah Penganggur .....	200
Gambar 5.4 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	202
Gambar 5.5 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Pencari Kerja terhadap Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) di Kabupaten Luwu Timur.....	204
Gambar 5.6 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI .....	205
Gambar 5.7 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs .....	207
Gambar 5.8 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi .....	208
Gambar 5.9 Analisis Prioritas Wilayah Angka Putus Sekolah SD/MI terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di Kabupaten Luwu Timur .....	208
Gambar 5.10 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Prevalensi Balita Stunting .....	211
Gambar 5.11 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Angka Kematian Balita.....	213
Gambar 5.12 Analisis Prioritas Wilayah Angka Kematian Bayi (Jiwa) terhadap Jumlah Kematian Neonatal (0-28 hari) di Kabupaten Luwu Timur .....	215
Gambar 5.13 Analisis Prioritas Wilayah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak dan Rumah Layak Huni .....	216
Gambar 5.14 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak .....	218
Gambar 5.15 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Persentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik .....	220

Gambar 5.16 Analisis Prioritas Wilayah Rumah Tidak Layak Huni terhadap Persentase Rumah Tangga dengan Akses Jamban di Kabupaten Luwu Timur .....	222
Gambar 5.17 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Ketahanan Pangan .....	223
Gambar 5.18 Analisis Prioritas Wilayah Indeks Ketahanan Pangan Terhadap Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT .....	225
Gambar 5.19 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem ((D1-D3) Terhadap Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	240
Gambar 5.20 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem ((D1-D3) Terhadap Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 .....	243

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas wilayah dan Presentase Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur .....	11
Tabel 2. 2 Pengamatan Unsur Iklim Di Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Menurut Bulan, Tahun 2021 .....	12
Tabel 2. 3 Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2021 .....	13
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	13
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017 – 2021 .....	14
Tabel 2. 6 Kepadatan Penduduk dirinci Per Kecamatan Tahun 2017 – 2021 .....	14
Tabel 2. 7 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 .....	15
Tabel 2. 8 Data <i>Sex Ratio</i> Kabupaten Luwu Timur 2017-2021 .....	16
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Luwu Timur 2017-2021 .....	16
Tabel 2. 10 Proporsi Penduduk di Kabupaten Luwu Timur Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	17
Tabel 2. 11 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 .....	25
Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Menurut Komponen Tahun 2010-2021 .....	28
Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah) .....	33
Tabel 2. 14 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah) .....	34
Tabel 2. 15 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu	

Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017 s.d 2021 .....	35
Tabel 2. 16 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	37
Tabel 2.17 Persentase Rumah Tangga menurut Program Perlindungan Sosial Yang diterima di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 .....	46
Tabel 2.18 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam membantu proses Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur .....	47
Tabel 3.1 Perkembangan Harga Bahan Pokok Utama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 .....	138
Tabel 3.2 Profil Kemiskinan Provinsi Sulsel Tahun 2017-2021 .....	139
Tabel 3.3 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan .....	144
Tabel 3.4 Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin .....	145
Tabel 3.5 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah Usia 7 s.d 18 Tahun .....	147
Tabel 3.6 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kelompok Usia Anak Berdasarkan Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah.....	147
Tabel 3.7 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Pendidikan yang Ditamatkan.....	148
Tabel 3.8 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan.....	149
Tabel 3.9 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar .....	151

Tabel 3.10 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja .....	152
Tabel 3.11 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Disabilitas .....	153
Tabel 3.12 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mengidap/Mengidap Penyakit Kronis/Menahun .....	155
Tabel 3.13 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal.....	160
Tabel 3.14 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kepemilikan Aset Tidak Bergerak .....	167
Tabel 4.1 Pengelompokan Kabupaten/Kota menurut Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 .....	171
Tabel 5.1. Prioritas Wilayah untuk Pemutakhiran data DTKS agar meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan pangan .....	196
Tabel 5.2 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia .....	199
Tabel 5.3 Prioritas Wilayah untuk Penurunan Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	201
Tabel 5.4 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	203
Tabel 5.5 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 .....	205
Tabel 5.6 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	206
Tabel 5.7 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	208
Tabel 5.8 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Persentase Penduduk Berumur 7-24	

tahun yang Tidak Bersekolah Lagi Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	209
Tabel 5.9 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Kabupten Luwu Timur Tahun 2021 .....	211
Tabel 5.10 Prioritas Wilayah untuk Penurunan Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	212
Tabel 5.11 Prioritas Wilayah untuk penurunan Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	214
Tabel 5.12 Prioritas Wilayah untuk Penurunan Angka Kematian Bayi Kabupten Luwu Timur Tahun 2021 .....	216
Tabel 5.13 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Akses Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	217
Tabel 5.14 Prioritas Wilayah untuk meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	219
Tabel 5.15 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	221
Tabel 5.16 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni Kabupten Luwu Timur Tahun 2021 .....	223
Tabel 5.17 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	224
Tabel 5.18 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021 .....	226
Tabel 5.19 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi .....	237
Tabel 5.20 Data Jumlah Keluarga (D1-D3) dan Individu (D1-D2) Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	240
Tabel 5.21 Prioritas Wilayah untuk Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (D1- D3) Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2022 .....	241
Tabel 5.21 Data Jumlah Keluarga (D1-D3) dan Individu (D1-D2) Pemasaran	

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 .....	241
Tabel 5.22 Prioritas Wilayah untuk Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (D1- D3) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.....	242
Tabel 5.23 Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur.....	244

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2021 .....	3
Grafik 2.1	Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (Persen) .....	21
Grafik 2.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 17-24 Tahun Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (Persen) .....	22
Grafik 2.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Usia 17-24 Tahun Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (Persen) .....	23
Grafik 2.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Usia 17-24 Tahun Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (Persen) .....	24
Grafik 2.5	Presentase Penduduk Kabupaten Luwu Timur yang memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2021 .....	26
Grafik 2.6	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur – Provinsi Sulawesi Selatan - Nasional Tahun 2017 – 2021 .....	28
Grafik 2.7	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur (Dengan dan Tanpa Biji Logam) Tahun 2017 s.d 2021 .....	30
Grafik 2.8	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 s.d 2021 .....	31
Grafik 2.9	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Tahun 2017 – 2021 .....	31
Grafik 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah) .....	35
Grafik 2.11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	38
Grafik 2.12	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	39
Grafik 2.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	39

Grafik 2.14 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Persen) .....	41
Grafik 2.15 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas dan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dan 2021 .....	42
Grafik 2.16 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Status Bekerja.....	43
Grafik 2.17 Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan dan Status Miskin Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2020-2021 .....	44
Grafik 2.18 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 s.d 2021 .....	45
Grafik 2.19 Perbandingan Perkembangan Gini Ratio Luwu Timur - Sulawesi Selatan – Nasional Tahun 2017 s.d 2021 .....	45

# BAB I



## PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud Dan Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Landasan Kebijakan
- 1.5 Sistematika RPKD

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional. Berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik yang bersifat langsung (program-program perlindungan sosial) maupun yang tidak langsung (program sektoral dan daerah) masih perlu di perhatikan dengan baik agar semua program-program penanggulangan kemiskinan dapat berperan dalam menurunkan angka kemiskinan.

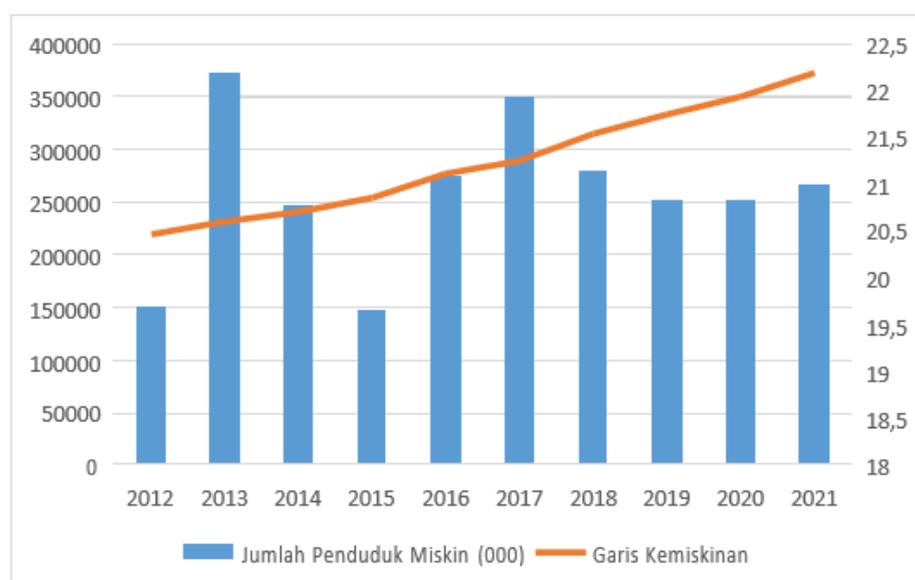
Dalam pengukuran kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (GKM) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan bukan makanan esensial (GKMN) seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran penduduk dalam rupiah yang harus dibayar dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini disebut dengan Garis Kemiskinan (GK). Dengan kata lain, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan adalah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin.

Secara nasional, beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan yaitu : (a) terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial; (b) masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam provinsi maupun Kabupaten/Kota; (c) akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan; (d) adanya globalisasi yang meningkatkan gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin; dan (e) meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip empat utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;

(ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip-prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi yaitu (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, oleh karenanya Penanggulangan Kemiskinan Daerah diperlukan sebagai cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu prioritas penanganan permasalahan di setiap daerah juga berbeda sesuai dengan kondisi daerah tersebut, menyangkut indikator kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.

Pada tahun 2021, garis kemiskinan sebesar 371.947 rupiah/kapita/bulan, terdapat 20,99 ribu atau 6,94 persen penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur. Angka ini turun di banding tahun 2020 sebanyak 20,82 ribu atau 6,85 persen penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.1 Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2021 berdasarkan data BPS Kabupaten Luwu Timur berikut :



Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

*Grafik 1.1 Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2021*

Kondisi ini memerlukan intervensi yang nyata dari Pemerintah dan stakeholders lain untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, melalui kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam rencana Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (2021-2026) serta upaya sinergi antar Perangkat Daerah terkait serta peran swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Tokoh masyarakat, dan juga media, maka diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur bisa efektif menjawab penurunan angka kemiskinan dan sebagai jawaban atas tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Kabupaten Luwu Timur.

Sejalan dengan upaya mendorong peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan, maka rencana penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada suatu landasan (dokumen) sebagai hasil identifikasi dan kajian secara mendalam terkait dengan permasalahan dan kondisi lokal sehingga penanggulangan kemiskinan di daerah dapat berjalan dengan optimal. Sejalan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Kemiskinan (RNPK), maka perlu disusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai pedoman bersama Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang terjadi di daerah sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia.

RPKD merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam proses desentralisasi sehingga daerah mampu mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dengan kemampuan dan wewenang yang dimiliki. Otonomi daerah juga mengisyaratkan kewajiban serta pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih akomodatif dan responsif serta memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ruang pengambilan keputusan.

Mengingat pentingnya penyusunan Rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 -2026 sebagaimana diuraikan di atas, Berkaitan dengan target Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam penanggulangan kemiskinan maka Rencana penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan oleh para perencana dan pengambil kebijakan. Keterangan mengenai jenis

persoalan dan akar permasalahan yang dihadapi berbagai jenis segmen penduduk miskin beserta profil dan karakteristik kemiskinan dapat membantu perencana program dalam menentukan program- program yang tepat dan pengambil kebijakan dapat lebih menfokuskan program pengentasan kemiskinan, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang didasari pemahaman menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan, pengambilan kebijakan, implementasi kebijakan akan tepat sasaran dan juga akan memudahkan proses evaluasi kebijakan.

## **1.2 Maksud Dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Penyusunan Dokumen RPKD Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi model pentahelix yaitu kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Tenaga Ahli Akademisi, Pelaku Usaha, Lembaga Internasional, Peran Media, dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, serta memandu penajaman intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 antara lain adalah :

1. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu adanya konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya.
2. Menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah yang ada di daerah.
3. Memperkuat pengarusutamaan (*mainstreaming*) penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
4. Mendorong sinergi dan penyelarasan serta memastikan bahwa penanggulangan

kemiskinan sebagai prioritas intervensi kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat dan pihak yang peduli terhadap kemiskinan.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya konsep Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021–2026;
- b. Terumuskannya kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur;
- c. Terumuskannya wilayah dan program yang merupakan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan;
- d. Tersusunnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan secara komprehensif;

### **1.4 Landasan Kebijakan**

Dalam menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota maka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan secara berkeadilan tanpa perbedaan. Sebagai sebuah dokumen strategis yang menjadi acuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa landasan hukum/Kebijakan terkait penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180) ;
  8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 289/F-02/IX/ Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 37/F-02/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

### **1.5 Sistematika RPKD**

Laporan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, berisi landasan kebijakan mengenai Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Selain itu juga menjelaskan dokumen RPKD

mencantumkan landasan kebijakan secara terstruktur mengenai penanggulangan kemiskinan. Bagian ini juga menjelaskan maksud dan tujuan serta sasaran dari dokumen RPKD, landasan hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan dokumen RPKD.

2. BAB II Kondisi Umum Daerah, berisi kondisi geografis dan demografis lalu kaitannya terhadap kondisi kemiskinan di daerah. Perlu menjelaskan informasi tentang administrasi wilayah, penduduk, dan kondisi sosial lainnya.
3. BAB III Profil kemiskinan daerah yang berisi: (profil kemiskinan daerah harus sudah melampirkan masuk ke analisis karakteristik kemiskinan dan analisis data kemiskinan).
4. BAB IV Prioritas program (Indikator perkembangan antar waktu; capaian indikator efektivitas, intervensi perbaikan serta bagaimana perkembangan capaian indikator capaian indikator sebagai dasar merumuskan program prioritas).
5. BAB V Prioritas Wilayah. Penentuan lokasi berdasarkan beberapa syarat yang sesuai dengan pencapaian target/sasaran program dan proyek, agar lebih tepat sasaran capaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026.

Bab VI Penutup, berisi harapan daerah dengan disusunnya dokumen RPKD terhadap penanggulangan kemiskinan di

# BAB II



## KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1 Geografis
- 2.2 Iklim Dan Musim
- 3.3 Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk
- 2.4 Pendidikan
- 2.5 Kesehatan
- 2.6 Pembangunan Manusia Dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2.7 Pertumbuhan Ekonomi
- 2.8 Kemiskinan
- 2.9 Tingkat Pengangguran
- 2.10 Gini Rasio
- 2.11 Program Penanggulangan Kemiskinan

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM DAERAH**

#### **2.1. Geografis**

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada paling Timur dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 6.944,88 km<sup>2</sup> atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara melalui Bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Secara Geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak antara 2°03'00'' - 3°03'25'' LS dan 119°28'56'' - 121°47'27'' BT dan berbatasan langsung dengan 2 (dua) Provinsi dan 5 (lima) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Poso di sebelah Utara, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang berada di sebelah Timur, Kabupaten Kolaka Utara dan Teluk Bone yang berada di sebelah Selatan serta Kabupaten Luwu Utara yang berada di sebelah Barat.

**Gambar 2.1.**  
Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber Data : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu Timur 2011-2031

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 124 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan Towuti tercatat memiliki wilayah paling luas yaitu 1.820,48 km<sup>2</sup> atau 26,21 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Kecamatan Kalaena memiliki luas terkecil, yaitu 41,98 km<sup>2</sup> atau 0,60 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Kecamatan Malili merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur dan merupakan Pusat Pemerintahan.

**Tabel 2.1.**

Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

NO	KECAMATAN	JUMLAH		IBUKOTA KECAMATAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
		DESA	KELURAHAN			
1	Burau	18	-	Burau	256,23	3,69
2	Wotu	17	-	Bawalipu	130,52	1,88
3	Tomoni	12	1	Mandiri	230,09	3,31
4	Tomoni Timur	8	-	Kertoraharjo	43,91	0,63
5	Angkona	10	-	Solo	147,24	2,12
6	Malili	14	1	Puncak Indah	921,2	13,26
7	Towuti	18	-	Langkea Raya	1.820,48	26,21
8	Nuha	4	1	Sorowako	808,27	11,64
9	Wasuponda	6	-	Ledu-Ledu	1244	17,91
10	Mangkutana	11	-	Wonorejo	1.300,96	18,73
11	Kalaena	7	-	Kalaena Kiri	41,98	0,60
<b>TOTAL</b>		<b>125</b>	<b>3</b>		<b>6944,88</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat jumlah Desa/Kelurahan yang terbanyak pada tahun 2021 yaitu berada di Kecamatan Burau dan Towuti sebanyak 18 Desa/Kelurahan, sedangkan Kecamatan yang memiliki Desa/Kelurahan paling sedikit yaitu Kecamatan Nuha dengan 4 Desa/Kelurahan.

## 2.2. Iklim dan Musim

Kabupaten Luwu Timur pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Berdasarkan pengamatan di Stasiun Meteorologi Andi Jemma rata-rata suhu udara minimum 22,4°C di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di Stasiun Andi Jemma 35,3°C dan suhu minimum 21,4°C. Untuk pengamatan unsur iklim di Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menurut Bulan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
Pengamatan Unsur Iklim Di Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Menurut Bulan, Tahun 2021

BULAN	SUHU		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	22,0	27,2	33,6
Februari	22,4	27,5	34,3
Maret	22,9	27,3	34,2
April	23,2	27,7	35,2
Mei	23,6	27,5	33,2
Juni	23,0	27,3	33,5
Juli	22,6	26,5	33,0
Agustus	22,4	26,6	34,2
September	21,4	26,7	33,7
Oktober	23,2	28,0	35,0
November	22,2	27,6	35,3
Desember	22,6	27,6	35,2

*Sumber Data : Stasiun Meteorologi Andi Jemma, 2022*

Sedangkan berdasarkan hari hujan di Kabupaten Luwu Timur rata rata selama setahun di tahun 2021 terdapat 19 hari hujan per bulan, dengan memberikan curah hujan rata rata 267 mm air hujan selama tahun 2021, untuk melihat jumlah curah hujan dan hari hujan tiap bulannya tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2021

BULAN	JUMLAH CURAH	JUMLAH HARI HUJAN
Januari	309	24
Februari	244	18
Maret	305	24
April	189	14
Mei	219	15
Juni	245	14
Juli	332	19
Agustus	328	23
September	239	19
Oktober	204	15
November	369	22
Desember	221	18

*Sumber Data : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah curah hujan tertinggi ada pada bulan November 2021 dengan curah hujan 369 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan maret 2021 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

### 2.3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 adalah sebesar 304.938 jiwa dengan pertumbuhan sekitar 0,96 persen dari tahun 2020, dengan rincian jumlah perempuan sebesar 147.571 orang dan jumlah laki-laki sebesar 157.367 orang. Seiring bertambahnya jumlah penduduk tersebut, maka jumlah kepala keluarga juga ikut bertambah sebesar 1,82 persen pada tahun 2021 menjadi 91.006 kepala keluarga.

**Tabel 2.4**  
Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2017	152.623	143.281	295.904	82.259
2	2018	154.391	145.584	299.975	85.028
3	2019	154.978	145.396	300.374	87.534
4	2020	155.726	146.313	302.039	89.380
5	2021	157.367	147.571	304.938	91.006

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur 2022*

Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur mengalami perkembangan setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka perkembangan jumlah Kepala Keluarga juga mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk yang bertambah di setiap tahun sehingga angka pertumbuhan penduduk juga bernilai positif. Dengan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil di setiap tahunnya sangat menguntungkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

**Tabel 2.5**  
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017 - 2021

NO.	KECAMATAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Mangkutana	22.868	22.827	22.523	22.437	22.363
2	Nuha	23.867	24.003	23.769	23.755	23.962
3	Towuti	39.542	41.510	42.391	43.597	44.899
4	Malili	41.653	42.610	42.882	43.421	44.096
5	Angkona	24.955	25.297	25.377	25.303	25.432
6	Wotu	33.531	33.694	33.569	33.732	33.925
7	Burau	35.753	35.463	35.197	35.100	35.292
8	Tomoni	26.220	26.489	26.578	26.773	26.930
9	Tomoni Timur	13.634	13.802	13.699	13.649	13.679
10	Kalaena	12.129	12.334	12.337	12.297	12.345
11	Wasuponda	21.752	21.946	22.052	21.975	22.015
<b>JUMLAH</b>		<b>295.904</b>	<b>299.975</b>	<b>300.374</b>	<b>302.039</b>	<b>304.938</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Jumlah Penduduk dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan, jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2021 pada data kependudukan Desember 2021 sebanyak 304.938 Jiwa, meningkat sebanyak 2.899 Jiwa dari Tahun 2020.

**Tabel 2.6**  
Kepadatan Penduduk dirinci Per Kecamatan Tahun 2017 – 2021

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Mangkutana	1,300.96	17	18	17	17	17
2	Nuha	808.27	29	30	29	29	29
3	Towuti	1,820.48	21	23	23	24	24

4	Malili	921.2	45	46	47	47	47
5	Angkona	147.24	169	172	172	172	173
6	Wotu	130.52	256	258	257	258	260
7	Burau	256.23	139	138	137	137	138
8	Tomoni	230.09	113	115	116	116	117
9	Tomoni Timur	43.91	310	314	312	311	313
10	Kalaena	41.98	288	294	294	293	294
11	Wasuponda	1,244.00	17	18	18	18	18
<b>LUWU TIMUR</b>		<b>6,944.88</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>44</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2022

Berdasarkan komposisi jenis kelamin menurut Kecamatan, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki terbanyak berada pada Kecamatan Towuti sementara jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah Kecamatan Malili.

**Tabel 2.7**  
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Mangkutana	11.348	11.015	22.363
2	Nuha	13.010	10.952	23.962
3	Towuti	23.808	21.091	44.899
4	Malili	22.756	21.340	44.096
5	Angkona	12.997	12.435	25.432
6	Wotu	16.974	16.951	33.925
7	Burau	17.958	17.334	35.292
8	Tomoni	13.641	13.289	26.930
9	Tomoni Timur	6.978	6.701	13.679
10	Kalaena	6.197	6.148	12.345
11	Wasuponda	11.700	10.315	22.015
<b>Luwu Timur</b>		<b>157.367</b>	<b>147.571</b>	<b>304.938</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2022

Data rasio Jenis Kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

**Tabel 2.8**  
Data *Sex Ratio* Kabupaten Luwu Timur 2017-2021

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	<i>Sex Ratio</i>
2017	147.984	139.89	295.904	106
2018	151.02	142.802	299.975	106,05
2019	154.978	145.396	300.372	106,59
2020	155.726	146.313	302.039	106,43
2021	157.367	147.571	304.938	106,63

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2022*

Dari tabel diatas, sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Dengan angka *sex ratio* 106 berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106-107 orang penduduk laki - laki.

**Tabel 2.9**  
Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Luwu Timur 2017-2021

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	0 – 4	32.822	33.087	25.568	26.226	26.006
2	5 – 9	30.341	30.858	29.793	29.869	29.675
3	10 – 14	27.873	28.264	30.454	30.423	30.479
4	15 – 19	24.778	24.85	30.681	28.471	26.424
5	20 – 24	22.985	23.616	27.005	27.425	28.431
6	25 – 29	25.91	26.52	22.668	23.386	24.561
7	30 – 34	24.917	25.286	22.437	22.342	22.400
8	35 – 39	21.144	21.384	24.48	24.027	24.301
9	40 – 44	18.149	18.454	22.461	23.047	23.468
10	45 – 49	15.379	15.874	18.452	19.128	19.824
11	50 – 54	13.224	13.855	13.887	14.404	15.432
12	55 – 59	11.077	11.617	9.94	10.212	10.800
13	60 – 64	7.175	7.557	7.687	8.285	8.113

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021*

Dengan memperhatikan tabel di atas Secara umum terjadi penambahan penduduk setiap tahunnya. Adapun beberapa kelompok usia terjadi pengurangan penduduk. Ini terlihat pada kelompok usia 5-19 tahun (usia belum produktif) dan kelompok usia 25-34 tahun (usia produktif) Kondisi ini disebabkan antara lain karena terjadinya mutasi penduduk dengan alasan mengikuti Kepala Keluarga, Mencari

Pekerjaan, Bekerja atau menuntut ilmu diluar kabupaten Luwu Timur yang mengharuskan melakukan proses pindah keluar dari kabupaten Luwu Timur. Untuk kelompok usia = >65 tahun (usia tidak produktif) tahun terjadi penambahan penduduk setiap tahunnya ini menandakan angka harapan hidup di Kabupaten Luwu Timur cukup tinggi.

**Tabel 2.10**  
Proporsi Penduduk di Kabupaten Luwu Timur  
Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Kecamatan/ Desa/Kelurahan		Jenis Kelamin		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
<b>1</b>	<b>MANGKUTANA</b>		<b>11.348</b>	<b>11.015</b>	<b>22.363</b>
	1	Maleku	1.427	1.380	2.807
	2	Wanorejo	1.267	1.265	2.532
	3	Margolembo	1.373	1.256	2.629
	4	Teromu	790	795	1.585
	5	Manggala	448	422	870
	6	Kasintuwu	1.703	1.560	3.263
	7	Balai Kembang	958	956	1.914
	8	Panca Karsa	798	823	1.621
	9	Sindu Agung	909	936	1.845
	10	Wonorejo Timur	1.288	1.275	2.563
	11	Koroncia	387	347	734
<b>2</b>	<b>NUHA</b>		<b>13.010</b>	<b>10.952</b>	<b>23.962</b>
	1	Nuha	340	328	668
	2	Nikkel	2.861	2.539	5.400
	3	Matano	979	862	1.841
	4	Magani	3.305	2.716	6.021
	5	Sorowako	5.525	5.507	10.032
<b>3</b>	<b>TOWUTI</b>		<b>23.808</b>	<b>21.091</b>	<b>44.899</b>
	1	Loeha	796	701	1.497
	2	Mahalona	1.026	1.009	2.035
	3	Timampu	1.873	1.694	3.567
	4	Wawondula	3.013	2.610	5.623

No.	Kecamatan/ Desa/Kelurahan		Jenis Kelamin		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
	5	Langkea Raya	2.581	2.242	4.823
	6	Tokalimbo	517	479	996
	7	Baruga	1.306	1.189	2.495
	8	Pekaloa	1.232	1.099	2.331
	9	Lioka	1.370	1.105	2.475
	10	Asuli	2.793	2.336	5.129
	11	Bantilang	1.118	1.086	2.204
	12	Masiku	446	397	843
	13	Rante Angin	912	833	1.745
	14	Matompi	1.453	1.280	2.733
	15	Tole	720	644	1.364
	16	Libukan Mandiri	949	832	1.781
	17	Kalosi	694	646	1.340
	18	Buangin	1.009	909	1.918
<b>4</b>	<b>MALILI</b>		<b>22.756</b>	<b>21.340</b>	<b>44.096</b>
	1	Harapan	1.369	1.225	2.594
	2	Laskap	1.021	932	1.953
	3	Malili	2.000	1.945	3.945
	4	Manurung	2.071	1.944	4.015
	5	Wewangriu	1.777	1.695	3.472
	6	Baruga	2.251	2.075	4.326
	7	Lakawali	1.841	1.755	3.596
	8	Ussu	1.139	1.140	2.279
	9	Tarabbi	808	753	1.561
	10	Balantang	1.399	1.353	2.752
	11	Atue	576	561	1.137
	12	Pongkeru	1.176	1.082	2.258
	13	Puncak Indah	3.804	3.482	7.286
	14	Pasi Pasi	610	550	1.160
	15	Lakawali Pantai	914	848	1.762
	16	Harapan	1.369	1.225	2.594
	17	Laskap	1.021	932	1.953
	18	Malili	2.000	1.945	3.945
<b>5</b>	<b>ANGKONA</b>		<b>12.997</b>	<b>12.435</b>	<b>25.432</b>
	1	Tawakua	1.652	1.595	3.247
	2	Tampinna	2.315	2.188	4.503
	3	Solo	1.007	995	2.002
	4	Taripa	1.706	1.639	3.345
	5	Mantadulu	1.189	1.191	2.380
	6	Balirejo	969	904	1.873
	7	Maliwowo	1.122	1.052	2.174
	8	Lamaeto	1.119	1.058	2.177

No.	Kecamatan/ Desa/Kelurahan		Jenis Kelamin		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
	9	Watangpanua	1.184	1.095	2.279
	10	Wanasari	734	718	1.452
<b>6</b>	<b>WOTU</b>		<b>16.974</b>	<b>16.951</b>	<b>33.925</b>
	1	Lampenai	2.937	3.044	5.981
	2	Tarengge	902	923	1.825
	3	Maramba	683	657	1.340
	4	Cendana Hijau	1.299	1.292	2.591
	5	Bawalipu	3.610	3.689	7.299
	6	Kalaena	643	595	1.238
	7	Lera	1.453	1.423	2.876
	8	Kanawatu	755	752	1.507
	9	Bahari	420	381	801
	10	Karambua	547	506	1.053
	11	Pepuro Barat	412	400	812
	12	Balo Balo	527	562	1.089
	13	Rinjani	813	752	1.565
	14	Tarangge Timur	702	737	1.439
	15	Madani	791	787	1.578
	16	Tabaroge	480	451	931
<b>7</b>	<b>BURAU</b>		<b>17.958</b>	<b>17.334</b>	<b>35.292</b>
	1	Burau	1.050	1.051	2.101
	2	Jalajja	2.228	2.226	4.454
	3	Lewonu	699	670	1.369
	4	Lambarese	1.233	1.208	2.441
	5	Lauwo	1.576	1.592	3.168
	6	Bone Pute	1.168	1.096	2.264
	7	Lumbewe	1.502	1.519	3.021
	8	Mabonta	843	802	1.645
	9	Laro	881	821	1.702
	10	Benteng	917	896	1.813
	11	Batu Putih	463	375	838
	12	Lanosi	660	623	1.283
	13	Legego	1.176	1.136	2.312
	14	Cendana	700	612	1.312
	15	Burau Pantai	704	661	1.365
	16	Asana	508	488	996
	17	Kalatiri	795	716	1.511
	18	Lambara Harapan	855	842	1.697
<b>8</b>	<b>TOMONI</b>		<b>13.641</b>	<b>13.289</b>	<b>26.930</b>
	1	Bayondo	813	855	1.668
	2	Mulyasri	1.447	1.431	2.878
	3	Tomoni	1.765	1.769	3.534

No.	Kecamatan/ Desa/Kelurahan		Jenis Kelamin		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
	4	Lestari	1.667	1.595	3.262
	5	Kalpataru	874	838	1.712
	6	Tadulako	562	533	1.095
	7	Beringin Jaya	1.151	1.125	2.276
	8	Bangun Jaya	1.368	1.377	2.745
	9	Mandiri	1.534	1.491	3.025
	10	Sumber Alam	417	397	814
	11	Ujung Baru	447	401	848
	12	Bangun Karya	768	734	1.502
	13	Rante Mario	828	743	1.571
<b>9</b>	<b>TOMONI TIMUR</b>		<b>6.978</b>	<b>6.701</b>	<b>13.679</b>
	1	Kertoraharjo	989	955	1.944
	2	Cendana Hitam	631	556	1.187
	3	Purwosari	1.071	984	2.055
	4	Pattengko	1.069	1.021	2.090
	5	Manunggal	1.028	1.011	2.039
	6	Margomulyo	1.310	1.355	2.665
	7	Alam Buana	322	281	603
	8	Cendana Hitam Timur	558	538	1.096
<b>10</b>	<b>KALAENA</b>		<b>6.197</b>	<b>6.148</b>	<b>12.345</b>
	1	Kalena Kiri	1.192	1.207	2.399
	2	Sumber Agung	952	893	1.845
	3	Pertasi Kencana	681	712	1.393
	4	Non Blok	626	650	1.276
	5	Argomulyo	613	622	1.235
	6	Sumber Makmur	965	960	1.925
	7	Mekar Sari	1.168	1.104	2.272
<b>11</b>	<b>WASUPONDA</b>		<b>11.700</b>	<b>10.315</b>	<b>22.015</b>
	1	Ledu Ledu	3.656	3.264	6.920
	2	Kawata	1.052	917	1.969
	3	Tabarano	1.909	1.686	3.595
	4	Wasuponda	1.772	1.493	3.265
	5	Parumpanai	1.888	1.715	3.603
	6	Balambano	1.423	1.240	2.663
<b>LUWU TIMUR</b>			<b>157.367</b>	<b>147.571</b>	<b>304.938</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

## 2.4. Pendidikan

Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, diantaranya melalui tingkat partisipasi penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan menurut jenjang pendidikannya. Hal ini juga sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 yang salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dalam salah satu tujuan SDGs yaitu tidak ada seorangpun yang tertinggal, terlupakan, atau bahkan terpinggirkan dari hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

### 2.4.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen. AMH merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Berdasarkan data, Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 mencapai 95,45 persen atau meningkat 1,39 persen dari Tahun 2017 sebesar 94,06 persen. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Grafik 2.1**

Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (Persen)



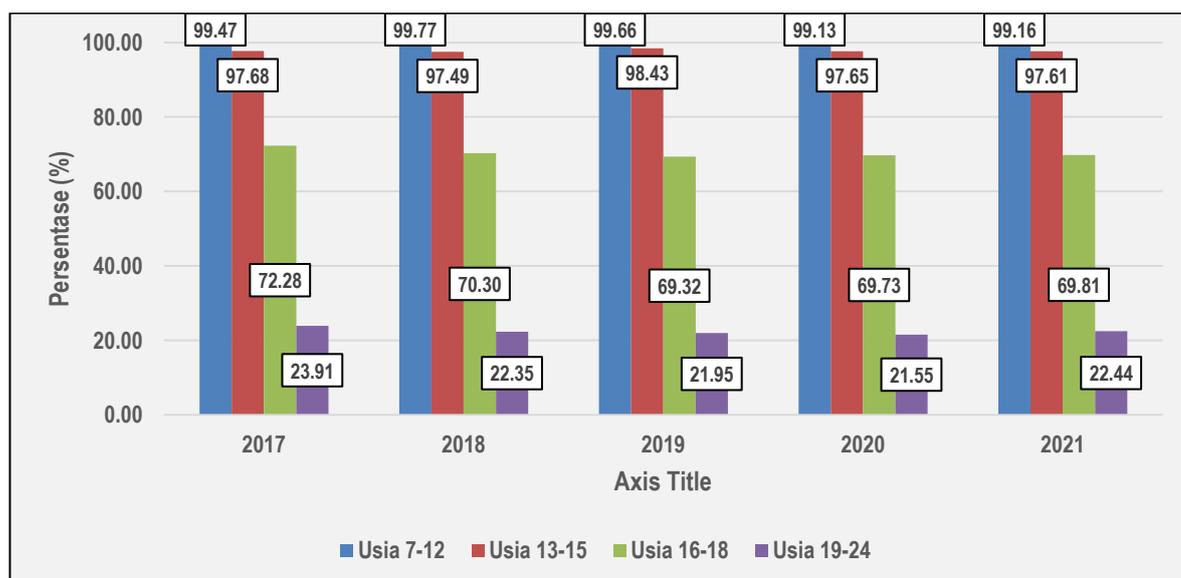
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (Data diolah)

## 2.4.2. Angka Partisipasi Sekolah

Manusia merupakan modal utama pembangunan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, salah satunya yaitu melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Bentuk peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu.

**Grafik 2.2**  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 17-24 Tahun  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (Data diolah)

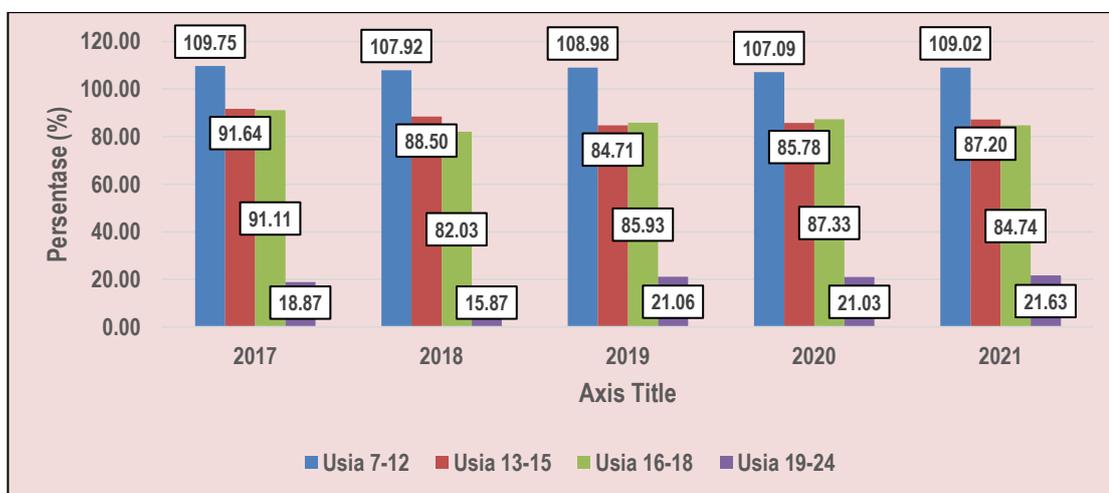
Pada Tahun 2021 APS Penduduk Usia 7-12 mencapai 99,16 persen, APS Penduduk Usia 13-15 mencapai 97,61 persen, APS Penduduk Usia 16-18

mencapai 69,81 persen dan APK Penduduk Usia 19-24 mencapai 22,44 persen. Jika dibandingkan dengan capaian APS pada Tahun 2017 hanya APS Penduduk Usia 19-24 yang mengalami peningkatan di Tahun 2021, sementara APS Penduduk Usia 7-12, Penduduk Usia 13-15 dan Penduduk Usia 16-18 cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur.

### 2.4.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Timur. APK Murid SD/Sederajat untuk tahun 2021 adalah 109,02 persen. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya APK Jenjang SD/sederajat dan APK Jenjang SMP/Sederajat selalu melampaui 100% dikarenakan saat ini Siswa usia sekolah SD dan SMP tidak dapat terdaftar di Data Pokok Pendidikan jika melebihi batas usia yang telah ditentukan. Sementara APK Murid SMP/Sederajat pada tahun 2021 mencapai 87,20 persen, APK SMA/Sederajat mencapai 84,74 persen dan APK Pendidikan Tinggi mencapai 21,63 persen.

**Grafik 2.3**  
 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Usia 17-24 Tahun  
 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (Persen)



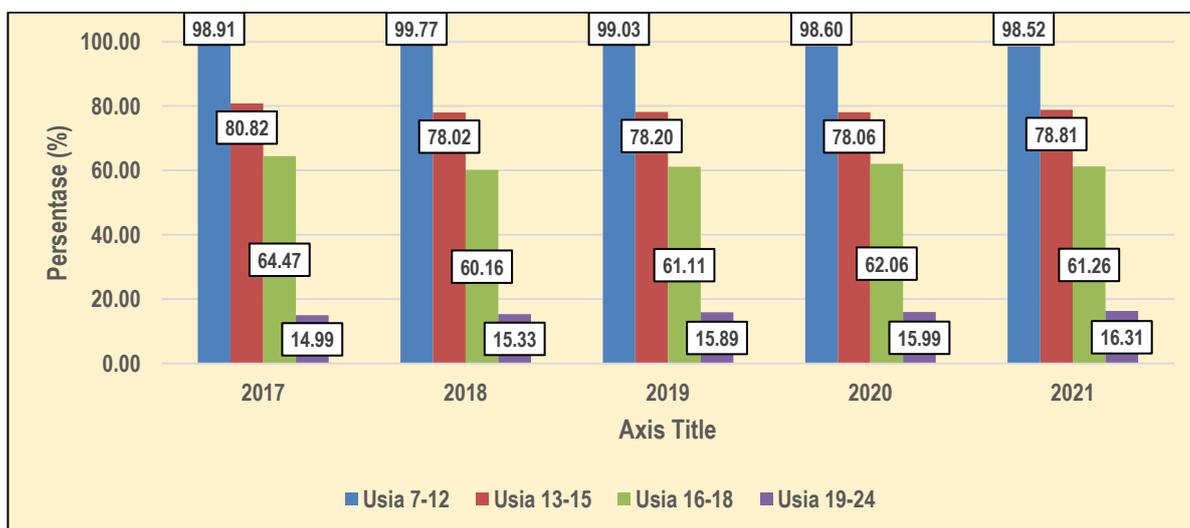
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (Data diolah)

#### 2.4.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator selain APS yang dapat dikatakan lebih halus dalam perhitungannya. Jika APS tidak memperhitungkan jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh oleh anak usia sekolah, APM ini hanya memasukkan anak yang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. APM SD untuk anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah di jenjang SD, APM SMP untuk anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMP, dan APM SMA/SMK untuk usia 16-18 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMA/SMK.

Menurut definisi, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.

**Grafik 2.4**  
Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Usia 17-24 Tahun  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (Data diolah)

Pada Tahun 2021 APM Penduduk Usia 7-12 mencapai 98,52 persen, APM Penduduk Usia 13-15 mencapai 78,81 persen, APM Penduduk Usia 16-18 mencapai 61,26 persen dan APM Penduduk Usia 19-24 mencapai 16,31 persen.

Jika dibandingkan dengan capaian APM pada Tahun 2017 hanya APM Penduduk Usia 19-24 yang mengalami peningkatan di Tahun 2021, sementara APM Penduduk Usia 7-12, Usia 13-15 dan Usia 16-18 juga cenderung mengalami penurunan.

## 2.5. Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu modal dasar dalam proses pembangunan dan menjadi tujuan pembangunan manusia. Sumber daya manusia yang sehat memegang peranan yang sangat penting bagi pembangunan karena jika sebagian besar sumber daya manusia tidak sehat atau sakit maka cenderung proses pembangunan menjadi tidak maksimal. Banyak penelitian yang menyatakan orang yang sakit cenderung lebih rendah produktifitasnya dibanding orang yang sehat.

Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat.

Keluhan kesehatan yang terjadi pada penduduk dapat memberikan satu informasi yang penting untuk melihat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. diketahui bahwa terdapat jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 di sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak  
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

NO.	JENIS PENYAKIT	JUMLAH KASUS
1	ISPA	17.420
2	HIPERTENSI	12.208
3	FEBRIS	9.846
4	GASTRITIS	8.139
5	COMMON COLD	8.081
6	DYSPEPSIA	6.849
7	CHEPALGIA	5.729
8	DERMATITIS	4.065
9	BATUK	2.942
10	DIARE	2.023

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus terbanyak yaitu

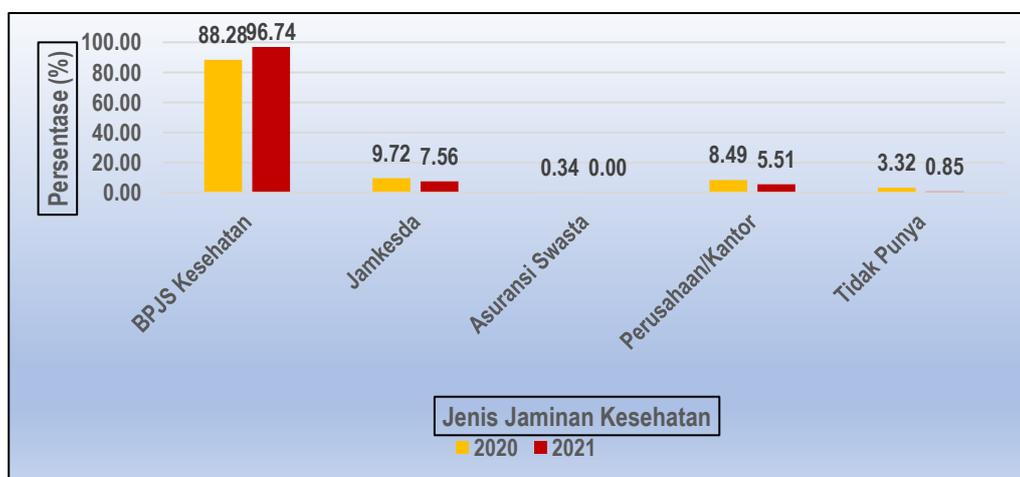
17.420 kasus dengan jenis penyakit Ispa, kemudian jumlah kasus penyakit diare yaitu 2.023 kasus yang merupakan kasus yang rendah diantara 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Luwu Timur.

Ketiadaan biaya pengobatan secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia tak terkecuali penduduk Kabupaten Luwu Timur, tujuannya mengatasi kendala biaya pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagiandari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Dari data Susenas menunjukkan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang tidak menggunakan jaminan kesehatan semakin berkurang. Di tahun 2020, penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan masih sekitar 3,32 persen, turun menjadi sekitar 0,85 persen di tahun 2021. Berikut disajikan Presentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan Kesehatan 2020-2021 berikut.

### Grafik 2.5

Presentase Penduduk Kabupaten Luwu Timur yang memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

## **2.6. Pembangunan Manusia dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan yaitu untuk memperoleh akses akan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dengan kemudian melakukan revisi pada metode penghitungan di tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian pembangunan dalam jangka panjang, tetapi pada perkembangannya dapat menjadi rujukan untuk jangka pendek dan menengah. Sebagai indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, ada dua aspek yang biasa diperhatikan dalam menilai IPM, yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM.

Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2021. IPM Kabupaten Luwu Timur meningkat dari 68,47 pada tahun 2010, menjadi 70,43 pada tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 73,22 pada tahun 2020. Pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 adalah sebesar 73,34. Selama periode 2010-2021, IPM Kabupaten Luwu Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,58 persen per tahun. Selama 2010-2021 IPM Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Pada tahun 2010, pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Luwu Timur berada pada tingkat pembangunan manusia level “Sedang” menurut kriteria UNDP.

Kemudian sejak tahun 2015 status pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Luwu Timur sudah meningkat pada level “Tinggi” yaitu pencapaian IPM 70 ke atas sampai kurang dari 80.

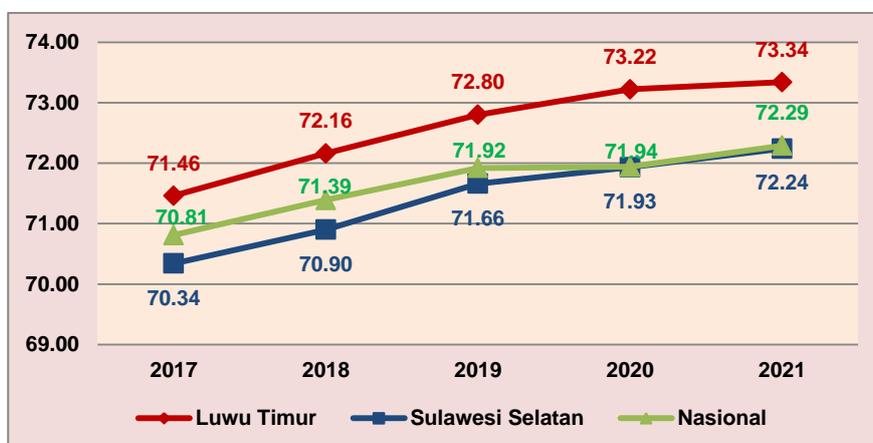
**Tabel 2.12**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur**  
**Menurut Komponen Tahun 2010-2021**

KOMPONEN	TAHUN											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>68,47</b>	<b>68,94</b>	<b>69,34</b>	<b>69,53</b>	<b>69,75</b>	<b>70,43</b>	<b>70,95</b>	<b>71,46</b>	<b>72,16</b>	<b>72,80</b>	<b>73,22</b>	<b>73,34</b>
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7,49	7,61	7,70	7,78	7,80	7,87	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80	8,81
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	11,32	11,54	11,75	11,79	11,95	12,36	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83	12,84
Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	69,26	69,32	69,38	69,42	69,44	69,64	69,71	69,79	70,03	70,38	70,53	70,63
Pengeluaran Per Kapita (PPP) (Ribu Rupiah)	11.754	11.813	11.828	11.844	11.859	11.926	11.960	12.030	12.346	12.802	12.814	12.886
Indeks Pendidikan	56,43	57,4	58,3	58,7	59,21	60,59	61,77	62,86	63,75	64,08	64,97	65,03
Indeks Kesehatan	75,78	75,87	75,96	76,03	76,06	76,36	76,48	76,6	76,97	77,51	77,74	77,89
Indeks Pengeluaran	75,07	75,23	75,27	75,31	75,35	75,52	75,61	75,78	76,58	77,68	77,71	77,88

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022

Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur mengalami kemajuan selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021. IPM Kabupaten Luwu Timur meningkat dari 71,46 pada tahun 2017 dan terus meningkat menjadi 73,34 di tahun 2021. Selama periode 2010-2021, IPM Kabupaten Luwu Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,48 persen per tahun.

**Grafik 2.6**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Luwu Timur – Provinsi Sulawesi Selatan - Nasional Tahun 2017 – 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022 (Data diolah)

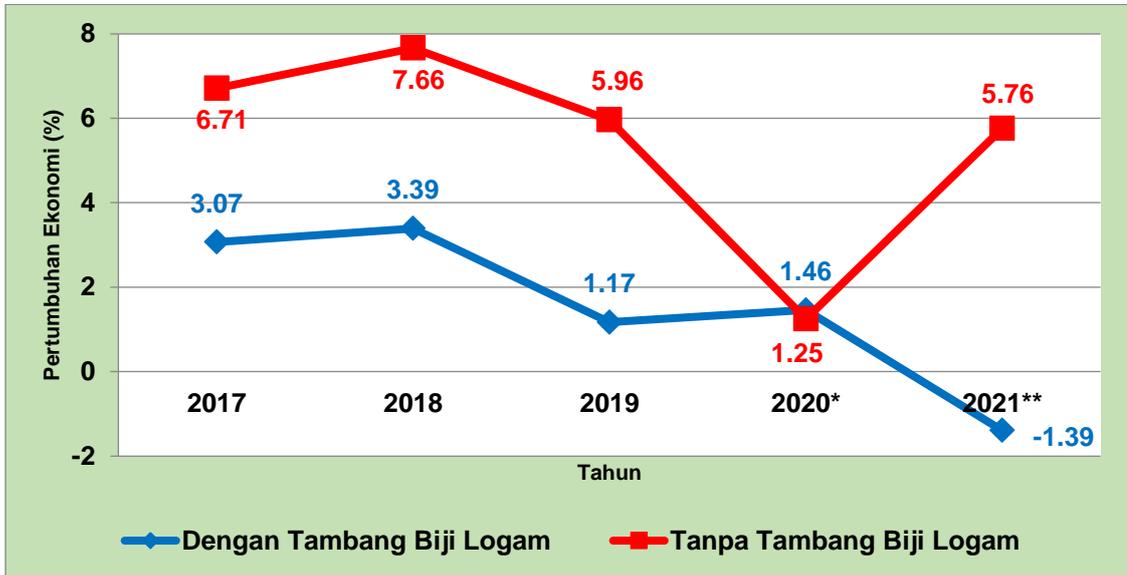
Selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM Kabupaten Luwu Timur yang lebih tinggi dari rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai 73,34 di atas rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 72,24 dan IPM Nasional yang sebesar 72,29. Tingginya pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur tidak lepas dari pencapaian komponen indikator pembentuk IPM, diantaranya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari besaran pengeluaran per kapita per tahun.

## **2.7. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur selama periode lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan karena peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2021 mencapai 43,99 persen.. Namun jika nilai Pertumbuhan Ekonomi dihitung tanpa Tambang Biji Logam, maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami tren yang sangat positif mencapai 5,76 persen.

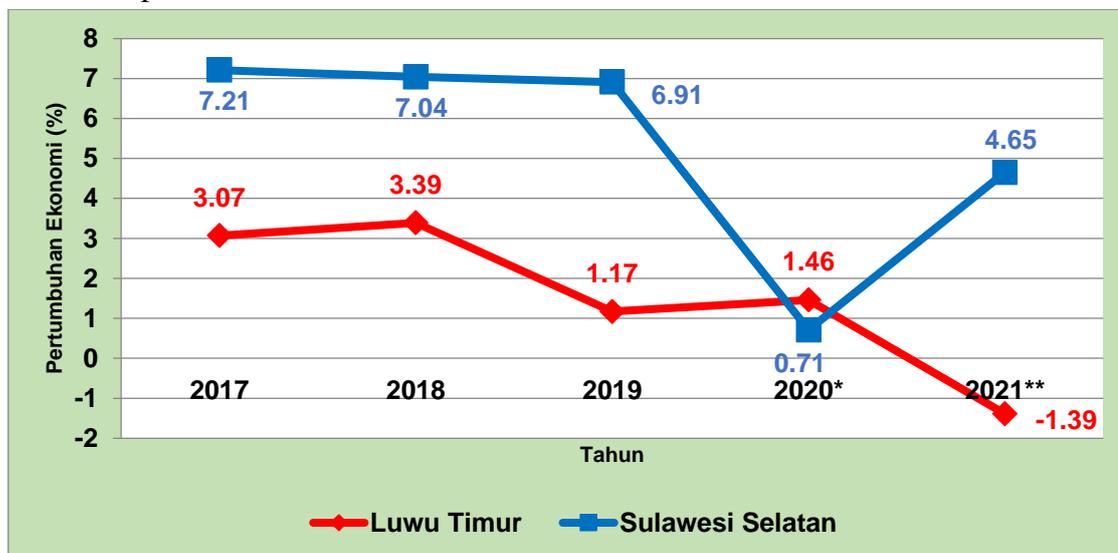
**Grafik 2.7**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur**  
**(Dengan dan Tanpa Biji Logam) Tahun 2017 s.d 2021**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022

Pada Tahun 2017 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur mencapai 3,07 Persen atau terjadi kesenjangan sebesar 4,14 persen dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2018 Kabupaten Luwu Timur berhasil memperkecil perbedaan laju pertumbuhan ekonomi dengan Provinsi Sulawesi Selatan pada angka 3,39 persen dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan pada angka 7,04 persen, sehingga hanya terdapat selisih 4,14 persen. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebut diperlukan peningkatan capaian-capaian kinerja pembangunan ekonomi melalui strategi yang tepat pada sektor perekonomian tersebut.

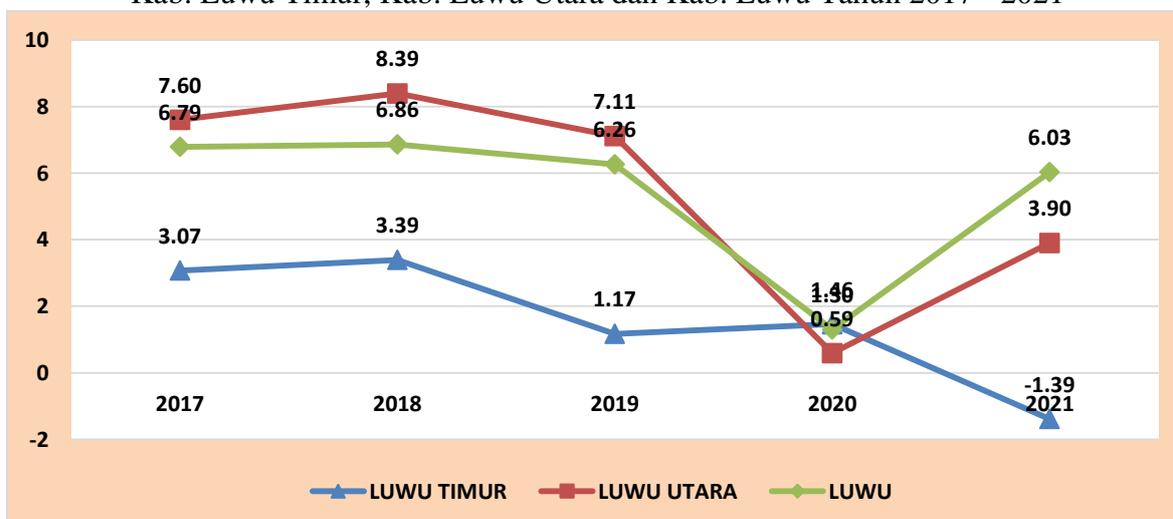
**Grafik 2.8**  
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 s.d 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi yang dialami Kabupaten Luwu Timur pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,46% namun pada tahun 2021, terdapat kondisi kontaksi sebesar -1,39%. Kondisi ini tidak dialami oleh Kabupaten tetangga lainnya seperti Kabupaten Luwu Utara yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% jika dibanding tahun 2020 dan Kabupaten Luwu bertumbuh sebesar 6,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020).

**Grafik 2.9**  
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Tahun 2017 - 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (Data Diolah)

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya. Dalam buku statistik PDRB selalu dijelaskan definisi PDRB yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Terdapat dua model penyajian data PDRB, yaitu : (a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan PDRB; (b) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk setiap tahun perhitungan PDRB.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilihat perkembangan kinerja ekonomi Kabupaten Luwu Timur. Apabila dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, PDRB Kabupaten Luwu Timur mencapai **20.393.893,9 juta rupiah**, kemudian tahun 2019 kembali meningkat mencapai **20.994.219,8 juta** rupiah dan terus meningkat tahun 2020 mencapai **21.529.809,6** rupiah.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 23.614.515,0 juta rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 43,99 persen.

Nilai PDRB yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang banyak dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

**Tabel 2.13**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.488.747,3	4.941.165,3	5.005.805,8	5.157.680,0	5.906.025,0
B	Pertambangan dan Penggalian	8.795.474,3	9.741.532,8	9.502.349,5	9.677.497,8	10.387.739,0
C	Industri Pengolahan	635.626,1	691.960,3	801.193,7	790.884,9	862.975,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.966,8	9.721,2	10.218,2	10.595,4	11.352,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1.230,0	1.345,0	1.471,1	1.622,3	1.848,3
F	Konstruksi	1.644.089,5	1.885.660,9	2.192.080,8	2.269.461,3	2.544.547,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	681.935,4	775.841,0	882.665,1	883.234,4	961.717,8
H	Transportasi dan Pergudangan	132.112,5	146.264,6	164.428,4	147.146,7	167.565,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.473,0	41.408,0	46.132,7	41.372,1	42.477,7
J	Informasi dan Komunikasi	255.449,4	288.236,8	325.470,8	362.769,7	390.483,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	165.738,3	189.925,0	210.775,7	221.042,8	235.312,3
L	Real Estate	432.680,3	465.327,8	509.270,1	542.983,8	574.094,4
M,N	Jasa Perusahaan	9.445,3	10.755,2	12.096,3	11.270,2	11.940,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	439.631,3	517.747,4	566.441,9	573.813,9	613.935,4
P	Jasa Pendidikan	368.418,8	409.500,4	454.545,5	486.909,1	515.923,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222.666,6	251.514,2	280.438,4	325.953,5	359.294,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	22.598,1	25.987,8	28.836,1	25.571,9	27.282,0
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>18 341 283,1</b>	<b>20 393 893,9</b>	<b>20 994 219,8</b>	<b>21.529.809,6</b>	<b>23.614.515,0</b>

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022*

*Ket. : \* Angka Sementara*

*\*\* Angka Sangat Sementara*

Sementara itu berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 menurun. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16.030.502,4 juta rupiah. Angka tersebut turun dari tahun 2020 seperti tersajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.955.133,6	3.150.529,4	3.183.973,3	3.175.948,7	3.308.980,4
B	Pertambangan dan Penggalian	8.667.996,5	8.681.490,7	8.447.706,1	8.587.768,9	7.916.767,4
C	Industri Pengolahan	430.907,2	455.673,6	521.872,7	507.751,8	541.154,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.091,6	9.630,7	10.029,2	10.522,9	11.165,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1.051,6	1.139,4	1.206,4	1.319,0	1.474,2
F	Konstruksi	1.188.708,2	1.279.365,3	1.403.975,5	1.448.200,8	1.559.002,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	549.462,6	606.129,5	669.824,2	662.567,2	707.104,8
H	Transportasi dan Pergudangan	91.413,9	100.787,4	111.864,8	97.385,9	103.939,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.901,9	25.594,8	27.785,3	24.233,3	24.800,5
J	Informasi dan Komunikasi	241.297,3	266.313,3	294.885,7	328.119,3	353.187,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	126.056,5	134.022,5	141.691,7	147.326,3	154.803,7
L	Real Estate	261.709,3	274.471,9	295.870,9	313.475,3	331.402,9
M,N	Jasa Perusahaan	6.401,6	7.073,5	7.817,0	7.151,0	7.421,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	294.124,7	330.230,5	348.463,1	345.808,2	366.498,2
P	Jasa Pendidikan	272.676,0	296.293,1	317.685,5	337.636,1	356.557,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	184.291,0	201.792,9	219.429,5	245.146,7	268.619,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	15.493,0	17.262,4	18.864,4	16.540,3	17.622,4
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>15.318.716,5</b>	<b>15.837.801,1</b>	<b>16.022.945,2</b>	<b>16.256.901,6</b>	<b>16.030.502,4</b>

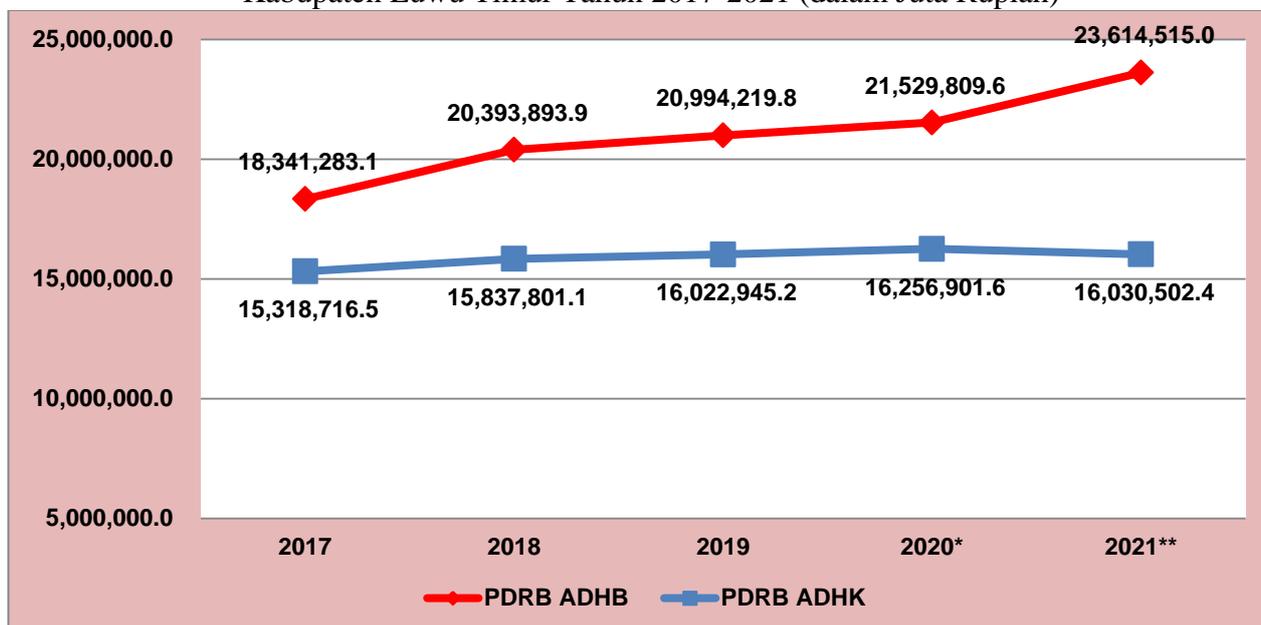
*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022*

*Ket. : \* Angka Sementara*

*\*\* Angka Sangat Sementara*

**Grafik 2.10**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 16,26 triliun rupiah menjadi 16,03 triliun rupiah sehingga mengalami kontraksi sebesar -1,39 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh PDRB sektor pertambangan dan penggalian di tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -7,81 persen.

**Tabel 2.15**

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017 s.d 2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,12	6,61	1,06	-0,25	4,19
B	Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,16	-2,69	1,66	-7,81
C	Industri Pengolahan	4,26	5,75	14,53	-2,71	6,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,30	5,93	4,14	4,92	6,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	12,07	8,34	5,88	9,34	11,76
F	Konstruksi	6,17	7,63	9,74	3,15	7,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,53	10,31	10,51	-1,08	6,72

H	Transportasi dan Pergudangan	6,39	10,25	10,99	-12,94	6,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,54	11,76	8,56	-12,78	2,34
J	Informasi dan Komunikasi	9,85	10,37	10,73	11,27	7,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,67	6,32	5,72	3,98	5,08
L	Real Estate	6,61	4,88	7,80	5,95	5,72
M,N	Jasa Perusahaan	6,55	10,50	10,51	-8,52	3,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,70	12,28	5,52	-0,76	5,98
P	Jasa Pendidikan	5,30	8,66	7,22	6,28	5,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,60	9,50	8,74	11,72	9,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,53	11,42	9,28	-12,32	6,54
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>3,07</b>	<b>3,39</b>	<b>1,17</b>	<b>1,46</b>	<b>-1,39</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022

Ket. : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

## 2.8. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.16**

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

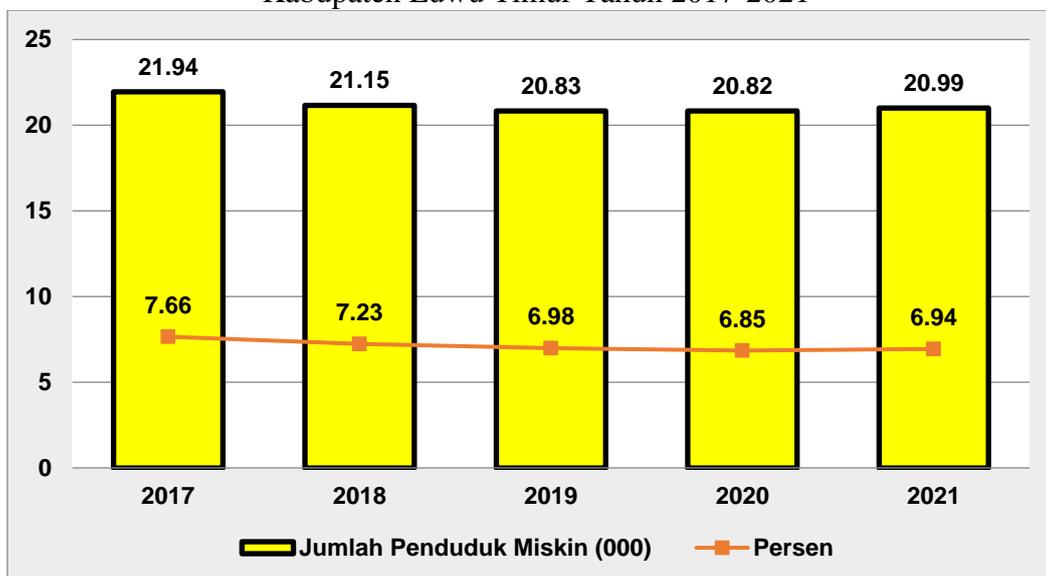
Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah (Ribu Jiwa)	Persen		
2017	289.214	21,94	7,66	1,60	0,50
2018	315.478	21,15	7,23	1,16	0,28
2019	333.739	20,83	6,98	1,11	0,25
2020	350.576	20,82	6,85	1,05	0,24
2021	371.947	20,99	6,94	1,09	0,26

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022 (Data Diolah)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2021 sebesar 20,99 ribu jiwa atau 6,94 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,17 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2020. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 6,94 persen juga naik sebesar 0,09 poin dari maret 2020. Jika melihat perkembangan selama lima tahun terakhir, 2017-2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sekitar 21,94 ribu jiwa, lalu pada tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah penduduk miskin terus berkurang dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 ini.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur yang juga bervariasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sebesar 7,66 persen terhadap total penduduk, kemudian mengalami penurunan menjadi 7,23 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mencapai 6,98 persen hingga tahun 2020 mencapai 6,85 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, persentase kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 6,94 persen.

**Grafik 2.11**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021**



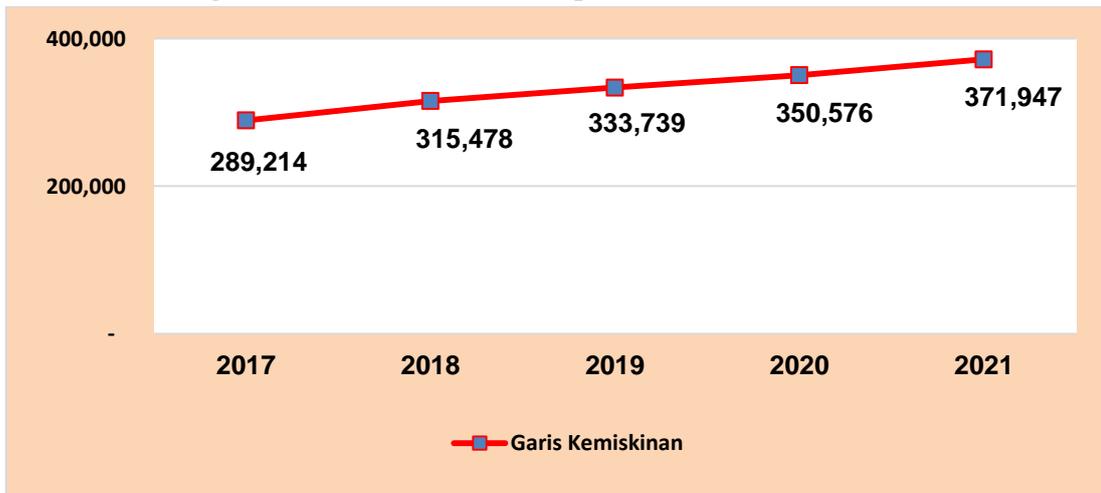
*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022 (Data Diolah)*

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama tahun 2017-2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sekitar Rp 289.214,-perkapita/bulan dan di tahun tersebut Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,21 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 9,08 persen menjadi Rp 315.478,- perkapita/bulan. Selanjutnya di tahun 2019 Garis Kemiskinan menjadi Rp 333.739,- perkapita/bulan dengan peningkatan sebesar 5,79 persen. Pada tahun 2020, Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan atau meningkat 5,04 persen. Terakhir pada tahun 2021, Garis Kemiskinan naik 6,10 persen menjadi Rp 371.947,- perkapita/bulan.

**Grafik 2.12**

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

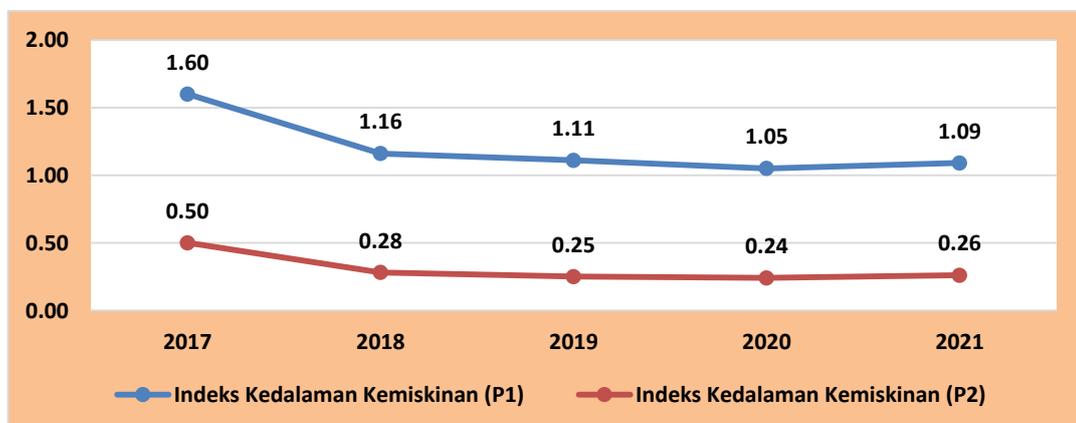


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022 (Data Diolah)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sekaligus juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan penduduk. Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

**Grafik 2.13**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022 (Data Diolah)

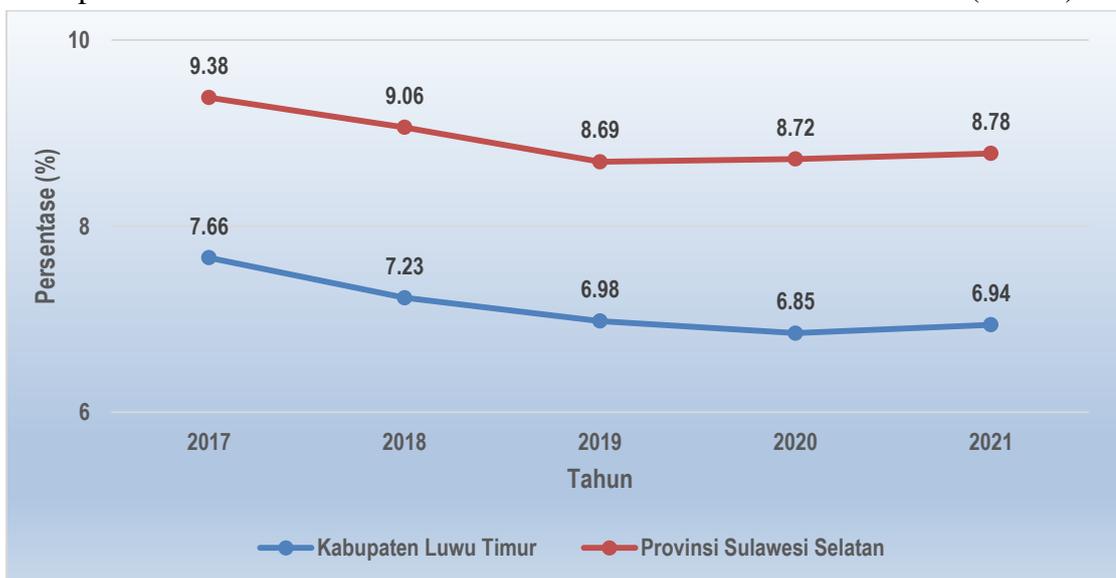
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur pada periode 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Selama 3 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 hingga 2020, Indeks P1 di Kabupaten Luwu Timur terus mengalami penurunan sedangkan di tahun 2021 ini mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2020. Pada tahun 2017, Indeks P1 di Kabupaten Luwu Timur sekitar 1,60. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2020, indeks P1 mengalami penurunan menjadi 1,16 pada tahun 2018, pada tahun 2019 menjadi 1,11 dan kembali menurun menjadi 1,05 pada tahun 2020. Tahun 2020 merupakan Indeks Kedalaman paling rendah selama kurun waktu enam tahun terakhir. Kemudian di tahun 2021, Indeks P1 mengalami kenaikan menjadi 1,09.

Dari perubahan Indeks P1 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2018 hingga 2020 semakin berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2017, dan di tahun 2021 kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan justru bertambah jika dibanding tahun 2020. Namun perubahan kenaikan Indeks Kedalaman kemiskinan di tahun 2021 tidak secara signifikan dari tahun sebelumnya.

Sejalan dengan Indeks P1, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur pada periode lima tahun terakhir juga berfluktuasi. Pada tahun 2017, Indeks P2 di Kabupaten Luwu Timur sekitar 0,50. Selanjutnya, mulai tahun 2018 Indeks P2 berangsur-angsur mengalami penurunan hingga tahun 2020. Selama kurun waktu lima tahun, seperti halnya indeks P1, Indeks Keparahan paling kecil terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 0,20. Kemudian di tahun 2021 ini indeks P2 naik sebesar 0,02 poin dari tahun sebelumnya menjadi 0,26. Dari perubahan Indeks P2 ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur dibanding tahun 2020.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur bervariasi, dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan.

**Grafik 2.14**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan**  
**Kabupaten Luwu Timur Dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Persen)**



*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022 (Data Diolah)*

Besarnya angka kemiskinan suatu daerah dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian pembangunan di suatu daerah, terutama dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan penurunan angka kemiskinan, pembangunan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur dapat dengan mudah dan cepat tercapai. Namun, jika suatu daerah mengalami kenaikan angka kemiskinan bukan berarti daerah itu gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena kemiskinan itu tidak diukur berdasarkan satu titik melainkan dengan periode waktu. Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,09 persen poin berbanding lurus dengan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang juga mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen poin di tahun 2021.

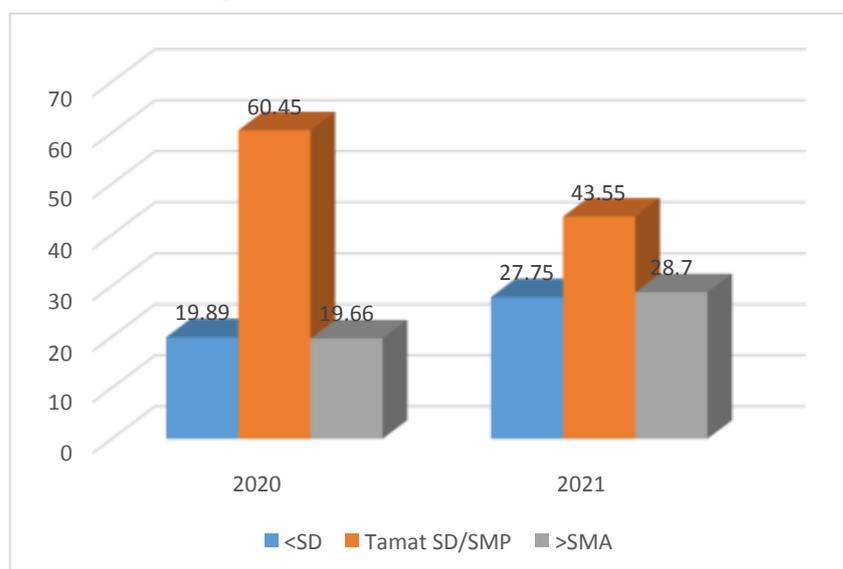
Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur masih berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2010 sekitar 9,18 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan rata-rata Sulawesi Selatan yang sekitar 11,4 persen. Kemudian selama 12 tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur terus berfluktuasi hingga menjadi 6,94 persen pada tahun 2021, dan pencapaiannya tetap lebih rendah dari angka kemiskinan rata-rata Sulawesi Selatan yang sebesar 8,78 persen.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan adalah karena tingkat pendidikan yang kurang, untuk persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2021 tamat SD dan SMP sebanyak 43,55 persen.

Sedangkan yang belum tamat SD sebanyak 27,75 persen dan tamat SMA 28,7 persen, hal ini mengalami penurunan di banding tahun 2020 untuk tamat SD dan SM sedangkan tamat SMA mengalami peningkatan dari 19,66 persen. Untuk persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 2.15**

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas dan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dan 2021

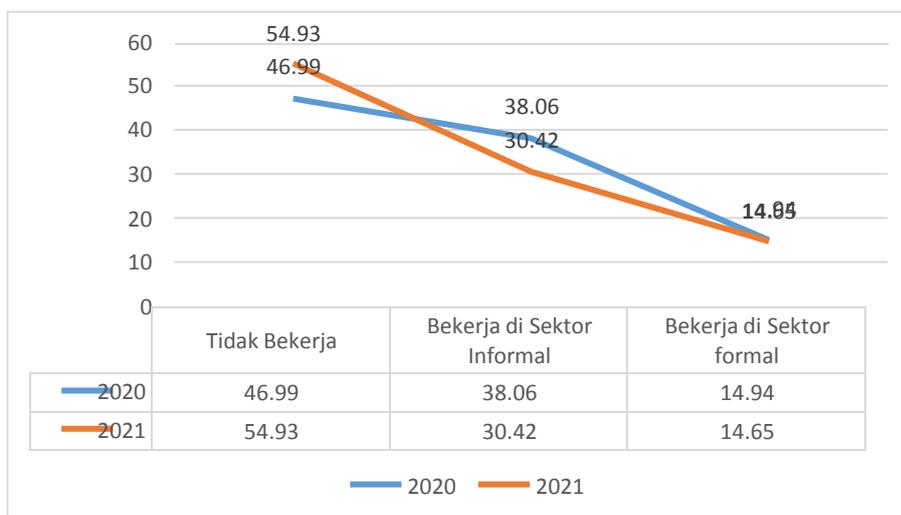


*Sumber Data : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021*

Selain pendidikan, sektor ketenagakerjaan juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah, sehingga untuk mengetahui sektor ketenagakerjaan penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur, untuk mengetahui status bekerja dan sektor bekerja penduduk miskin 15 tahun ke atas di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2.16**

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Status Bekerja



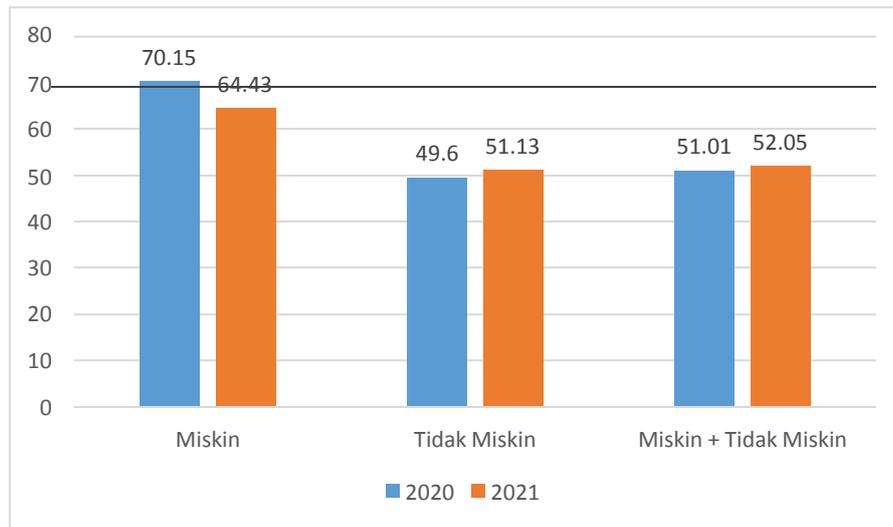
Sumber Data : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas persentasi penduduk miskin usia 15 Tahun katatas menurut status kerja dan sektor kerja dapat dilihat bahwa persentase penduduk yang bekerja masih lebih banyak di banding yang tidak bekerja dan untuk sektor bekerja dapat dilihat bahwa penduduk miskin usia 15 tahun keatas lebih banyak bekerja pada sektor informal di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dan 2021 yaitu sebanyak 38,06 persen tahun 2020 dan 30,42 persen tahun 2021, dan sektor informal yang hampir sama yaitu di tahun 2020 dan 2021 mencapai 14,94 dan 14,65 persen. sedangkan penduduk tidak bekerja ada peningkatan di tahun 2021 yaitu 54,93 di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 2020 jumlah persentase penduduk tidak bekerjasebanyak 46,99 persen.

Selain dari segi jumlah dan persentase penduduk miskin, perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, yang tercermin pada besaran dan pola pengeluaran penduduk. Pada tahun 2020-2021, pengeluaran perkapita untuk makanan dan status miskin di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 2.17**

Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan dan Status Miskin Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2020-2021



Sumber Data : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021

## 2.9. Tingkat Pengangguran

Salah satu indikator yang juga cukup mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat sebanyak 1.023 orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang meningkat sebesar 0,5 persen poin menjadi 4,96 persen atau 8.052 orang pada tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan Jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 yang mencapai 162.182 Orang, atau bertambah sebanyak 4.673 orang dibanding tahun 2020. Sementara penduduk yang bekerja di tahun 2021 mencapai 154.130 orang, atau meningkat sebanyak 3.650 orang dari tahun 2020.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa besarnya peningkatan jumlah angkatan kerja yang ada setiap tahunnya, belum dapat diimbangi oleh lapangan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis untuk memberi peluang lebih besar kepada masyarakat memperoleh pekerjaan ataupun menciptakan lapangan kerjanya sendiri.

**Grafik 2.18**  
 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 s.d 2021

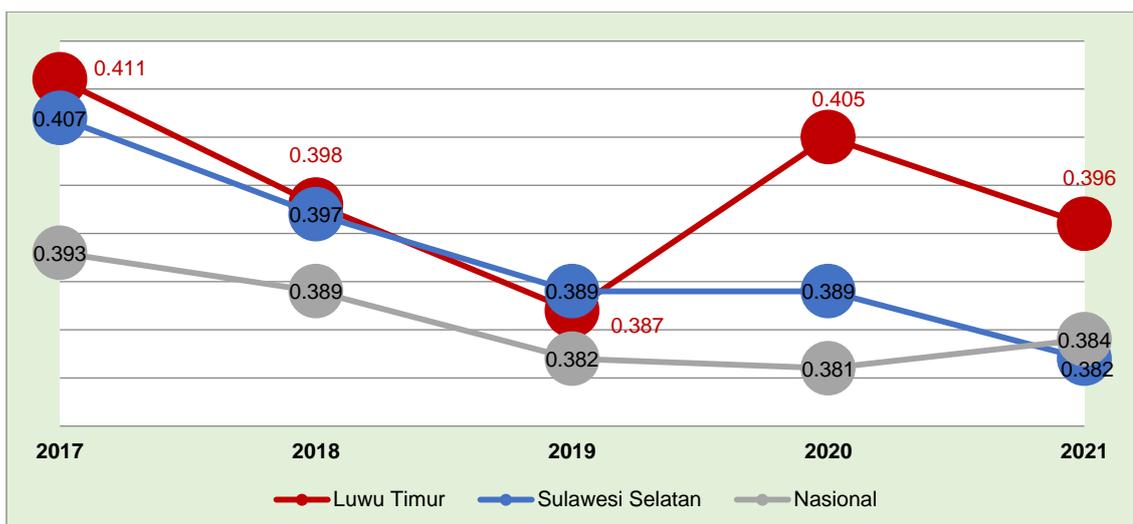


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022 (Data diolah)

### 2.10. Gini Ratio

Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur di tahun 2021 sebesar 0,396 poin atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 0,405 poin. Penurunan Gini Ratio tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kabupaten Luwu Timur.

**Grafik 2.19**  
 Perbandingan Perkembangan Gini Ratio  
 Luwu Timur - Sulawesi Selatan – Nasional Tahun 2017 s.d 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022

## 2.11. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dilakukan dalam berbagai kegiatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat yaitu program Sembako/BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tersebar di Kabupaten Luwu Timur merupakan Program Nasional yang mempunyai Keluarga Penerima manfaat yang cukup banyak, berikut dipaparkan dalam Tabel 2.13 terkait persentase Rumah tangga menurut Program Perlindungan Sosial yang diterima di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 berikut:

**Tabel 2.17**  
Persentase Rumah Tangga menurut Program Perlindungan Sosial  
Yang diterima di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENERIMA
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	14,93
Program Indonesia Pintar (PIP)	7,55
Kartu perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	10,74
Program Keluarga Harapan (PKH)	11,74

*Sumber Data : Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS Tahun 2021*

Selain Program perlindungan sosial Bantuan Pemerintah pusat, Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur juga perlu dilaksanakan dan di tingkatkan, akan tetapi program penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilaksanakan hanya dengan satu Perangkat Daerah saja melainkan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu Timur saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam Penanggulangan kemiskinan agar apa yang akan dikerjakan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur di berbagai Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut:

**Tabel 2.18**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam membantu proses Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
12	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
14	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

15	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11 Kecamatan
18	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
20	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
27	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
29	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
30	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
31	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

32	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
33	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
34	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
35	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
36	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
37	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
38	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
39	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
40	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
41	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
42	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
No	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
43	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
44	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
45	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
46	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
47	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
48	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
49	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
50	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
51	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
52	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

53	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
54	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
55	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
56	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
57	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
58	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
59	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
60	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
61	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
62	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
63	Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
64	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
65	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
66	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
67	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
68	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
69	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
70	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
72	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
73	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
74	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
75	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
76	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
77	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
78	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
79	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

*Sumber Data : Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur*

Dalam hal Penanggulangan Kemiskinan sudah banyak program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dampak program atau kegiatan sedikit berubah ketika pandemi covid-19. Kondisi pandemi covid-19 membuat banyak penyesuaian terutama dari sisi anggaran kebijakan, dan semakin beratnya kondisi kemiskinan dengan ditandai berubah arahnya pola tingkat kemiskinan dari yang sebelumnya mengalami tren penurunan menjadi tren kenaikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan kemiskinan, dan banyak hal yang membutuhkan perhatian lebih lanjut diantaranya adalah:

1. Belum terdapat implementasi Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga masih terjadi exclusion error dan inclusion error pada data DTKS.
2. Komitmen terhadap Pengentasan kemiskinan Masih lemah di tingkat Provinsidan kabupaten/kota.
3. Belum optimalnya advokasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan TKPKProvinsi dan kabupaten/kota.
4. Peran CSR dalam pengentasan kemiskinan masih belum maksimal.
5. Penggunaan basis data terpadu masih belum optimal dalam pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan serta dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah.
6. Kemampuan Pengelolaan dan analisis data DTKS masih lemah.
7. Meningkatkan dan memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) terkait program-program dalam Penanggulangan Kemiskinan.
8. Kurangnya Konvergensi Program, baik program Pusat, Program Khusus maupun Program daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

# BAB III



## PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1 Bidang Konsumsi Pengeluaran
- 3.2 Bidang Ketenagakerjaan
- 3.3 Bidang Pendidikan
- 3.4 Bidang Kesehatan
- 3.5 Bidang Infrastruktur Dasar
- 3.6 Bidang Ketahanan Pangan
- 3.7 Analisis Data Terpadu

### **BAB III**

#### **PROFIL KEMISKINAN DAERAH**

Dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan tepat sasaran perlu didukung oleh data yang menggambarkan letak permasalahan secara akurat dan menentukan target sasaran program secara tepat, sehingga rumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana secara lebih efektif.

Hal ini juga didukung oleh Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020 – 2024 terkait strategi penanggulangan kemiskinan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perlu didukung oleh data yang valid dan sistem informasi yang terpadu dengan **memanfaatkan data kemiskinan terpadu serta instrumen perencanaan, penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin.**

Data kemiskinan merupakan cikal bakal analisis kemiskinan yang menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah terutama dari sisi penentuan program/kegiatan dan perumusan target sasaran yang tepat dan terukur. Berdasarkan data yang valid dan akurat maka proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan sasaran program/ kegiatan dan target penerima manfaat dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif.

Data yang baik juga dapat mendorong konsistensi program pembangunan secara horizontal (antara sasaran kegiatan dalam perencanaan dan alokasi dana pada penganggaran) dan vertikal (antara kebijakan program pusat dan daerah maupun). Sehingga data merupakan suatu alat informasi yang *sangat 'powerful' dalam menentukan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan miskin* sehingga perlu dikelola dengan baik.

Profil dan karakteristik kemiskinan ditulis dalam bentuk analisis agar dapat memberikan gambaran mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan kemiskinan yang sedang dihadapi, lebih tepatnya disebut proses identifikasi masalah. Sehingga para perencana program dan pengambil kebijakan dapat lebih fokus dalam menentukan program-program yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin.

Dalam bab ini kemiskinan dibahas dari dua sisi, yaitu indikator kemiskinan yang berbasis *konsumsi atau pengeluaran*, serta kemiskinan dari sisi multidimensi yang terdiri dari *beberapa bidang kebutuhan dasar*. Paket analisis dalam membahas masing-masing bidang melalui empat tahapan sebagai berikut :

1. Analisis posisi relatif yang berisikan penjelasan :
  - a) Posisi capaian indikator Provinsi Sulawesi selatan terhadap daerah/provinsi lain di Indonesia.
  - b) Posisi capaian indikator Provinsi Sulawesi selatan terhadap daerah/provinsi lain di Pulau Sulawesi
  - c) Posisi capaian indikator Provinsi Sulawesi selatan terhadap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan
2. Analisis perkembangan antar waktu yang berisikan penjelasan :
  - a) Perkembangan capaian indikator dalam setahun terakhir
  - b) Pola perubahan capaian indikator tahun ke tahun (konsisten/fluktuatif)
3. Analisis efektivitas yang berisikan penjelasan :
  - a) Perubahan capaian selama periode kebijakan tertentu (RPJMD)
  - b) Perubahan antar periode kebijakan (antar periode RPJMD)
4. Analisis relevansi perkembangan dari kondisi kemiskinan tersebut yang berisikan penjelasan pola perubahan daerah terhadap pola perubahan di tingkat yang lebih tinggi atau lebih luas.

### **3.1 Bidang Konsumsi Pengeluaran**

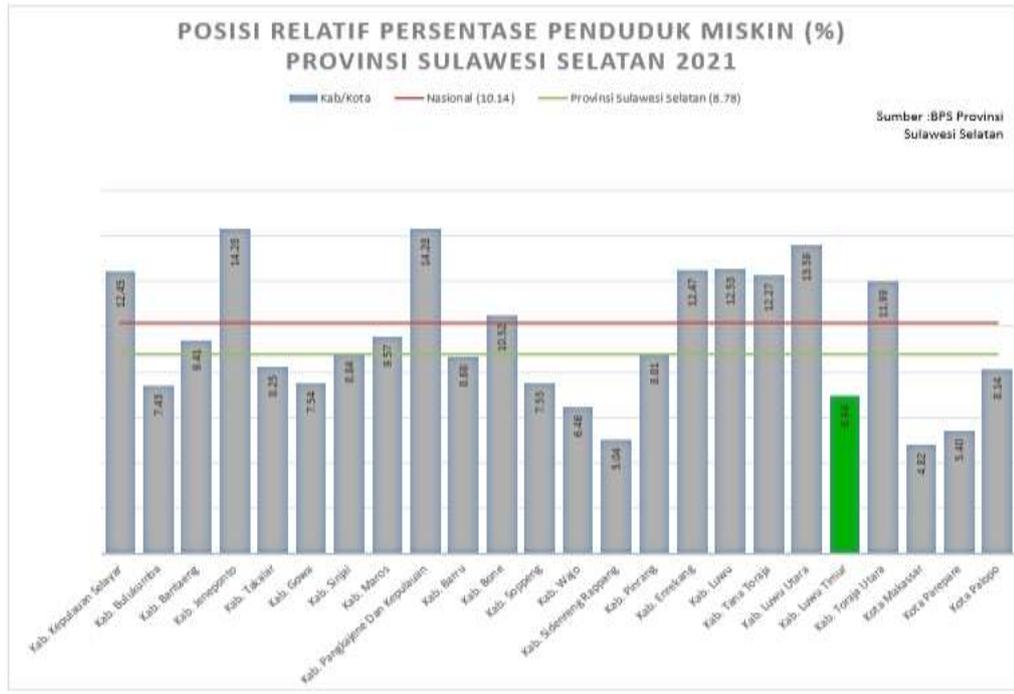
Pengukuran kemiskinan berbasis konsumsi atau pengeluaran pada dasarnya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Beberapa indikator yang dihasilkan dari konsep kemiskinan ini diantaranya, Persentase penduduk miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), serta tentunya Garis Kemiskinan (GK) yang dijadikan patokan atau penentuan status kemiskinannya, Tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat ketimpangan, serta dibahas juga tentang Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkaitan dengan bidang pengeluaran yang nantinya menjadi sasaran program dan prioritas wilayah. Analisa lengkapnya dijabarkan dibawah ini.

### 3.1.1 Persentase Penduduk miskin (P0)

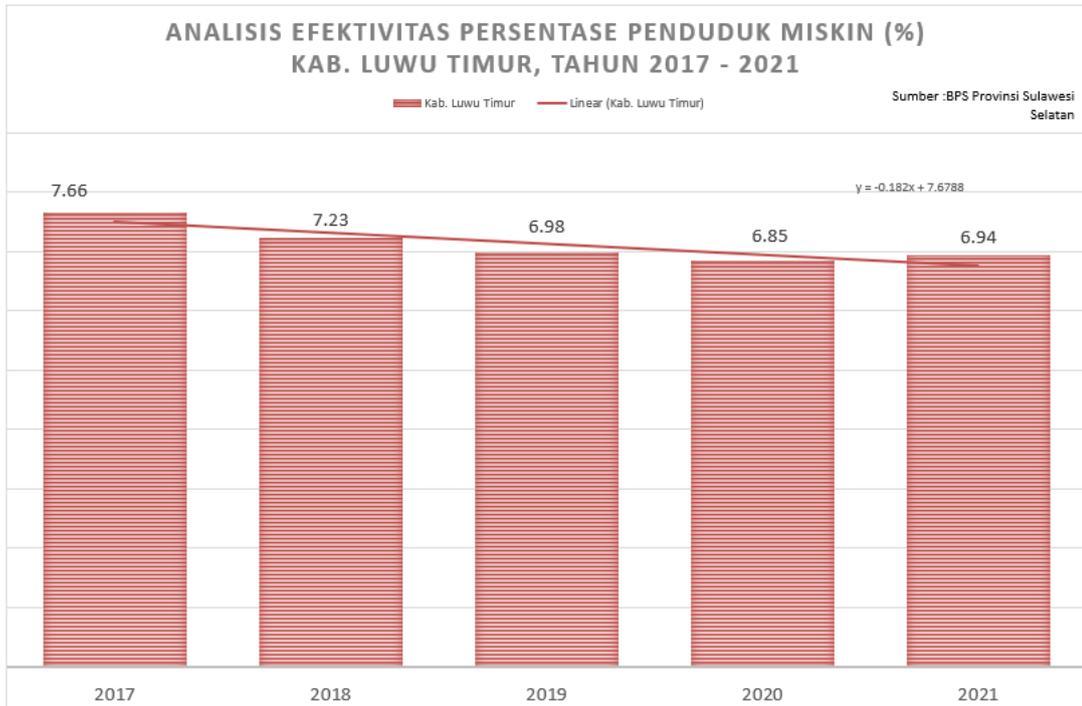
Gambar 3.1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Prov Sulsel Tahun 2021



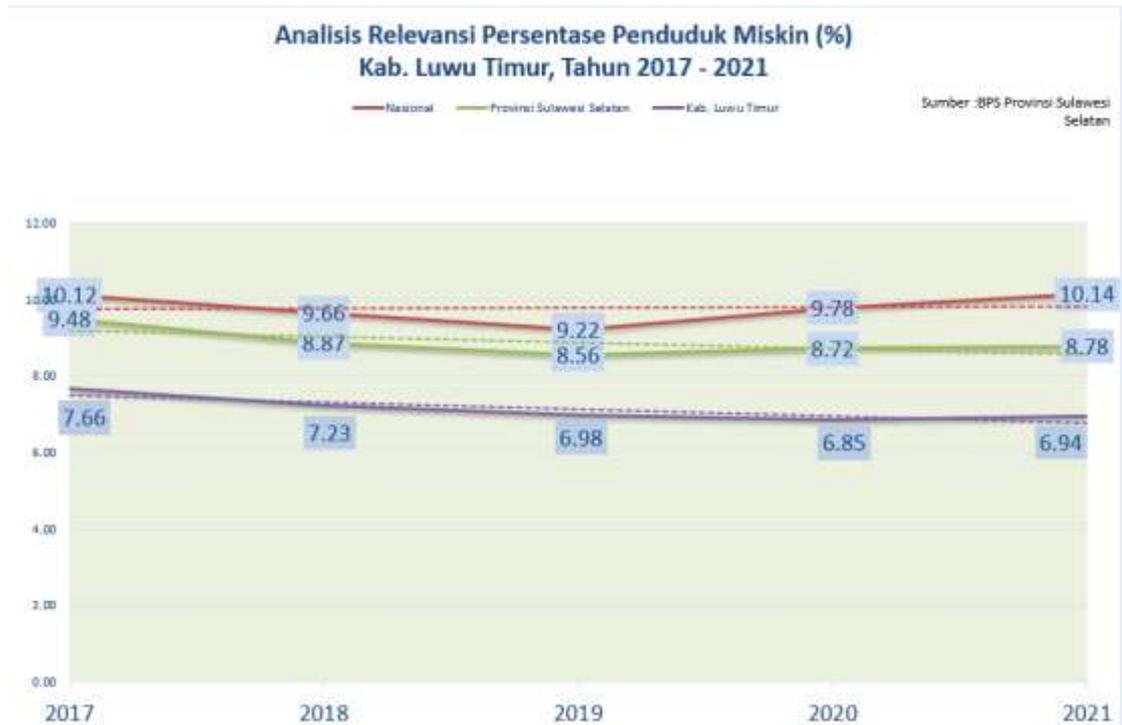
Gambar 3.2 Perkembangan antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



Gambar 3.3 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.4 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



## Kondisi Karakteristik Masalah Persentase Penduduk Miskin :

### a. Posisi Relatif:

- ✓ Pada tingkat Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 9 Kabupaten yang capaian nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, kemudian 2 Kab/Kota yang capaian nya diatas Provinsi Sulawesi selatan namun sudah dibawah nasional, sisanya sebanyak 13 Kab/Kota termasuk Kabupaten Luwu Timur telah berada dibawah Provinsi Sulawesi selatan dan nasional. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar kab/kota di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Nasional dan capaian Prov Sulsel.
- ✓ Pada Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur berada di posisi ke-5 terendah untuk Persentase tingkat kemiskinan di antara 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaiannya sebesar 6.94%, posisi pertama terendah adalah Kota Makassar dengan capaian 4.82% dan posisi tertinggi dengan capaian 14.28% di tempati oleh Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Pangkajene & Kepulauan.
- ✓ Target Persentase Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dalam dokumen RPJMD 2021–2026 adalah 5.84% pada tahun 2026. Target tahun 2026 tersebut diharapkan bisa tercapai, walaupun masih berada pada tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi covid19 sejak tahun 2020 yang membuat banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

### b. Perkembangan Antar Waktu:

- Jika dilihat tren pada periode tahun 2017-2021, tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 7.66% menjadi 6.94%. Terjadi penurunan sebesar 0.72%. Tahun 2020 capaian tingkat kemiskinan terendah berada pada titik 6.85% tetapi kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 0.09% menjadi 6.94%. Hal ini disebabkan karena tahun 2020 menjadi awal pandemi covid19 di Indonesia termasuk di Kabupaten Luwu Timur.
- Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017- 2020 menunjukkan Tren penurunan yang cukup konsisten meskipun lajunya dirasa cukup lambat. Kemudian mengalami perubahan pada periode 2020- 2021 menjadi tren kenaikan.

c. Efektivitas:

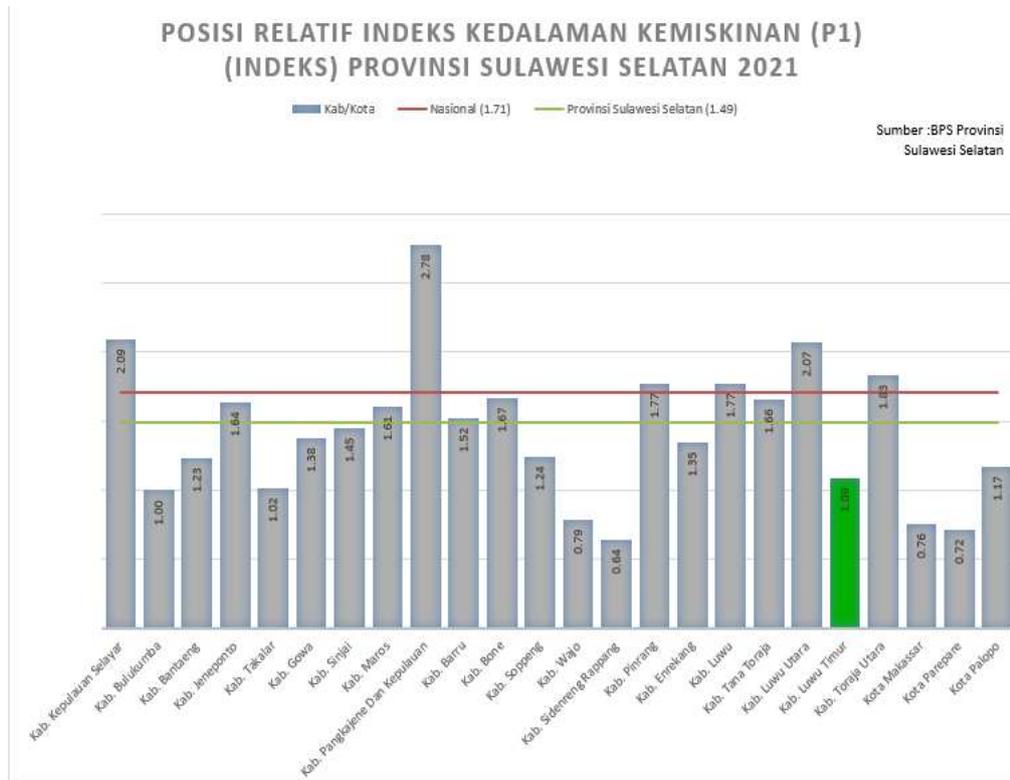
- Pada Periode 2017-2021, adanya pola penurunan yang signifikan terutama pada tahun 2017-2020. Namun pada tahun 2020 hingga sekarang menunjukkan pola kenaikan akibat adanya pandemi covid-19. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian indikator tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan penurunan sebesar 0.72% walaupun penurunannya sangat lambat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dihitung dalam 5 tahun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya mampu menurunkan 0.144% tingkat kemiskinannya setiap tahunnya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemkab sudah efektif walaupun masih belum maksimal dan membutuhkan langkah-langkah strategis dan massif untuk mencapai target RPJMD di tahun 2026 sebesar 5.84%.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan mulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017, capaian Nasional sebesar 10,12% dan capaian Prov Sulawesi Selatan sebesar 9.48% masih lebih tinggi dibandingkan capaian Kabupaten Luwu Timur yang hanya sebesar 7.66%. Kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2020 sampai 2021 capaian Nasional mulai mengalami kenaikan menjadi 10.4% dan begitu pula dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan menjadi 8.78% walaupun capaian ini masih jauh di bawah dari capaian Nasional sementara Kabupaten Luwu Timur juga mengalami kenaikan dari 6.85% menjadi 6.94%. Hal ini berarti capaian indikator tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017-2021 relevan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dengan capaian Nasional.

### 3.1.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

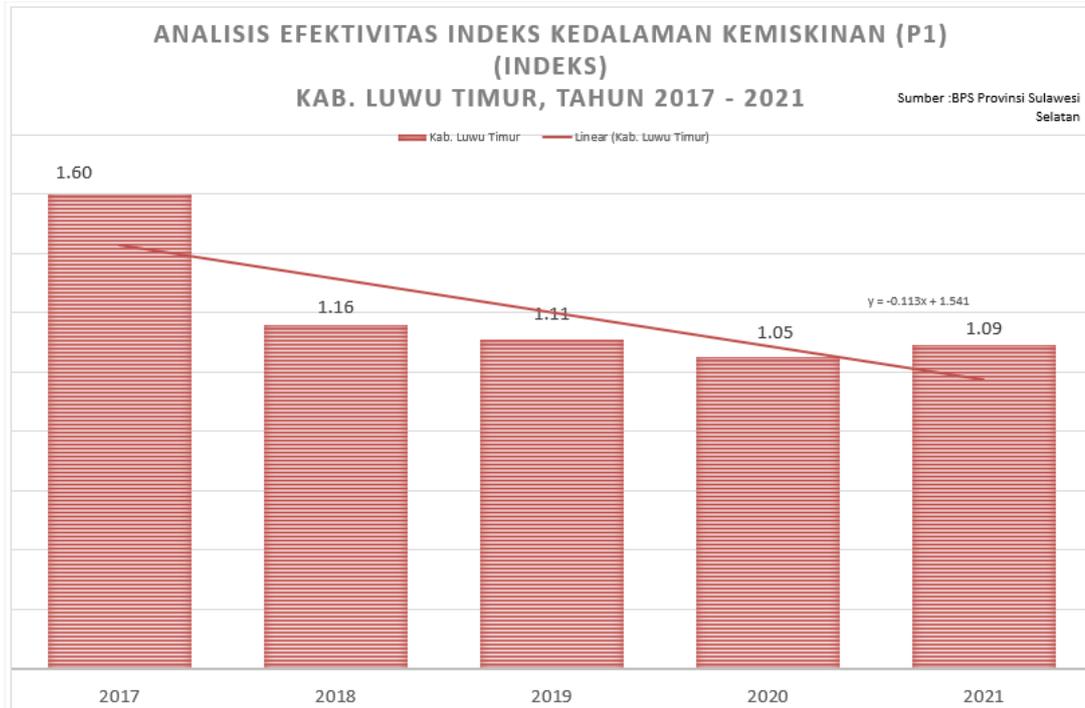
Gambar 3.5 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Prov Sulsel Tahun 2021



Gambar 3.6 Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.7 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.8 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



## Kondisi Karakteristik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) :

### a. Posisi Relatif:

- ✓ Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 6 Kab/Kota yang capaiannya di atas capaian Nasional, sebanyak 5 Kab/Kota capaiannya berada di atas Provinsi Sulawesi selatan dan di bawah capaian Nasional. Sisanya sebanyak 13 kab/kota sudah berada dibawah capaian Prov Sulawesi Selatan dan tentu saja di bawah capaian Nasional. Ini menggambarkan bahwa Sebagian besar kab/kota di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Nasional dan capaian Prov Sulsel.
- ✓ Posisi Relatif Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-7 terendah di antara 24 Kab/Kota Se-Sulsel dengan capaian 1.49%. Posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan angka 0.64% dan posisi tertinggi di tempati oleh Kabupaten Pangkajene & Kepulauan dengan angka 2.78%.

### b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada periode 2017-2021 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 1.60% menjadi 1.09%.
- Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017-2021 menunjukkan Tren penurunan yang fluktuatif dengan laju yang cukup lambat hanya terjadi penurunan sebesar 0.51% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

### c. Efektivitas:

- Pada Periode 2017–2021 terjadi penurunan sebesar 0.51% dari 1.60% di tahun 2017 menjadi 1.09% di tahun 2021. adanya pola penurunan indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkab Luwu Timur sudah efektif tetapi masih harus perlu dimaksimalkan karena masih terdapat kesenjangan pengeluaran antara masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

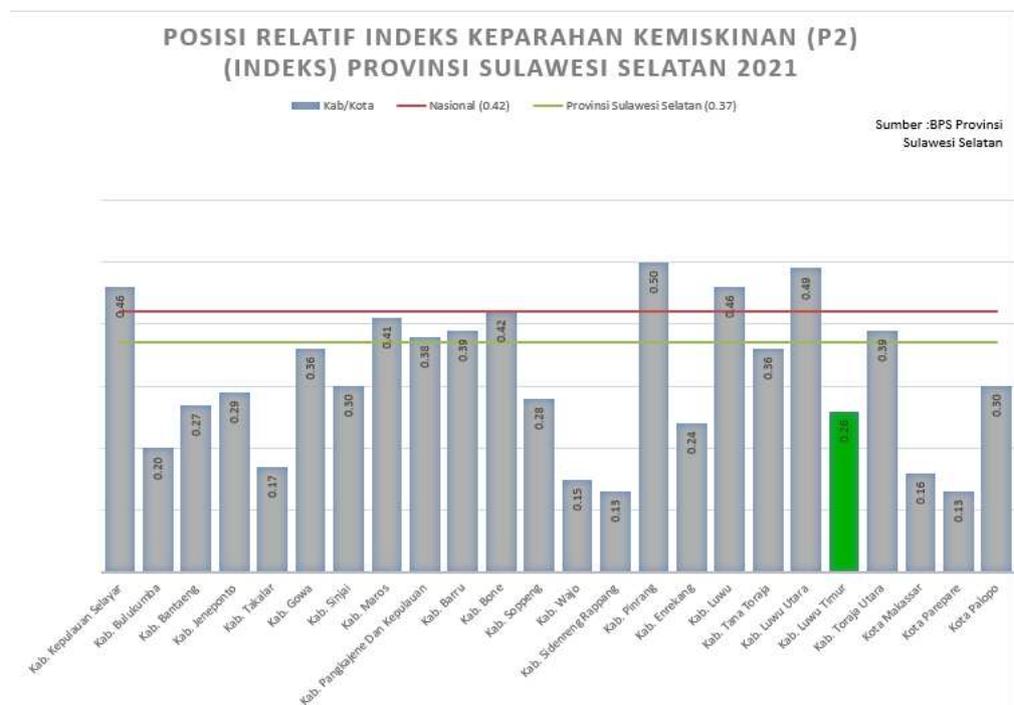
### d. Relevansi:

- Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Tren dan pola perubahan antara capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan. Hanya saja, pada tahun 2021, capaian Provinsi Sulawesi Selatan

mengalami perbaikan dengan penurunan angka dari capaian tahun 2020, sedangkan capaian Nasional sama dengan capaian Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kenaikan dari capaian tahun 2020, walaupun demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya sejak tahun 2017 sampai 2021 capaian Kabupaten Luwu Timur relevan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional.

### 3.1.3 Indeks keparahan kemiskinan (P2)

Gambar 3.9 Posisi Relatif Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) Prov Sulsel Tahun 2021



Gambar 3.10 Analisis Perkembangan antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.11 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.12 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Karakteristik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) :

a. Posisi Relatif:

- Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 4 kab/kota yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, 5 Kab/Kota yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan namun dibawah nasional, sisanya sebanyak 15 Kab/Kota telah berada dibawah Provinsi Sulawesi selatan dan nasional. Ini menggambarkan bahwa Sebagian besar kab/kota menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
- Posisi Relatif Kabupaten Luwu Timur di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan menempati posisi ke-7 terendah dengan capaian 0.26%. Posisi pertama terendah ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Pare-pare dengan capaian 0.13%, sementara posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Pinrang dengan angka 0.50%

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021 indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 0.50% menjadi 0.26%. Terjadi penurunan terendah di tahun 2020 sebesar 0.24% dari 0.25% di tahun 2019. Namun

meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 0.26%.

- Apabila dilihat tren ataupun pola perubahannya, pada periode 2017-2021 menunjukkan Tren penurunan yang fluktuatif meskipun cukup lambat karena hanya sebesar 0.24% selama 5 tahun terakhir.

c. Efektivitas:

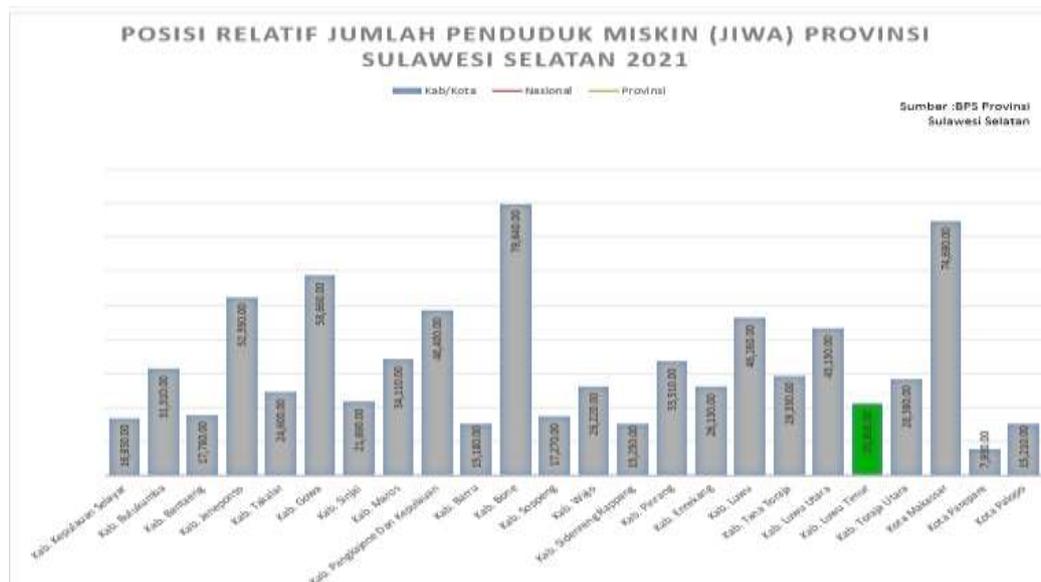
- Pada Periode 2017–2021, menunjukkan adanya pola penurunan indeks Keparahan kemiskinan. Namun pada tahun 2021 menunjukkan pola kenaikan akibat adanya pandemi covid-19. Jika dilihat tren-nya terjadi penurunan, sehingga bisa disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan Persentase keparahan kemiskinan sudah efektif. Namun masih harus lebih dimaksimalkan karena masih ada kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.

d. Relevansi:

- Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Tren dan pola perubahan antara capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi selatan juga capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan. Hanya saja, pada tahun 2021, Provinsi Sulawesi sudah menunjukkan perbaikan capaian dari tahun 2020 karena mengalami penurunan sebesar 0.02%. sedangkan Nasional mengalami kenaikan di tahun 2021 seperti capaian Kabupaten Luwu Timur dari capaian tahun 2020. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa capaian ketiganya relevan.

### 3.1.4 Jumlah penduduk miskin

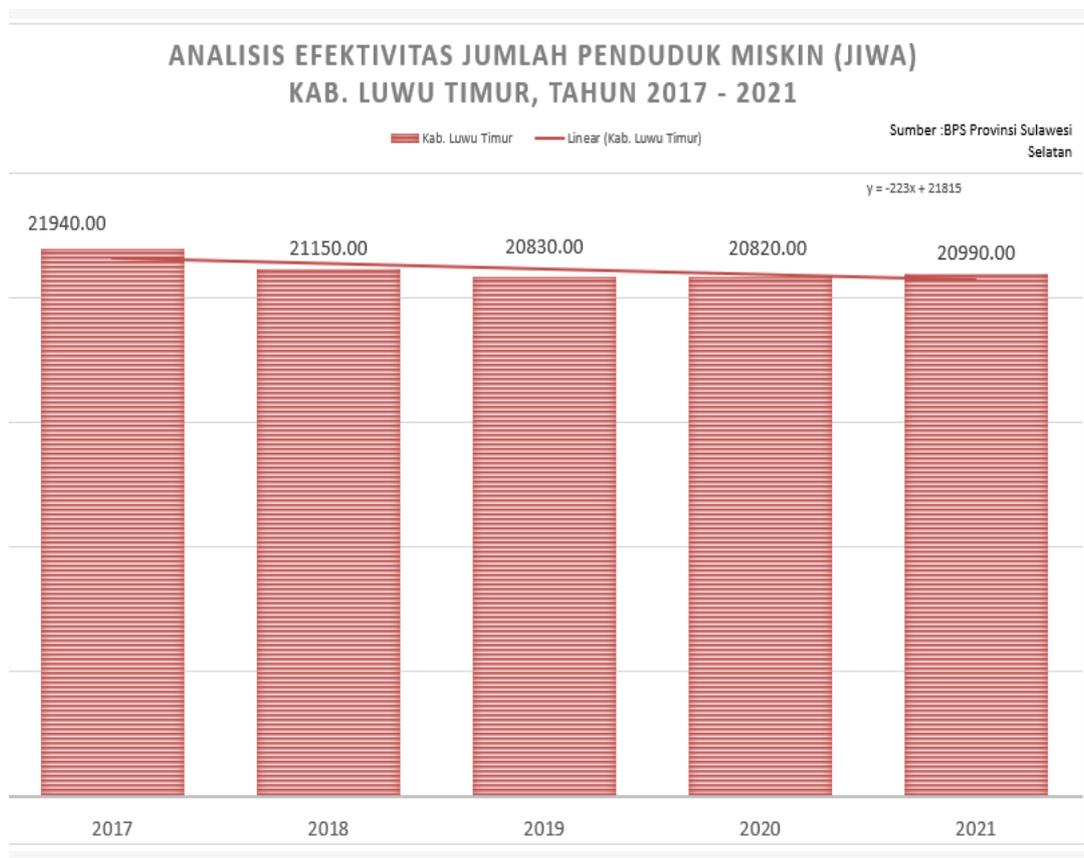
Gambar 3.13 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Prov Sulsel Tahun 2021



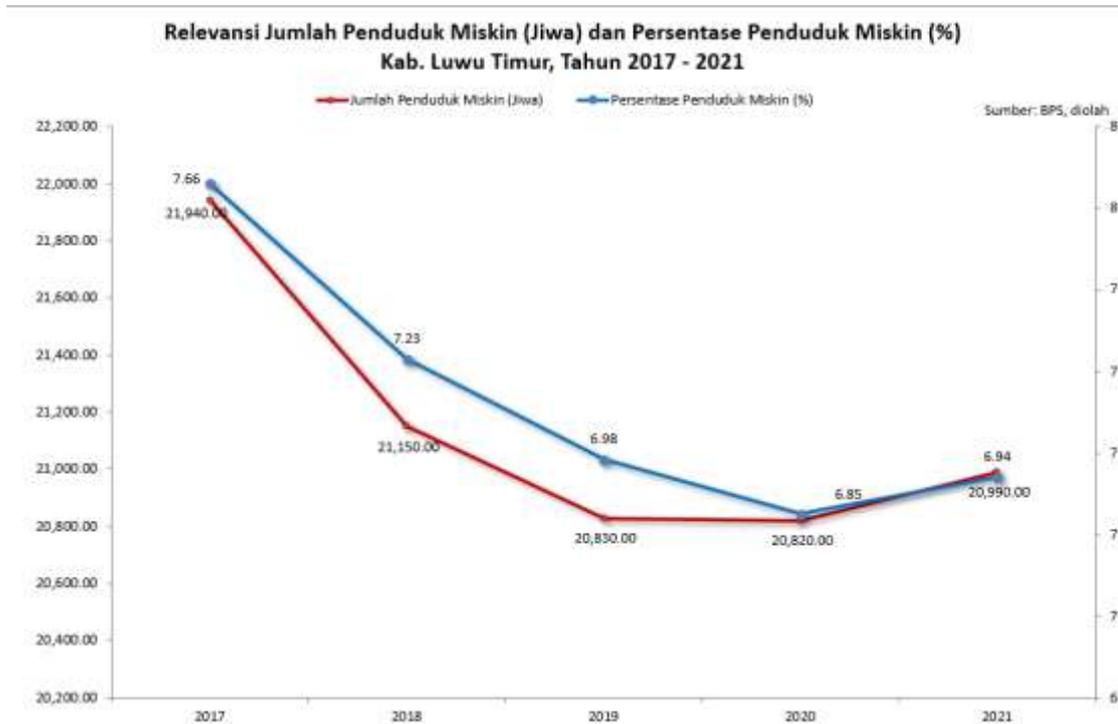
Gambar 3.14 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.15 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.16 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



- Pada tingkat Kab/Kota, semua menunjukkan angka yang lebih rendah dari capaian Provinsi Sulsel dan juga tentu saja lebih rendah dari capaian Nasional.
- Posisi Relatif Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 menempati posisi ke-8 terendah di antara 24 Kab/Kota di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk miskin. Posisi terendah di tempati oleh Kota Pare-pare dengan jumlah 7.930 penduduk dan di posisi tertinggi berada pada Kabupaten Bone dengan jumlah 79.640 penduduk.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode Tahun 2017-2021, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 21.940 jiwa menjadi 20.990 jiwa. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya yaitu sebesar 20.820 jiwa, namun kemudian mengalami peningkatan jumlah di tahun 2021 menjadi 20.990 jiwa diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang terdampak Covid19.
- Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017- 2021 menunjukkan Tren penurunan yang fluktuatif, walaupun pada periode 2020-2021 menunjukkan tren kenaikan.

c. Efektivitas:

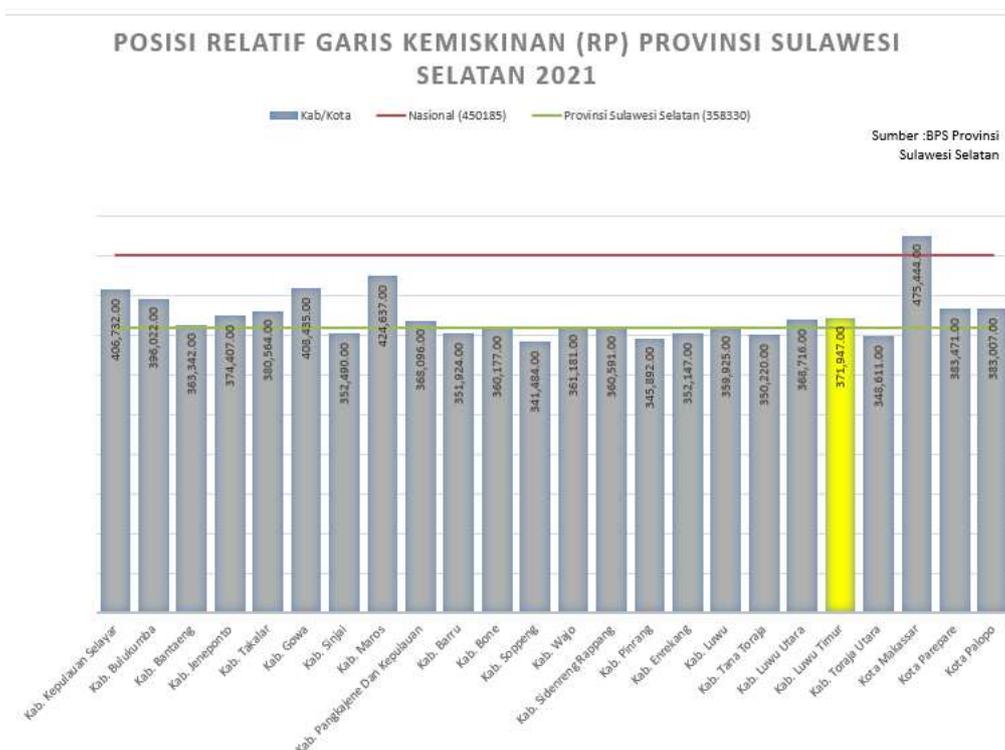
- Pada Periode tahun 2017–2021, adanya pola penurunan jumlah penduduk miskin terutama pada periode 2017-2020. Namun pada tahun 2021 menunjukkan pola kenaikan akibat adanya pandemi covid-19. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur hanya sebanyak 950 jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hanya sebesar 190 jiwa per tahunnya. Angka ini masih menunjukkan perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga dibutuhkan Langkah-langkah strategis dan konkrit dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Walaupun secara umum dapat dikatakan bahwa upaya penurunan jumlah penduduk miskin sudah efektif.

d. Relevansi:

- Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Tren dan pola perubahan antara capaian jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dapat dikatakan cukup beriringan. Atau dapat dikatakan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur relevan dengan capaian Persentase Penduduk Miskin.

### 3.1.5 Garis Kemiskinan

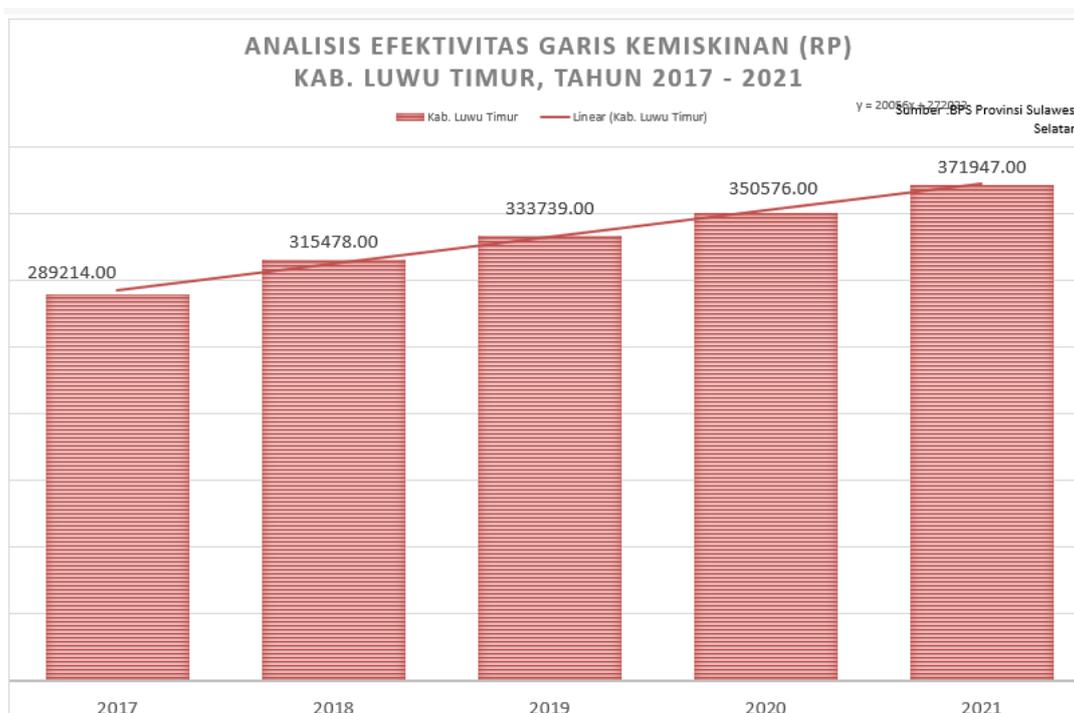
Gambar 3.17 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Prov Sulsel Tahun 2021



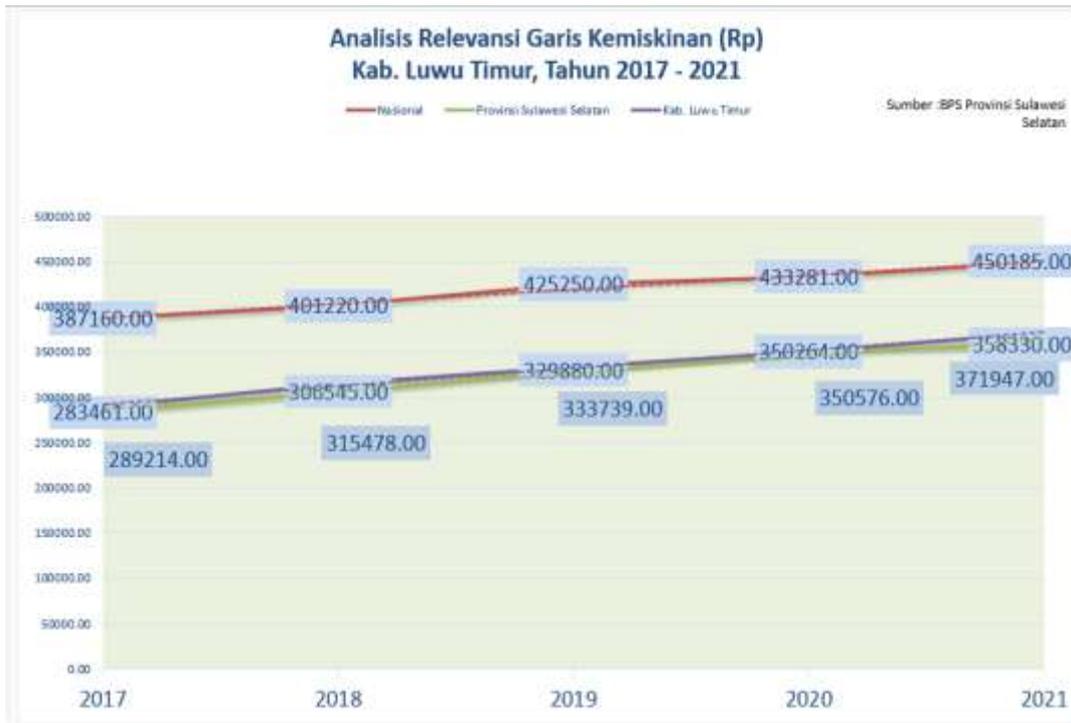
Gambar 3.18 Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.19 Analisis Efektivitas Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.20 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi karakteristik Garis Kemiskinan :

a. Posisi Relatif:

- Pada tingkat Kab/Kota terdapat 1 kab/kota yang garis kemiskinannya di atas Nasional, terdapat 16 kab/Kota yang garis kemiskinannya di atas Provinsi Sulawesi selatan dan di bawah nasional salah satunya adalah Kabupaten Luwu Timur, sisanya sebanyak 7 kab/kota berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Sulawesi selatan dan nasional.
- Posisi relatif Kabupaten Luwu Timur di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan adalah berada pada posisi ke-8 tertinggi dengan angka Rp 371.947,- Posisi terendah di tempati Kabupaten Soppeng dengan angka Rp 341.484,- dan posisi tertinggi di tempati oleh Kota Makassar dengan angka Rp 475.444,-

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode Tahun 2017-2021, Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari Rp 289.214,- di tahun 2017 terus meningkat menjadi Rp 371.947,- di tahun 2021.
- Apabila dilihat pada tren ataupun pola laju pertumbuhan garis kemiskinan,

pada periode 2017-2021 menunjukkan pola kenaikan yang konsisten.

c. Efektivitas:

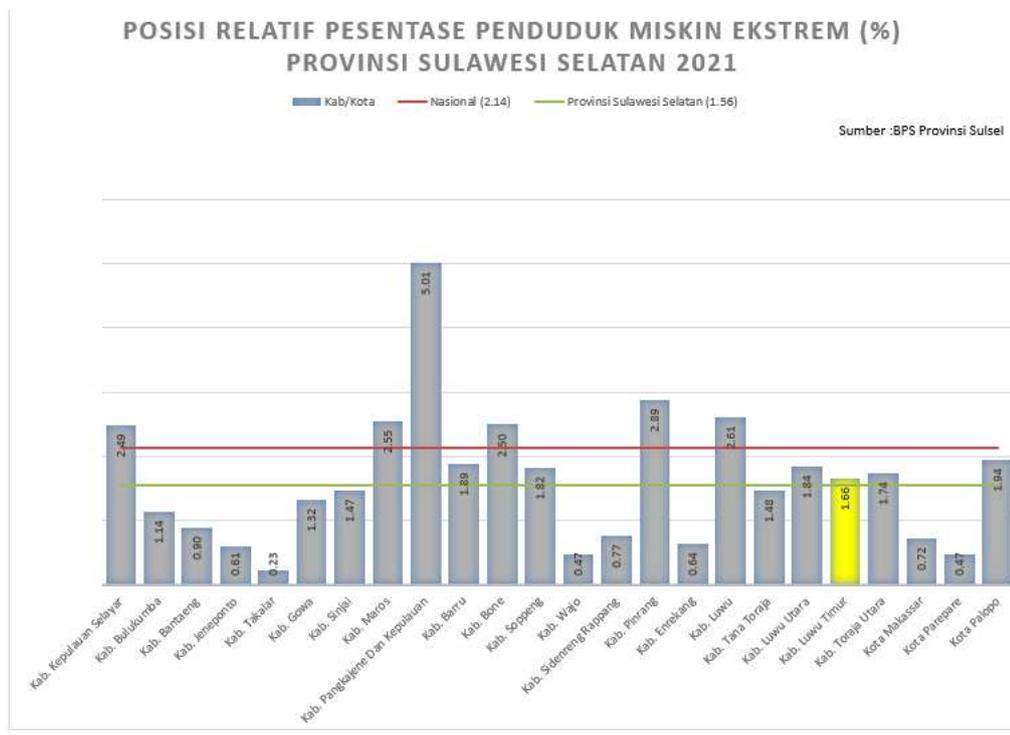
- Pada Periode tahun 2017–2021, laju pertumbuhan garis kemiskinan begitu konsisten mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh harga dari komoditi yang di konsumsi masyarakat juga menunjukkan kenaikan harga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya penurunan garis kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemkab masih belum efektif.

d. Relevansi:

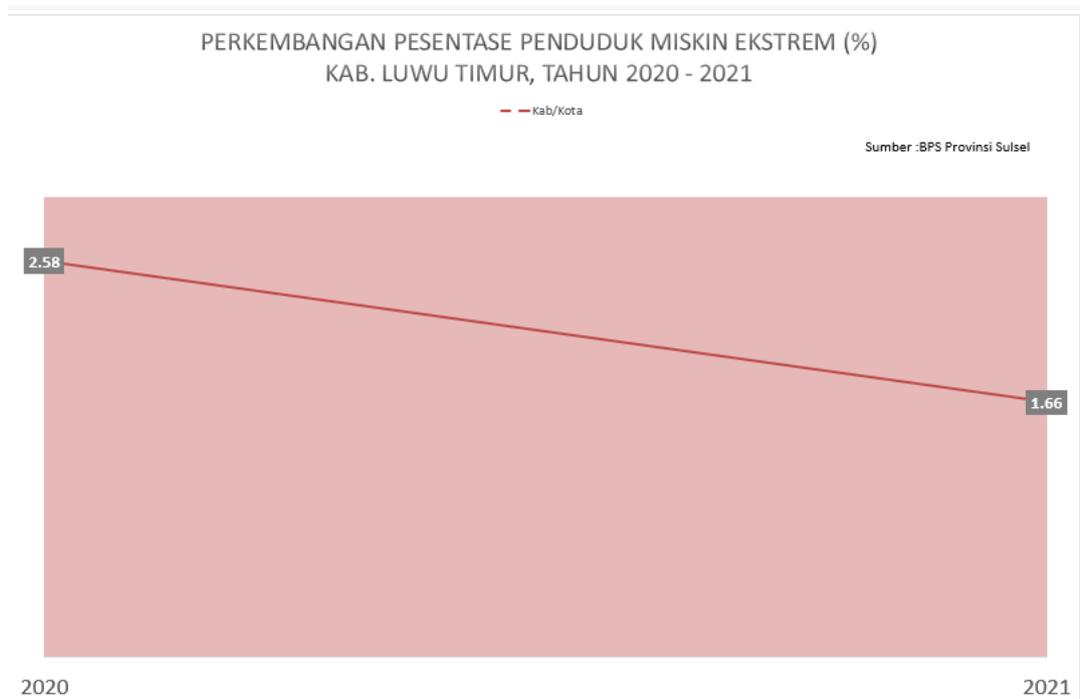
- Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Secara Tren dan pola perubahan antara garis kemiskinan ketiganya dapat dikatakan sangat beriringan, artinya pola kenaikannya hampir sama antara Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, yang berbeda hanya besaran angka dan perubahannya di setiap tahunnya. Jadi hubungan ketiganya relevan.

### 3.1.6 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem

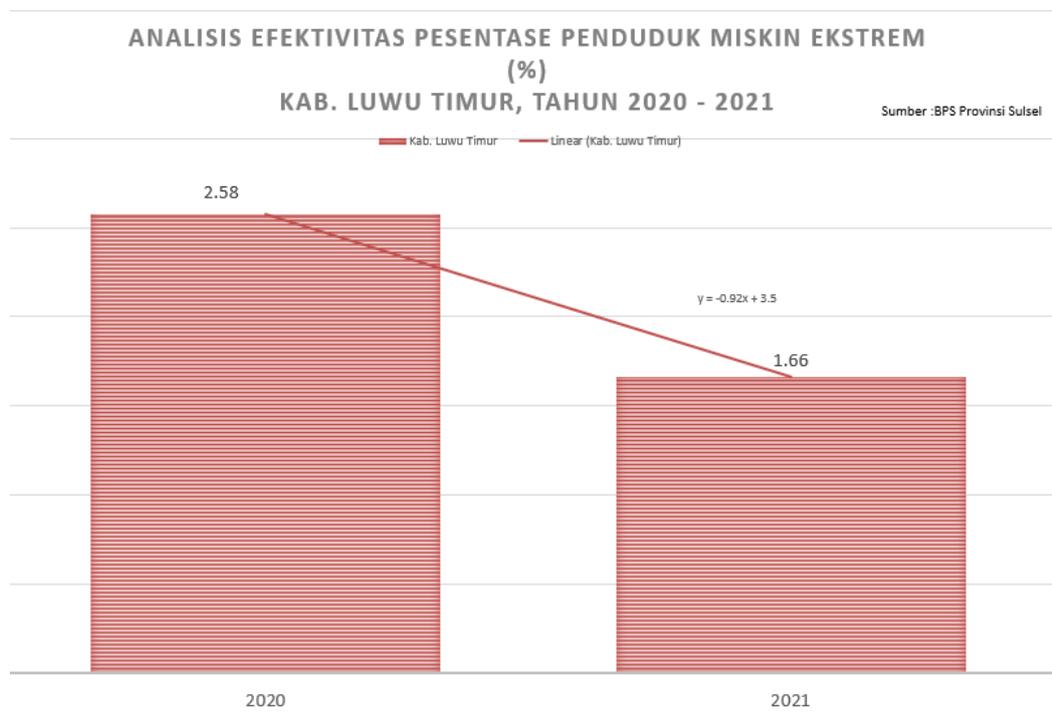
Gambar 3.21 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021



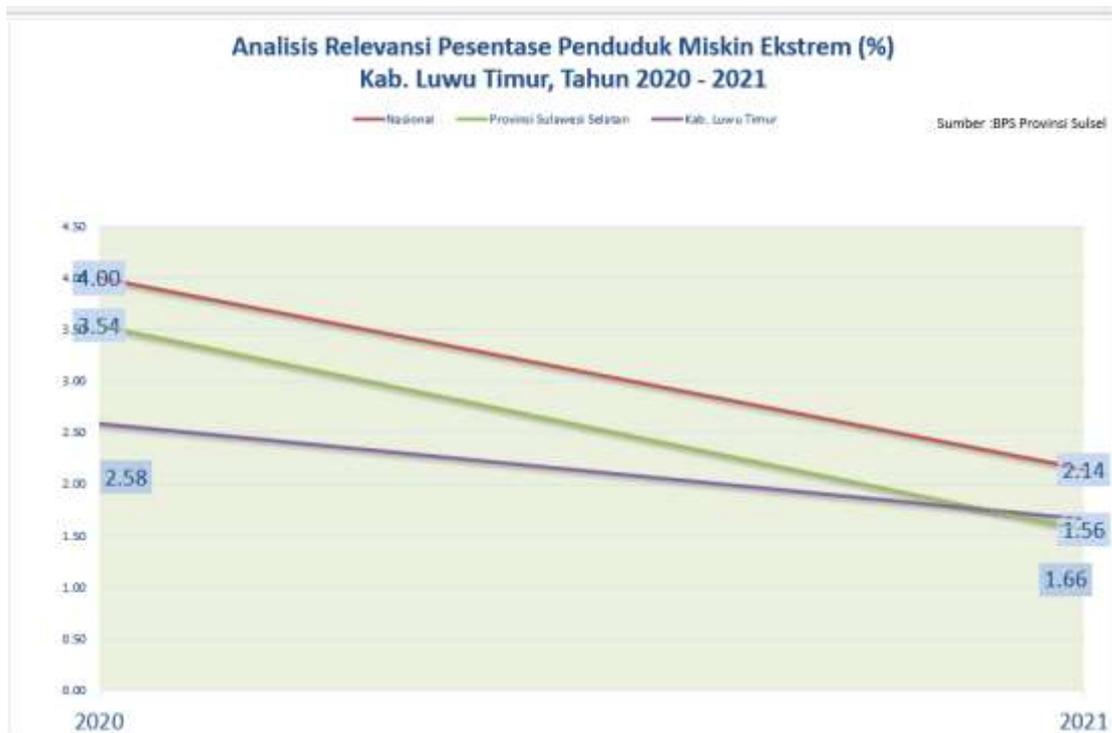
Gambar 3.22 Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2021



Gambar 3.23 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2021



Gambar 3.24 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2021



Gambaran Kondisi Kemiskinan Ekstrem (<1,9\$ PPP) Tahun 2020-2021 Kabupaten Luwu Timur:

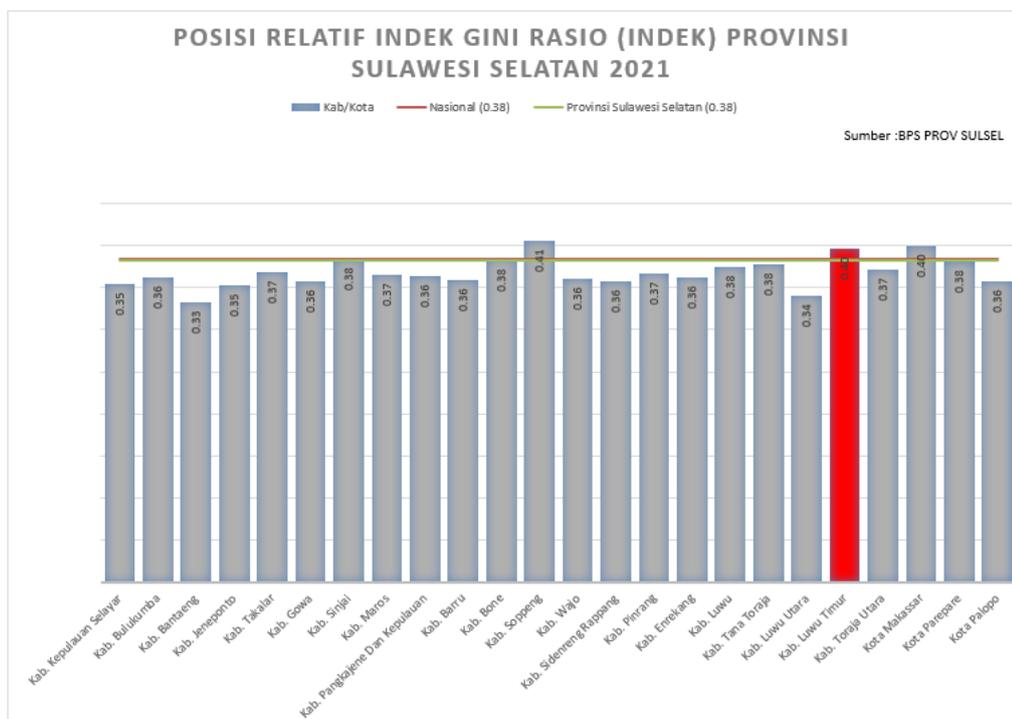
- ✓ Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan eskترم setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu.
- ✓ Berdasarkan Data Tahun 2021, Secara Persentase Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi selatan mencapai 3,54%. Angka tersebut berada dibawah rata-rata Nasional yang sebesar 4,00%. Kondisi ini menempatkan Provinsi Sulawesi selatan pada peringkat ke-17 secara nasional atau peringkat ke-5 terendah di Sulawesi.
- ✓ Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 6 Kab/Kota yang kondisinya diatas tingkatkemiskinan ekstrim Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional, sementara 6 kabupaten termasuk Kabupaten Luwu Timur berada diatas angka provinsi namun sudah dibawah Nasional, sedangkan sebanyak 12 Kab/Kota telah berada dibawah angka Provinsi Sulawesi selatan maupunNasional.
- ✓ Perkembangan antar waktu Persentase tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020 sampai 2021 menunjukkan penurunan angka capaian, dari

2.58% menjadi 1.66%.

- ✓ Penurunan angka capaian dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0.92% menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur sudah efektif.
- ✓ Berdasarkan tren sejak tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan relevansi penurunan capaian Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional. Sehingga dapat disimpulkan jika capaian ketiganya relevan.

### 3.1.7 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)

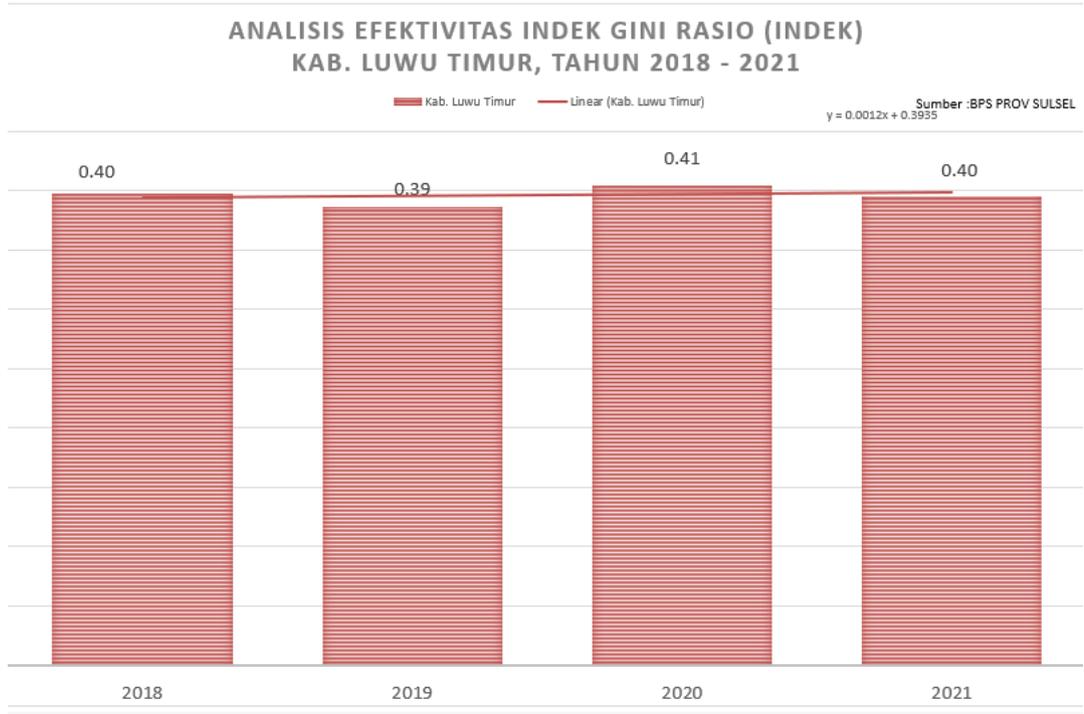
Gambar 3.25 Posisi Relatif Indeks Gini Ratio Prov Sulsel Tahun 2021



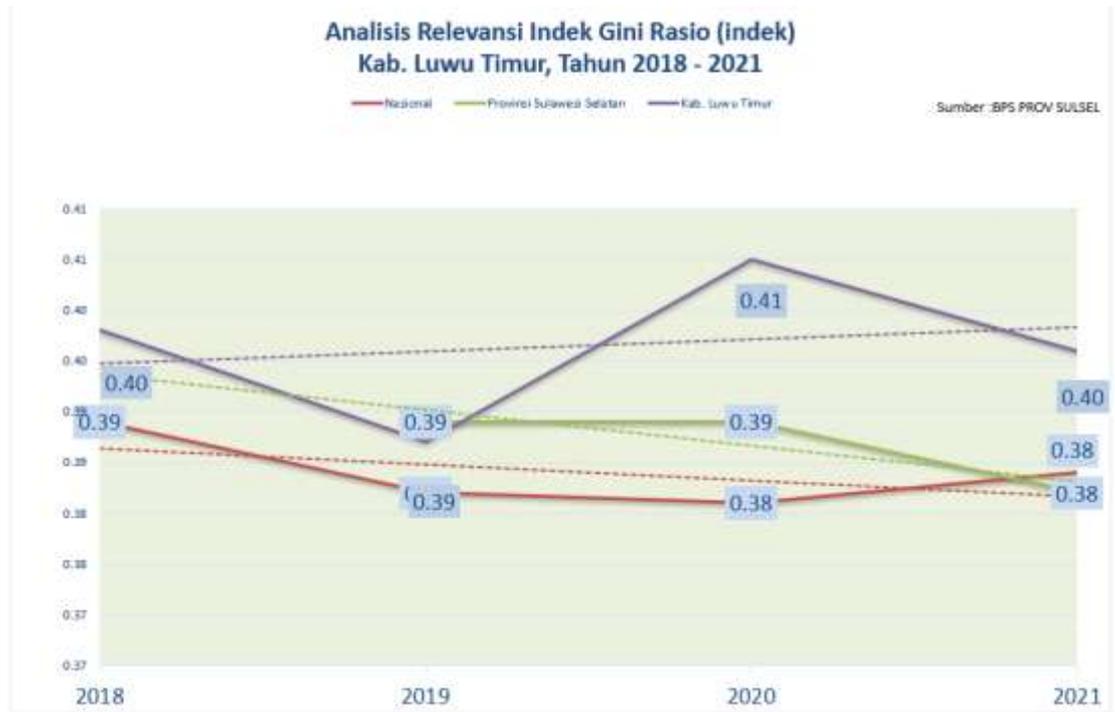
### 3.26 Perkembangan Antar Waktu Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 - 2021



Gambar 3.27 Analisis Efektivitas Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2020



Gambar 3.28 Analisis Relevansi Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2020



Kondisi Karakteristik Masalah Ketimpangan Pengeluaran :

a. Posisi Relatif:

- ✓ Pada Tahun 2021 tingkat ketimpangan pengeluaran (*Gini Ratio*) Kabupaten Luwu Timur sebesar 0.40 berada pada posisi ke-3 tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaiannya Lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang hanya sebesar 0.38
- ✓ Target ketimpangan pengeluaran (*Gini Ratio*) Kabupaten Luwu Timur pada RPJMD 2021–2026 yaitu 0,217 di tahun 2026.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- ✓ Pada Periode tahun 2018-2021 tingkat ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Luwu Timur mengalami perkembangan yang fluktuatif dan tidak terjadi penurunan karena capaian di tahun 2018 angkanya 0.40 menurun di tahun 2019 menjadi 0.39, naik di tahun 2020 menjadi 0.41 dan Kembali menjadi 0.40 di tahun 2021.
- ✓ Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2018-2021 menunjukkan Tren peningkatan meskipun angkanya capaian di awal dan akhirnya sama.

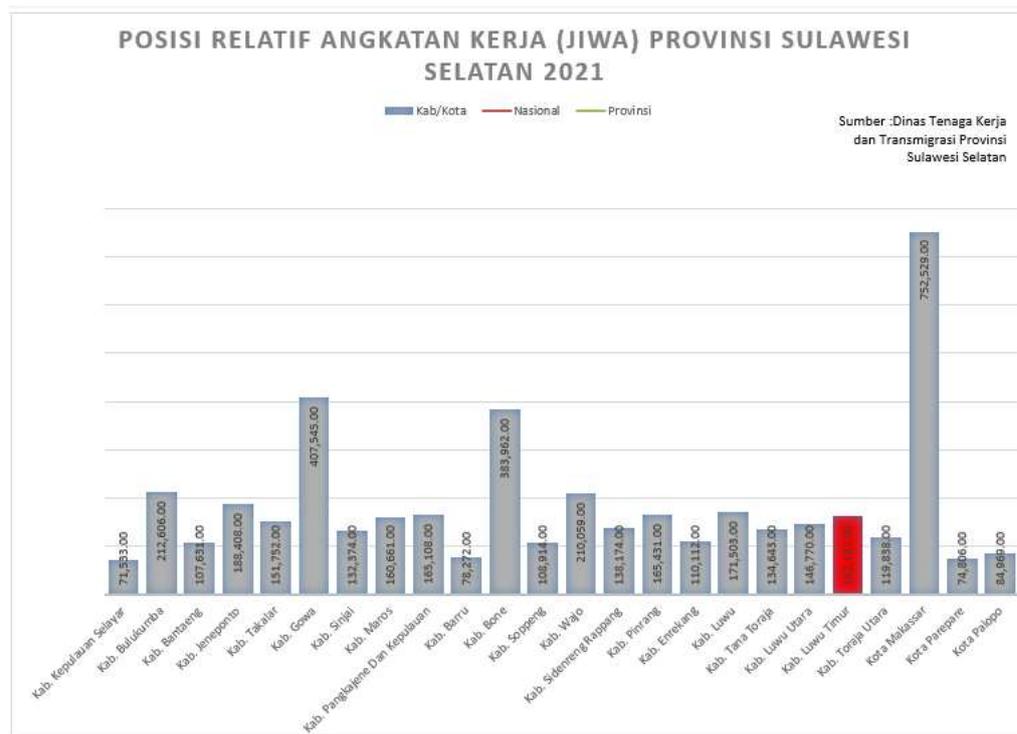
c. Efektivitas:

- ✓ Pada Periode tahun 2018–2021, tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami tren peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemkab Luwu Timur belum efektif dalam menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran.
- d. Relevansi:
- ✓ Pada tahun 2018 hingga tahun 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Secara Tren dan pola perubahan antara ketiganya dapat dikatakan tidak beriringan, artinya pola kenaikannya tidak sama antara Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, jadi hubungan ketiganya tidak relevan

### 3.2 Bidang Ketenagakerjaan

#### 3.2.1 Angkatan Kerja

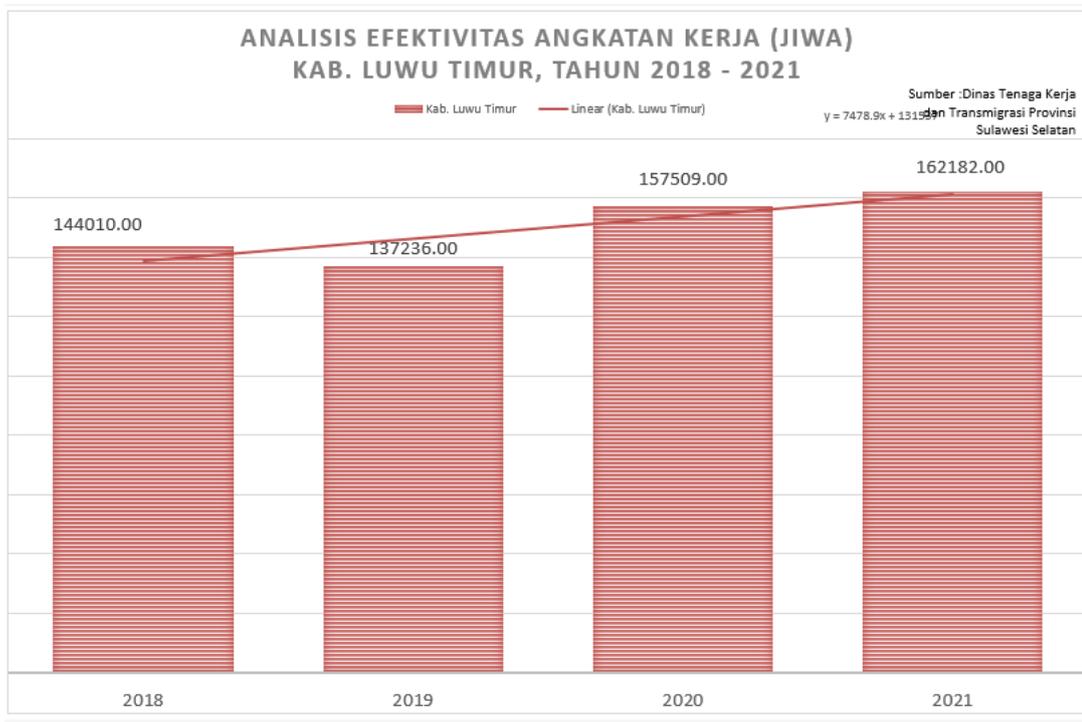
Gambar 3.29 Posisi Relatif Angkatan Kerja Provinsi Sulsel Tahun 2021



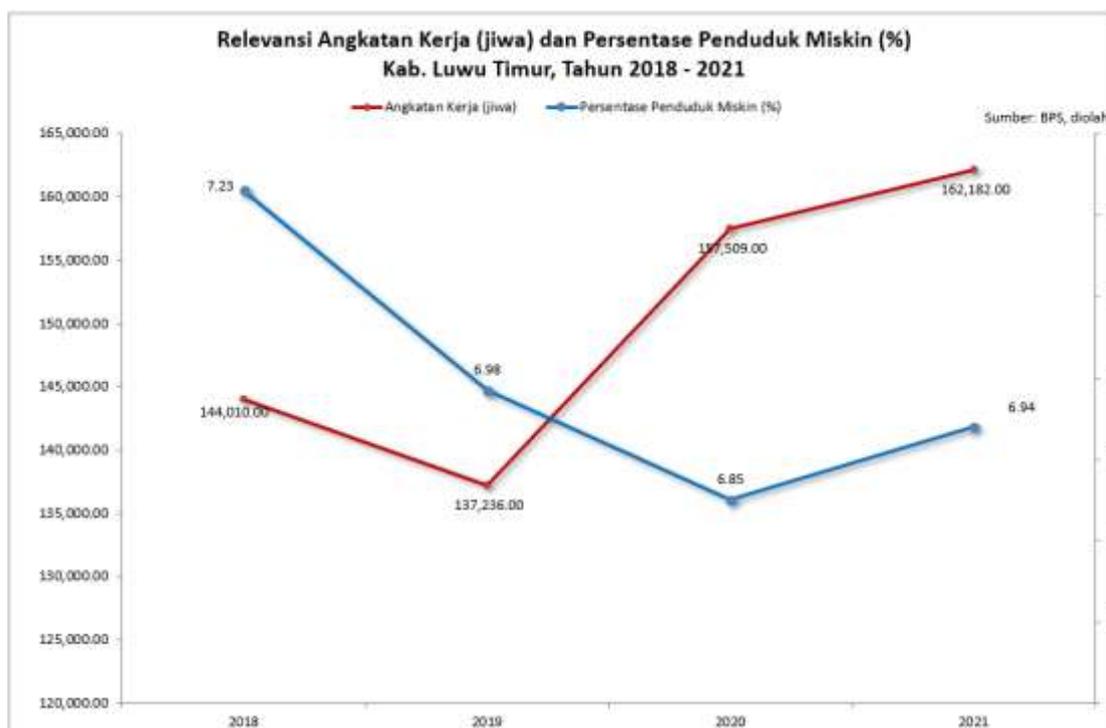
Gambar 3.30 Perkembangan Antar Waktu Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.31 Analisis Efektivitas Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.32 Analisis Relevansi Angkatan Kerja dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Kondisi Karakteristik Angkatan Kerja :

a. Posisi Relatif:

- ✓ Pada Tahun 2021 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi selatan sebanyak 4.412.782 jiwa. Posisi pertama ditempati oleh Kota Makassar dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 752.529 jiwa dan posisi terendah di Kab Kepulauan Selayar sebanyak 71.533 jiwa. Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-10 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 162.182 jiwa.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- ✓ Pada Periode tahun 2018-2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 144.010 jiwa menjadi 162.182 jiwa. Perkembangan angka capaiannya cenderung konsisten tiap tahunnya mengalami kenaikan. Walaupun pernah mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 137.236 jiwa namun meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2021.

c. Efektivitas:

- ✓ Pada Periode 2018-2021, jumlah angkatan kerja mengalami tren yang fluktuatif menunjukkan kenaikan jumlah capaian, kondisi pandemi covid-19 ternyata tidak merubah pola perubahan angkatan kerja di periode Agustus 2020 yang harusnya terjadi

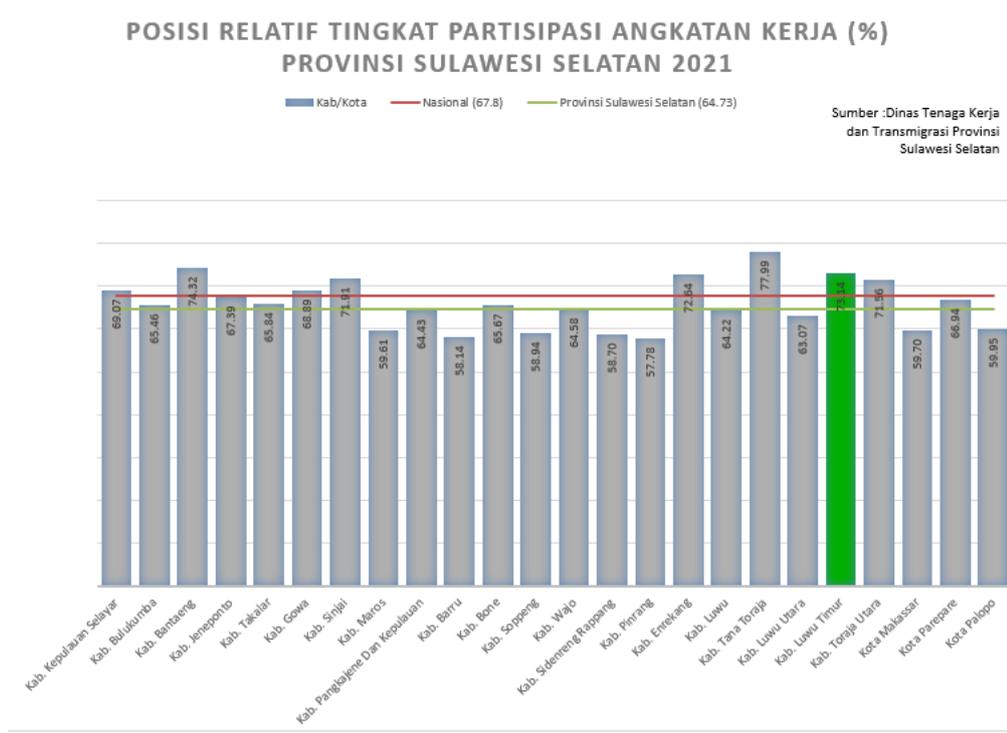
penurunan, namun justru mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk peningkatan capaian jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur cukup efektif.

d. Relevansi:

- ✓ Tren dan pola perubahan antara capaian Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Persentase penduduk miskin dapat dikatakan tidak beriringan, karena Persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan sejak 2018 sampai 2021 sementara capaian Angkatan kerja mengalami kenaikan di periode tersebut. Tetapi ini merupakan capaian yang berkesesuaian. Idealnya semakin tinggi jumlah Angkatan kerja maka akan semakin mudah menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan hubungan keduanya relevan.

### 3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Gambar 3.33 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulsel Tahun 2021



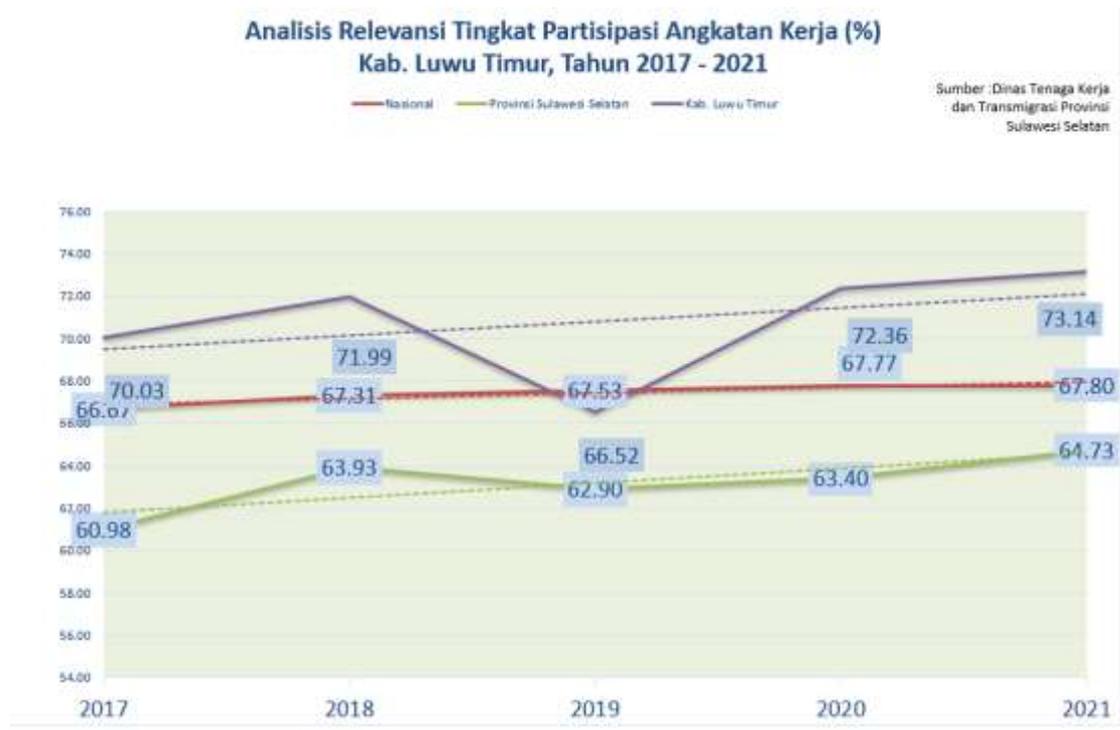
Gambar 3.34 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.35 Analisis Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.36 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) :

a. Posisi Relatif:

- Pada Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi selatan mencapai 64.73%, lebih rendah dari capaian nasional (67.8%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 8 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 4 kab/kota berada di atas Provinsi Sulawesi selatan dan di bawah Nasional. Serta sisanya sebanyak 12 kab/kota lainnya berada dibawah TPAK provinsi dan Nasional.
- Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-3 tertinggi dengan capaian 73.14% di antara 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi di tempati oleh Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 77.99% dan posisi terendah di tempati oleh Kabupaten Pinrang dengan capaian 57.78%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode Tahun 2017-2021, TPAK Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 70.03% menjadi 73.14%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir sebesar 3.11 poin artinya rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0.622%.

c. Efektivitas:

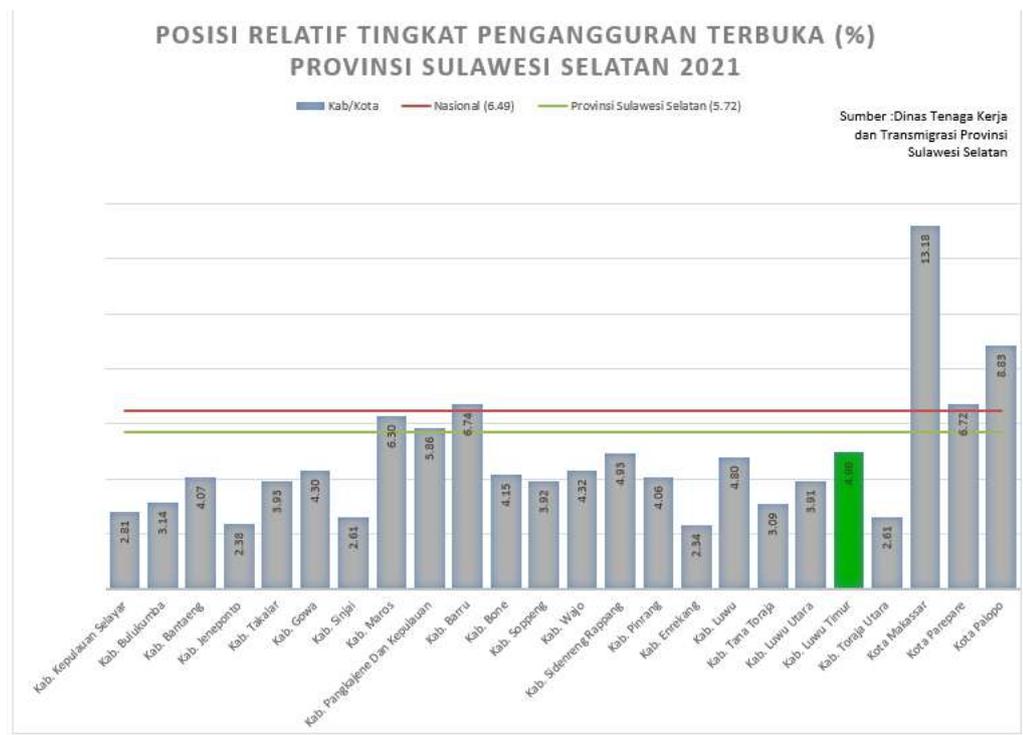
- Dalam 5 tahun terakhir yaitu 2017–2021, TPAK mengalami tren kenaikan yang fluktuatif, kondisi pandemi covid-19 ternyata tidak merubah pola perubahan TPAK di tahun 2020 yang harusnya bisa membuka peluang terjadinya penurunan, namun justru mengalami kenaikan. Ini menunjukkan upaya pemkab untuk menaikkan capaian TPAK sudah efektif.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan pola perkembangan ketiganya relevan.

### 3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

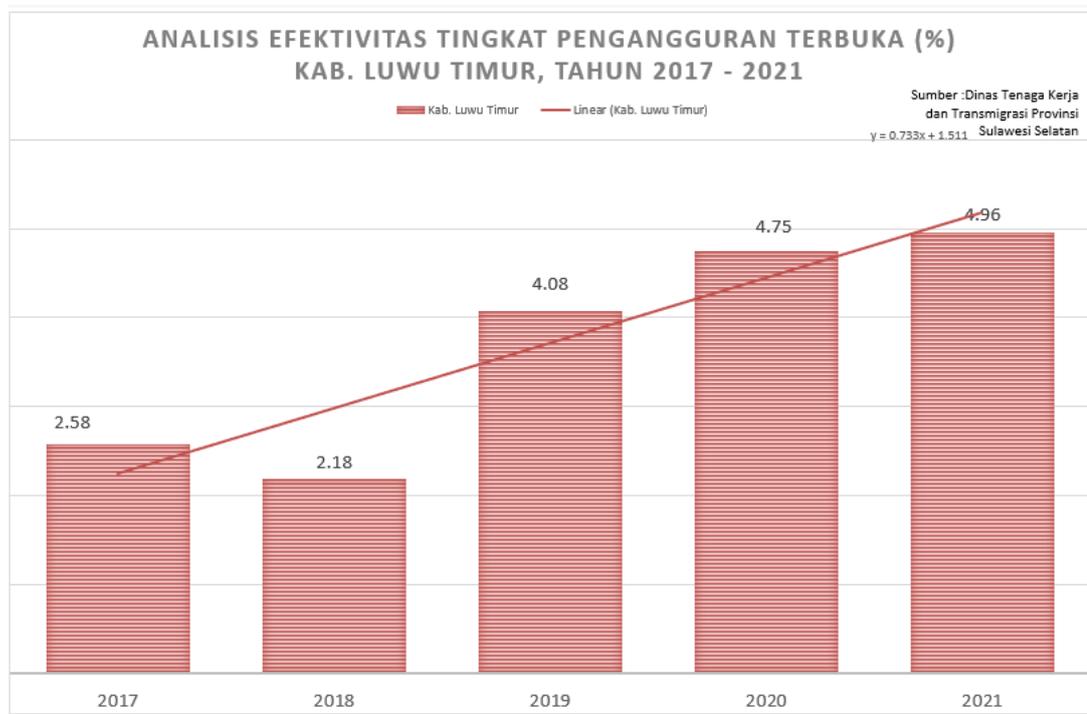
Gambar 3.37 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulsel Tahun 2021



Gambar 3.38 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.39 Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.40 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi selatan mencapai 5.72%, lebih rendah dari TPT nasional (6.49%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 4 Kab/Kota yang kondisi TPT nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. Dan 2 kab/kota berada diatas provinsi namun dibawah Nasional. Sedangkan sisanya sebanyak 18 kab/kota lainnya termasuk Kabupaten Luwu Timur capaiannya sudah dibawah TPT Provinsi Sulawesi selatan maupun Nasional.
- Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 4.96% berada pada posisi ke-7 tertinggi di antara 24 Kab/Kota di Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi pertama ditempati Kota Makassar dengan capaian 13.18% dan posisi terendah di tempati oleh Kabupaten Enrekang dengan capaian 2.34%

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2018, TPT Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 2.58% menjadi 2.18%. Kemudian mengalami kenaikan drastis di tahun 2019 dengan capaian 4.08% dan meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 4.96% di tahun 2021.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, TPT mengalami tren kenaikan yang fluktuatif, secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dinyatakan belum efektif.

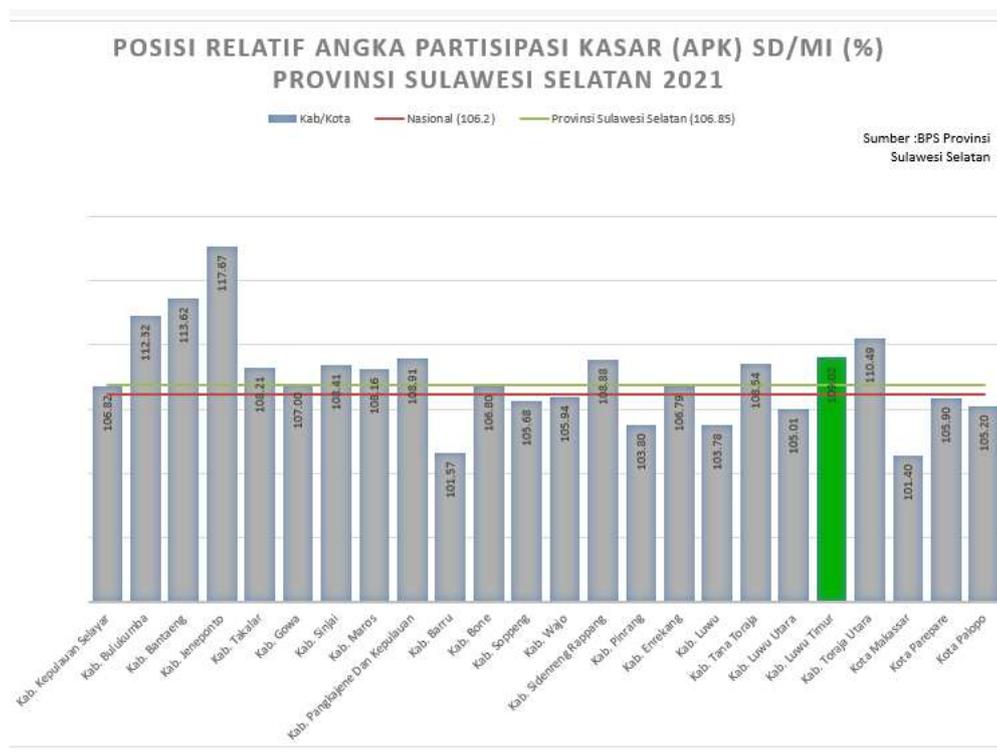
d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian TPT Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

### 3.3 Bidang Pendidikan

#### 3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

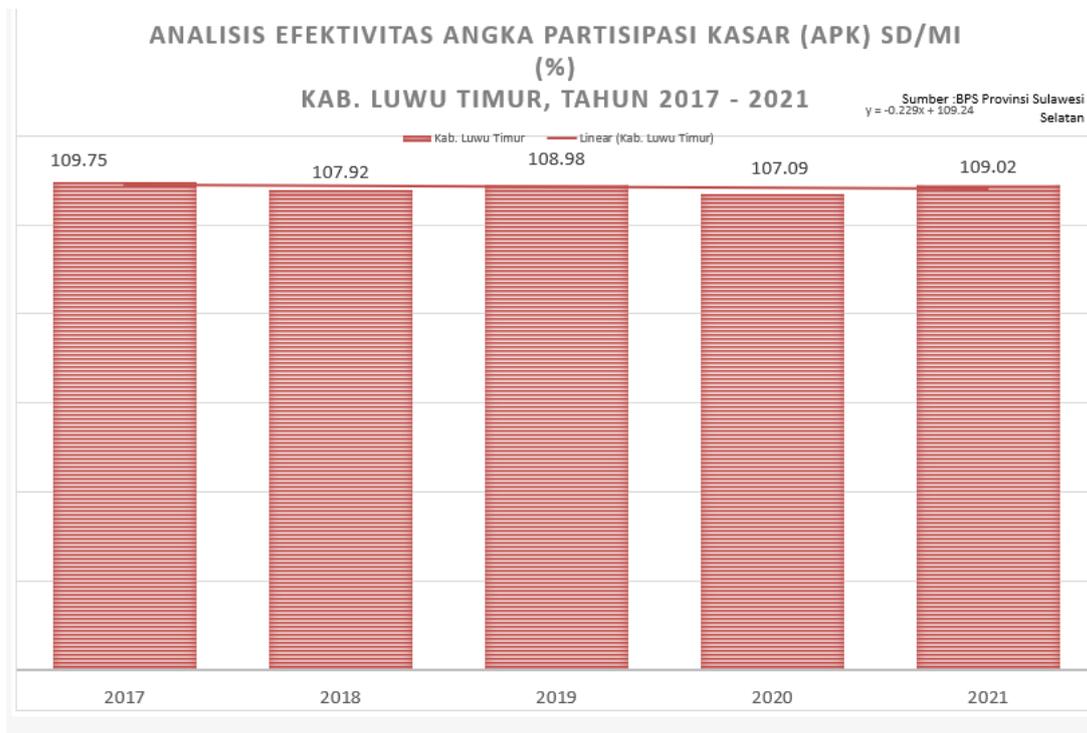
Gambar 3.41 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Prov Sulsel Tahun 2021



Gambar 3.42 Perkembangan Antar Waktu Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.43 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.44 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Sulawesi selatan mencapai 106.85% lebih tinggi dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Nasional (106.2%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 11 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 4 Kab/kota di bawah Provinsi dan di atas capaian Nasional, sementara sisanya ada 9 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-5 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 109.02%. Posisi tertinggi pertama ditempati Kabupaten Jeneponto dengan capaian 117.67% dan posisi terendah ditempati Kota Makassar dengan capaian 101.40%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2018, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 109.75% menjadi 107.92%. Kemudian mengalami kenaikan drastis di di tahun 2019 dengan capaian 108.98% namun Kembali turun di tahun 2020 menjadi 107.09%, lalu meningkat di tahun 2021

menjadi 109.02% capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tren penurunannya fluktuatif.

c. Efektivitas:

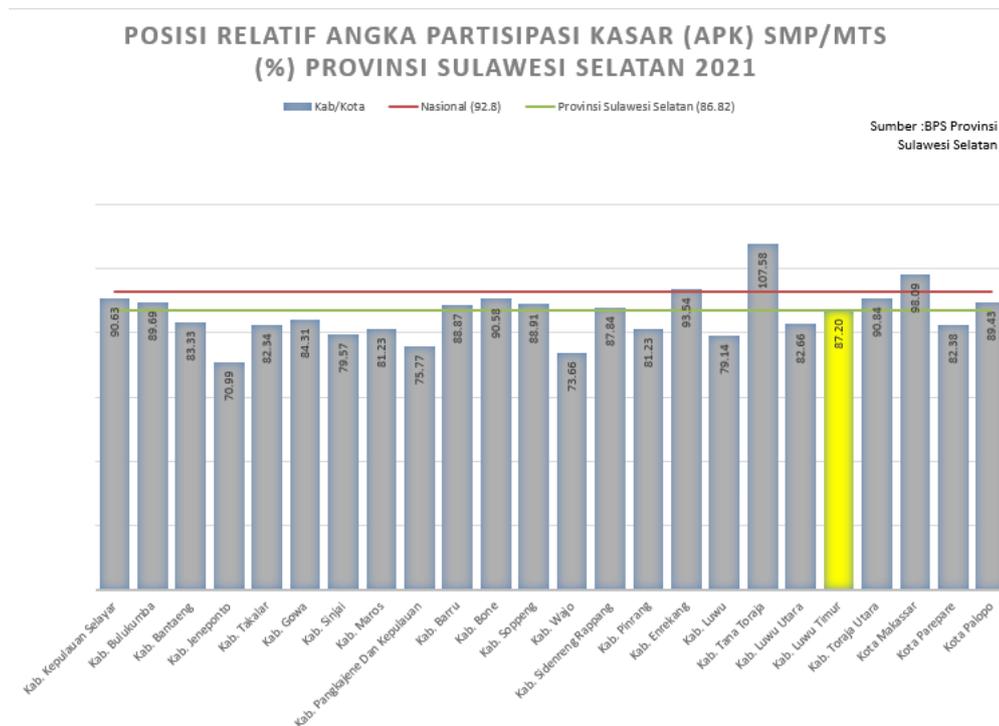
- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mengalami tren yang fluktuatif, namun cenderung menunjukkan tren penurunan. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dinyatakan belum efektif.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

### 3.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

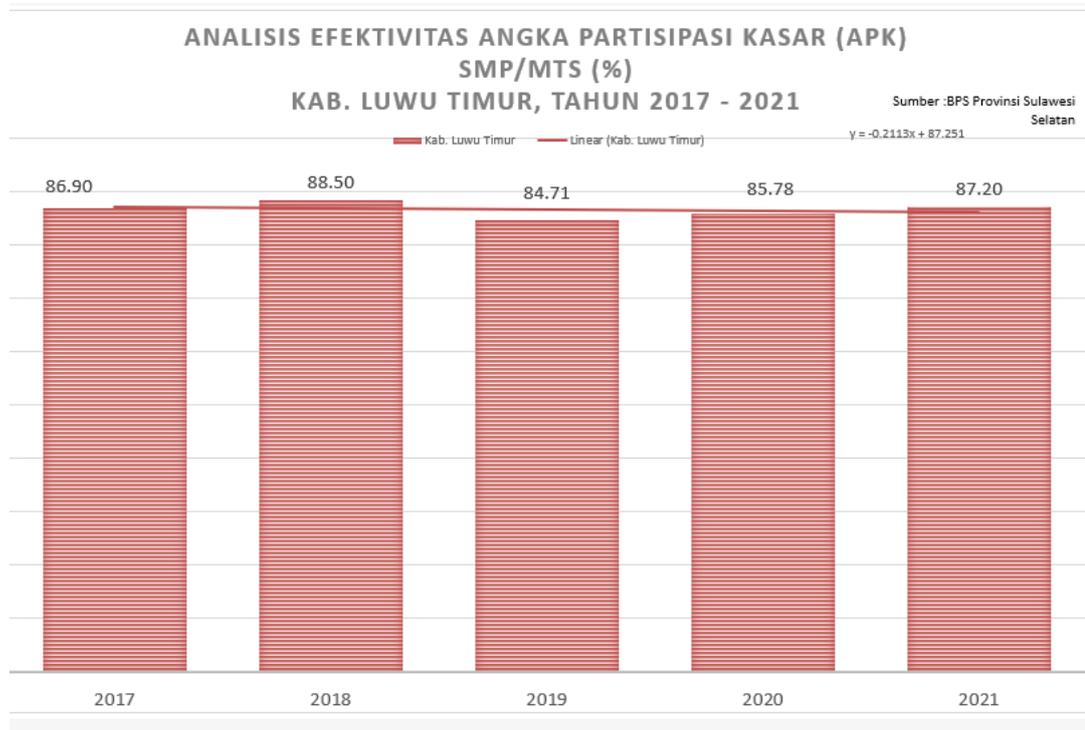
Gambar 3.45 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Prov Sulsel Tahun 2021



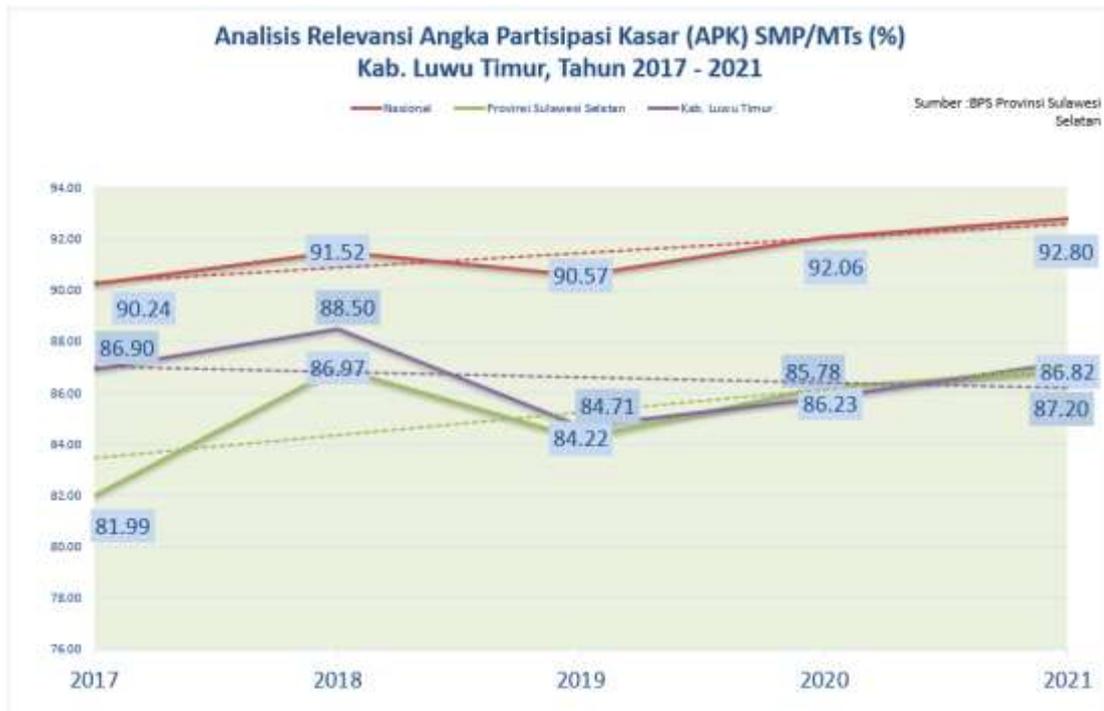
Gambar 3.46 Perkembangan Antar Waktu Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.47 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs



Gambar 3.48 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Provinsi Sulawesi selatan mencapai 88.82% lebih rendah dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Nasional (92.8%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 3 Kab/Kota yang kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs-nya diatas ProvinsiSulawesi selatan dan Nasional. 8 Kab/Kota berada di atas provinsi di bawah capaian Nasional, dan sisanya 13 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 87.20% berada pada posisi ke-12 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi pertama ditempati Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 107.58% dan posisi terendah ditempati Kabupaten Jeneponto dengan capaian 70.99%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 86.90% menjadi 87.20%. Peningkatannya hanya 0.3% selama kurun waktu 5 tahun. Hanya meningkat 0.06% setiap tahunnya.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs mengalami

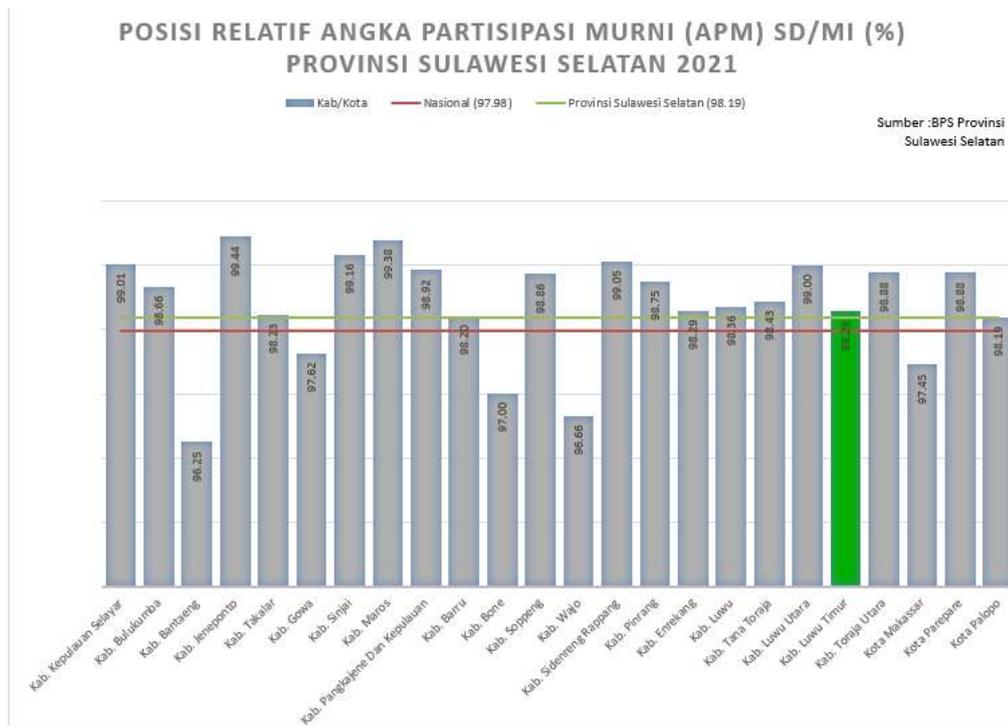
tren yang fluktuatif, namun cenderung menunjukkan tren kenaikan. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dinyatakan cukup efektif namun masih perlu kerja keras untuk meningkatkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

### 3.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

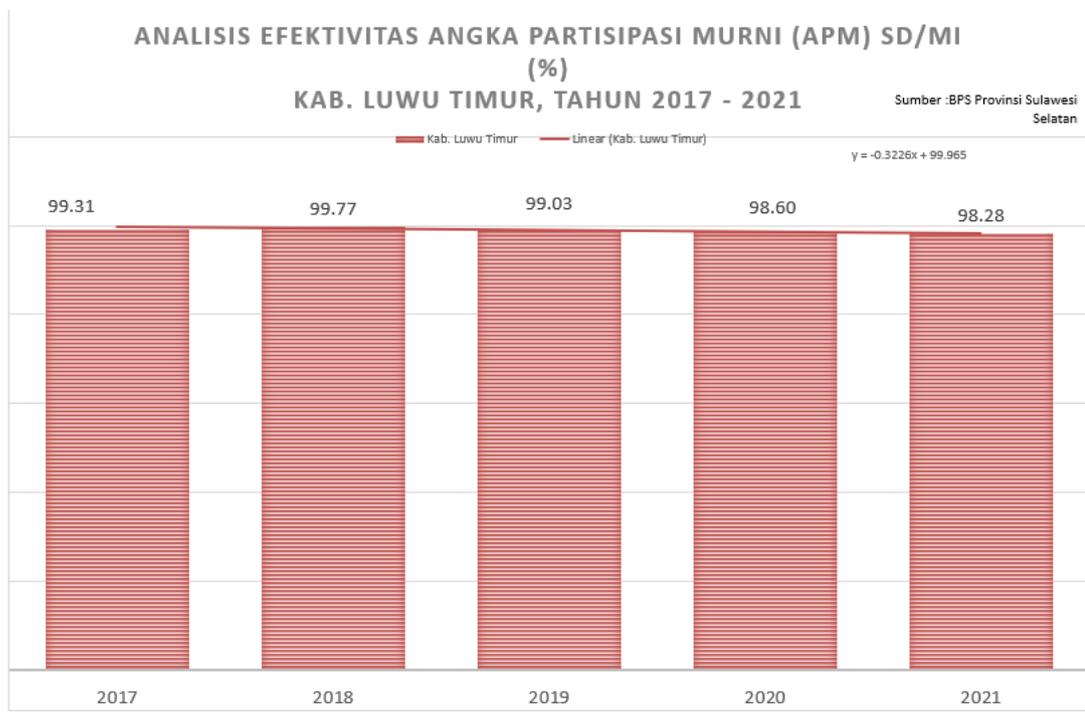
Gambar 3.49 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



Gambar 3.50 Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.51 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.52 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sulawesi selatan mencapai 98.19% lebih tinggi dari Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Nasional (97.98%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 18 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 1 Kab/Kota yang capaiannya sama dengan Provinsi tapi di atas capaian Nasional, sisanya sebanyak 5 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 98.28% menempati posisi ke-16 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan capaian 99.44%, dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Bantaeng dengan capaian 96.25%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 99.31% menjadi 98.28%. Penurunannya sebesar 1.03% selama 5 tahun, setiap tahunnya kurang lebih menurun sebanyak 0.206%.

c. Efektivitas:

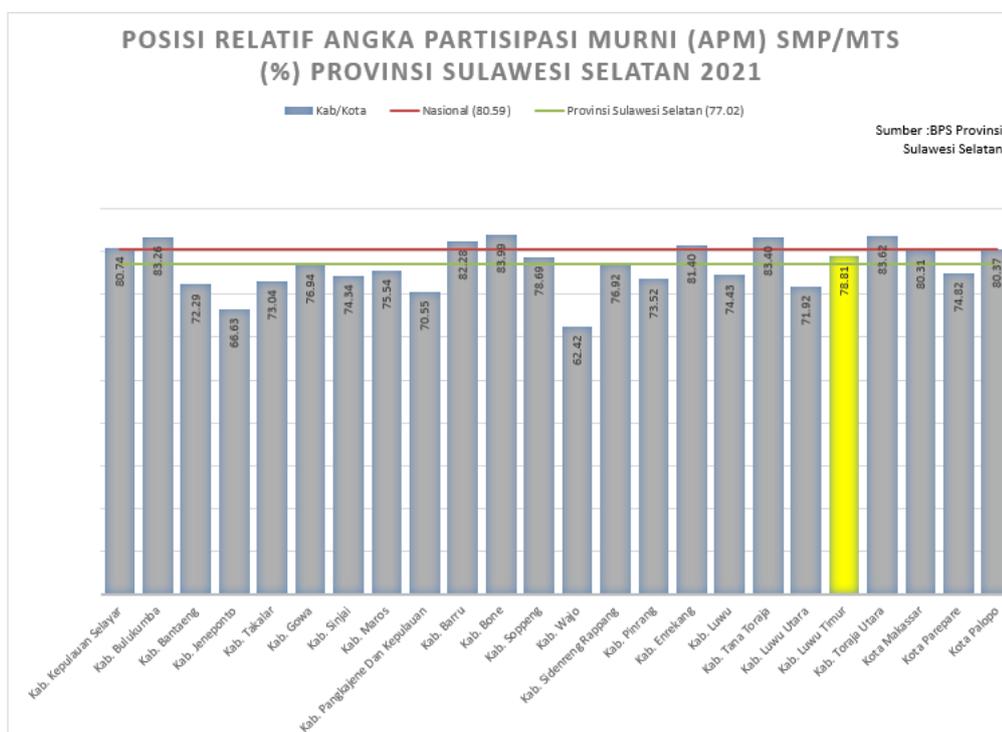
- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mengalami tren penurunan yang fluktuatif. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dinyatakan belum efektif masih sangat dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya di tahun-tahun mendatang.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan tidak beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya tidak relevan.

### 3.3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Gambar 3.53 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



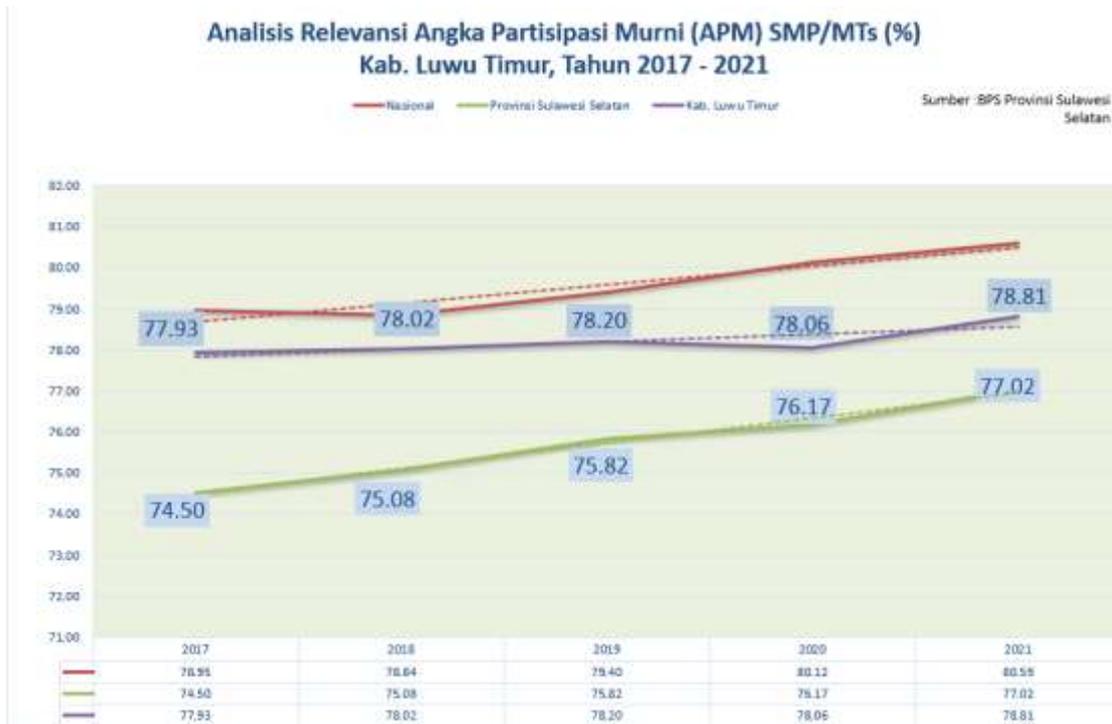
Gambar 3.54 Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.55 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.56 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Sulawesi selatan mencapai 77.02% lebih tinggi dari Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Nasional (80.59%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 6 kab/kota yang kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 5 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang capaiannya di bawah Nasional di atas Provinsi. Sisanya sebanyak 13 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-9 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 78.81%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Bone dengan capaian 83.99% dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Wajo dengan capaian 62.43%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 77.93% menjadi 78.81%. Sejak 2017 kenaikannya cenderung konsisten sampai tahun 2019, dan sedikit menurun di

tahun 2020 menjadi 78.06% namun meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 78.81%

c. Efektivitas:

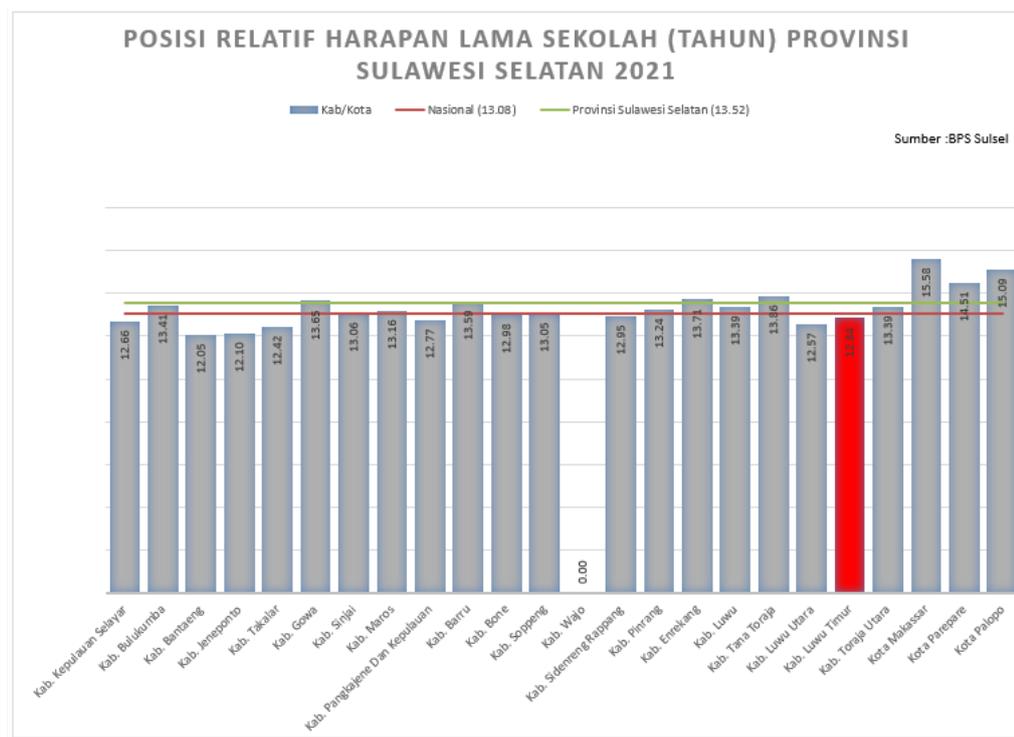
➤ Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs mengalami tren kenaikan yang fluktuatif. Dari 77.93% di tahun 2017 menjadi 78.81% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 0.88% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

➤ Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga 2021, jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

### 3.3.5 Harapan Lama Sekolah

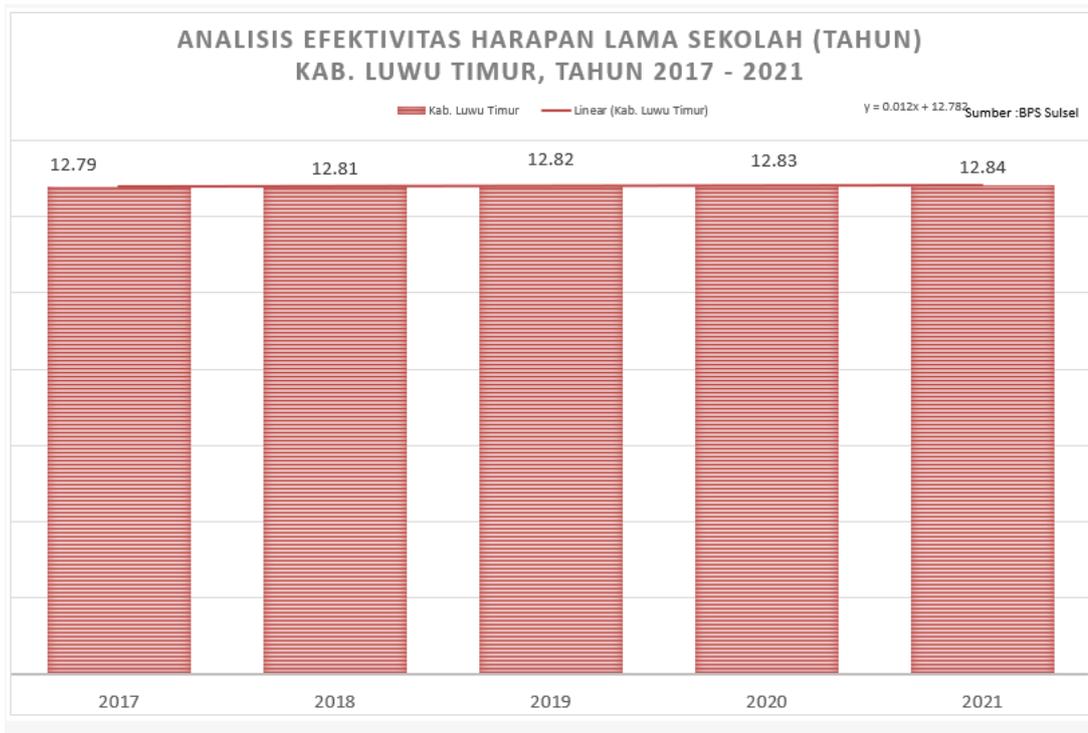
Gambar 3. 57 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Prov Sulsel Tahun 2021



Gambar 3. 58 Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3. 59 Analisis Efektivitas Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.60 Analisis Relevansi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Harapan Lama Sekolah :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi selatan mencapai 13.57 tahun lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Nasional (13.08 tahun). Pada tingkat kab/kota, terdapat 6 kab/kota yang kondisi Harapan Lama Sekolah-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 5 kab/kota di bawah provinsi dan di atas capaian Nasional. Sisanya 13 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi 13 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 12.84 tahun. Posisi pertama tertinggi ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 15.58 tahun dan posisi terendah di tempati oleh Kabupaten Bantaeng dengan capaian 12.05 tahun.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 12.79 tahun menjadi 12.84 tahun. Sejak 2017 kenaikannya cenderung konsisten sampai tahun 2021.

c. Efektivitas:

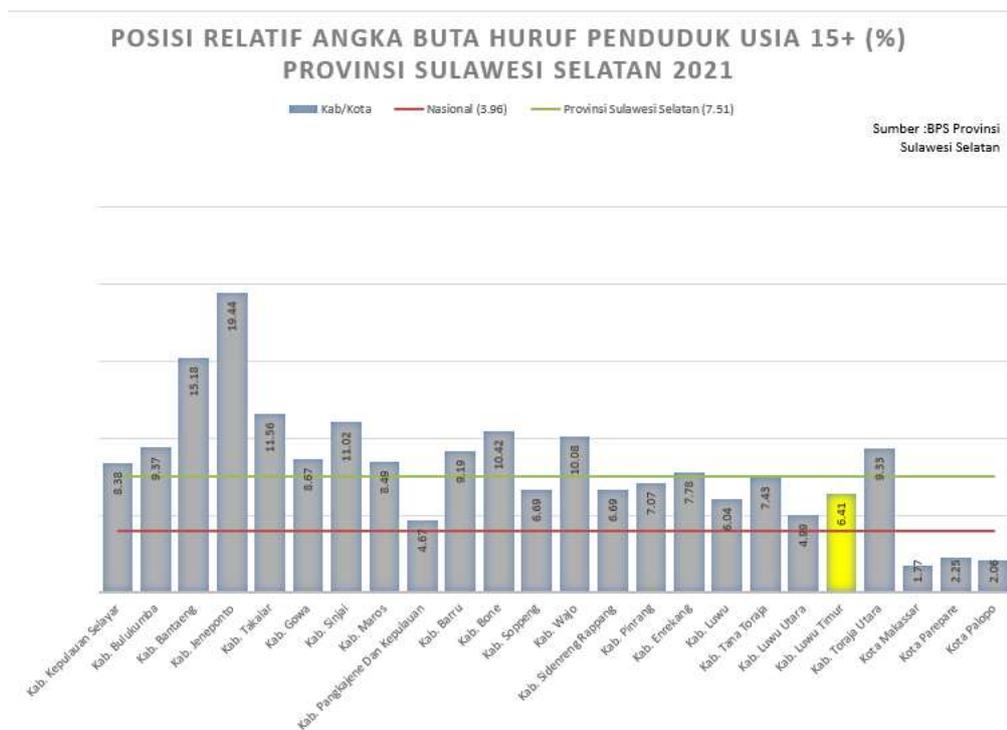
- Pada Periode tahun 2017–2021, Harapan Lama Sekolah mengalami tren kenaikan yang konsisten. Dari 12.79 tahun menjadi 12.84 tahun di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 0.05 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

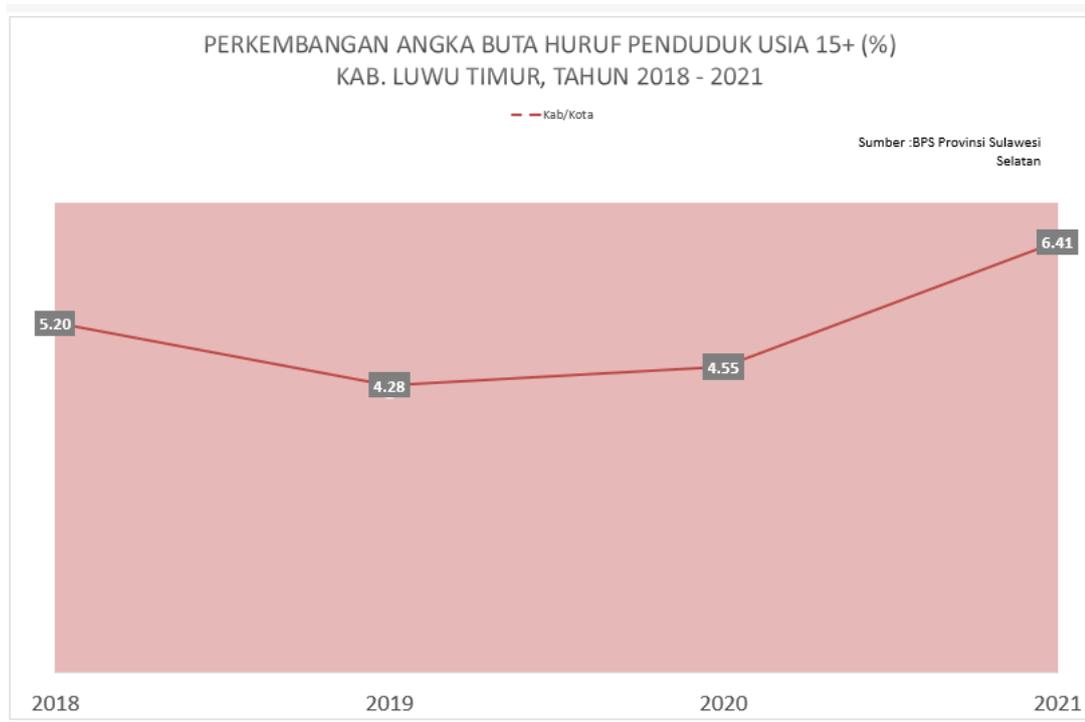
- Tren dan pola perubahan antara capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

### 3.3.6 Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+

Gambar 3. 61 Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Prov Sulsel Tahun 2021



Gambar 3. 62 Perkembangan Antar Waktu Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.63 Analisis Efektivitas Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.64 Analisis Relevansi Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Kondisi Karakteristik Angka Buta Huruf Penduduk 15+ :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Provinsi Sulawesi selatan mencapai 7.51% lebih tinggi dari Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Nasional (3.96%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 13 kab/kota yang kondisi Angka Buta Huruf Penduduk 15+-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 8 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur capaiannya di bawah Provinsi dan di atas capaian Nasional. Sisanya hanya 3 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-7 terendah di antara 24 kan/kota di Sulawesi Selatan dengan capaian 6.41%. Posisi pertama terendah ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 1.77% dan posisi tertinggi ditempati Kabupaten Jeneponto dengan capaian 19.44%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2021, Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 5.20% menjadi 6.41%. walaupun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sampai ke angka 4.55% namun akhirnya mengalami kenaikan drastis di tahun 2021 menjadi 6.41%.

c. Efektivitas:

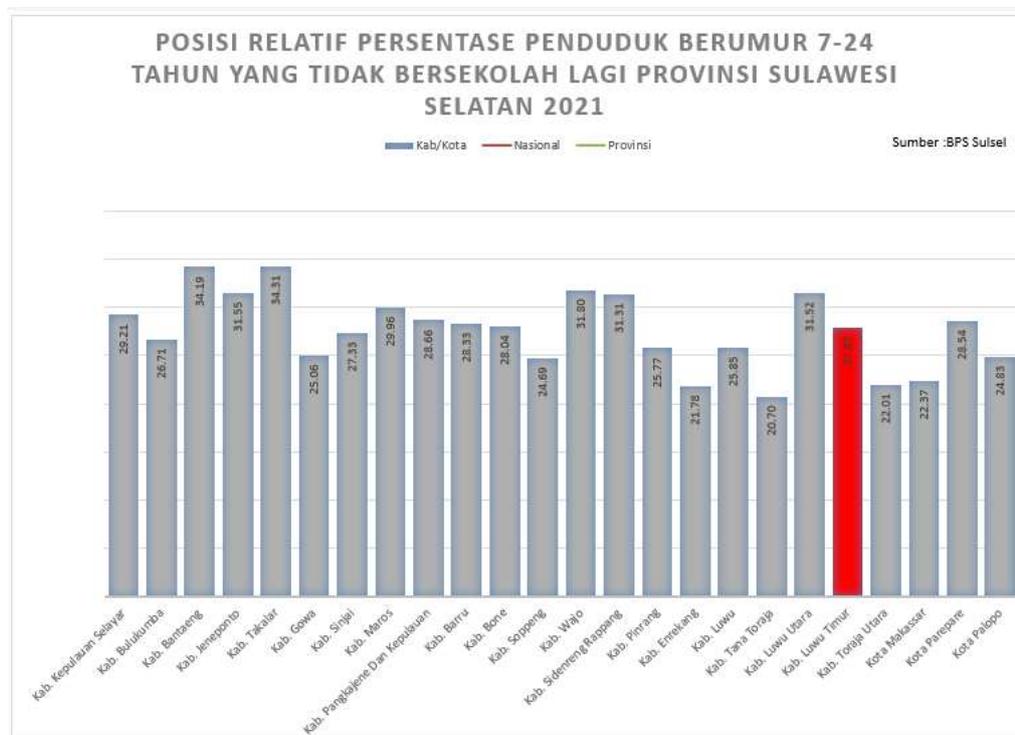
- Pada Periode tahun 2018–2021, Angka Buta Huruf Penduduk 15+ mengalami tren peningkatan yang fluktuatif. Dari 5.20% menjadi 6.41% di tahun 2021, ini menunjukkan upaya penurunan yang belum maksimal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Buta Huruf Penduduk 15+ dinyatakan tidak efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan tidak beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Karena capaian Provinsi dan Nasional mengalami tren penurunan sementara Kabupaten Luwu Timur mengalami tren kenaikan. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya tidak relevan.

### 3.3.7 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Sudah Tidak Bersekolah lagi

Gambar 3.65 Posisi Relatif Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Prov Sulsel Tahun 2021



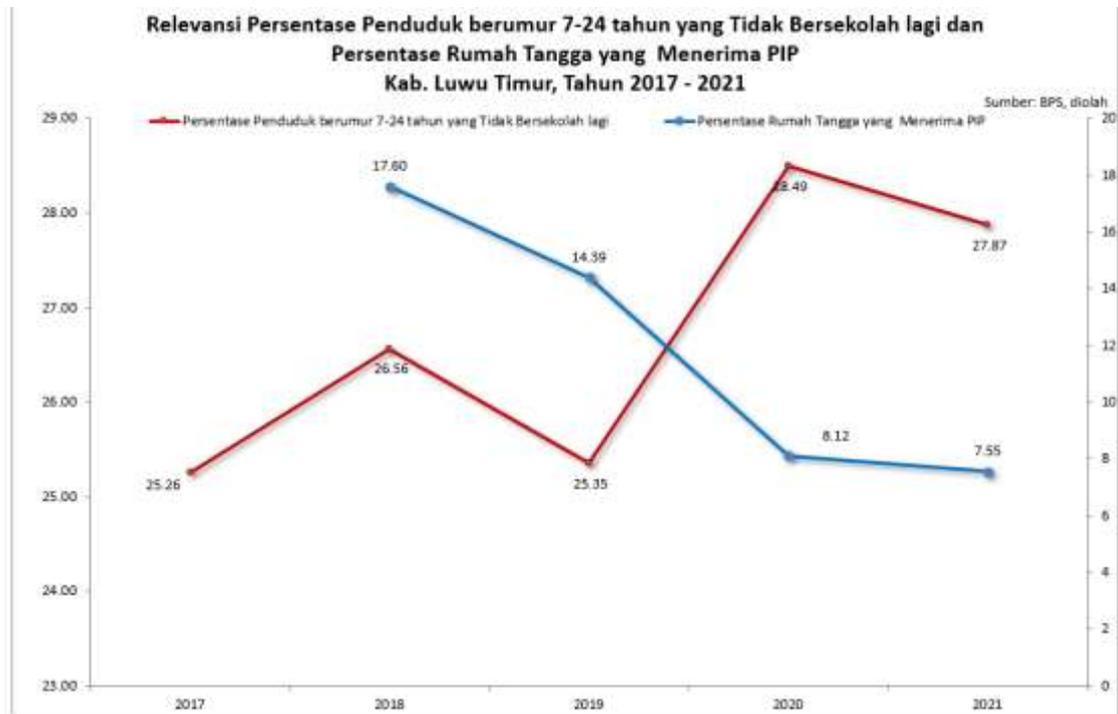
Gambar 3.66 Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.67 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.68 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi dan Persentase Rumah Tangga yang Menerima PIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi Provinsi Sulawesi selatan mencapai 26.71%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 14 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi diatas Provinsi Sulawesi selatan dan 1 Kabupaten sama dengan capaian provinsi. Serta sisanya hanya 9 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-12 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 27.87%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Takalar dengan capaian 34.31%, posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 20.70%

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah di Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 25.26% menjadi 27.87%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi mengalami tren kenaikan yang fluktuatif. Dari 25.26% menjadi 27.87% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang idealnya harus diturunkan. Angka kenaikannya sebesar 2.61 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

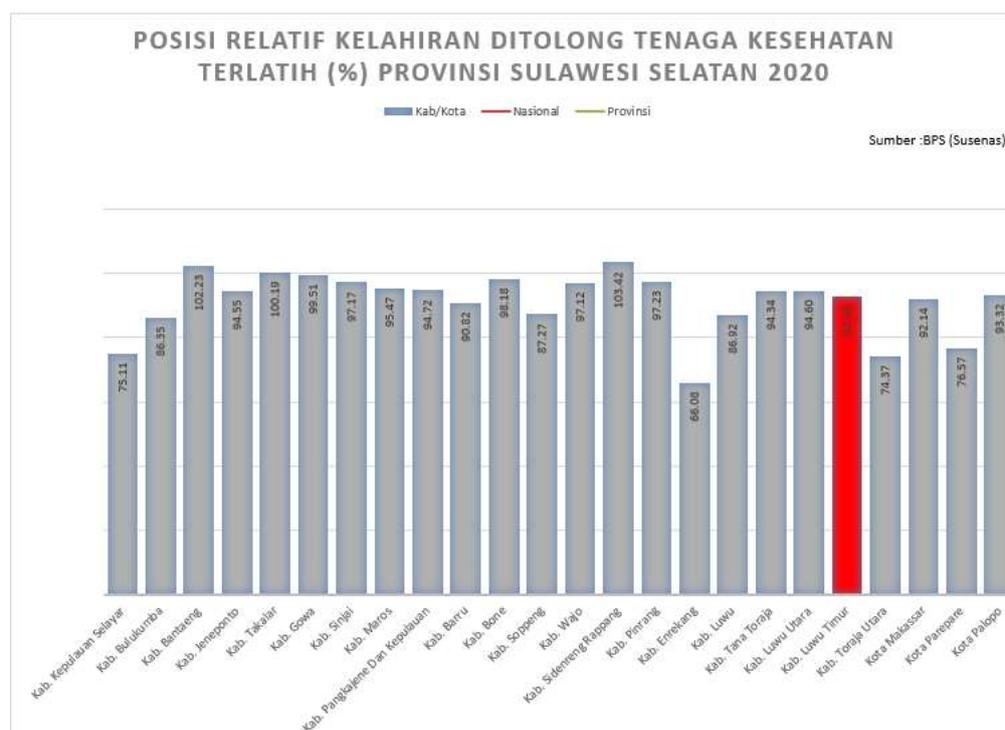
d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Persentase Rumah tangga yang menerima PIP dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Hal ini menunjukkan hubungan timbal balik “jika terjadi penurunan angka Persentase rumah tangga yang menerima PIP maka akan mempengaruhi kenaikan jumlah Persentase penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi”. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

### 3.4 Bidang Kesehatan

#### 3.4.1 Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

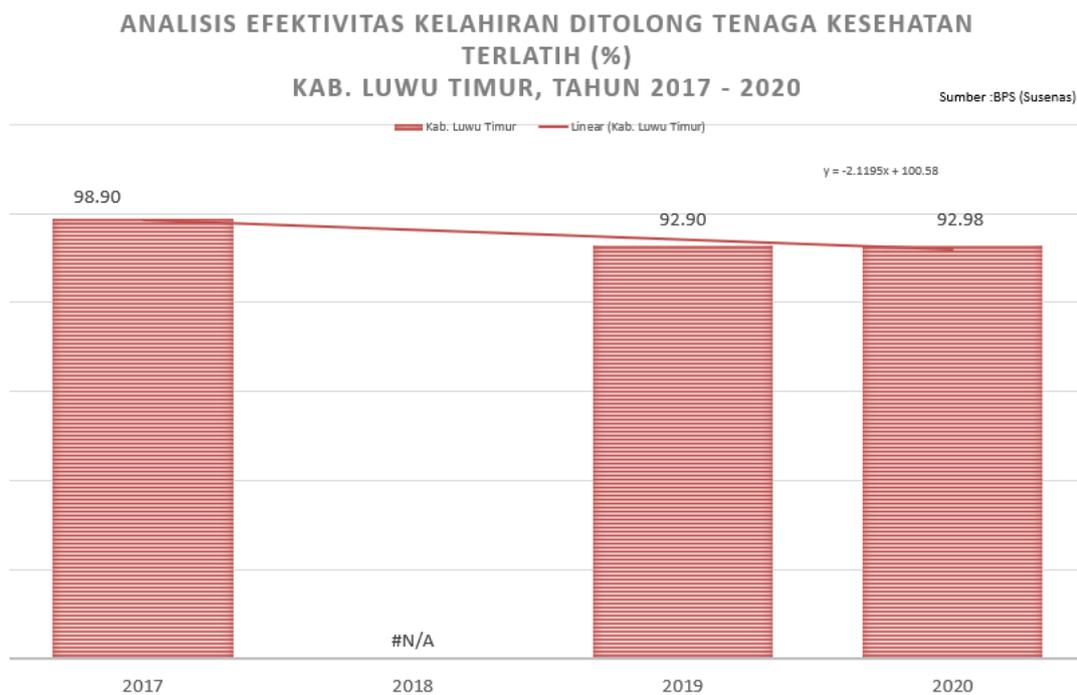
Gambar 3.69 Posisi Relatif Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020



Gambar 3.70 Perkembangan Antar Waktu Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



Gambar 3.71 Analisis Efektivitas Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



Gambar 3.72 Analisis Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



Kondisi Karakteristik Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2020 Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Provinsi Sulawesi selatan mencapai 92.44%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 15 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih diatas Provinsi Sulawesi selatan. Serta sisanya hanya 9 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-14 tertinggi di antara 24 kab/kota di Sulawesi Selatan dengan capaian 92.98%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan capaian 103.42%, dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Enrekang dengan capaian 60.42%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2020, Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 98.90% menjadi 92.98%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017-2020, Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif. Dari 98.90% menjadi 92.98% di tahun 2020, ini menunjukkan penurunan yang idealnya harus ditingkatkan. Angka

penurunannya sebesar 5.92 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

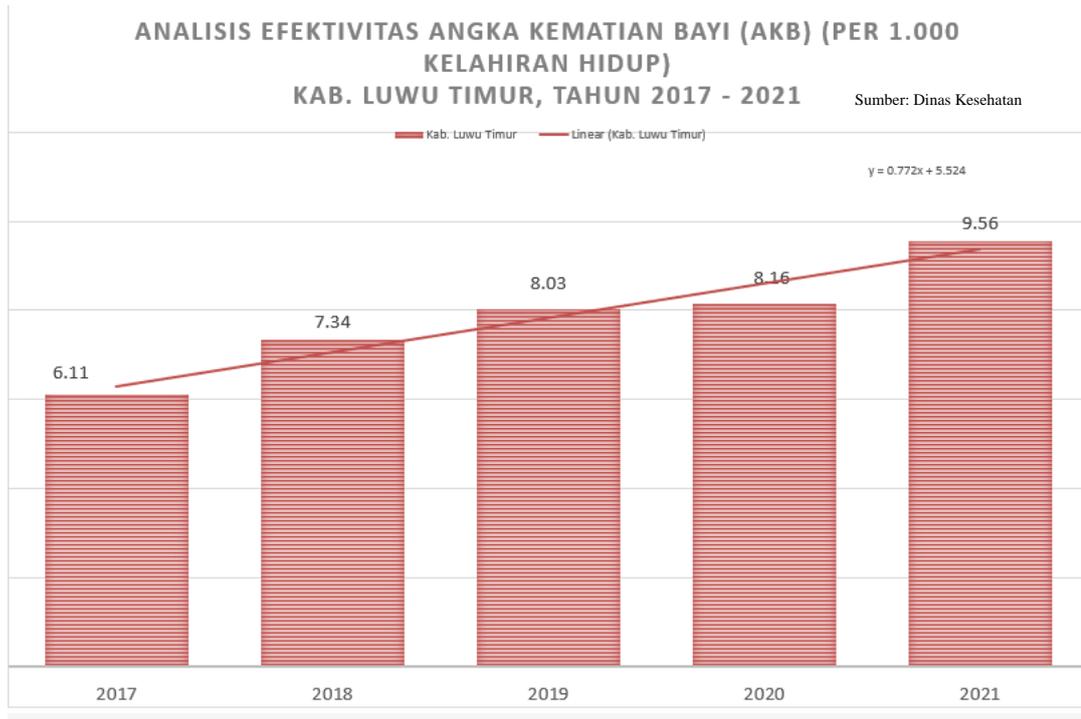
- Tren dan pola perubahan antara capaian Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi selatan dapat dikatakan cukup beririgan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Sama-sama mengalami penurunan. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

### 3.4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup)

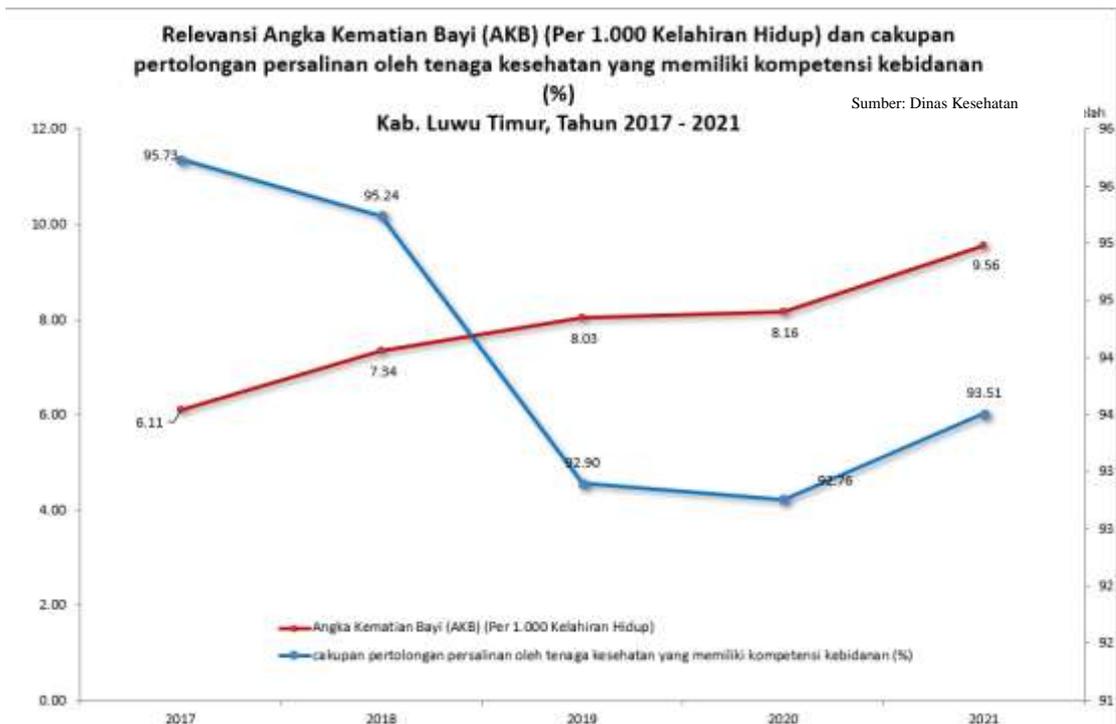
Gambar 3.73 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.74 Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



Gambar 3.75 Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020



#### Kondisi Karakteristik Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup):

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya dari 6.11% menjadi 9.56%.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) mengalami tren kenaikan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari 6.11% menjadi 9.56% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang idealnya harus terus diturunkan jumlahnya. Angka kenaikannya sebesar 3.45% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya di tahun-tahun mendatang.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jika terjadi penurunan capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tentu saja akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup). Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

### 3.4.3 Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup)

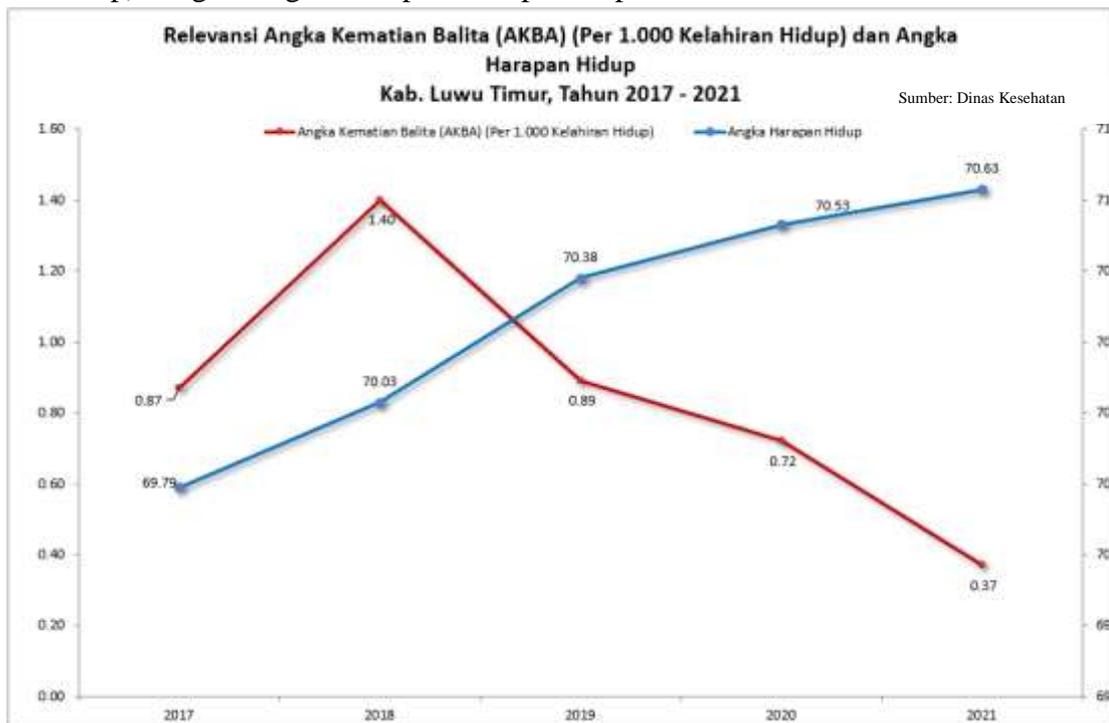
Gambar 3.76 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.77 Analisis Efektivitas Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.78 Analisis Relevansi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dengan Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup):

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2020, Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 0.87% menjadi 0.37%.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2020, Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 0.87% di tahun 2017 meningkat drastis di tahun 2018 menjadi 1.40% lalu kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya menjadi 0.37% di tahun 2021, ini menunjukkan penurunan yang idealnya memang harus terus diturunkan jumlah capaiannya. Angka penurunannya sebesar 0.5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Angka Harapan Hidup

dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Jika terjadi penurunan capaian Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) tentu saja akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Harapan Hidup. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

### 3.4.4 Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

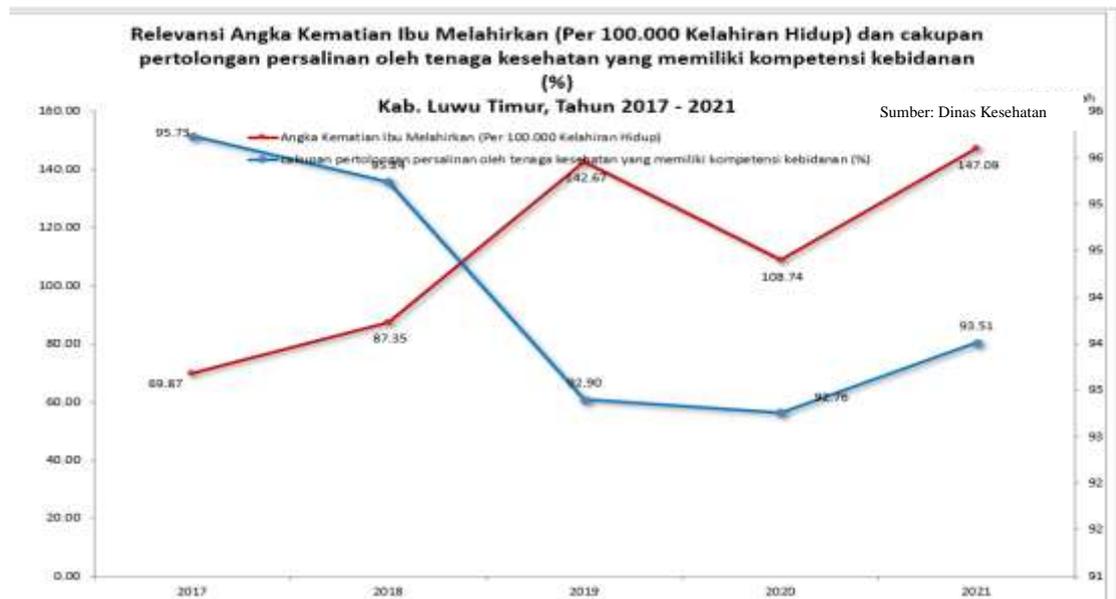
Gambar 3.79 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.80 Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.81 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



**Kondisi Karakteristik Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup):**

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2020, Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 69.87% menjadi 147.09%.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2020, Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) mengalami tren peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Dari 69.87% menjadi 142.67% di tahun 2019 kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 108.74% dan mengalami peningkatan drastis di tahun 2021 menjadi 147.09%. Ini menunjukkan angka peningkatan yang idealnya harus terus diturunkan jumlahnya setiap tahunnya. Angka kenaikannya sebesar 77.22% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dinyatakan sangat tidak efektif dan pastinya masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Jika terjadi

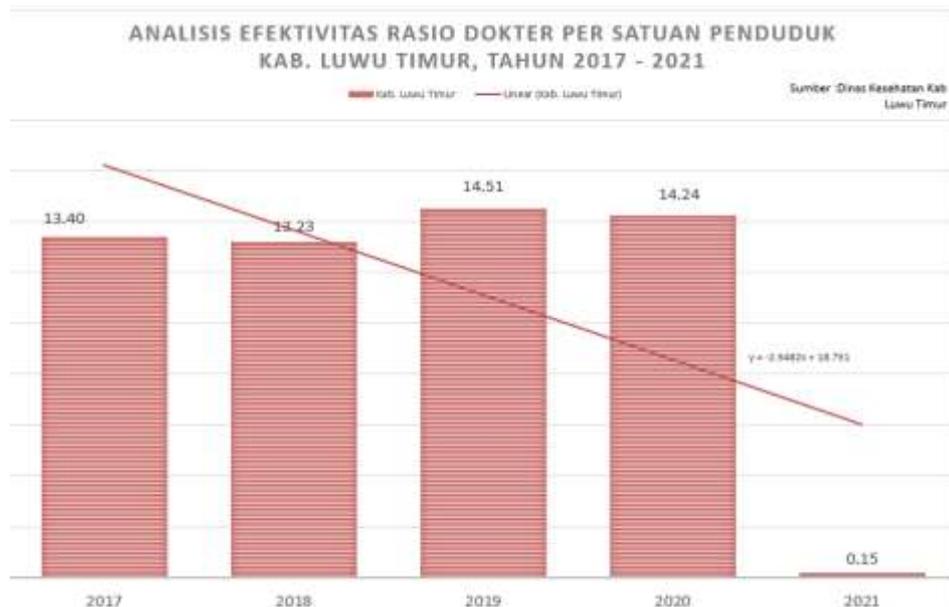
penurunan capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tentu saja akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup). Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

### 3.4.5 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

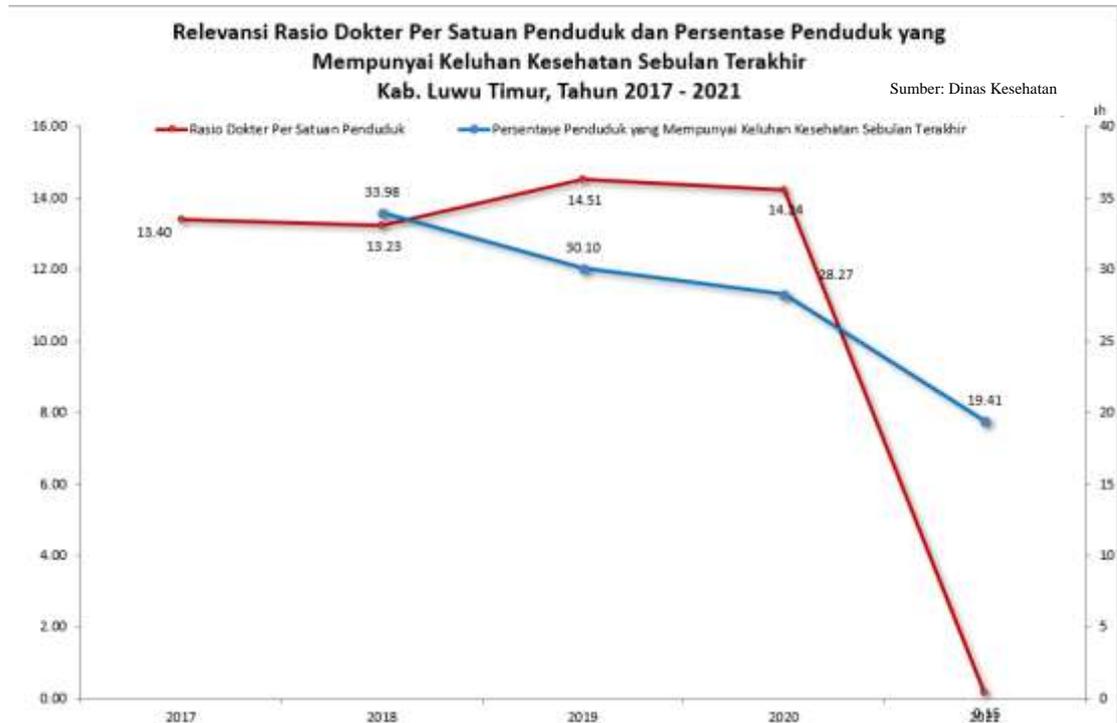
Gambar 3.82 Perkembangan Antar Waktu Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.83 Analisis Efektivitas Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.84 Analisis Relevansi Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Kondisi Karakteristik Rasio Dokter Per Satuan Penduduk:

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan secara fluktuatif dari 13.40% menjadi 0.15%. Walaupun pernah mengalami peningkatan drastis di tahun 2018 sebanyak 14.51%, tetapi kemudian menurun di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2021.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Rasio Dokter Per Satuan Penduduk mengalami tren penurunan drastis yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 13.40% menjadi 0.15% di tahun 2021, ini menunjukkan angka penurunan yang idealnya harus terus ditingkatkan jumlahnya. Angka penurunannya sangat besar yaitu 13.25% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan Kesehatan dengan cara peningkatan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dinyatakan belum efektif dan pastinya masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dapat dikatakan tidak relevan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2020. Jika terjadi penurunan capaian Rasio Dokter Per Satuan Penduduk harusnya akan mengakibatkan lonjakan capaian pada indikator Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir. Tetapi pada kenyataannya malah terjadi penurunan jumlah penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan sebulan terakhir. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya tidak relevan.

### 3.4.6 Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Terakhir

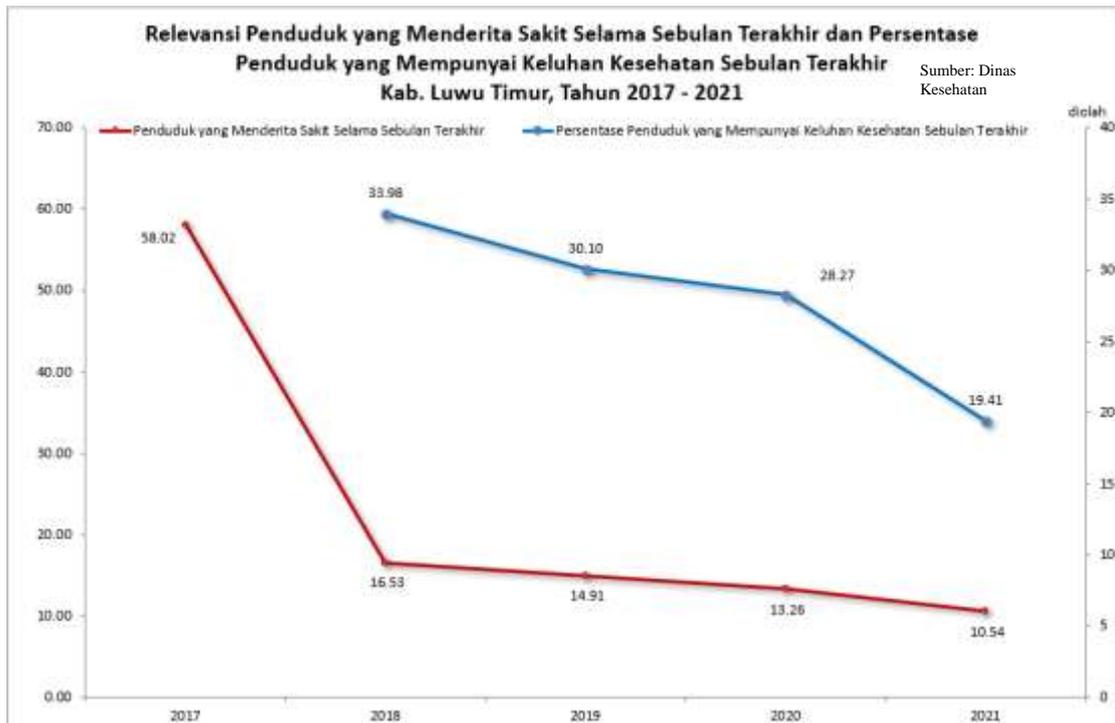
Gambar 3.85 Perkembangan Antar Waktu Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.86 Analisis Efektivitas Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.87 Analisis Relevansi Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir dengan Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



### Kondisi Karakteristik Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir:

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan drastis dari 58.02% menjadi 10.54%

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir mengalami tren penurunan. Dari 58.02% menjadi 10.54% di tahun 2021, ini menunjukkan angka penurunan yang idealnya memang harus terus diturunkan jumlahnya. Angka penurunannya sebesar 47,48% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan upaya lebih lagi untuk memaksimalkan capaiannya.

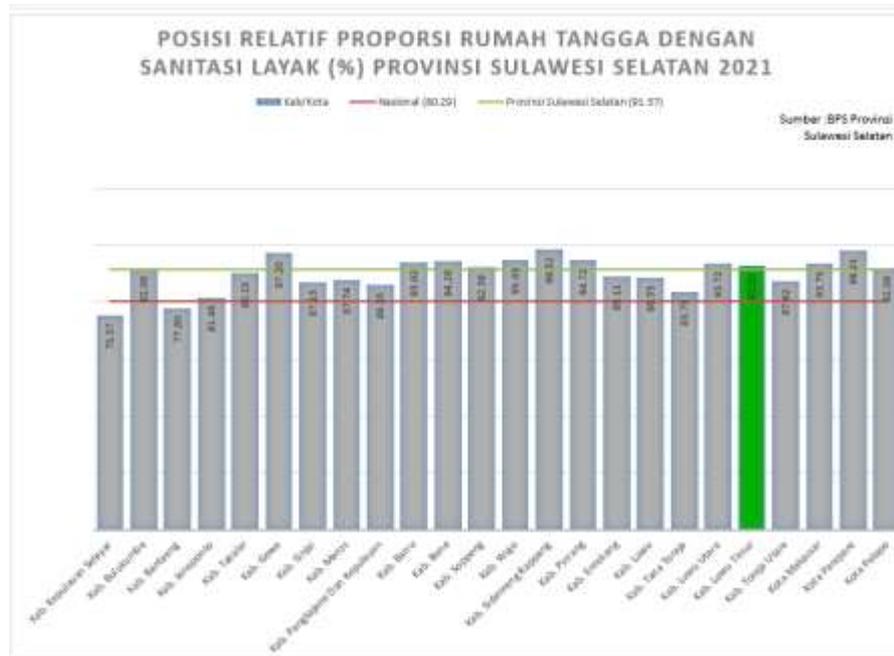
c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jika terjadi penurunan capaian Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir tentu saja akan mengakibatkan penurunan angka capaian pada indikator Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir. Dengan kata lain semakin berkurang Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir maka akan mengakibatkan mereka peduli pada kesehatannya dan implikasinya adalah berkurangnya jumlah penduduk yang menderita sakit. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

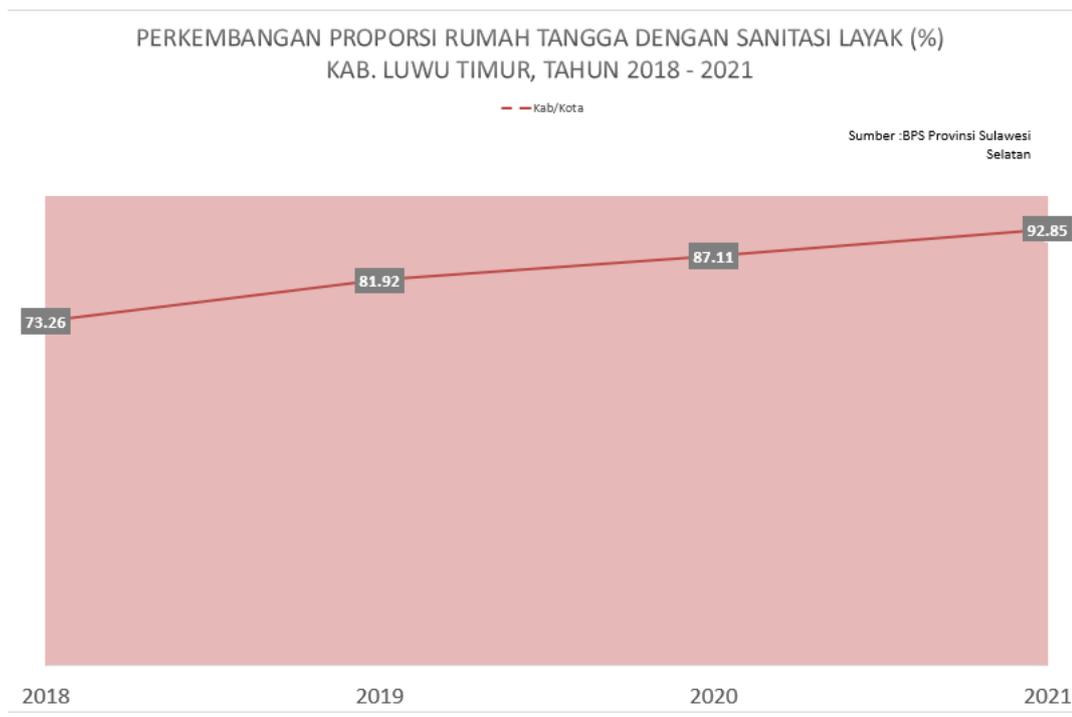
### 3.5 Bidang Infrastruktur Dasar

#### 3.5.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Gambar 3.88 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021



Gambar 3.89 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.90 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.91 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021

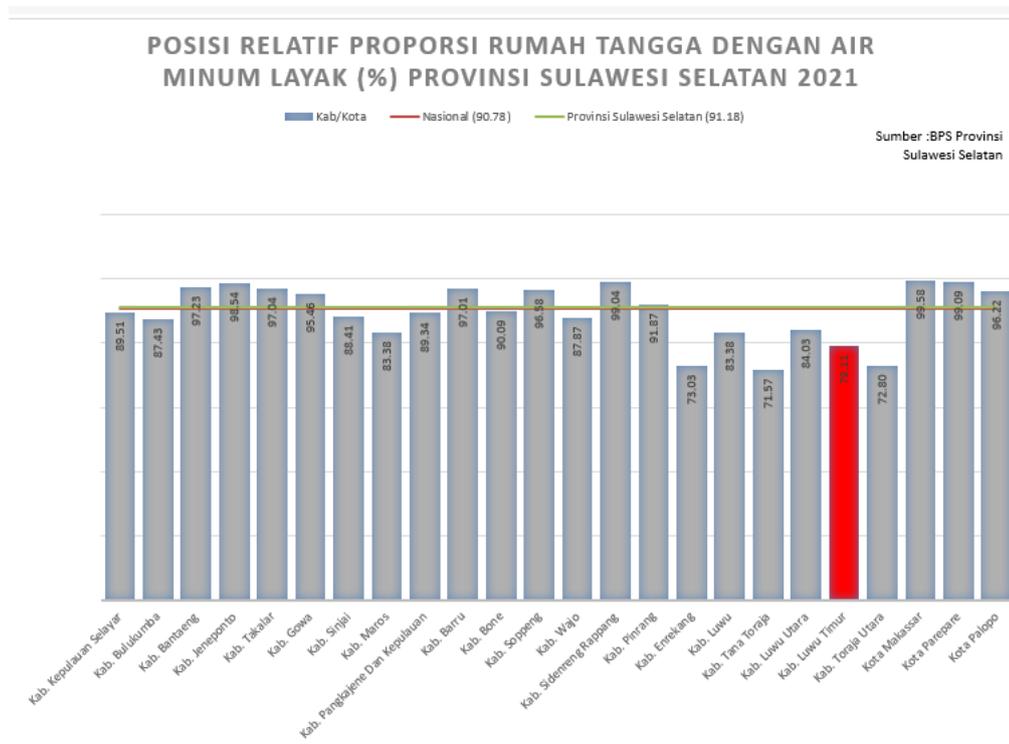


## Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak :

- a. Posisi Relatif:
  - Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi selatan mencapai 91.57% lebih tinggi dari Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Nasional (80.29%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 22 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. Dan hanya 2 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
  - Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-10 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 92.85%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan capaian 98.52%, dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 75.57%.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
  - Pada Periode tahun 2018-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 73.26% menjadi 92.85%.
- c. Efektivitas:
  - Pada Periode tahun 2018–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak mengalami tren peningkatan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari 73.26% menjadi 92.85% di tahun 2021, ini menunjukkan peningkatan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 19.59 poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.
- d. Relevansi:
  - Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

### 3.5.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Gambar 3.92 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021



Gambar 3.93 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.94 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.95 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021

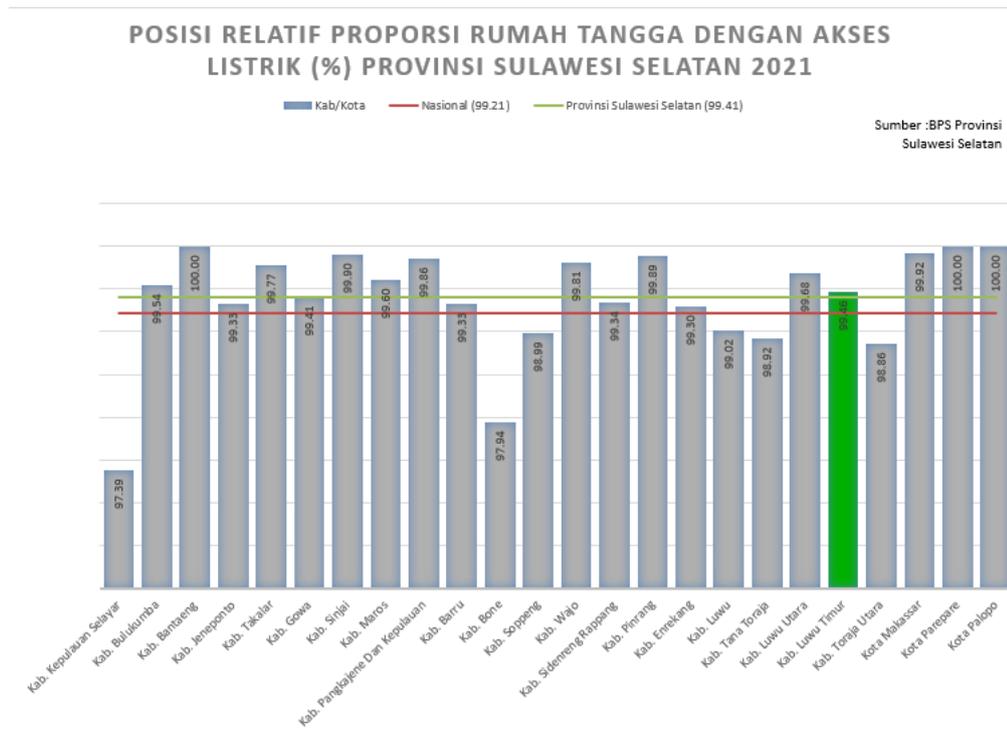


## Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak :

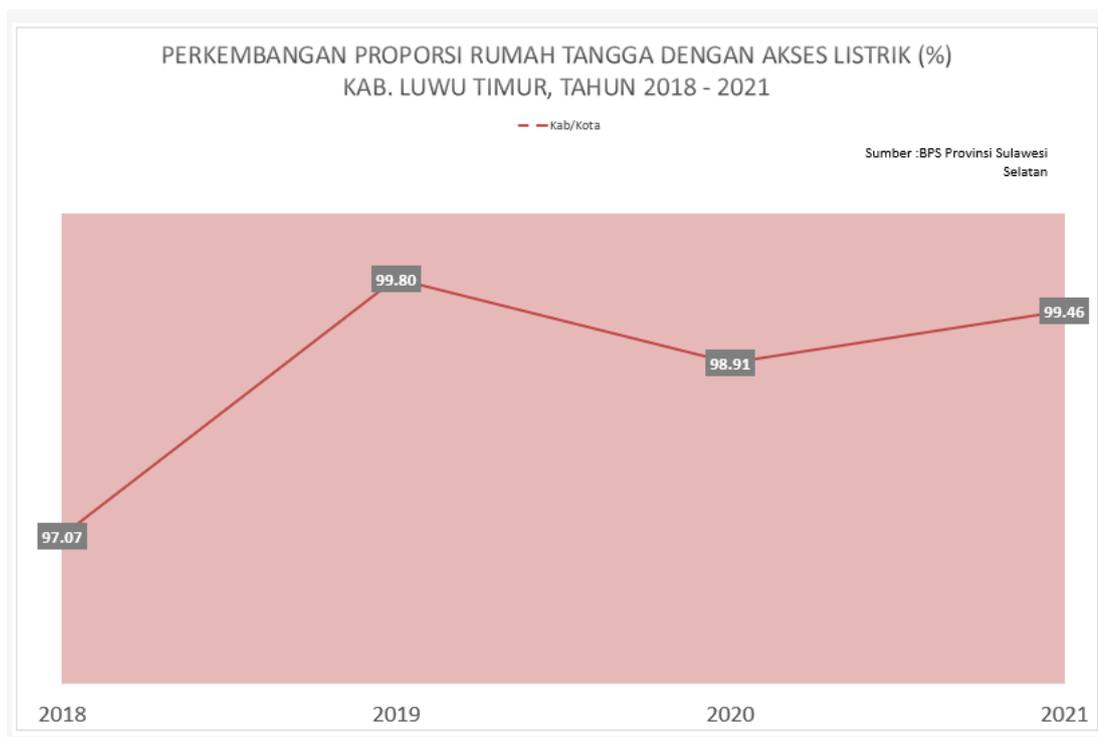
- a. Posisi Relatif:
  - Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Provinsi Sulawesi selatan mencapai 91.18% lebih tinggi dari Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Nasional (90.78%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 11 kab/kota yang kondisi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak -nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. Dan 13 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
  - Pada Periode tahun 2018-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 77.41% menjadi 79.11%.
- c. Efektivitas:
  - Pada Periode tahun 2018–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak mengalami tren peningkatan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 77.41% di tahun 2018 menjadi 81.26% di tahun 2019, menurun di tahun 2020 menjadi 76.16% dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2021 menjadi 79.11%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang belum maksimal karena hanya naik sebesar 1.7 poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.
- d. Relevansi:
  - Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

### 3.5.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

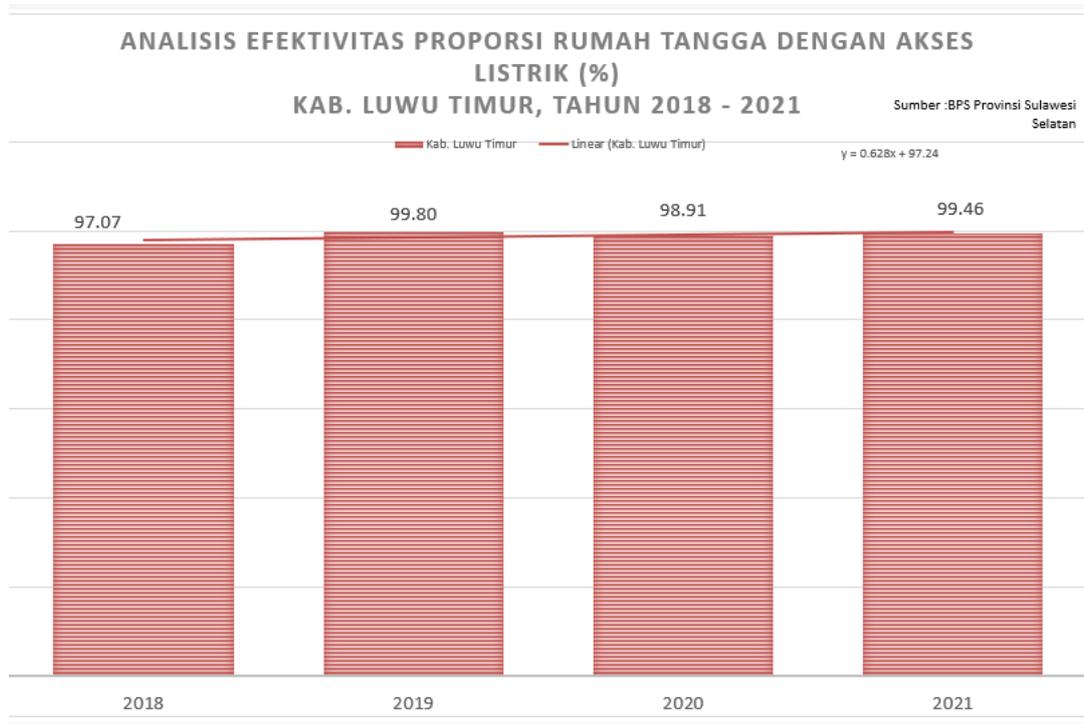
Gambar 3.96 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021



Gambar 3.97 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.98 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.99 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



## Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik :

### a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Provinsi Sulawesi selatan mencapai 99.41% lebih tinggi dari Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Nasional (99.21%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 18 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listriknya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. Dan hanya 6 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-13 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 99.46%. Posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bantaeng, Kota Pare-pare dan Kota Palopo dengan capaian 100%. Dan Posisi terendah ditempati Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 97.39%.

### b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 97.07% menjadi 99.46%.

### c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2018–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik mengalami tren peningkatan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 97.07% di tahun 2018 menjadi 99.80% di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 98.91% di tahun 2020 dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 99.46%. ini menunjukkan peningkatan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 2.46 poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

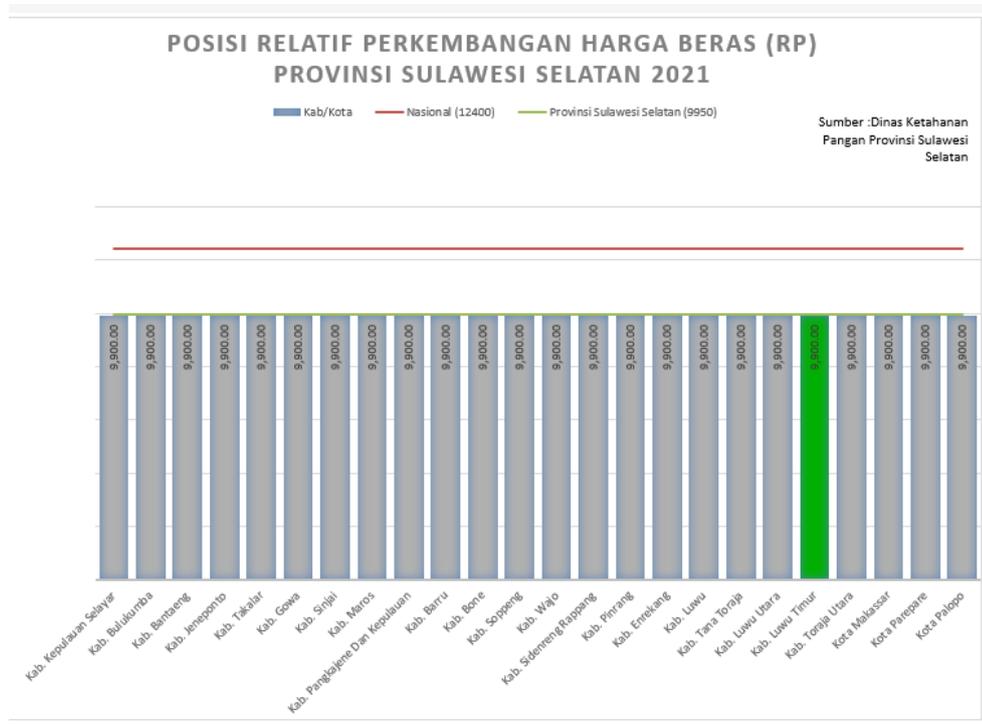
### d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

### 3.6 Bidang Ketahanan Pangan

#### 3.6.1 Perkembangan Harga Beras

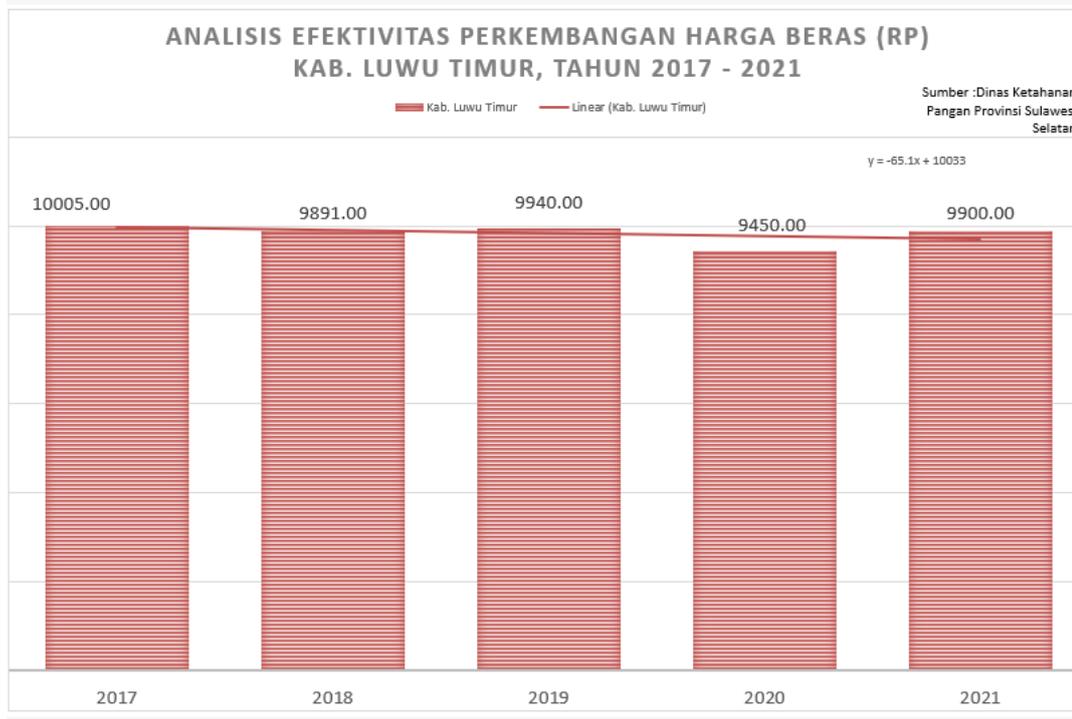
Gambar 3.100 Posisi Relatif Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



Gambar 3.101 Perkembangan Antar Waktu Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.102 Analisis Efektivitas Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



Gambar 3.103 Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

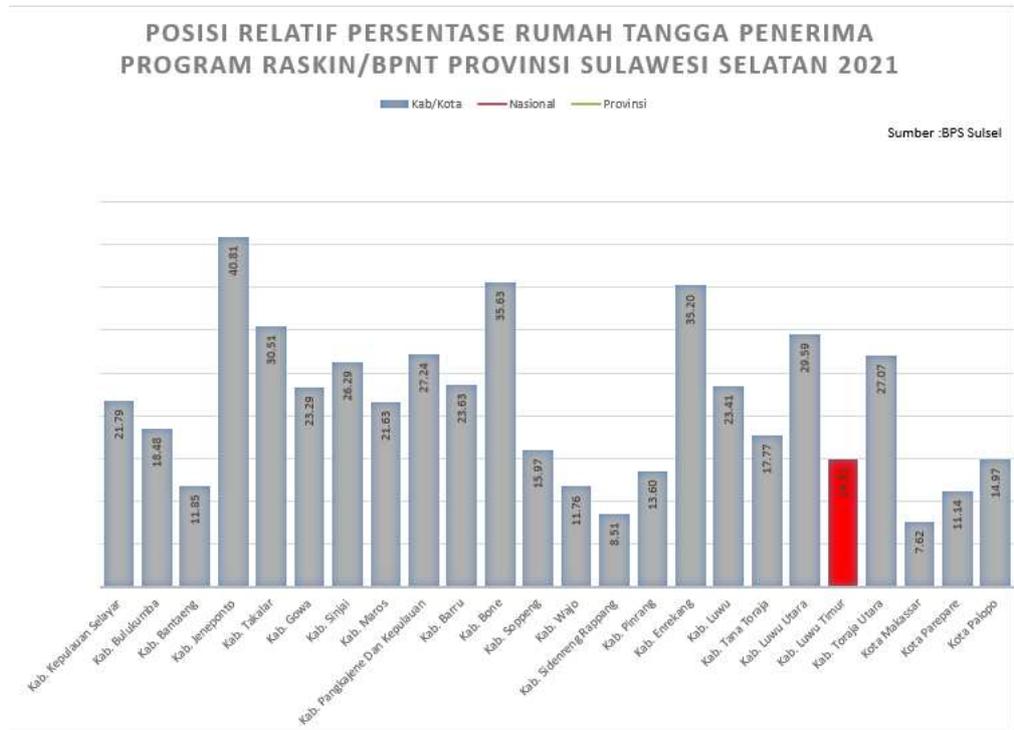


### Kondisi Karakteristik Perkembangan Harga Beras:

- a. Posisi Relatif:
  - Pada tahun 2021 Perkembangan Harga Beras Provinsi Sulawesi selatan mencapai Rp 9.950,- lebih rendah dari Perkembangan Harga Beras Nasional (Rp 12.400,-). Pada tingkat kab/kota, terdapat 24 atau semua kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Perkembangan Harga Beras-nya di bawah Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
  - Pada Periode tahun 2017-2021, Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan yang tidak terlalu berbeda setiap tahunnya. Dari Rp 10.005,- menjadi Rp 9.900,-
- c. Efektivitas:
  - Pada Periode tahun 2017–2021, Perkembangan Harga Beras mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari Rp 10.005,- menjadi Rp 9.900,- di tahun 2021, ini menunjukkan harga yang stabil setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan Perkembangan Harga Beras dinyatakan sudah efektif.
- d. Relevansi:
  - Tren dan pola perubahan antara capaian Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

### 3.6.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT

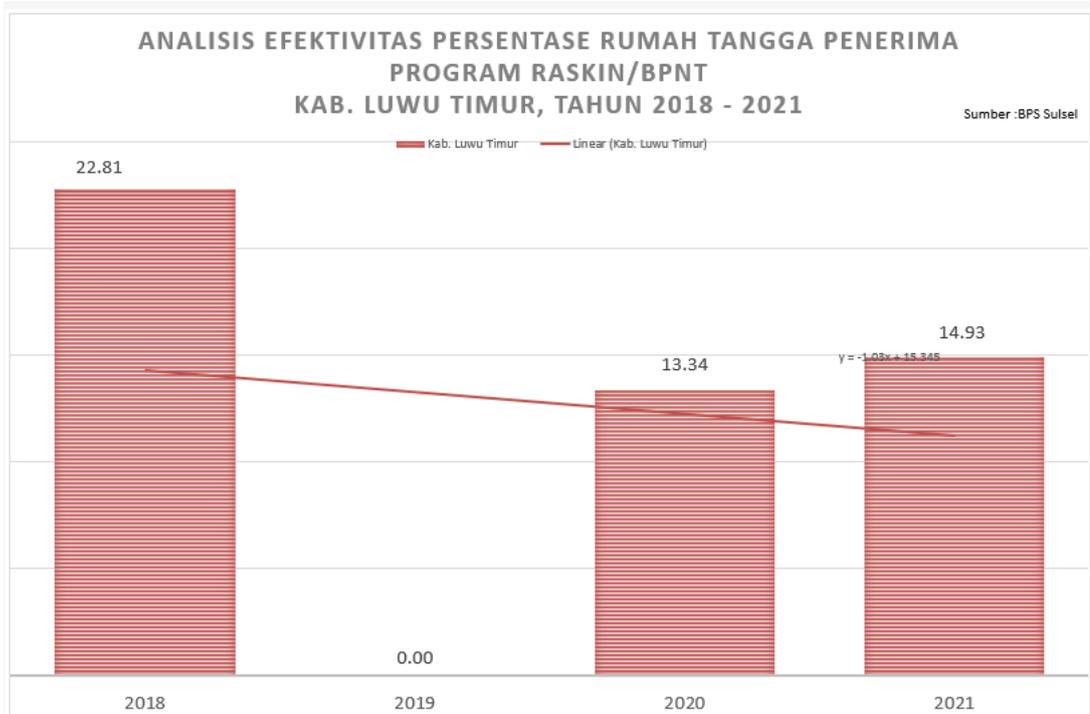
Gambar 3.104 Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Prov Sulawesi Selatan Tahun 2021



Gambar 3.105 Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.106 Analisis Efektivitas Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021



Gambar 3.107 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021



### Kondisi Karakteristik Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT:

- a. Posisi Relatif:
  - Pada tahun 2021 Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Provinsi Sulawesi selatan mencapai 20.49%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 13 kab/kota yang kondisi Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT diatas Provinsi Sulawesi selatan. Dan sisanya 11 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah capaian Provinsi.
  - Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-7 terendah di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 14.93%. Posisi pertama tertinggi ditempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan capaian 40.81% dan Posisi terendah ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 7.62%.
- b. Perkembangan Antar Waktu:
  - Pada Periode tahun 2018-2021, Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 22.81% menjadi 14.93%.
- c. Efektivitas:
  - Pada Periode tahun 2018–2021, Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT mengalami tren penurunan yang fluktuatif. Dari 22.81% menjadi 14.93% di tahun 2021, angka capaiannya turun sebesar 7.17 poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah Tangga Miskin salah satunya dengan pemberian Program Raskin/BPNT dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. Semakin banyak Rumah tangga miskin yang bisa terjangkau oleh program Raskin/BPNT maka akan membantu penurunan tingkat kemiskinan.
- d. Relevansi:
  - Tren dan pola perubahan antara capaian Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

### 3.6.3 Perkembangan harga Bahan Pokok Utama

Tabel 3.1 Perkembangan Harga Bahan Pokok Utama Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2021

No.	Komoditas(Rp)	1/11/2021	1/12/2021	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Beras</b>			
1	Beras Kualitas Bawah I (kg)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2	Beras Kualitas Bawah II (kg)	9,500.00	9,500.00	9,500.00
3	Beras Kualitas Medium I (kg)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4	Beras Kualitas Medium II (kg)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
5	Beras Kualitas Super I (kg)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
6	Beras Kualitas Super II (kg)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
<b>II</b>	<b>Daging Ayam</b>			
1	Daging Ayam Ras Segar (kg)	26,000.00	26,000.00	30,000.00
<b>III</b>	<b>Daging Sapi</b>			
1	Daging Sapi Kualitas 1 (kg)	120,000.00	120,000.00	125,000.00
2	Daging Sapi Kualitas 2 (kg)	125,000.00	125,000.00	130,000.00
<b>IV</b>	<b>Telur Ayam</b>			
1	Telur Ayam Ras Segar (kg)	17,500.00	17,500.00	24,000.00
<b>V</b>	<b>Bawang Merah</b>			
1	Bawang Merah Ukuran Sedang (kg)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>VI</b>	<b>Bawang Putih</b>			
1	Bawang Putih Ukuran Sedang (kg)	28,000.00	28,000.00	30,000.00
<b>VII</b>	<b>Cabai Merah</b>			
1	Cabai Merah Besar (kg)	25,000.00	40,000.00	50,000.00
2	Cabai Merah Keriting (kg)	30,000.00	40,000.00	55,000.00
<b>VIII</b>	<b>Cabai Rawit</b>			
1	Cabai Rawit Hijau (kg)	23,000.00	50,000.00	75,000.00
2	Cabai Rawit Merah (kg)	25,000.00	50,000.00	75,000.00
<b>IX</b>	<b>Minyak Goreng</b>			
1	Minyak Goreng Curah (kg)	15,000.00	15,000.00	16,000.00
2	Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 (kg)	19,000.00	20,000.00	22,000.00
3	Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 (kg)	21,000.00	22,000.00	23,000.00
<b>X</b>	<b>Gula Pasir</b>			
1	Gula Pasir Kualitas Premium (kg)	13,500.00	13,500.00	13,500.00
2	Gula Pasir Lokal (kg)	13,000.00	13,000.00	13,000.00

Sumber: Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

Jika melihat data dalam Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan harga 10 Bahan pokok utama di Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 di tiga bulan terakhir pada umumnya masih stabil. Hanya ada 7 bahan pokok utama yang menunjukkan harga kenaikan di 3 bulan terakhir yaitu: daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan minyak goreng. Ke-4 bahan pokok utama ini memang diketahui harganya selalu dipengaruhi oleh kondisi ketersediaannya di peternak ataupun petani. Tetapi jika dilihat kondisi ketersediaan semua bahan pokok utama, bisa dipastikan stabilitas harganya masih berlanjut di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah

untuk mendukung stabilitas harga bahan pokok utama cukup efektif. Jika kondisinya tetap stabil dan tidak ada lonjakan harga maka bisa dipastikan bisa menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin yang tentu saja berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

Profil kemiskinan daerah Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Profil Kemiskinan Provinsi Sulsel Tahun 2017-2021

No	Indikator	Analisis						
		Perkembangan Antar Waktu		Posisi Relatif	Analisis Efektivitas		Analisis Relevansi	
		Awal	Akhir	Perbandingan dengan Capaian Provinsi /Nasional	Efektif	Tidak Efektif	Capaian Provinsi/ Nasional	Capaian antar Indikator
<b>I</b>	<b>Bidang Konsumsi Pengeluaran</b>							
1	Persentase Penduduk Miskin	7.66%	6.94%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.60%	1.09%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.50%	0.26%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
4	Jumlah Penduduk Miskin	21.940 jiwa	20.990 jiwa	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Persentase Penduduk Miskin
5	Garis Kemiskinan	Rp 28.921,-	Rp 371.947,-	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Lebih Rendah dari Capaian	(-)	√	Relevan	(-)

				Nasional				
6	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	2.58%	1.66%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Lebih Rendah dari Capaian Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
7	Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Rasio)	0.40%	0.40%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
<b>II</b>	<b>Bidang Ketenagakerjaan</b>							
1	Angkatan kerja	144.010 jiwa	162.182 jiwa	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Persentase Penduduk Miskin
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.03%	73.14%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.58%	4.96%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
<b>III</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	109.75 %	109.02%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	86.90%	87.20%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99.31%	98.28%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)

4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	77.93%	78.81%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Lebih Rendah dari Capaian Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
5	Harapan Lama Sekolah	12.79 tahun	12.84 tahun	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
6	Angka Buta Huruf Penduduk 15+	5.20%	6.41%	Lebih Rendah Dari Capaian Provinsi, Lebih Tinggi dari Capaian Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
7	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi	25.26%	27.87%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Persentase Rumah Tangga yang Menerima PIP
<b>IV</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>							
1	Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	98.90%	92.98%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi, Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
2	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup)	6.11%	9.56%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
3	Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000)	0.87%	0.37%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Angka Harapan

	Kelahiran Hidup)							Hidup
4	Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	69.87%	147.09%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
5	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	13.40%	0.15%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Tidak Relevan dengan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir
6	Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Terakhir	58.02%	10.54%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir
<b>V</b>	<b>Bidang Infrastruktur Dasar</b>							
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	73.26%	92.85%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	77.41%	79.11%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik	97.07%	99.46%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)

VI	Bidang Ketahanan Pangan							
1	Perkembangan Harga Beras	Rp 10.005,-	Rp 9.900,-	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
2	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Raskin/BPNT	22.81%	14.93%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi, Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
3	Perkembangan Harga Bahan Pokok	Stabil	Stabil	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	(-)

### 3.7 Analisis Data Terpadu (Kepmensos 19/HUK/2020)

Analisis data dilakukan pada tingkat kabupaten berdasarkan karakteristik demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepesertaan program, kepemilikan aset, dan sosial ekonomi lainnya.

#### 3.7.1 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Demografi

Karakteristik demografi yang disajikan meliputi jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan rumah tangga, keluarga, anggota rumah tangga, serta jumlah kepala rumah tangga laki-laki dan perempuan.

##### a. Jumlah dan Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Perbedaan terlihat antar kecamatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Luwu Timur cukup tinggi. Perbedaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada **Tabel 3.3**

**Tabel 3.3 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Rumah Tangga	Keluarga	Anggota Rumah Tangga	Populasi Penduduk (Desember 2020)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
Mangkutana	2.488	4.774	9.261	22.437	41.27
Nuha	550	876	2.070	23.755	8.71
Towuti	2.955	3.672	11.733	43.597	26.91
Malili	3.265	3.469	13.774	43.421	31.72
Angkona	3.679	3.276	14.211	25.303	56.16
Wotu	3.268	4.177	13.139	33.732	38.95
Burau	4.380	6.843	17.497	35.100	49.85
Tomoni	2.817	3.471	10.247	26.773	38.27
Tomoni	2.044	2.140	7.418	13.649	54.35
Timur	1.869	3.228	6.567	12.297	53.40
Kalaena	1.890	1.673	8.119	21.975	36.94
Wasuponda					
<b>TOTAL</b>	<b>29.205</b>	<b>37.099</b>	<b>114.006</b>	<b>302.039</b>	<b>X=37.74%</b>

Sumber: 1. DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur

Dari **Tabel 3.3** jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terkonsentrasi di Kecamatan Burau. Perbedaan cukup tinggi dapat dilihat pada tiap kecamatan, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Burau 4.380 rumah tangga, 6.843 keluarga dan 17.497 anggota rumah tangga. Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terendah berada di Kecamatan Nuha 550 rumah tangga, 876 keluarga, dan untuk jumlah anggota rumah tangga terendah berada di Kecamatan Nuha dengan Jumlah 2.070 anggota rumah tangga.

Berdasarkan **Tabel 3.3** menunjukkan Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut kecamatan berdasarkan DTKS Nomor 19/HUK/2020. Terlihat bahwa Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terbesar berada di Kecamatan Angkona, Tomoni Timur dan Kalaena. Dari DTKS terdapat 3 (tiga) kecamatan yang dapat dikategorikan memiliki Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang relatif rendah yaitu Kecamatan Nuha (8,71 %), Towuti (26,91 %) dan Malili (31,72 %). Persentase Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial yang relatif lebih besar terdapat Kecamatan Angkona (56,16 %) dan Tomoni Timur(54,35 %).

#### b. Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin

KRT adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Dari **Tabel 3.4** terlihat jumlah KRT laki-laki lebih banyak dibandingkan KRT perempuan yaitu sebanyak 16.001 KRT, sedangkan KRT perempuan sebanyak 3.063 KRT. Jumlah KRT laki-laki tertinggi berada di Kecamatan Burau sebanyak 2.504 KRT (15.65 %) dan yang terendah berada di Nuha sebanyak 316 KRT (1.97 %), sedangkan jumlah KRT perempuan tertinggi berada di Burau sebesar 515 KRT (16.81 %) dan terendah di Kecamatan Nuha sebanyak 84 KRT (2.74 %).

**Tabel 3.4 Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin**

Kecamatan	KRT Laki-Laki		KRT Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)
Mangkutana	1.385	8.66	232	7.57
Nuha	316	1.97	84	2.74
Towuti	879	5.49	206	6.73
Malili	1.760	11.00	426	13.91
Angkona	2.473	15.45	334	10.91
Wotu	1.808	11.30	419	13.68
Burau	2.504	15.65	515	16.81
Tomoni	1.560	9.75	270	8.82
Tomoni Timur	947	5.92	152	4.96
Kalaena	1.174	7.34	198	6.46
Wasuponda	1.195	7.47	227	7.41
<b>TOTAL</b>	<b>16.001</b>	<b>100</b>	<b>3.063</b>	<b>100</b>

Sumber: DTKS Kemensos Nomor 19/HUK/2020

#### 3.7.2 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Pendidikan

Kemiskinan dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan, menurut

berbagai penelitian bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah begitu juga sebaliknya. Indikator pendidikan yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah indikator pendidikan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan.

**a. Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Menurut Kelompok Usia**

**Tabel 3.5** menunjukkan jumlah dan Persentase anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut anak yang bersekolah dan yang tidak bersekolah. Pada tabel dapat dilihat bahwa dari 26.598 jiwa anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan usia antara 7 s.d 18 tahun, terdapat 24.974 jiwa (93.90 %) anak yang bersekolah dan 1.624 jiwa (6.10 %) yang tidak bersekolah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sebagian besar anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berusia 7 s.d 18 tahun merupakan anak yang bersekolah.

**Tabel 3.5 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah Usia 7 s.d 18 Tahun**

<b>Status Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)
Anak yang Bersekolah	24.974	93.90
Anak yang Tidak Bersekolah	1.624	6.10
<b>TOTAL</b>	<b>26.598</b>	<b>100</b>

Sumber: DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

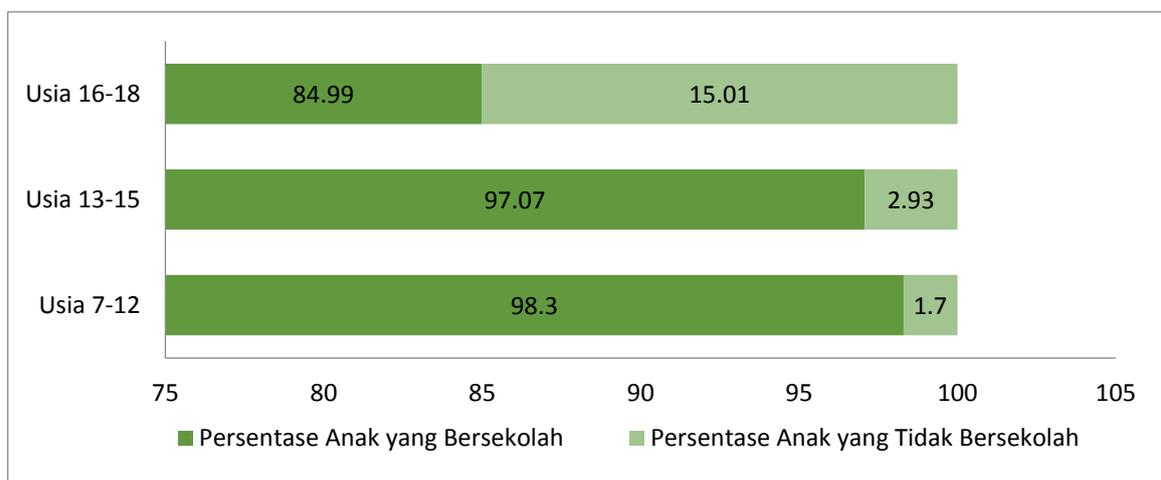
Selanjutnya untuk mengetahui jumlah anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut kelompok usia anak bersekolah dan tidak bersekolah disajikan dalam **Tabel 3.6**. Berdasarkan **Tabel 3.6**, anak yang bersekolah dan yang tidak bersekolah dengan usia 7-12 tahun berjumlah 10.879 jiwa, usia 13-15 tahun berjumlah 7.617 jiwa, dan usia 16-18 tahun berjumlah 8.102 jiwa. Gambaran mengenai anak yang bersekolah dan tidak bersekolah menurut kelompok usia disajikan pada **Tabel 3.6**

**Tabel 3.6 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kelompok Usia Anak Berdasarkan Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah**

Status Pendidikan	Usia 7-12		Usia 13-15		Usia 16-18	
	Tahun		Tahun		Tahun	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anak yang Bersekolah	10.694	98.30	7.394	97.07	6.886	84.99
Anak yang Tidak Bersekolah	185	1.70	223	2.93	1.216	15.01
<b>TOTAL</b>	<b>10.879</b>	<b>100</b>	<b>7.617</b>	<b>100</b>	<b>8.102</b>	<b>100</b>

Sumber: DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Dari **Gambar 3.108** terlihat bahwa untuk semua kelompok usia Persentase anak yang bersekolah lebih besar dari Persentase anak yang tidak bersekolah. Anak dengan kelompok usia 7 s.d 12 tahun menempati Persentase tertinggi untuk anak yang bersekolah yaitu sebesar 98.30 % dari total jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun.



Sumber: DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.108 Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kelompok Usia Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah**

#### b. Pendidikan yang Ditamatkan Anggota Rumah Tangga

Pendidikan yang ditamatkan anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disajikan pada **Tabel 1.5**. Terlihat bahwa anggota rumah tangga yang menamatkan

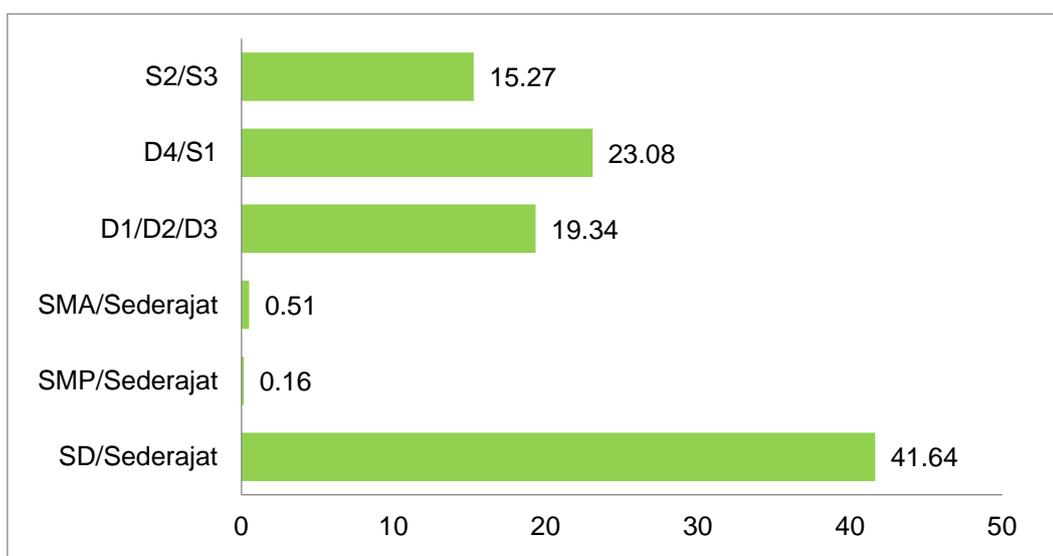
pendidikan dari jenjang SD/Sederajat sampai dengan S2/S3 berjumlah 109.537 jiwa. Selanjutnya gambaran tentang pendidikan yang ditamatkan anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada **Gambar 1.5**.

**Tabel 3.7 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
SD/Sederajat	45.614	41.64%
SMP/Sederajat	175	0.16%
SMA/Sederajat	555	0.51%
D1/D2/D3	21.183	19.34%
D4/S1	25.283	23.08%
S2/S3	16.727	15.27%
<b>TOTAL</b>	<b>109.537</b>	<b>100</b>

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Dari **Tabel 3.7** dan **Gambar 3.109** dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang ditamatkan anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagian besar adalah jenjang pendidikan SD/Sederajat sebesar 45.614 jiwa (41.64 %). Sementara itu, jenjang pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah SMP/Sederajat sebesar 175 jiwa (0,16 %).



Sumber : DT- PFM dan OTM Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

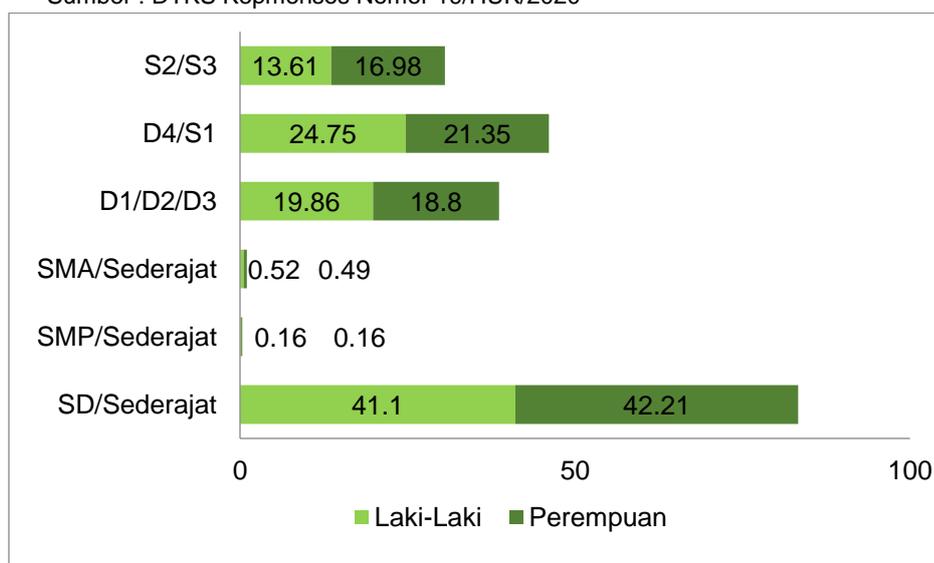
**Gambar 3.109 Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

Pengelompokan anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan disajikan pada **Tabel 3.8** dan **Gambar 3.110**. Dari **Gambar 3.110** terlihat bahwa untuk jenjang pendidikan yaitu SD/Sederajat, SMP/Sederajat, DI/D2/D3, D4/SI, dan S2/S3, anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berjenis kelamin perempuan memiliki Persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki, kecuali untuk jenjang SMA/Sederajat dimana yang berjenis kelamin laki-laki memiliki Persentase lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan.

**Tabel 3.8 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan**

Pendidikan yang Ditamatkan (1)	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah (2)	% (3)	Jumlah (4)	% (5)
SD/Sederajat	22.900	41.10	22714	42.21
SMP/Sederajat	86	0.16	89	0.16
SMA/Sederajat	291	0.52	264	0.49
D1/D2/D3	11.065	19.86	10.118	18.80
D4/S1	13.793	24.75	11.490	21.35
S2/S3	7.586	13.61	9.141	16.98
<b>TOTAL</b>	<b>55.721</b>	<b>100</b>	<b>53.816</b>	<b>100</b>

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.110 Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan**

### 3.7.3 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Kesehatan

#### a. Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar

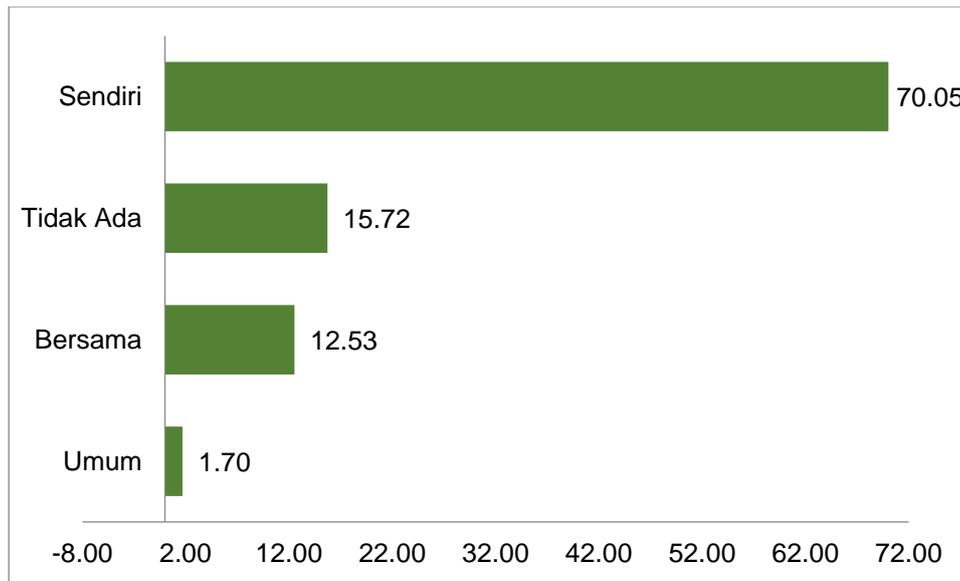
Dalam pembangunan kesehatan masyarakat, salah satu indikator kesehatan adalah akses sanitasi. Termasuk dalam akses sanitasi adalah ketersediaan fasilitas tempat pembuangan air besar. Fasilitas tempat pembuangan air besar yang dimaksud adalah ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Informasi mengenai jumlah dan Persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut fasilitas tempat pembuangan air besar dapat dilihat pada **Tabel 3.9**, terlihat bahwa dari 29.205 rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, terdapat 20.457 rumah tangga (70.05 %) yang menggunakan jamban sendiri, 3.660 rumah tangga (12.53 %) menggunakan jamban bersama, 496 (1.70 %) rumah tangga menggunakan jamban umum, dan 4.592 rumah tangga (15.72 %) tidak memiliki fasilitas tempat pembuangan air besar. Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa lebih dari sebagian rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah memiliki sendiri fasilitas tempat pembuangan air besar, sebaliknya yang tidak memiliki fasilitas tempat pembuangan air besar jumlahnya juga cukup signifikan seperti terlihat pada **Gambar 3.111**

**Tabel 3.9 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar**

<b>Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)
Sendiri	20.457	70.05
Bersama	3.660	12.53
Umum	496	1.70
Tidak Ada	4.592	15.72
<b>TOTAL</b>	<b>29.205</b>	<b>100</b>

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.111 Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar**

#### **b. Tempat Pembuangan Akhir Tinja**

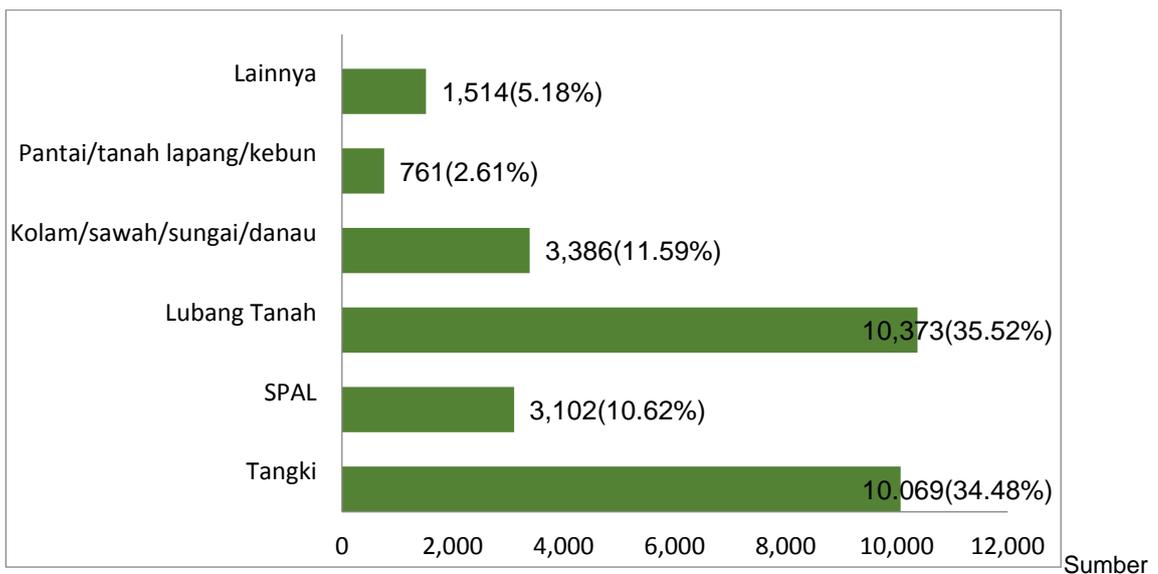
Tempat pembuangan akhir tinja yang memenuhi standar kesehatan adalah jika kedap air sehingga menghindari pencemaran lingkungan, selain itu letaknya paling sedikit berjarak meter dari sumber air minum (sumur). Ada beberapa macam tempat pembuangan akhir tinja diantaranya tangki, Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL), lubang tanah, kolam/sawah/sungai/danau, pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya. Dalam DTKS, tempat pembuangan akhir tinja yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah tangki, lubang tanah, kolam/sawah/sungai/danau, dan sistem pembuangan air limbah (SPAL) dengan jumlah dan Persentase secara berurutan adalah 10.069 rumah tangga (34.48 %), 10.373 rumah tangga (35.52 %), 3.386 rumah tangga (35.52 %) dan 3.102 rumah tangga (10.62 %).

Sebaliknya tempat pembuangan akhir tinja yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah pantai/tanah lapang/kebun sebesar 761 rumah tangga (2.61 %) dan lainnya sebesar 1.514 rumah tangga (5.18 %). Informasi dan gambaran lengkap mengenai jumlah dan Persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut tempat akhir pembuangan tinja disajikan pada **Tabel 3.10 dan Gambar 3.112**

**Tabel 3.10 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja**

Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Tangki	10.069	34.48
SPAL	3.102	10.62
Lubang Tanah	10.373	35.52
Kolam/sawah/sungai/danau	3.386	11.59
Pantai/tanah lapang/kebun	761	2.61
Lainnya	1.514	5.18
<b>TOTAL</b>	<b>29.205</b>	<b>100</b>

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.112 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja**

### c. Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

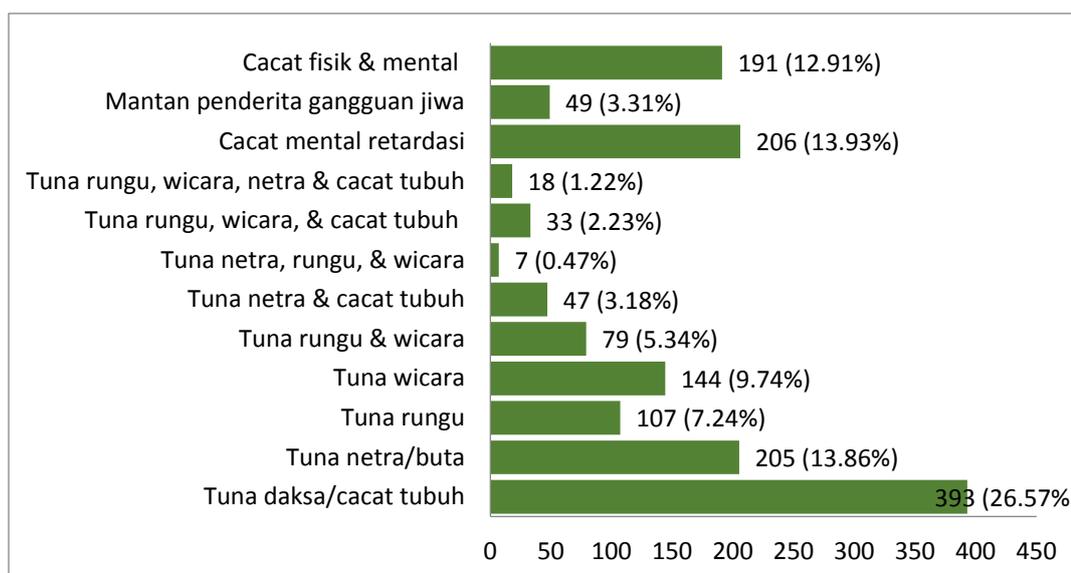
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Informasi mengenai penyandang disabilitas dalam DTKS disajikan dalam **Tabel 3.11** Berdasarkan **Tabel 3.11** di bawah ini, anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memiliki disabilitas hanya sebesar 1.479 jiwa (1,29 %) selebihnya merupakan anggota rumah tangga yang bukan penyandang disabilitas sejumlah 113.007 jiwa (98,71 %).

**Tabel 3.11 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Disabilitas**

Status Disabilitas	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Bukan Penyandang Disabilitas (Tidak cacat)	113.007	98,71
Penyandang Disabilitas	1.479	1,29
<b>TOTAL</b>	<b>114.486</b>	<b>100</b>

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Selanjutnya informasi tentang jenis disabilitas yang disandang oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan jumlah anggota rumah tangga fakir miskin dan orang tidak mampu yang menyandang disabilitas dapat dilihat pada **Gambar 3.113**.



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.113 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Disabilitas**

Berdasarkan **Gambar 3.113** diketahui bahwa jenis disabilitas yang paling banyak disandang oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah tuna daksa/cacat tubuh yaitu sebesar 393 jiwa (26,57 %) sedangkan yang paling sedikit adalah tuna netra rungu wicara sebesar 7 jiwa (0,47 %).

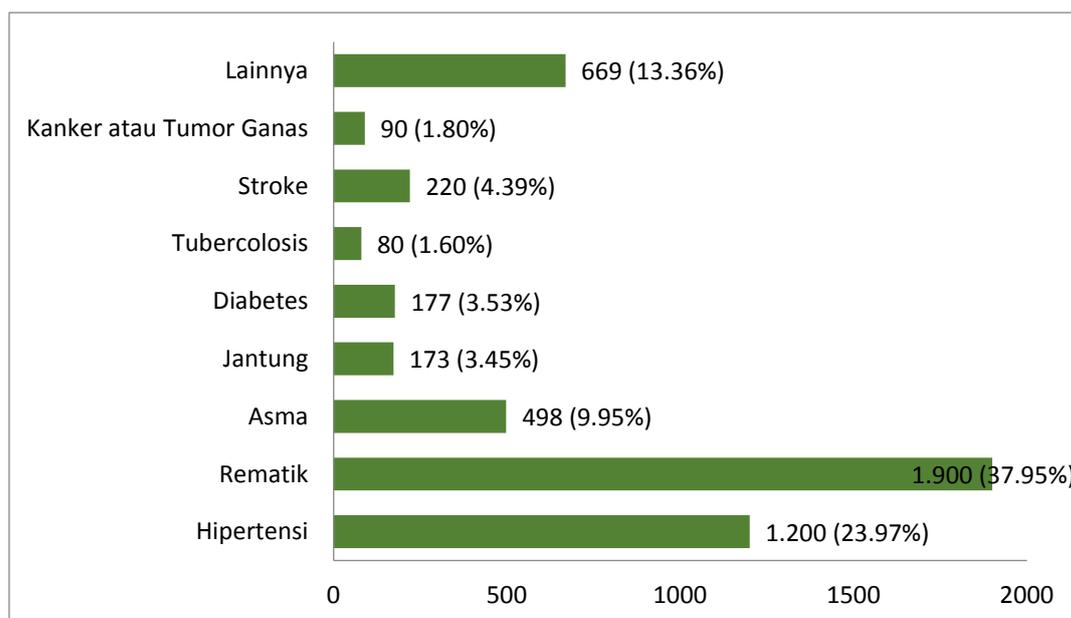
#### **d. Penyakit Kronis/Menahun**

Penyakit kronis/menahun adalah gangguan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), tidak terjadi secara tiba-tiba/spontan, dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama. Informasi mengenai penyakit kronis/menahun berdasarkan DTKS disajikan dalam **Tabel 3.12** Ada beberapa jenis penyakit kronis/menahun yang dialami oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diantaranya hipertensi, rematik, asma, jantung, diabetes, TBC, stroke, kanker, dan lainnya (seperti gagal ginjal dan sejenisnya). Pada **Tabel 3.12** terlihat bahwa jumlah anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mengidap penyakit kronis/menahun adalah 109.479 jiwa (95.63 %) sedangkan yang tidak mengidap penyakit kronis/menahun sebanyak 5.007 jiwa (4.37 %). Jumlah anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mengidap penyakit kronis/menahun dan yang tidak mengidap penyakit kronis/menahun sebesar 114.486 jiwa.

**Tabel 3.12 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mengidap/Mengidap Penyakit Kronis/Menahun**

<b>Status Penyakit Kronis</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)
Tidak Ada	109.479	95,63
Mengidap Penyakit Kronis	5.007	4.37
<b>TOTAL</b>	<b>114.486</b>	<b>100</b>

Rincian tentang jenis penyakit kronis yang dimiliki oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disajikan pada **Gambar 3.114**. Terlihat bahwa penyakit kronis/menahun yang paling banyak dialami oleh anggota rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah rematik sebesar 1.900 jiwa (37.95 %) sebaliknya jenis penyakit kronis/menahun yang paling sedikit adalah Tuberculosis (TBC) sebesar 80 jiwa (1,60 %).



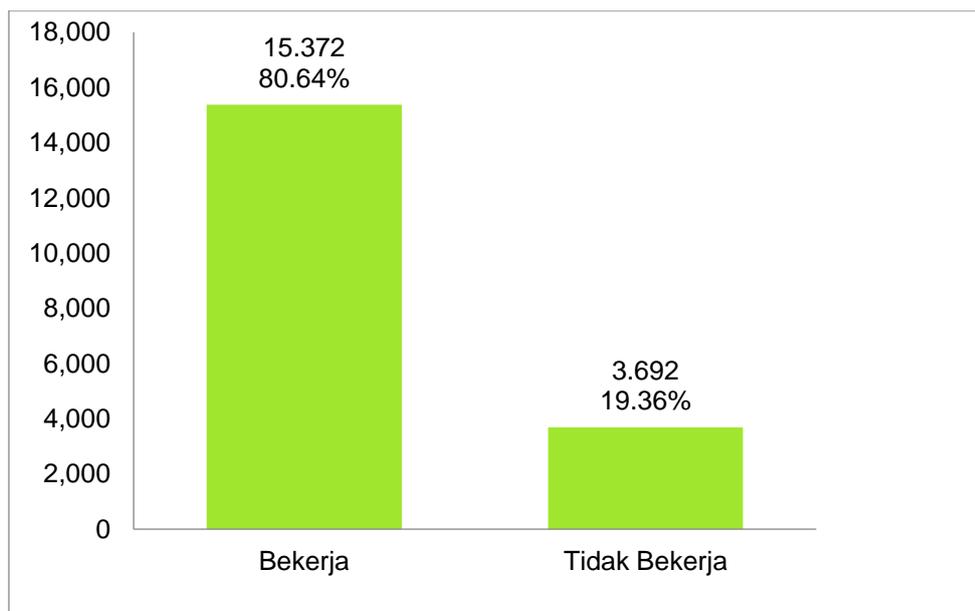
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.114 Jumlah dan Persentase Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Penyakit Kronis/Menahun**

### **3.7.4 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Ketenagakerjaan**

#### **a. Kepala Rumah Tangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja**

KRT mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan bekerja. Bekerja merupakan suatu kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Dalam DTKS terdapat KRT yang bekerja dan tidak bekerja. Informasi mengenai jumlah dan Persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bekerja dan tidak bekerja disajikan pada **Gambar 3.115**.



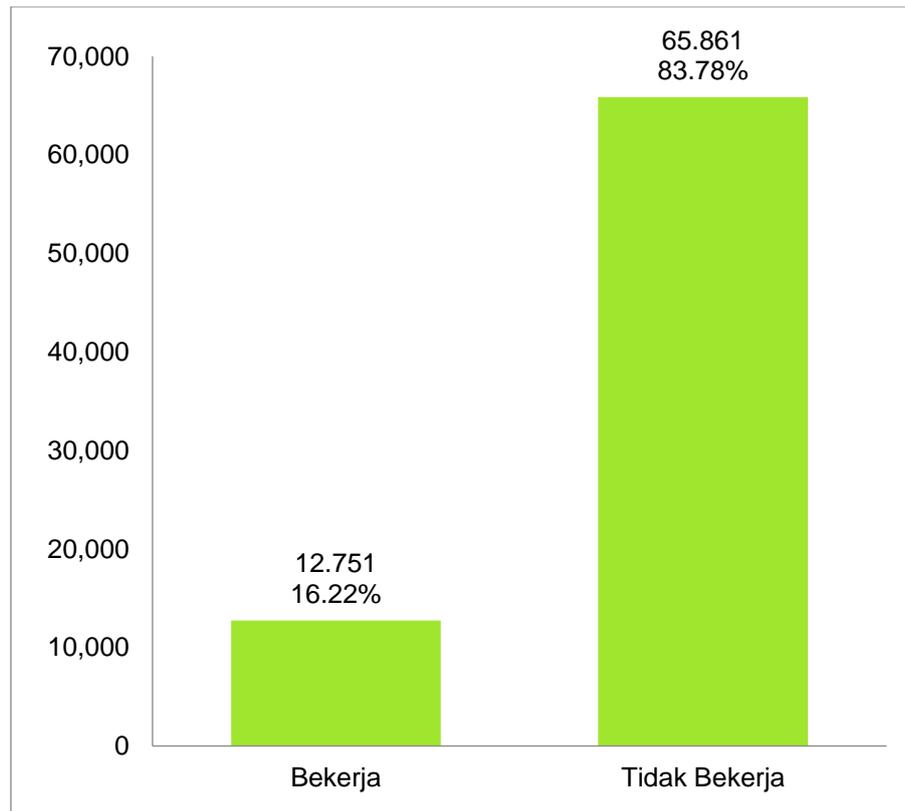
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.115 Jumlah dan Persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Bekerja dan Tidak Bekerja**

Dari **Gambar 3.115** terlihat bahwa lebih dari sebagian KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial memiliki status bekerja yaitu sebesar 15.372 jiwa (80.64 %) sedangkan KRT yang tidak bekerja berjumlah 3.692 jiwa (19.36 %).

**b. Anggota Rumah Tangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja**

Status bekerja dan tidak bekerja dalam DTKS tidak hanya pada KRT tapi juga ART yang berusia di atas lima tahun. ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bekerja dan tidak bekerja dapat dilihat pada **Gambar 3.116**.



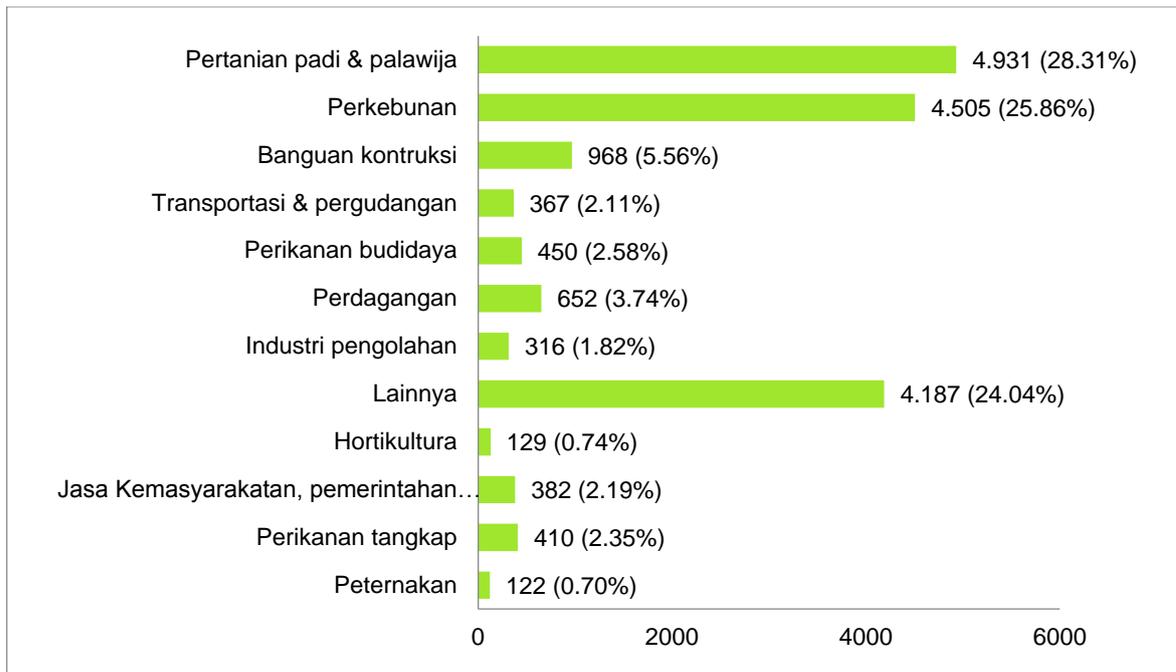
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.116 Jumlah dan Persentase ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Bekerja dan Tidak Bekerja**

ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bekerja berdasarkan **Gambar 1.9** jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang tidak bekerja, yang bekerja berjumlah 12.751 jiwa (16.22 %) sedangkan yang tidak bekerja berjumlah 65.861 jiwa (83.78 %).

**c. Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga**

KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bekerja memiliki beragam bentuk lapangan usaha dari pekerjaan utamanya yang terdiri dari pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan tangkap, peternakan, industri pengolahan, bangunan/konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan, dan lainnya. Informasi mengenai jumlah dan Persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan lapangan usaha dari pekerjaan utama KRT disajikan pada **Gambar 3.117**



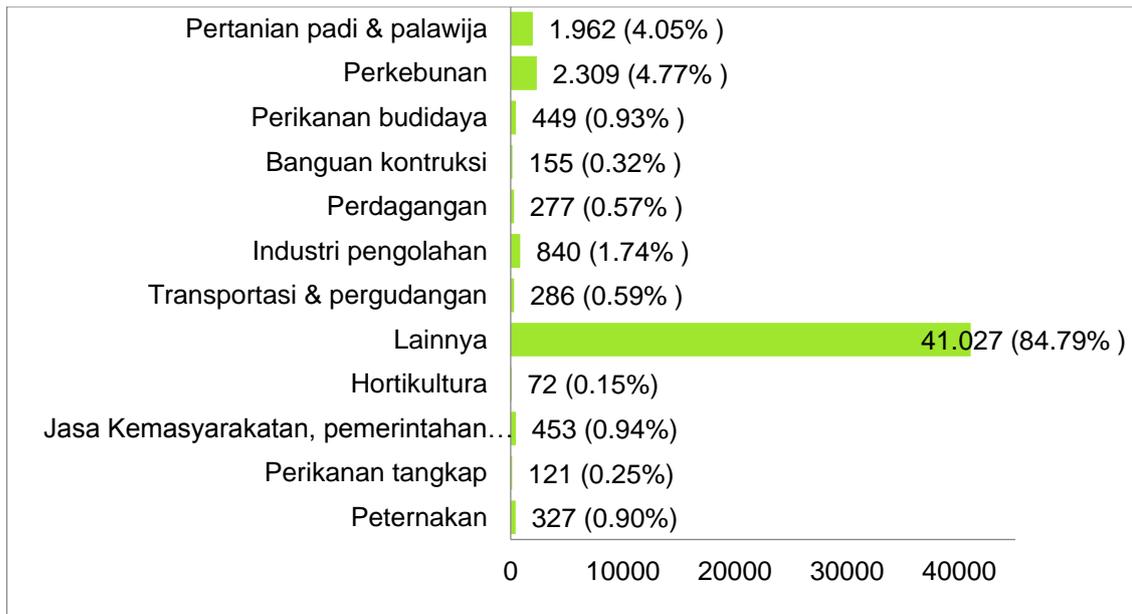
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.117 Jumlah dan Persentase KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut lapangan usaha dari pekerjaan utama KRT**

Dari **Gambar 3.117** terlihat bahwa KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial lebih banyak bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija sebesar 4.931 jiwa (28.31%) dan perkebunan sebesar 4.505 jiwa (25.86%).

**d. Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama Anggota Rumah Tangga**

ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai sektor lapangan usaha yang tidak jauh berbeda dengan dengan sektor lapangan usaha pada KRT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. **Gambar 3.118** memberikan gambaran tentang lapangan usaha dari pekerjaan utama ART.



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.118 Jumlah dan Persentase ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Lapangan Usaha**

ART Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan **Gambar 3.118** kebanyakan bekerja di sektor lainnya (84.79 %) dan perkebunan (4.77 %).

### 3.7.5 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Indikator Perumahan

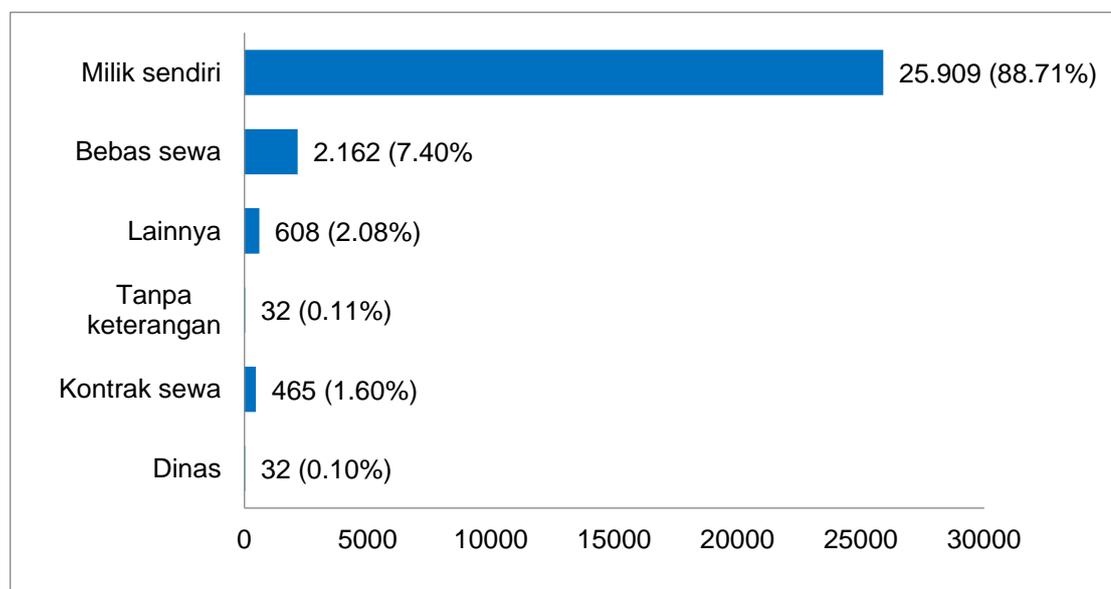
#### a. Status Tempat Tinggal

Rumah atau tempat tinggal merupakan tempat istirahat dan berlindung. Dari DTKS terlihat bahwa rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memiliki rumah sendiri menempati kelompok terbesar hingga 88.71 %. Uniknya lagi ternyata ada rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menempati rumah dinas sebesar 0,10 %. Rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang harus membayar sewa/kontrak rumah %tasenya 1.60 %. Untuk rumah tangga yang kepemilikan rumahnya adalah milik orang tua/sanak/saudara sekitar 2.08 %, sedangkan yang lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas sejumlah 0.11 %. Jumlah dan Persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati dapat dilihat pada **Tabel 3.13** dan **Gambar 3.119**

**Tabel 3.13 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal**

Status Penguasaan Tempat Tinggal	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Milik sendiri	25.909	88.71
Kontrak sewa	465	1.60
Bebas sewa	2.162	7.40
Dinas	29	0.10
Lainnya	608	2.08
Tanpa Keterangan	32	0.11
<b>TOTAL</b>	<b>29.205</b>	<b>100</b>

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

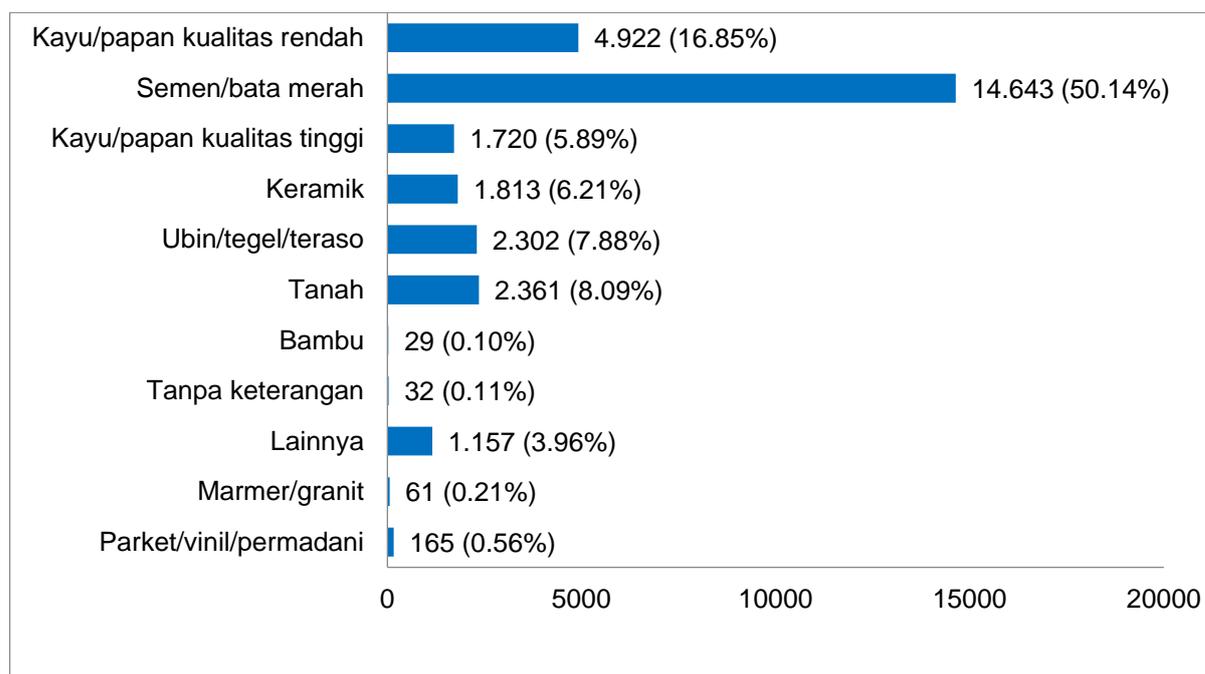


**Gambar 3.119 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal**

#### **b. Jenis Lantai**

Rumah yang baik harus memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat tinggal. Beberapa variabel yang sering digunakan untuk menilai kelayakan sebuah tempat tinggal adalah lantai, dinding dan atap. Semakin bagus kualitas dari lantai, dinding dan atap, mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang tinggi. Dari DTKS jenis lantai rumah yang ditempati rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dikelompokkan menjadi 10 jenis, seperti terlihat

pada **Gambar 3.120**



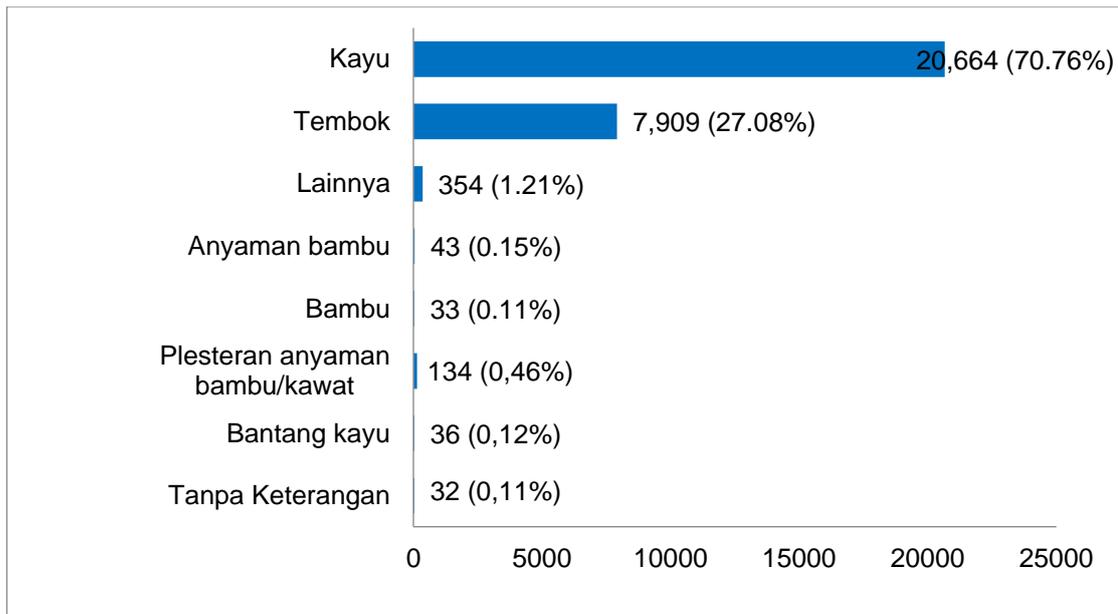
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.120 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Lantai**

Persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan rumah berjenis lantai semen/bata merah menempati urutan pertama sebesar 14.643 rumah tangga (50,14 %), diikuti oleh lantai kayu/papan kualitas rendah sebesar 4.922 rumah tangga (16.85 %), dan jenis lantai tanah sebesar 2.361 rumah tangga (8.09 %).

### c. Jenis Dinding

Informasi karakteristik berikutnya dari tempat tinggal adalah jenis dinding. Salah satu indikasi kualitas tempat tinggal adalah kualitas dinding. Secara logika, semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga maka kualitas tempat tinggalnya pun akan meningkat. Rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial memiliki rumah dengan jenis dinding beragam yaitu tembok, kayu, bambu dan beberapa jenis lainnya. **Gambar 3.121** memberikan gambaran tentang jumlah dan persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis dinding tempat tinggal.



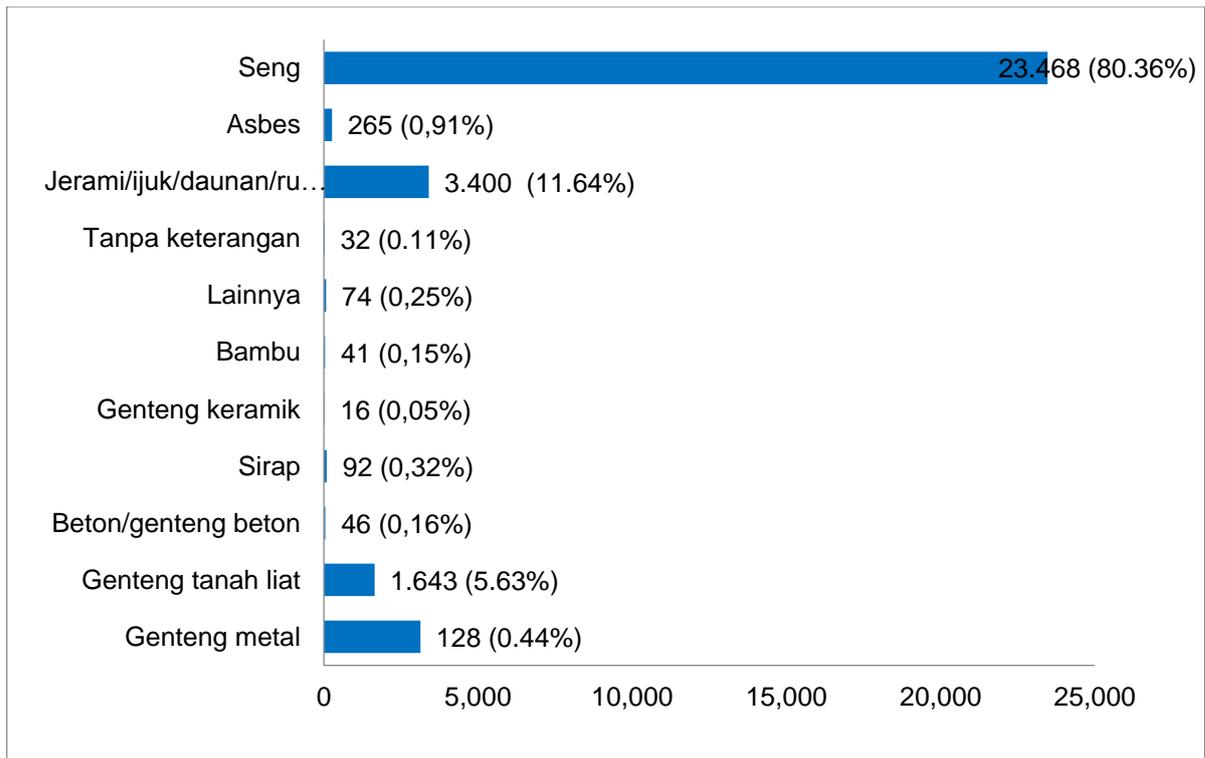
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.121 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Dinding Tempat Tinggal**

Dari **Gambar 3.121** dapat dilihat bahwa jenis dinding rumah untuk rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagian besar berjenis kayu berjumlah 20.664 rumah tangga (70,76 %), diikuti dinding tembok berjumlah 7.909 rumah tangga (27.08 %), dan dinding jenis lainnya berjumlah 354 rumah tangga (1.21 %).

#### **d. Jenis Atap**

Pada umumnya jenis atap rumah yang dipergunakan adalah genteng. Tetapi ada wilayah tertentu yang sangat sulit untuk mendapatkan genteng dan bila ada harganya pun sangat mahal sehingga mereka memilih seng atau asbes sebagai pengganti genteng. Rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam DTKS menggunakan beberapa jenis atap untuk tempat tinggal mereka. Informasi mengenai jenis atap tersebut dilihat pada **Gambar 3.122**



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

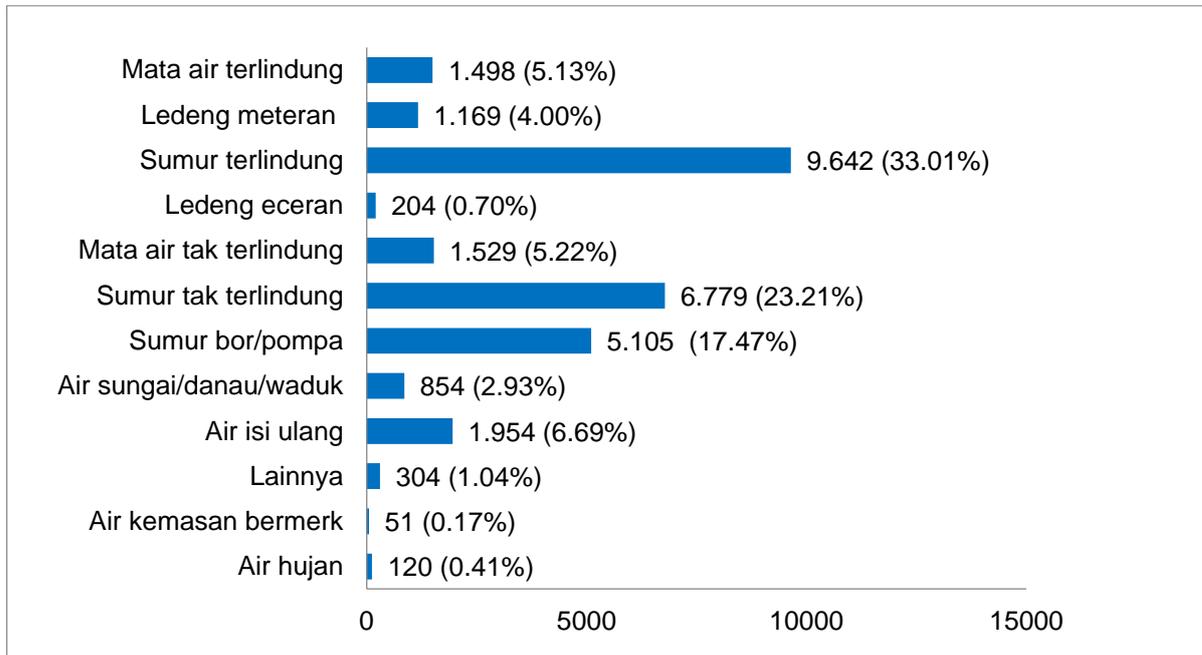
**Gambar 3.122 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Atap Tempat Tinggal**

Berdasarkan **Gambar 3.122** terlihat bahwa mayoritas rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tinggal dirumah dengan atap jenis seng dengan Persentase 80.36 % sedangkan untuk jenis atap yang paling sedikit digunakan adalah atap berjenis genteng keramik sebesar 0,05 %.

#### **e. Sumber Air Minum**

Sumber air minum yang digunakan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dibidang kesehatan sehingga air yang dipergunakan untuk minum haruslah air yang bersih. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Air bersih sangat dipengaruhi oleh sumber air minum tersebut. Semakin jauh dari sumber pencemar maka air tersebut akan semakin bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Air yang bersih dan layak untuk diminum adalah air yang bersumber seperti dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor, sumur air terlindung, dan mata air terlindung. Dari berbagai sumber air tersebut, yang banyak digunakan oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah mata air terlindung (33.01 %) seperti terlihat

pada **Gambar 3.123**



Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

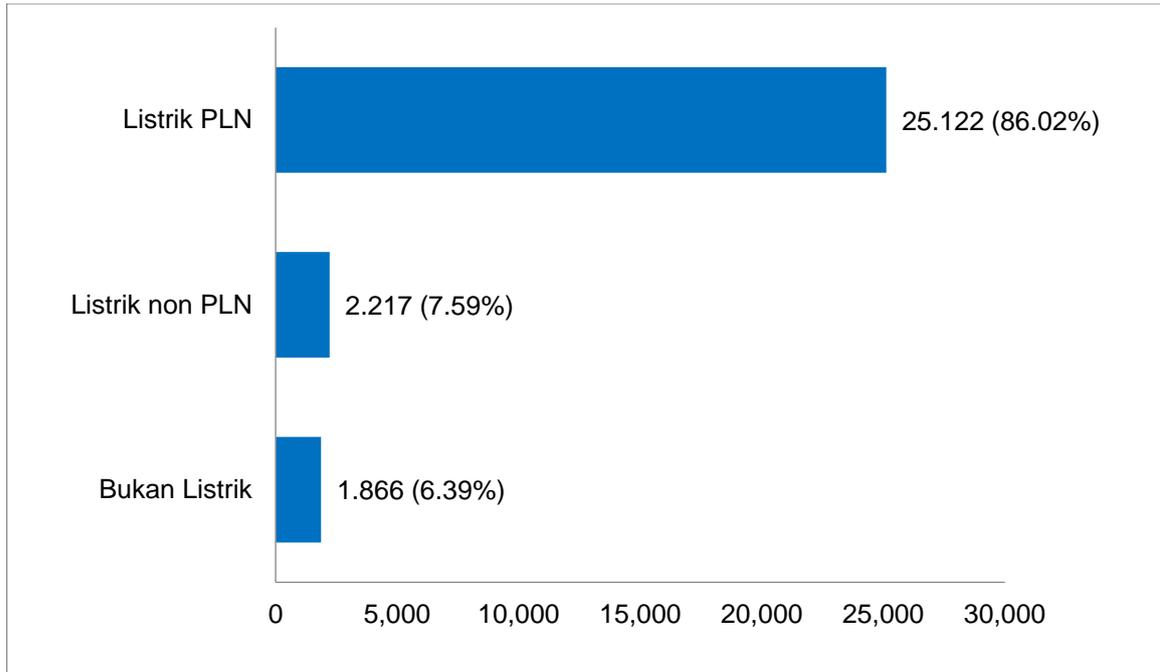
**Gambar 3.123 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Sumber Air Minum**

Selain mata air terlindung, sumber air minum yang banyak digunakan berikutnya adalah sumur tak terlindung (23.21 %), dan sumur bor/pompa (17.47 %), sedangkan rumah tangga pengguna air kemasan bermerk menempati urutan terendah (0,17 %).

#### **f. Sumber Penerangan Utama**

Sumber penerangan sangat diperlukan oleh setiap rumah tangga. Sumber penerangan utama bisa berasal dari listrik, petromak, atau pelita. Listrik memegang peranan yang vital dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa listrik telah menjadi sumber penerangan dan sumber energi dalam setiap kegiatan di rumah tangga seperti untuk peralatan memasak, setrika, mencuci atau yang lainnya.

Menurut DTKS lebih dari 86 % rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama baik listrik PLN maupun non PLN. **Gambar 3.124** menunjukkan jumlah dan Persentase sumber penerangan rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



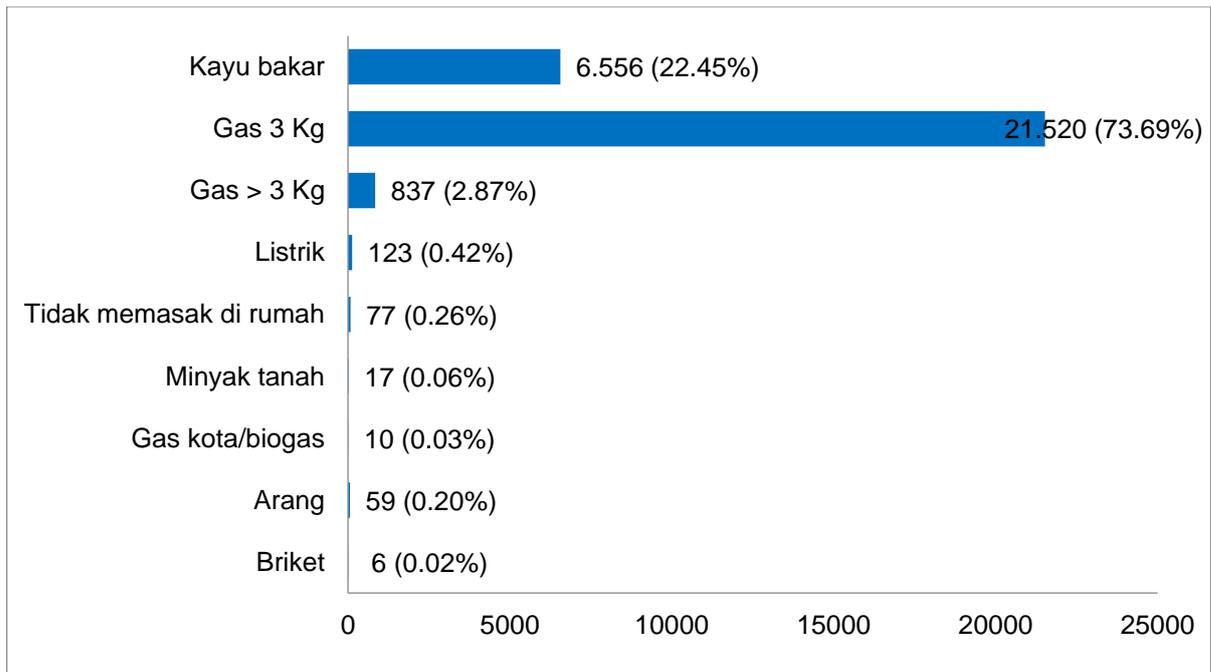
Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.124 Jumlah dan Persentase RumahTangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Sumber Penerangan Utama**

Dari **Gambar 3.124** terlihat rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menggunakan listrik PLN sebesar 25.122 rumah tangga (86.02 %), listrik non PLN sebesar 2.217 rumah tangga (7.59 %) dan yang sumber penerangannya bukan menggunakan listrik sejumlah 1.866 rumah tangga (6.39 %).

**g. Bahan Bakar Utama Untuk Memasak**

Dalam hal penggunaan bahan bakar untuk memasak pada umumnya rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menggunakan kayu bakar dan gas 3 kg untuk memasak. **Gambar 3.125** memperlihatkan jumlah dan Persentase rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut bahan bakar/energi utama untuk memasak.



Sumber : DTKS Kemensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.125 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Bahan Bakar/Energi Utama Untuk Memasak**

Rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial paling banyak menggunakan kayu bakar dan gas 3 kg sebagai bahan bakar/energi utama untuk memasak dengan jumlah dan Persentase sebesar 21.520 rumah tangga (73.69 %) menggunakan kayu bakar dan 6.556 rumah tangga (22.45 %) seperti terlihat pada **Gambar 3.125**. Hal ini sejalan dengan program dari pemerintah tentang pemberian tabung gas elpiji 3 kg yang dimulai pada tahun 2007. Pada tanggal 28 November 2007 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung Tiga Kilogram. Peraturan tersebut sebagai bagian dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas/LPG yang telah dimulai pada bulan Mei tahun 2007. Program konversi minyak tanah ke gas ini didasarkan pada penghematan subsidi sektor minyak tanah untuk rumah tangga yang diprediksikan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang terus melambung. Sementara itu bahan bakar/energi utama yang paling sedikit digunakan adalah briket sebesar 6 rumah tangga (0,02 %).

### 3.7.6 Distribusi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Kepemilikan Aset

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari aset atau barang yang dimiliki. Aset dapat berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak. Semakin besar aset yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Aset tidak bergerak yang dimiliki oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terdiri dari lahan dan rumah lain. Lahan adalah semua lahan yang dimiliki oleh rumah tangga baik lahan pertanian maupun lahan non pertanian. Termasuk juga semua lahan baik yang ada bangunan (untuk usaha atau bukan) maupun tidak. Rumah lain adalah kepemilikan rumah selain rumah yang ditempati sekarang tanpa mempertimbangkan status kepemilikan lahan rumah tersebut. Status kepemilikan aset tidak bergerak rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disajikan pada **Tabel 3.14**.

**Tabel 3.14 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kepemilikan Aset Tidak Bergerak**

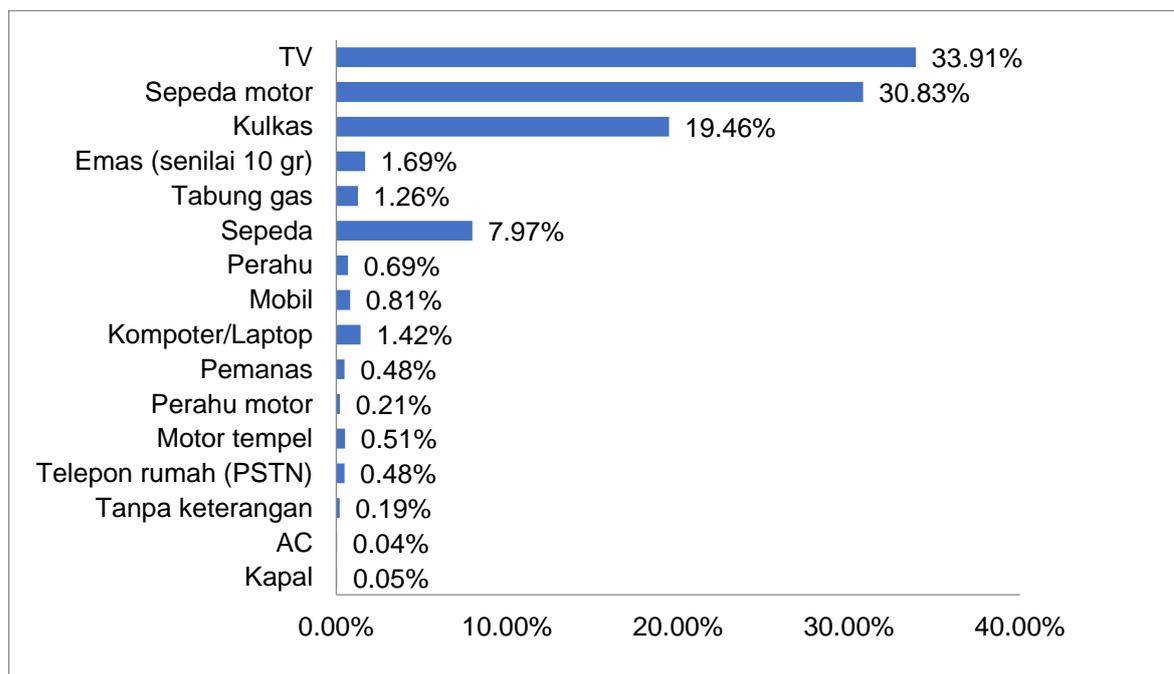
Status Kepemilikan Aset	Jenis Aset Tidak Bergerak			
	Lahan		Rumah Lain	
	Jumlah	%tase	Jumlah	%tase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Punya	20.743	71.03	18,524	63.43
Tidak Punya	8.430	28.86	4,768	16.33
Tanpa Keterangan	32	0,11	32	0,11
<b>Jumlah</b>	<b>29.205</b>	<b>100</b>	<b>29.205</b>	<b>100</b>

Sumber : DTKS Kepmensos Nomor 19/HUK/2020

Mayoritas dari rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial memiliki aset tidak bergerak berupa lahan yaitu sebesar 20.743 rumah tangga (71.03 %). Sementara itu kepemilikan aset tidak bergerak berupa rumah lain hanya sebesar 18.524 rumah tangga (0,50 %).

Selanjutnya aset bergerak yang dimiliki rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi TV, kulkas, tabung gas, emas, telepon rumah (PSTN), pemanas, AC, laptop/komputer, sepeda motor, mobil, perahu, motor tempel, perahu motor, dan kapal.

Informasi mengenai kepemilikan aset bergerak rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada **Gambar 3.126**



Sumber : DTKS Kemensos Nomor 19/HUK/2020

**Gambar 3.126 Persentase Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menurut Kepemilikan Aset Bergerak**

Berdasarkan **Gambar 3.126** dapat dilihat bahwa aset bergerak yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah TV sebesar 33,91 % dari total rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kemudian diikuti aset berupa sepeda motor sebesar 30.83 % dan kulkas 19.46 %. Sedangkan aset bergerak berupa kapal menjadi aset yang paling sedikit dimiliki oleh rumah tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu sebesar 0,05 %.

# BAB IV



## PRIORITAS PROGRAM

- 4.1 Prioritas Intervensi
- 4.2 Analisis Keterkaitan (Causal Relationship)
- 4.3 Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan

## **BAB IV PRIORITAS PROGRAM**

Bab ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang: Prioritas Intervensi (teori perubahan) atau theory of change (ToC); Analisis keterkaitan; dan Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan identifikasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui permasalahan di Kabupaten Luwu Timur terdapat dibidang apa saja yang tercermin dari hasil analisis indikator-indikator perbidangnya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut akan dilakukan intervensi dan disajikan ke dalam bentuk theory of change (ToC) yang terbagi menjadi beberapa bidang yaitu konsumsi pengeluaran, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.

### **4.1 Prioritas Intervensi**

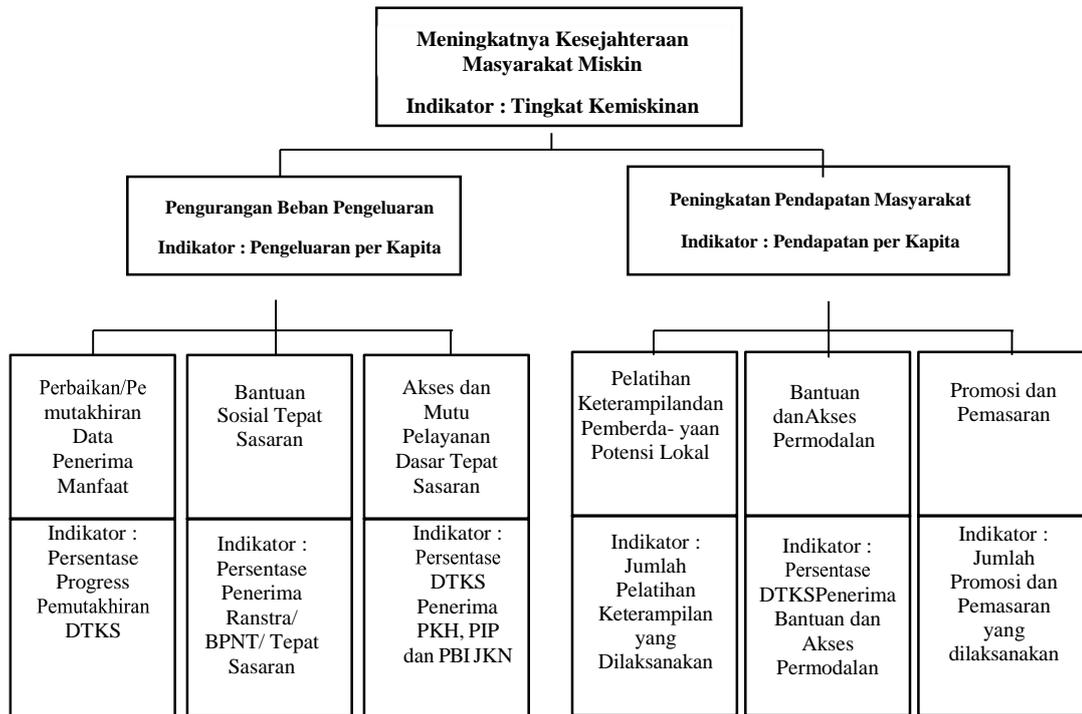
#### **4.1.1 Teori Perubahan/Theory of Change**

##### **a. Bidang Konsumsi/Pengeluaran**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab III, permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Luwu Timur yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan yang tercermin dari tingginya persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur. Tingkat kemiskinan Luwu Timur menunjukkan pencapaian yang belum optimal bila dilihat secara relatif dengan beberapa Kabupaten/Kota yang setara lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Luwu Timur di dorong oleh faktor kualitas manusia yang masih rendah walaupun secara persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,78% dan Nasional sebesar 10,14%, namun fokus penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada persentase penduduk miskin tapi lebih pada jumlah penduduk miskinnya. Sehingga di balik derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli yang cukup tinggi, namun penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan porsinya terbilang juga masih cukup besar. serta diikuti dengan daya serap tenaga kerja sektor ekonomi yang masih terbatas hal ini yang mendasari kurang optimalnya upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin.

Selain itu masih kurangnya kualitas pemutakhiran data untuk memastikan ketepatan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan serta masih kurang dimanfaatkannya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam upaya penanggulangan kemiskinan tiap OPD. Hal ini yang menjadi penyebab utama masih kurang optimalnya capaian hasil dari sisi pengurangan beban rumah tangga miskin. Untuk menguraikan permasalahan tersebut, maka

disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.



Gambar 4.1 Teori Perubahan/ToC Bidang Konsumsi/Pengeluaran

Agar tujuan menurunkan tingkat dan jumlah penduduk miskin dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada dua hal yaitu:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin, melalui:
  - Perbaikan/pemutakhiran data penerima manfaat
  - Bantuan sosial tepat sasaran
  - Peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar tepat sasaran
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin, melalui:
  - Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan potensi lokal
  - Bantuan dan akses permodalan
  - Peningkatan promosi dan pemasaran

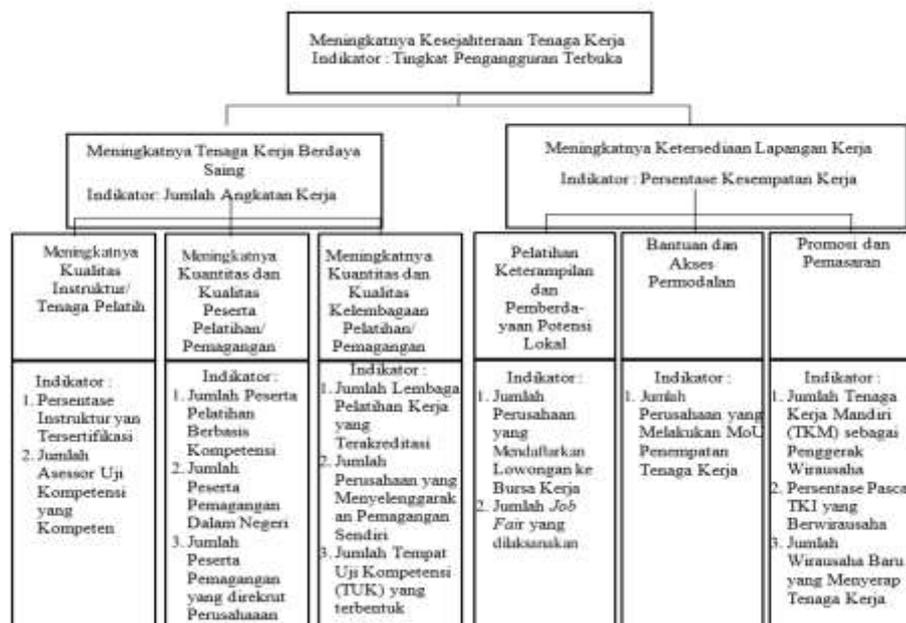
**b. Ketenagakerjaan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Luwu Timur di bidang ketenagakerjaan yaitu Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dengan indikator penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sulsel. Masih tingginya tingkat pengangguran Luwu Timur tersebut terutama disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Rendahnya minat pencari kerja untuk meningkatkan kapasitasnya disamping itu ketersediaan Pendidikan vokasional belum mampu menciptakan *link and match* antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri.

Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Sulawesi Selatan adalah adanya pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur. Selain pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Untuk mencapai tujuan tersebut, makadisusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



Gambar 4.2 Teori Perubahan/ToC Bidang Ketenagakerjaan

Agar tujuan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, melalui:

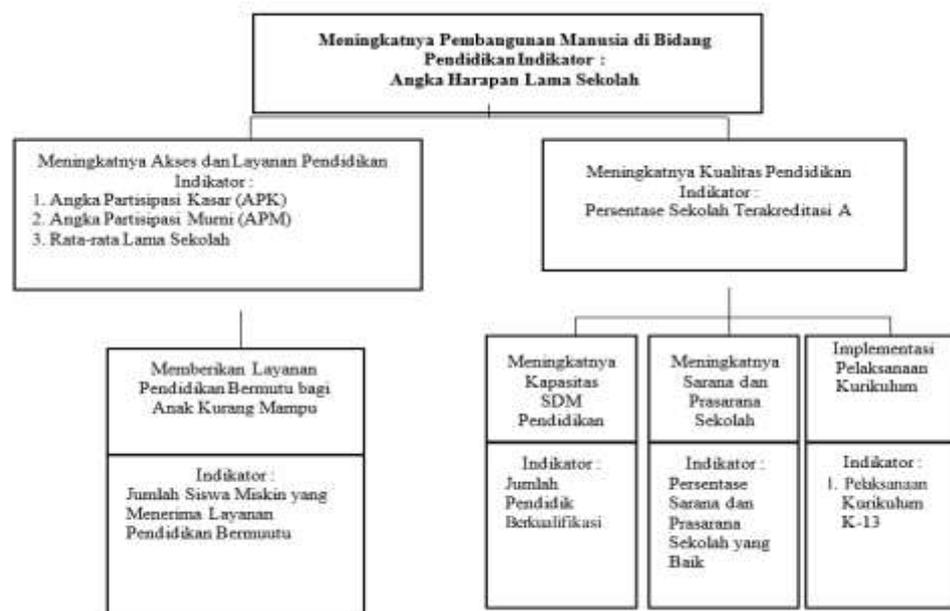
- Peningkatan kualitas instruktur/tenaga pelatih
- Peningkatan kuantitas dan kualitas peserta pelatihan dan pemagangan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelatihan dan pemagangan
- Penguatan kompetensi jurusan SMK yang sesuai Kebutuhan pasar kerja

2. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, melalui:

- Meningkatnya informasi pasar kerja yang dapat diakses
- Peningkatan jejaring kerjasama penempatan tenaga kerja
- Perluasan kerja sektor informal

**c. Bidang Pendidikan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pendidikan yaitu Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas dengan indikator Harapan Lama Sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



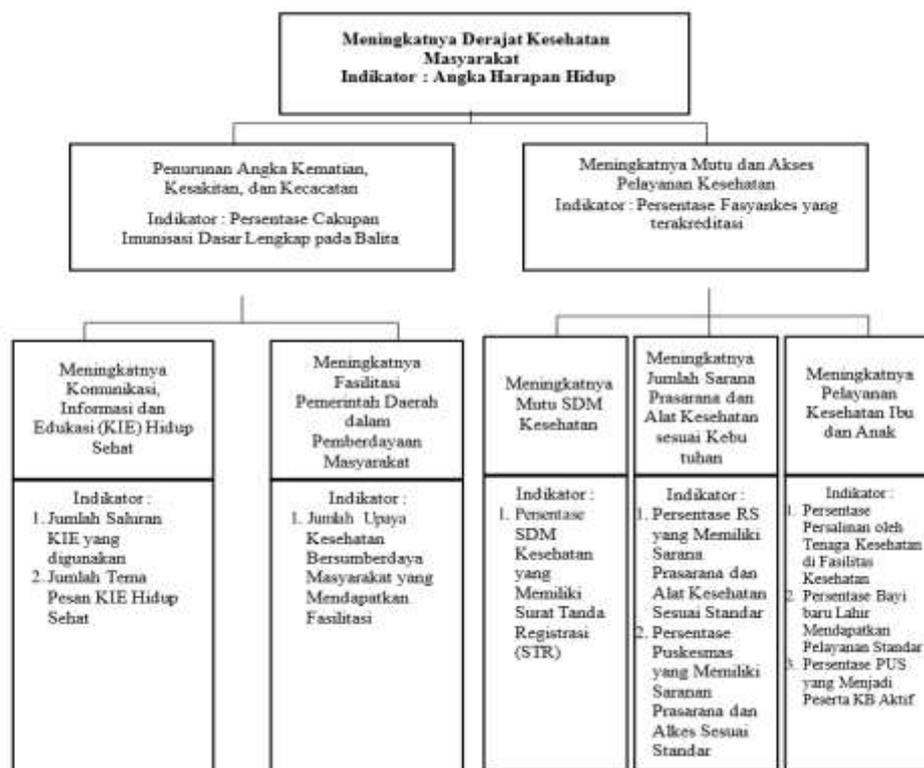
Gambar 4.3 Teori Perubahan/ToC Bidang Pendidikan

Agar tujuan meningkatkan Harapan Lama Sekolah dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan melalui :
  - pemberian layanan pendidikan bermutu bagi anak kurang mampu
2. Meningkatnya kualitas pendidikan, melalu
  - Peningkatan kapasitas SDM pendidikan
  - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
  - Implementasi pelaksanaan kurikulum

#### d. Bidang Kesehatan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bidang kesehatan yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat yang tercermin dari Angka Harapan Hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



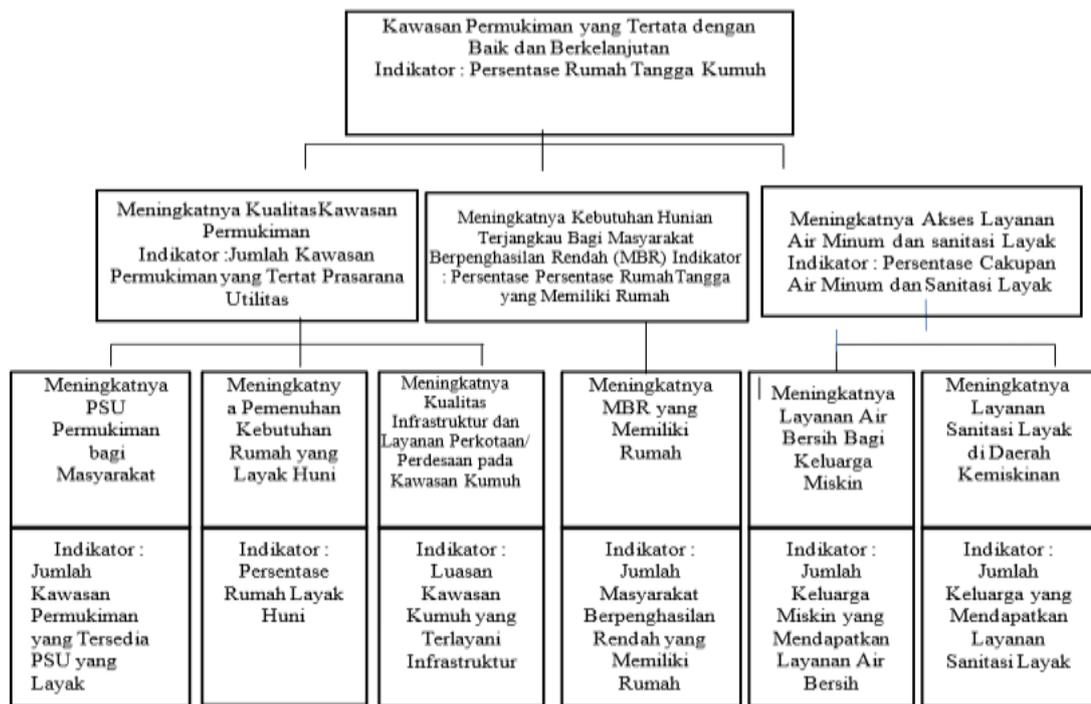
Gambar 4.4 Teori Perubahan/*ToC* Bidang Kesehatan

Agar tujuan meningkatkan Angka Harapan Hidup dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Menurunnya angka kematian, kesakitan, dan kecacatan, melalui:
  - Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi hidup sehat
  - Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan, melalui:
  - Meningkatnya mutu SDM Kesehatan
  - Meningkatnya jumlah sarana prasarana dan alat Kesehatan sesuai kebutuhan
  - Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak

**e. Bidang Infrastruktur Dasar**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bidang infrastruktur dasar yaitu Kawasan Permukiman yang Tertata dengan Baik dan Berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut



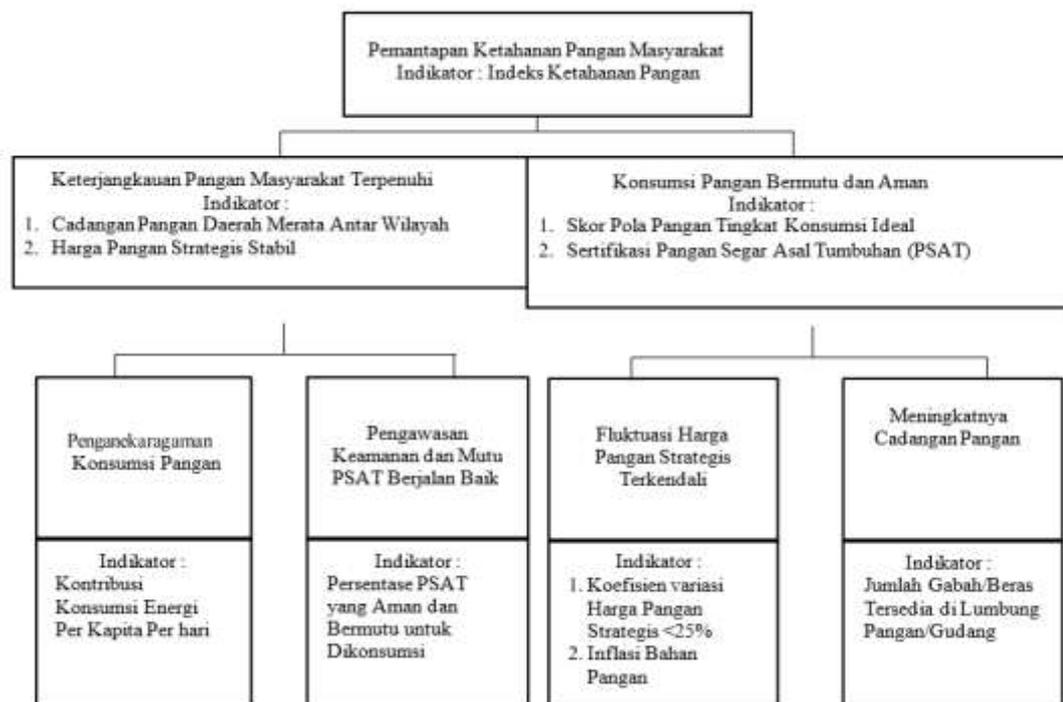
Gambar 4.5 Teori Perubahan/ToC Bidang Infrastruktur Dasar

Agar tujuan meningkatkan kawasan permukiman yang berkelanjutan dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 3 hal yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, melalui:
  - Meningkatnya PSU permukiman bagi masyarakat
  - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni
  - Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan perkotaan/pedesaan pada kawasan kumuh
2. Meningkatnya kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui peningkatan masyarakat MBR yang memiliki rumah
3. Meningkatnya akses layanan air minum dan sanitasi yang layak, melalui:
  - Meningkatnya layanan air bersih bagi keluarga miskin
  - Meningkatnya layanan sanitasi layak di daerah kemiskinan

#### f. Bidang Ketahanan Pangan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di bidang ketahanan pangan yaitu Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini.



Gambar 4.6 Teori Perubahan/*ToC* Bidang Ketahanan Pangan

Agar tujuan Pemantapan Ketahanan Pangan dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal yaitu:

1. Terpenuhinya Keterjangkauan Pangan Masyarakat, melalui:
  - Fluktuasi harga pangan strategis yang terkendali
  - Peningkatan cadangan pangan
2. Konsumsi Pangan Bermutu dan Aman, melalui:
  - Penganekaragaman konsumsi pangan
  - Pengawasan keamanan dan mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang berjalan baik

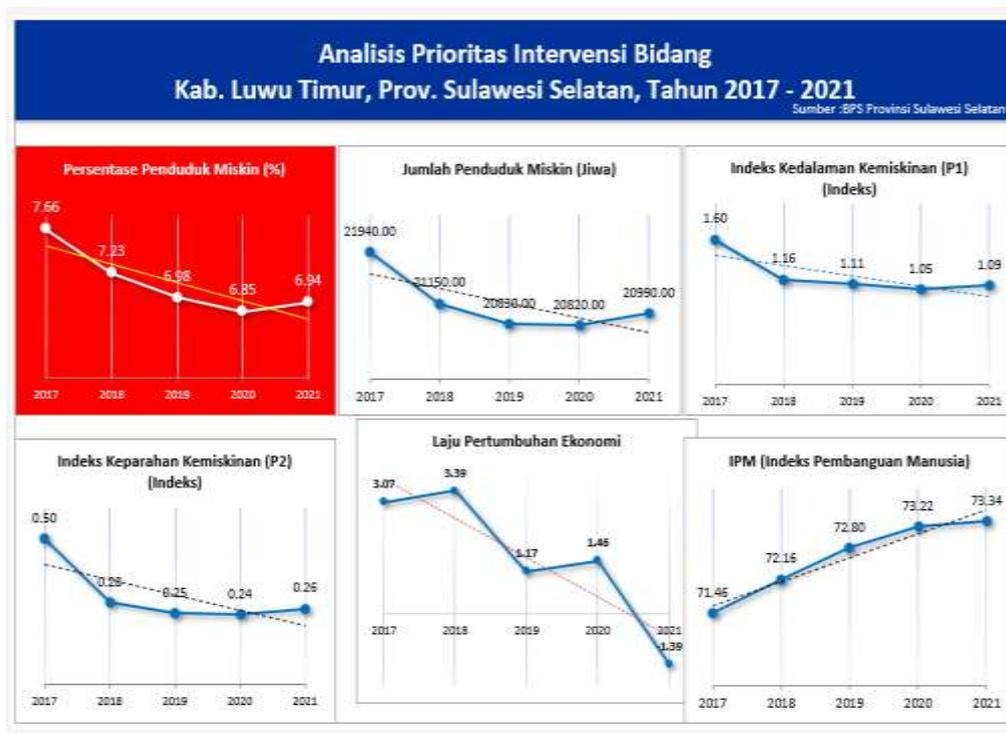
#### **4.2 Analisis Keterkaitan (*Causal Relationship*)**

Analisis keterkaitan digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu program/kegiatan terhadap *outcome* yang telah dihasilkan. Melalui analisis keterkaitan kita dapat mengetahui apakah capaian yang dihasilkan disebabkan oleh intervensi kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan program/kegiatan atau bukan. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam melakukan analisis keterkaitan sehingga dapat ditentukan faktor penentu keberhasilan suatu capaian. Dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu capaian, Bappelitbangda Kabupaten Luwu Timur melakukan diskusi/FGD untuk menganalisis lebih detil bersama dengan perangkat daerah terkait.

Setelah dilakukan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran antara / *intermediate outcome* pada masing-masing bidang seperti yang ditunjukkan dalam grafik ToC, selanjutnya dilakukan analisis keterkaitan untuk mengidentifikasi apakah program/kegiatan yang telah dilakukan berpengaruh terhadap capaian sasaran antara yang pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan secara keseluruhan. Jika diketahui bahwa suatu kegiatan tidak memiliki pengaruh terhadap hasil capaian, maka perlu dipertimbangkan kegiatan tersebut apakah tetap dianggarkan atau tidak. Sebaliknya jika ada kegiatan yang belum dilaksanakan namun memiliki pengaruh terhadap hasil capaian, maka kegiatan tersebut perlu dialokasikan dalam rangka mendukung tujuan yang ingin dicapai.

### a. Bidang Konsumsi

Untuk mencapai indikator Tingkat Kemiskinan yang rendah terdapat 2 sasaran antara yang digunakan yaitu Pengurangan Beban Pengeluaran dengan indikator pengeluaran per kapita dan sasaran antara Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan indikator pendapatan per kapita.



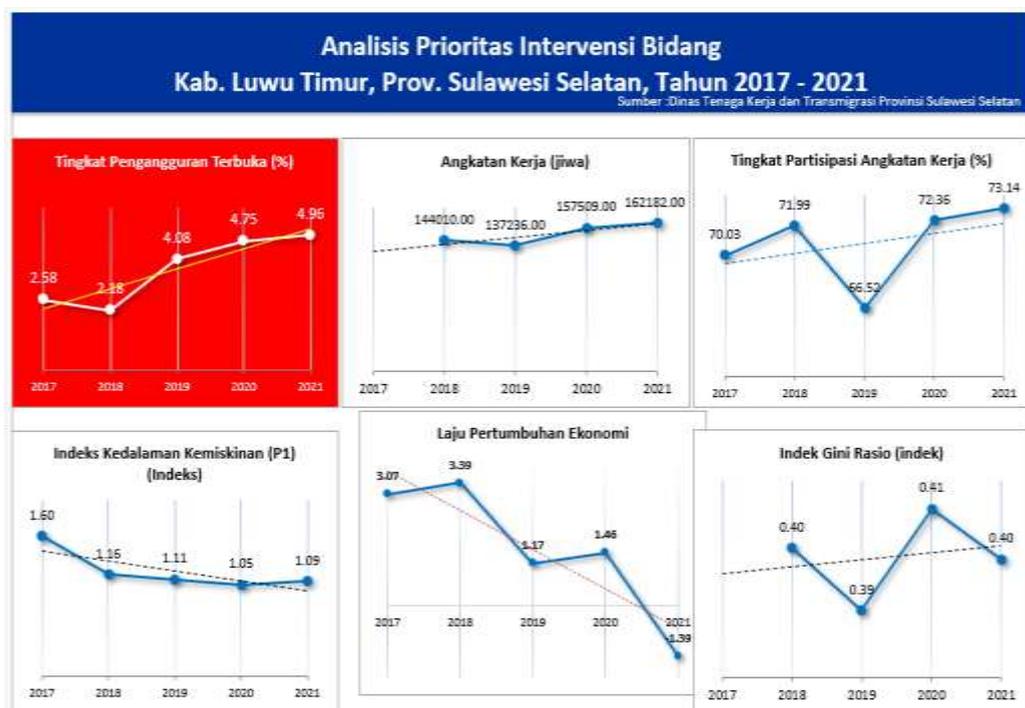
Gambar 4.7 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Konsumsi/Pengeluaran

Berdasarkan grafik keterkaitan di atas, terlihat bahwa persentase penduduk miskin berkaitan dengan capaian jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Dimana pola perkembangannya hampir sama untuk keempat indikator tersebut. Tren penurunan keempat indikator tersebut seiring dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Hal yang berbeda dengan indikator IPM yang menunjukkan tren kenaikan, hal ini semakin menguatkan wacana peningkatan IPM akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Terhusus untuk indikator laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren penurunan semakin memperjelas bahwa pengaruh pandemic Covid-19 masih sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi pasca tahun 2020. Hal yang sama terjadi disebagaian besar daerah di Indonesia. Idealnya kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya akan berpengaruh pada penurunan persentase penduduk miskin. Tren penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab mengapa

penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur masih cenderung lambat dalam lima tahun terakhir.

### b. Bidang Ketenagakerjaan

Pada sektor ketenagakerjaan, yang masih menjadi permasalahan di Kabupaten Luwu Timur yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tujuan tersebut akan tercapai dengan meningkatkan daya saing dan memperluas kesempatan kerja sebagai sasaran antara yang harus diraih. Untuk melihat keterkaitan sasaran antara tersebut dengan tujuan utamanya dapat dilihat berdasarkan gambar di bawah ini.



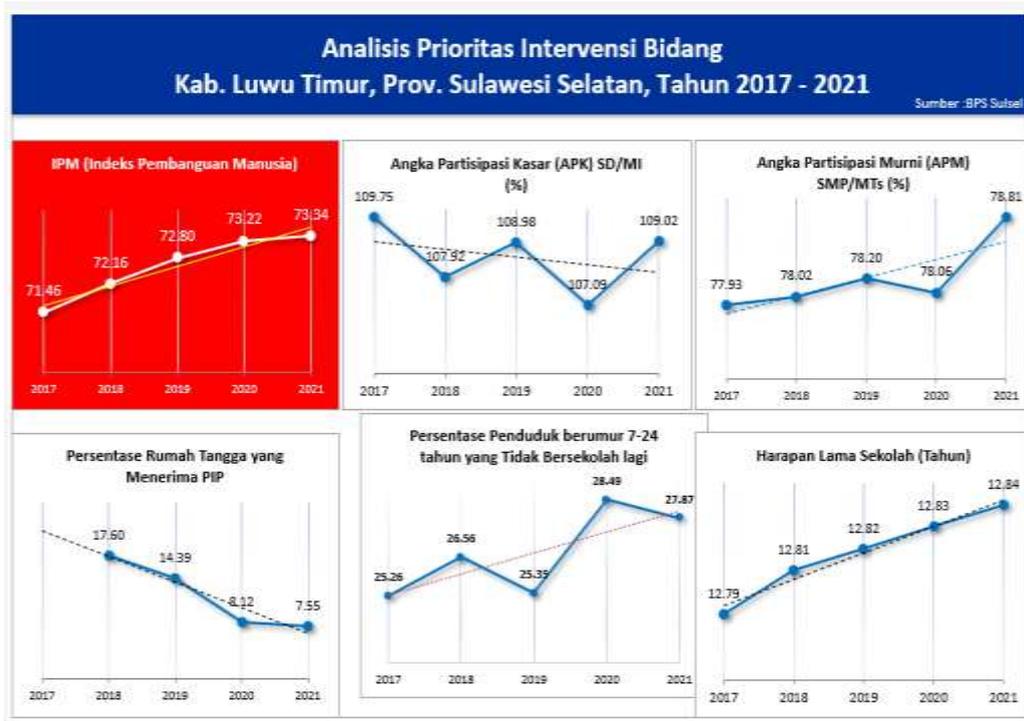
Gambar 4.8 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

Perkembangan tenaga kerja formal berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana ketika terjadi kenaikan Angkatan kerja ternyata tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan, begitu juga dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja menunjukkan tren kenaikan seiring dengan kenaikan TPT. Hal yang sebaliknya terjadi pada indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1), laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini ratio. Dimana penurunan capaian ketiga indikator tersebut ternyata diikuti dengan kenaikan TPT. Salah satu penyebab utama peningkatan TPT adalah semakin berkurangnya kesempatan kerja. Walaupun persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan. Jika capaian indikator kesempatan kerja menurun maka hal ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran

terbuka. Sehingga kondisi ekonomi yang stabil dengan tersedianya kesempatan kerja yang luas akan mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka.

### c. Bidang Pendidikan

Pada sektor pendidikan, permasalahan yang perlu diintervensi di Kabupaten Luwu Timur yaitu harapan lama sekolah. Adapun APK dan APM dan rata-rata lama sekolah sebagai sasaran antara yang harus tercapai, termasuk juga peningkatan kualitas pendidikan. Gambaran jelas mengenai keterkaitan sasaran antara dan tujuan utama dapat dilihat pada gambardibawah ini:

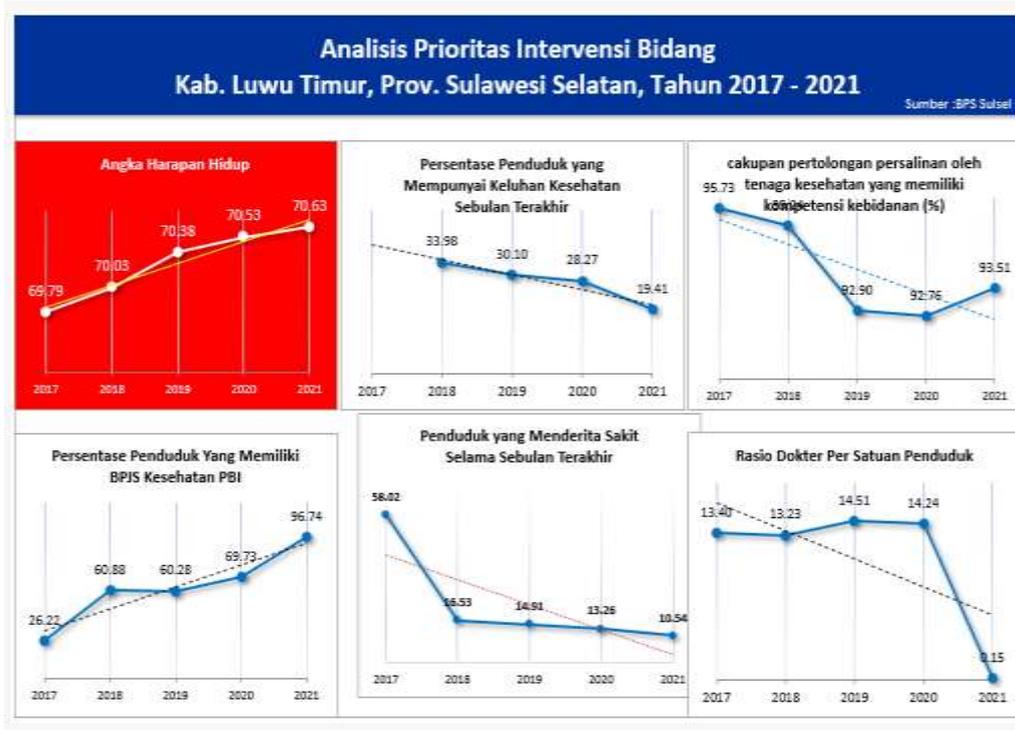


Gambar 4.9 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

Dari gambar analisis keterkaitan diatas, diperoleh gambaran bahwa yang berkaitan kuat dengan peningkatan IPM adalah peningkatan APM SMP/MTs juga peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah. Sedangkan untuk penurunan capaian indikator APK SD/MI, Persentase Rumah Tangga yang Menerima PIP dan kenaikan persentase penduduk berumur 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi tidak mempengaruhi peningkatan IPM. Hal ini disebabkan jumlah siswa penerima PIP masih sangat sedikit jika dibandingkan jumlah siswa yang berada dalam rumah tangga miskin dan juga jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi masih dalam batas kewajaran sehingga kenaikan capaiannya belum berpengaruh. Jika harapan lama sekolah mengalami kenaikan maka akan sejalan dengan peningkatan capaian indeks pembangunan manusia (IPM).

#### d. Bidang Kesehatan

Pada sektor kesehatan, permasalahan yang perlu diintervensi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu umur harapan hidup saat lahir, prevalensi stunting, imunisasi dasar lengkap, persalinan oleh tenaga dokter atau bidan, tingkat kesakitan (morbiditas), serta peningkatan kualitas sarana kesehatan sebagai sasaran antara yang ingin diraih. Adapun keterkaitan antar indikator tersebut sebagai berikut:

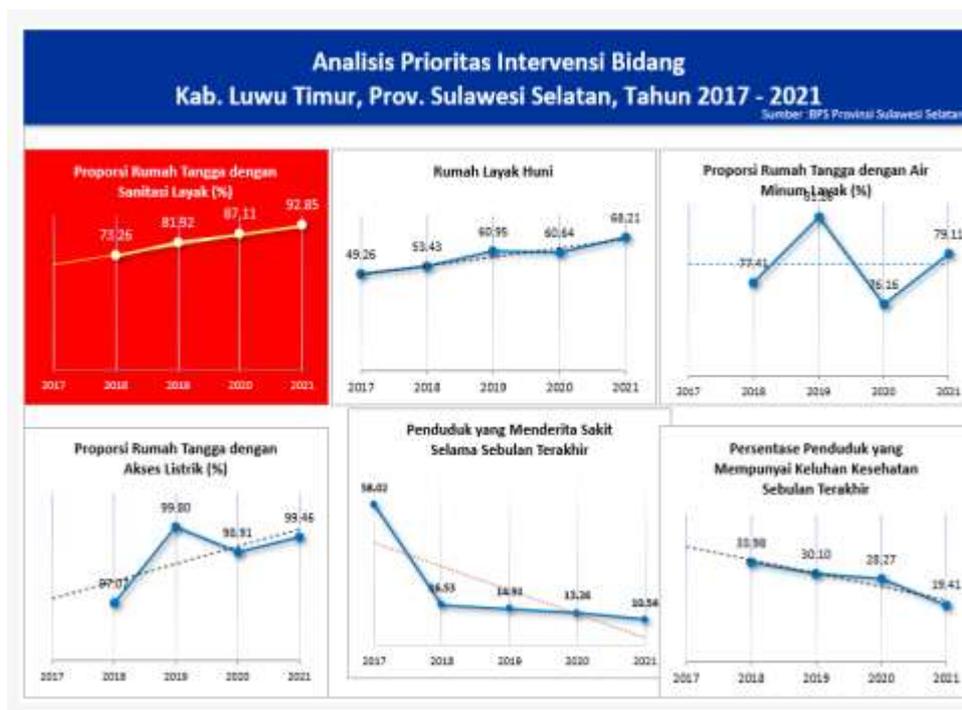


Gambar 4.10 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

Semua indikator sasaran antara berkaitan dengan tujuan utama yang ingin dicapai yaitu usia harapan hidup. Penurunan capaian indikator persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan selama sebulan terakhir, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dan penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir juga berkaitan dengan kenaikan usia harapan hidup, hal ini bisa dilihat dari pola perkembangan indikator-indikator tersebut. Sementara peningkatan capaian indikator persentase penduduk yang memiliki BPJS Kesehatan juga ikut berpengaruh menaikkan angka harapan hidup karena semakin banyak warga yang terjamin kesehatannya secara gratis. Sementara penurunan capaian indikator Rasio Dokter per satuan penduduk tidak ikut berpengaruh pada peningkatan angka harapan hidup.

### e. Bidang Infrastruktur Dasar

Pada sektor infrastruktur, permasalahan yang perlu diintervensi di Kabupaten Luwu Timur yaitu akses sanitasi dan air minum yang layak, serta kepemilikan rumah sebagai sasaran antara, sementara tujuan utamanya menurunnya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Adapun gambaran keterkaitannya sebagai berikut.

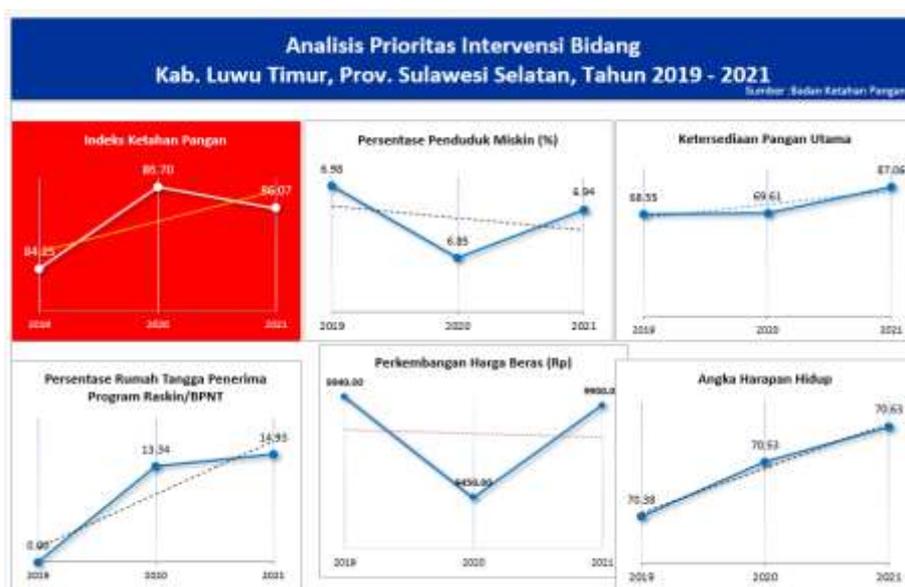


Gambar 4.11 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar/Perumahan

Hampir semua indikator sasaran antara berkaitan erat dengan tujuan utama, yaitu meningkatnya capaian rumah layak huni atau menurunnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah kumuh. Peningkatan capaian Indikator Proporsi Rumah tangga dengan sanitasi layak sangat erat kaitannya dengan peningkatan capaian proporsi rumah tangga dengan air minum layak, rumah layak huni dan proporsi rumah tangga dengan akses listrik. Sedangkan capaian Indikator Persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan dan penduduk yang menderita sakit dalam sebulan terakhir sangat dipengaruhi oleh capaian indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak. Semakin tinggi capaian indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak maka akan semakin bagus capaian dua indikator Kesehatan tersebut.

## f. Bidang Ketahanan Pangan

Akses rumah tangga terhadap pangan secara umum dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, institusi, jaringan distribusi dan kapasitas produksi antar wilayah dan musim, yang berdampak pada pasokan dan stabilitas harga. Dari semua indikator tersebut bisa tergambarkan dari indeks ketahanan pangan (IKP) yang dijadikan sebagai tujuan utama yang ingin diraih dibidang ketahanan pangan. Sementara sasaran antara yang ingin dicapai yaitu keterjangkauan pangan yang bisa terpenuhi dan konsumsi pangan yang aman dan bermutu. Adapun gambaran keterkaitan indikator sasaran antara dan tujuan utama bisa tergambar dari perbandingan pola perkembangannya sebagai berikut.



Gambar 4.12 Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan

Adanya peningkatan capaian Indeks Ketahanan Pangan berkaitan dengan peningkatan capaian indikator ketersediaan pangan utama dan persentase rumah tangga yang menerima program Raskin/BPNT. Sementara itu, pola keterkaitan juga terlihat antara perkembangan harga beras dengan indeks ketahanan pangan, dimana penurunan harga beras berkaitan dengan kenaikan indeks ketahanan pangan. Hal yang sama berlaku juga pada indikator persentase penduduk miskin, semakin bagus capaian indeks ketahanan pangan maka akan mengakibatkan penurunan persentase penduduk miskin. Peningkatan Indikator Angka Harapan Hidup juga sangat ditunjang oleh peningkatan capaian Indeks ketahanan pangan.

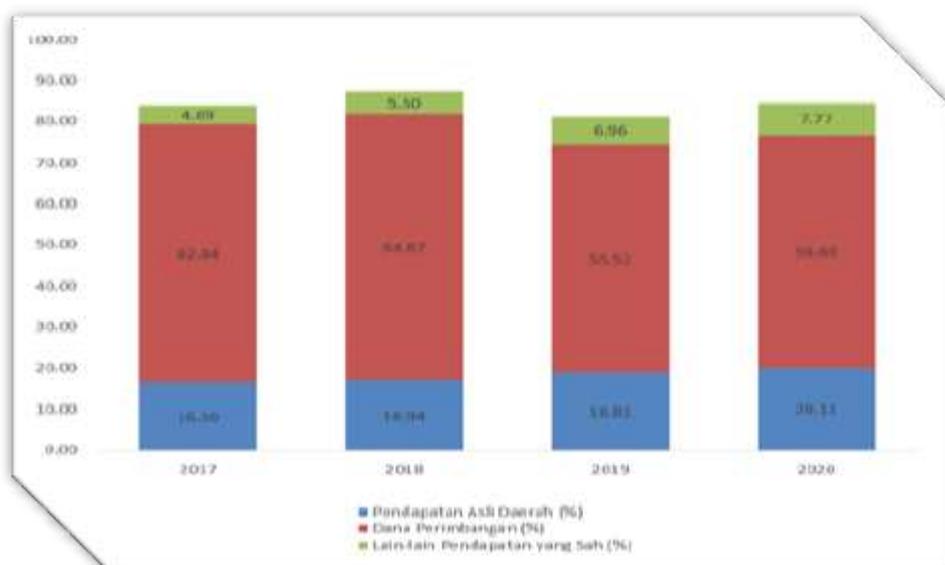
### 4.3. Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka pelayanan publik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### 4.3.1. Analisis Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan. Pandemi covid-19 tidak merubah tren positif kenaikan pendapatan daerah pada tiga tahun sebelumnya (2017-2019).

Berdasarkan komposisinya, dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah, walaupun trennya cenderung menurun dari 62,84% di tahun 2017 menjadi 56,60% di tahun 2020



Sumber: [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

Gambar 4.13 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 – 2020

Dari komposisi pendapatan daerah tahun 2017-2020, dominasi dana perimbangan menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal daerah Kabupaten Luwu Timur cukup rendah.



Dari Gambar 4.14 dapat dilihat hubungan kapasitas fiskal dan tingkat kemiskinan terbagi kedalam 4 kelompok kuadran kabupaten/kota sebagaimana tabel 4.1 berikut:

<b>Kuadran I</b> (Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan tinggi)	Kab Jeneponto, Kab Pangkajene Kepulauan, Kab Luwu Utara, Kab Luwu, Kab Enrekang, Kab Tana Toraja, Kab Toraja Utara, Kab Bone, Kab Maros
<b>Kuadran II</b> (Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan tinggi)	Kab Sinjai, Kab Bulukumba, Kab Takalar, Kab Gowa, Kab Pinrang, Kab Wajo
<b>Kuadran III</b> (Kapasitas fiskal rendah dan kemiskinan rendah)	Kab Kepulauan Selayar
<b>Kuadran IV</b> (Kapasitas fiskal tinggi dan kemiskinan rendah)	Kab Barru, Kab Bantaeng, Kab Soppeng, Kota Palopo, Kab Sidenreng Rappang, Kab Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Pare-pare

Tabel 4.1 Pengelompokan Kabupaten/Kota menurut Kapasitas Fiskal dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020

Sumber: Kemenkeu dan BPS 2020, diolah.

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran I semestinya menjadi perhatian utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu kabupaten/kota yang berada di kuadran I perlu memprioritaskan kebijakan penganggarannya untuk efektivitas belanja daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Sementara Kabupaten Luwu Timur masih berada pada prioritas IV hal ini menggambarkan bahwa kondisi kapasitas fiskal untuk upaya penanggulangan kemiskinan masih efektif.

### **4.3.2. Analisis Belanja Daerah**

#### **4.3.2.1. Struktur Belanja Daerah**

Komponen belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pelayanan publik. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2020) komponen Belanja Tidak Langsung proporsinya lebih besar dibandingkan Belanja

Langsung sebagaimana gambar 4.15 berikut:

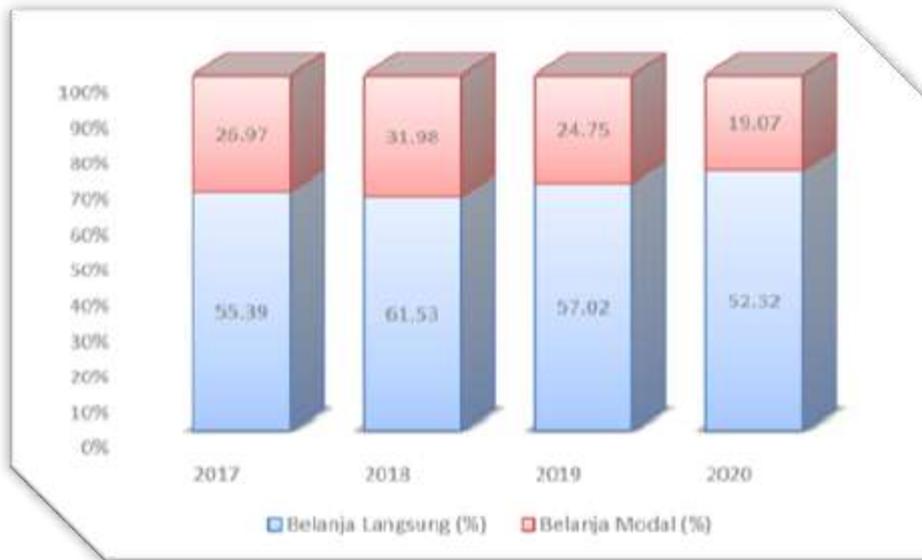


Sumber: [djk.kemenkeu.go.id](http://djk.kemenkeu.go.id).

Gambar 4.15 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Meskipun belanja tidak langsung (BTL) proporsinya lebih besar tetapi di dalamnya bukan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai saja. Dalam komponen BTL juga terdapat belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain diwujudkan melalui Bantuan Siswa Miskindan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pada komponen belanja modal, persentasenya terhadap total belanja langsung pada tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan wajib pendidikan (pendidikan menengah) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berkonsekuensi adanya tambahan pembiayaan khususnya untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Penyebab lainnya adalah pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) tidak lagi menjadi prioritas pembangunan di tahun berikutnya. Proporsi Belanja Modal terhadap total belanja Langsung tahun anggaran 2017-2020 sebagaimana gambar 4.16 di bawah ini.

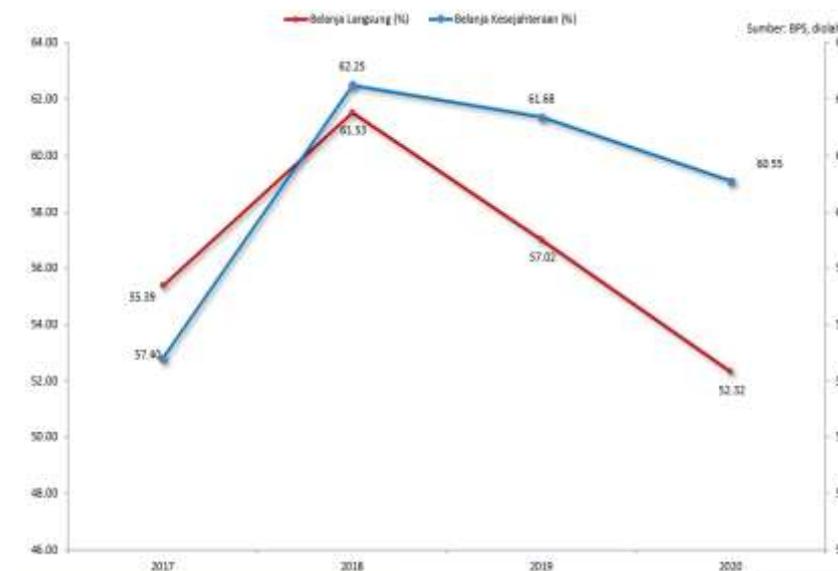


Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 4.16 Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

#### 4.3.2.2. Analisis Belanja Kesejahteraan

Pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat (belanja hibah dan bantuan sosial dibagi jumlah penduduk miskin) dari tahun 2017 sampai 2020 memiliki tren peningkatan dari 55,22% di tahun 2017 menjadi 59,74% di tahun 2020. Berbeda dengan perkembangan Belanja Tidak Langsung yang cenderung menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2017 sampai 2020. Dari 57,40% di tahun 2017 menjadi 60,55% di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 4.19 di bawah ini:



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 4.19 Perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Kesejahteraan Kabupaten

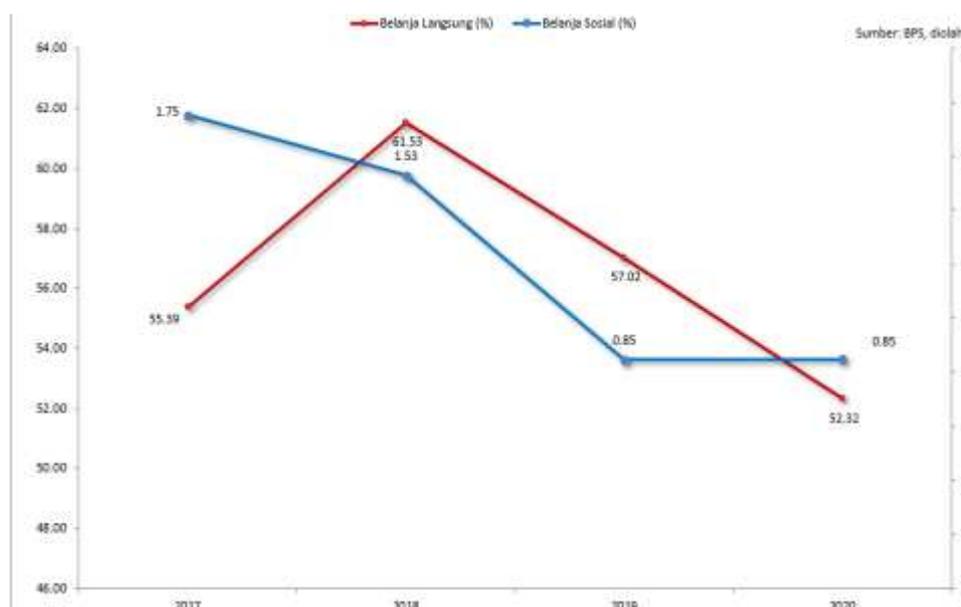
Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Dari berbagai kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara umum kebijakan belanja daerah pada APBD Kabupaten Luwu Timur sudah sesuai dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, ditandai dengan peningkatan belanja kesejahteraan terutama dalam periode 2017-2020. Meskipun tren untuk belanja langsung bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan.

Jika Pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat (belanja hibah dan bantuan sosial dibagi jumlah penduduk miskin) selalu mengalami peningkatan, maka hal ini akan membantu pemda mempercepat upayanya untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur.

#### 4.3.2.3. Analisis Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Analisis belanja pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menjaga dan melindungi kemampuan ekonomi penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan ekonomi yang terjadi, sekaligus sebagai penyangga untuk tidak masuk kedalam gerbang kemiskinan.



Sumber: [djk.kemenkeu.go.id](http://djk.kemenkeu.go.id), diolah.

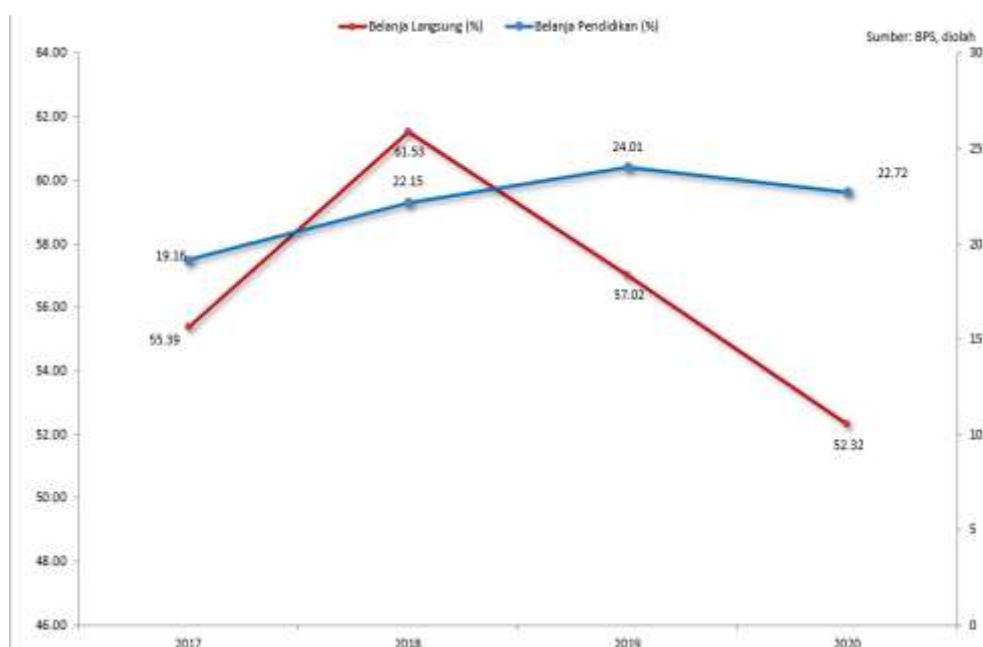
Gambar 4.20 Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Dari kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja fungsi perlindungan sosial menunjukkan tren penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

Walaupun tren untuk belanja langsung bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif namun tetap menunjukkan tren penurunan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi perlindungan sosial mengalami penurunan, implikasinya adalah akan terjadi perlambatan dalam upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada kurang optimalnya capaian pemerintah pada indikator persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi selatan.

#### 4.3.2.4 Analisis Belanja Pendidikan

Analisis belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan layanan Pendidikan yang baik kepada masyarakat. Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat kemiskinan dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Capaian indikator di bidang Pendidikan juga sangat mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: [djk.kemenkeu.go.id](http://djk.kemenkeu.go.id), diolah.

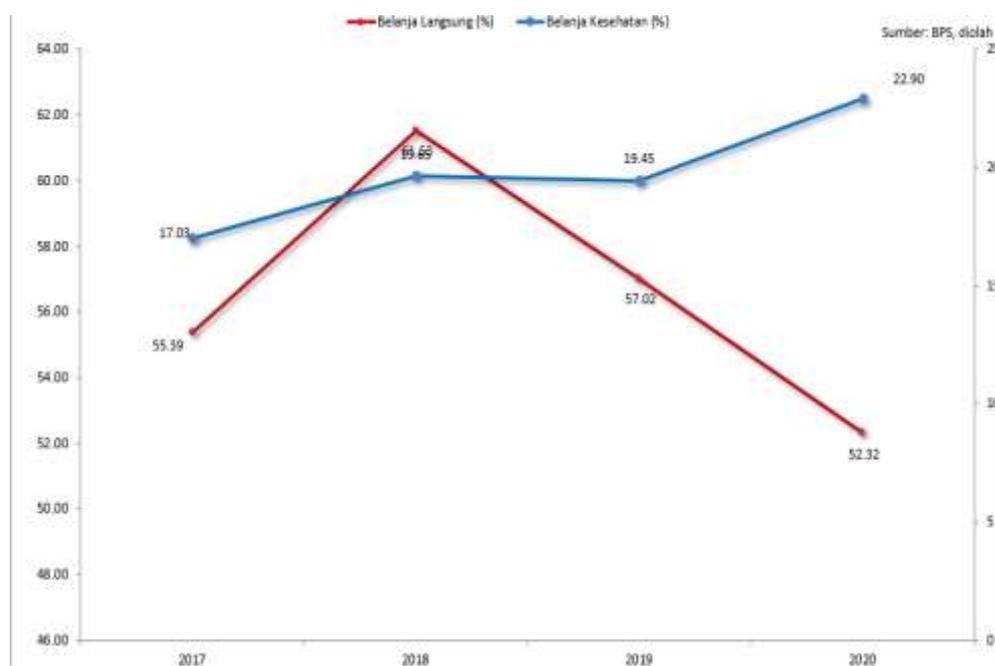
Gambar 4.21 Perkembangan Belanja Pendidikan dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

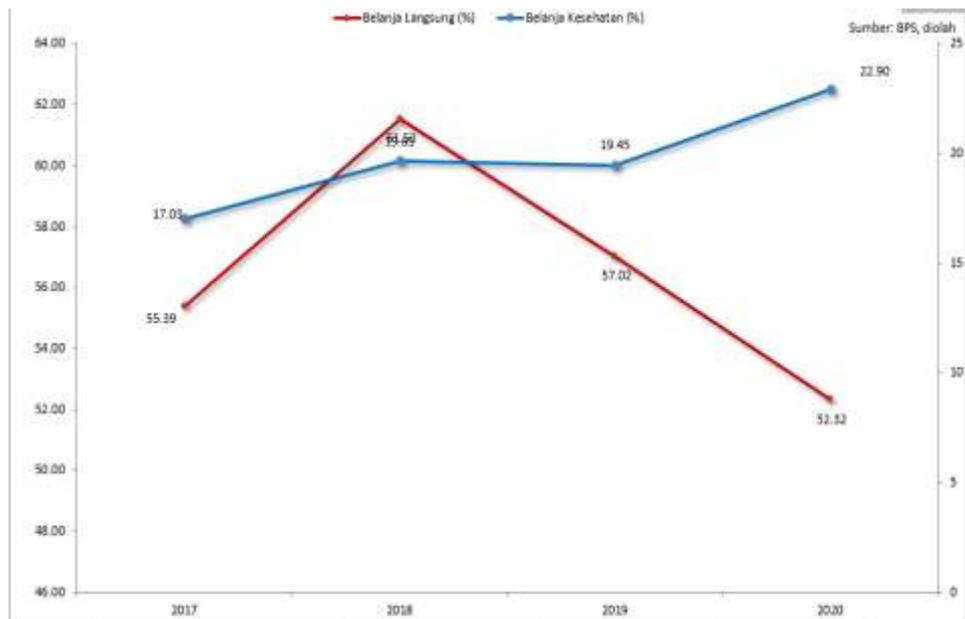
Dari kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja fungsi pendidikan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Walaupun perkembangan tren untuk belanja langsung mengalami perkembangan fluktuatif dan juga menunjukkan tren

penurunan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi pendidikan mengalami kenaikan, implikasinya adalah akan mendukung percepatan dalam upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada optimalisasi capaian pemerintah pada indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur.

#### 4.3.2.5 Analisis Belanja Kesehatan

Analisis belanja pemerintah menurut fungsi Kesehatan memberikan gambaran upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat dan memastikan jaminan layanan Kesehatan bagi masyarakat. Kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menambah beban pengeluaran rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup yang bisa menurunkan pendapatan rumah tangga miskin dan tentu saja menciptakan kemiskinan. Capaian indikator di bidang Kesehatan sangat menentukan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).





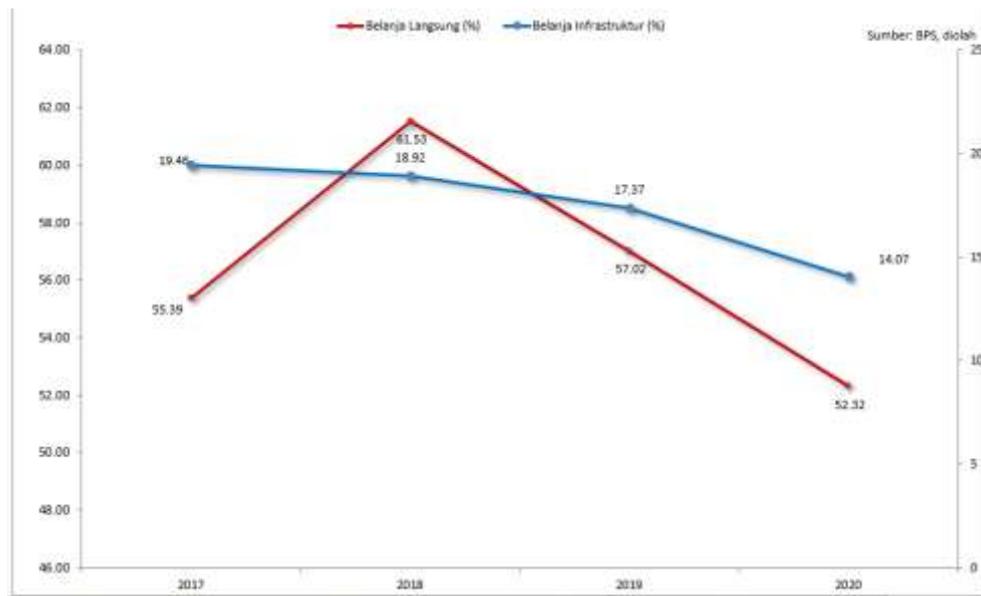
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 4.22 Perkembangan Belanja Kesehatan dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja fungsi kesehatan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Walaupun pada belanja langsung mengalami perkembangan fluktuatif dan menunjukkan tren penurunan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi Kesehatan mengalami peningkatan, implikasinya adalah akan mendukung percepatan dalam upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada optimalisasi capaian pemerintah pada indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur.

#### 4.3.2.5 Analisis Belanja Infrastruktur

Analisis belanja pemerintah menurut bidang infrastruktur dasar memberikan gambaran upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sanitasi yang layak, air minum yang layak, dan akses listrik bagi masyarakat. Kemiskinan dan infrastruktur dasar merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Infrastruktur yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan menambah beban pengeluaran rumah tangga sehingga pada akhirnya bisa menurunkan pendapatan rumah tangga miskin dan tentu saja menciptakan kemiskinan.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 4.23 Perkembangan Belanja Infrastruktur dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Timur T.A. 2017 – 2020

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja fungsi Infrastruktur menunjukkan tren penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Seiring dengan belanja langsung yang mengalami perkembangan fluktuatif dan menunjukkan tren penurunan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi Infrastruktur mengalami penurunan, implikasinya adalah akan memperlambat pemerintah dalam upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada optimalisasi capaian pemerintah pada indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur.

# BAB V



## PRIORITAS WILAYAH

- 5.1 Bidang Konsumsi/Pengeluaran
- 5.2 Bidang Ketenagakerjaan
- 5.3 Bidang Pendidikan
- 5.4 Bidang Kesehatan
- 5.5 Bidang Infrastruktur Dasar
- 5.6 Bidang Ketahanan Pangan
- 5.7 Kemiskinan Ekstrem

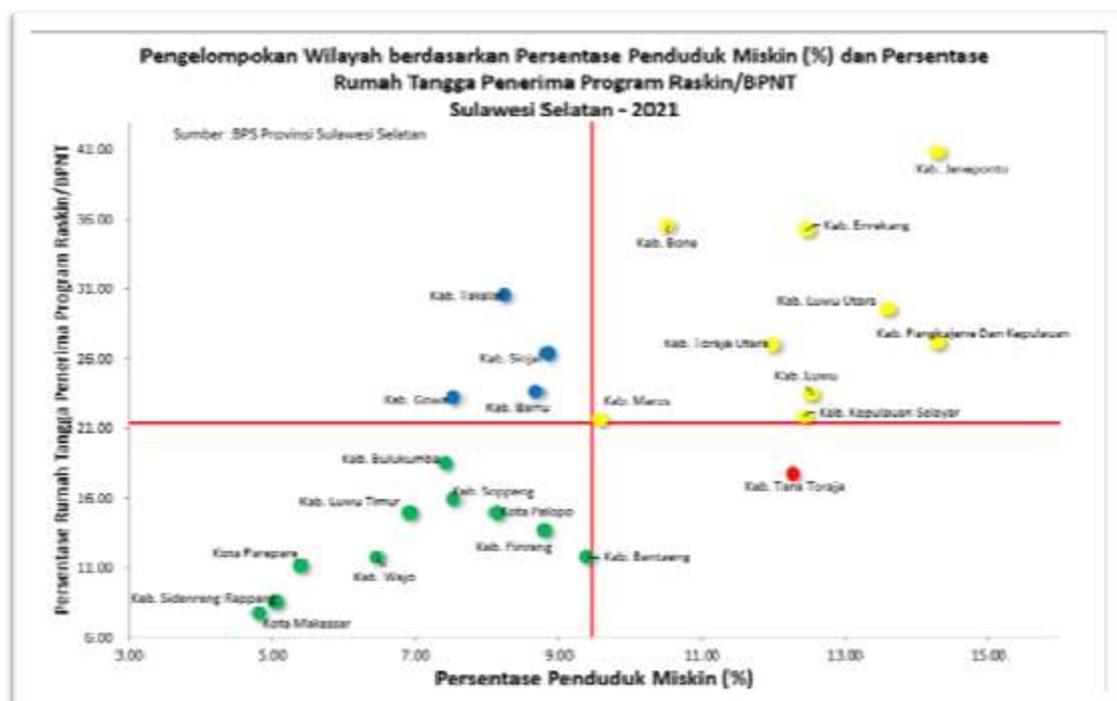
## BAB V

### PRIORITAS WILAYAH

Penentuan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan data capaian tujuan (*goal*) Kabupaten/Kota pada *Theory of Change* (TOC) masing-masing bidang dengan data capaian Kabupaten/Kota salah satu *intermediate outcome* atau prakondisi yang dirasa memiliki pengaruh terhadap tujuan dimaksud kedalam sebuah kuadran. Dari kuadran tersebut, dapat dilihat wilayah Kabupaten/Kota mana yang capaian kedua indikatornya relatif buruk dibandingkan dengan capaian provinsi sehingga harus menjadi wilayah yang diprioritaskan.

#### 5.1 Bidang Konsumsi/Pengeluaran

##### 5.1.1 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin dengan Persentase Ketepatan Bantuan Pangan (Raskin/BPNT)



Gambar 5.1 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin terhadap Persentase ketepatan penerima bantuan pangan (Raskin/BPNT)

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Persentase Penduduk Miskin dan *intermediate outcome* bantuan sosial tepat sasaran dengan persentase ketepatan Bantuan Pangan sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Persentase Penduduk Miskinnya diatas capaian provinsi dan persentase ketepatan Bantuan

Pangan dibawah capaian provinsi yaitu Kabupaten Tana Toraja berada pada prioritas I, sedangkan yang berada pada prioritas ke II adalah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Maros.

Diharapkan Lokasi Prioritas untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS agar dapat meningkatkan ketetapan sasaran program bantuan pangan, adapun kabupaten/kota yang harus segera melakukan pemutakhiran sesuai dengan skala prioritas sebagai berikut.

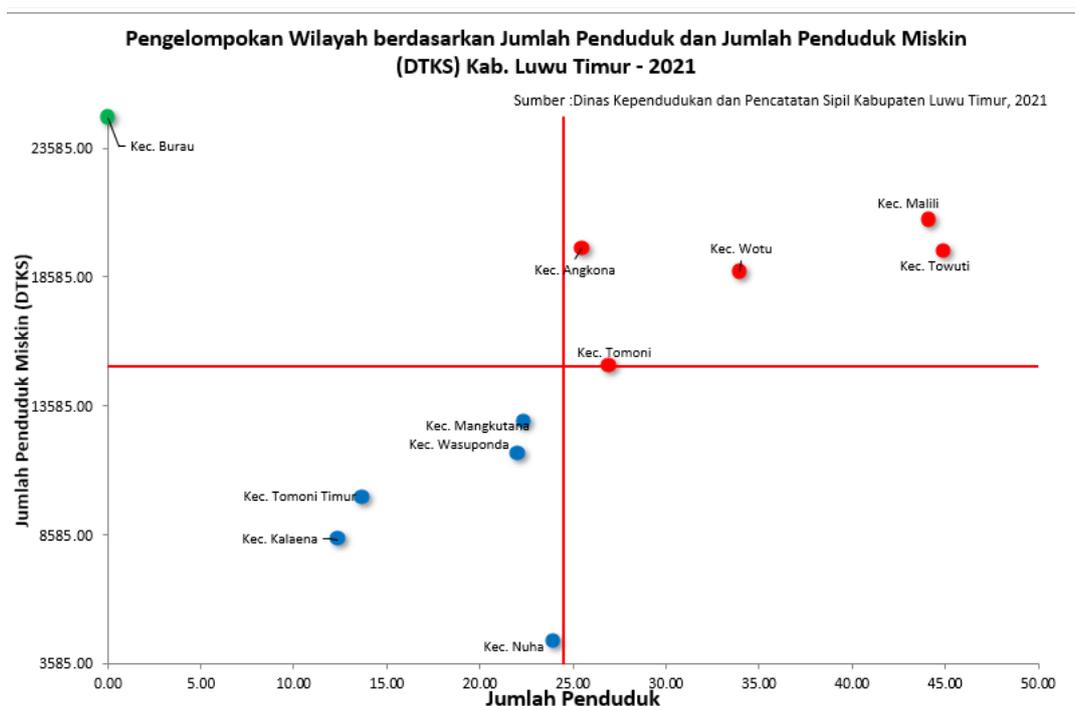
Tabel 5.1.

Prioritas Wilayah untuk Pemutakhiran data DTKS agar meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan pangan

Prioritas I (1 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Tana Toraja
Prioritas II (9 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Maros
Prioritas III (10 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kota Makassar
Prioritas IV (4 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Gowa, Kabupaten Barru

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas III bersama 9 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang rendah namun capaian persentase ketetapan sasaran penerima bantuan pangan (Raskin/BPNT) masih rendah.

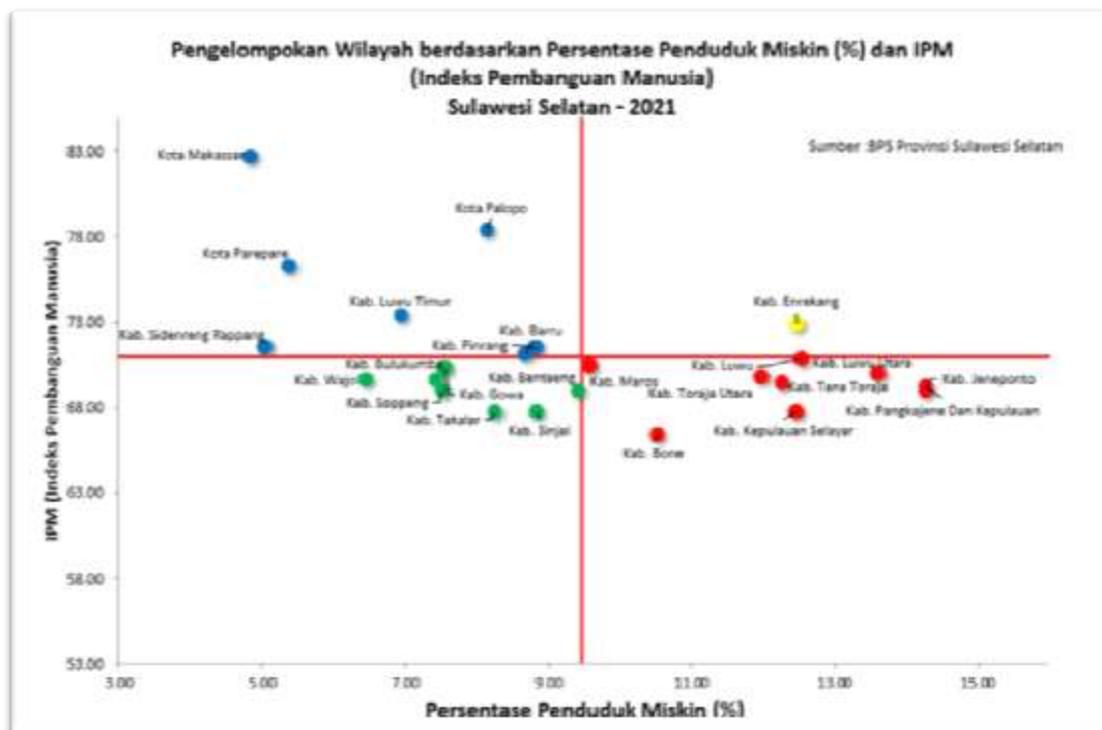
### 5.1.2 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin (DTKS) Kab Luwu Timur



Gambar 5.2 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin (DTKS) Kab Luwu Timur Tahun 2021

Berdasarkan analisis prioritas wilayah jumlah penduduk di setiap kecamatan disandingkan dengan jumlah penduduk miskin (DTKS) di setiap kecamatan, diperoleh hasil: Kecamatan yang menempati prioritas I dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kab. Luwu Timur adalah: Kecamatan Towuti, Kecamatan Maili, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Angkona. Prioritas II adalah Kecamatan Berau, sedangkan Prioritas ke IV adalah Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Nuha.

### 5.1.3 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin dengan Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Gambar 5.2 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Persentase Penduduk Miskinnya diatas capaian provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibawah capaian provinsi yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bone, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Maros yang berada pada prioritas I, sedangkan yang berada pada prioritas ke II adalah Kabupaten Enrekang.

Diharapkan Lokasi Prioritas untuk segera melakukan Intervensi program-program penanggulangan kemiskinan yang mampu mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskinnya, adapun

kabupaten/kota yang harus segera melakukan Langkah konkrit dan strategis sesuai dengan skala prioritas sebagai berikut.

Tabel 5.2

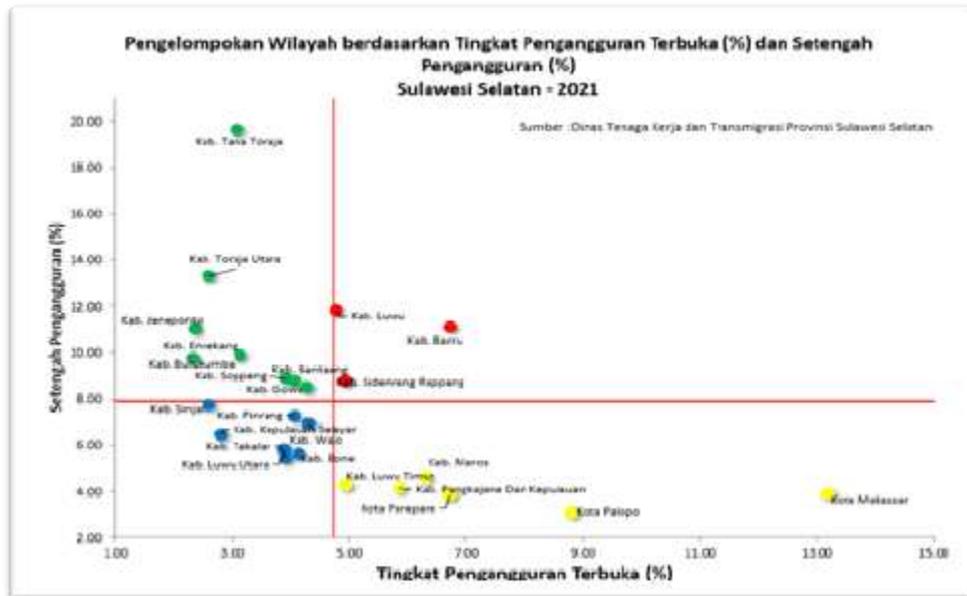
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia

<b>Prioritas I</b> <b>(9 Kabupaten/Kota)</b>	Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bone, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Maros
<b>Prioritas II</b> <b>(1 Kabupaten/Kota)</b>	Kabupaten Enrekang
<b>Prioritas III</b> <b>(7 Kabupaten/Kota)</b>	Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng
<b>Prioritas IV</b> <b>(7 Kabupaten/Kota)</b>	Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Makassar

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas IV bersama 6 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang rendah dan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang sudah tergolong tinggi.

## 5.2 Bidang Ketenagakerjaan

### 5.2.1 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Setengah Penganggur



Gambar 5.3 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Setengah Penganggur

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka dan *intermediate outcome* meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dengan setengah penganggur sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian TPTnya diatas capaian provinsi dan Tingkat Setengah Penganggurnya diatas capaian provinsi yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru dan Kabupaten Sidenreng Rappang.

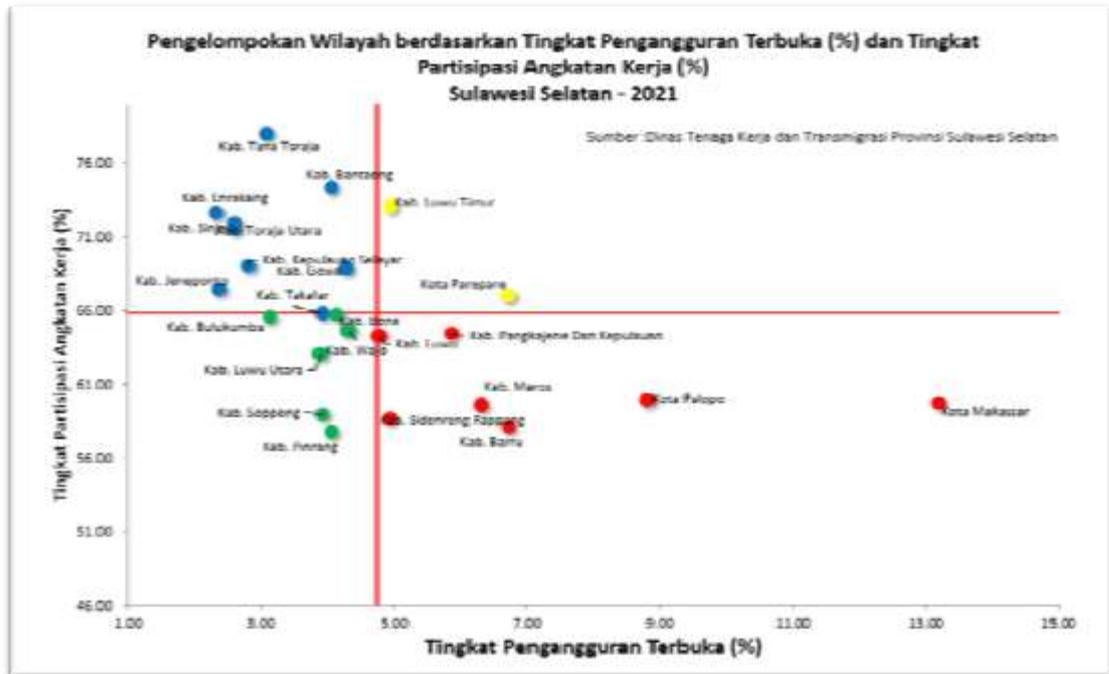
Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penurunan tingkat setengah penganggur hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.3  
 Prioritas Wilayah untuk Penurunan Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi  
 Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas I (3 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru dan Kabupaten Sidenreng Rappang.
Prioritas II (6 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Parepare, Kota Palopo, dan Kota Makassar
Prioritas III (8 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Gowa
Prioritas IV (7 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kepulauan Selayar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Bone

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas II bersama 5 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang tinggi dan capaian Setengah pengangguran yang sudah rendah.

## 5.2.2 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Gambar 5.4 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka dan *intermediate outcome* meningkatnya tenaga kerja berdaya saing dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian TPTnya diatas capaian provinsi dan jumlah pekerja formalnya dibawah capaian provinsi yaitu Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Barru, Kota Palopo dan Kota Makassar.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

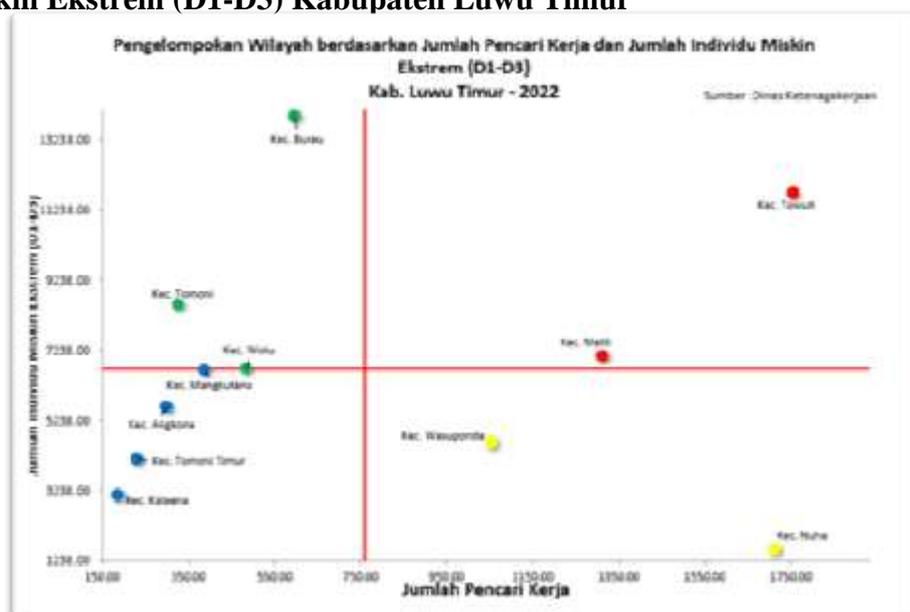
Tabel 5.4

Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas I (7 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Barru, Kota Palopo dan Kota Makassar
Prioritas II (2 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Parepare
Prioritas III (6 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Pinrang
Prioritas IV (9 Kabupaten)	Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas II bersama Kota Pare-pare. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang masih tinggi dan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang sudah tergolong tinggi.

**5.2.3 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Pencari Kerja Terhadap Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) Kabupaten Luwu Timur**



Gambar 5.5 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Pencari Kerja terhadap Jumlah

Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) di Kabupaten Luwu Timur  
Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel

Jumlah Pencari Kerja dan *intermediate outcome* meningkatnya Jumlah tenaga kerja berdaya saing dengan menyandingkan indikator jumlah individu miskin ekstrem (D1-D3), maka dapat ditentukan Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Jumlah Pencari Kerjanya tinggi dengan Jumlah individu miskin ekstrem (D1-D3) yang juga tinggi, yaitu Kecamatan Malili dan Kecamatan Towuti.

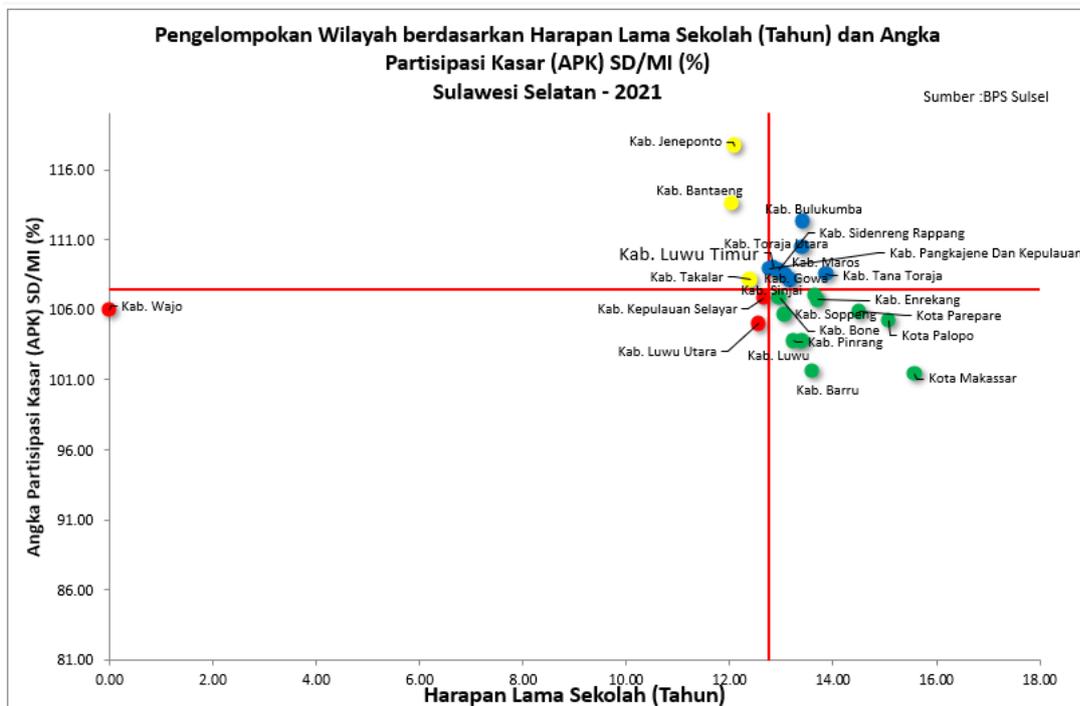
Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.5  
Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Prioritas I (2 Kecamatan)	Kecamatan Towuti dan Kecamatan Malili
Prioritas II (2 Kecamatan)	Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Nuha
Prioritas III (3 Kecamatan)	Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Tomoni
Prioritas IV (4 Kecamatan)	Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Kalaena

### 5.3 Bidang Pendidikan

#### 5.3.1 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI



Gambar 5.6 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Harapan Lama Sekolah dan *intermediate outcome* meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Harapan Lama Sekolahnya dibawah capaian provinsi dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di bawah rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Wajo.

Diharapkan OPD di bidang Pendidikan hendaknya meningkatkan capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

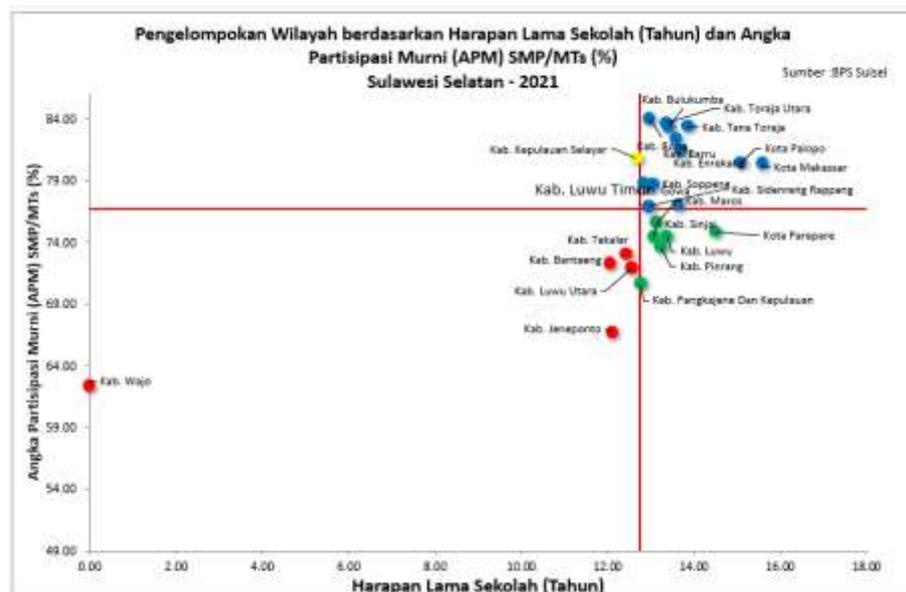
Tabel 5.6

Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas I (3 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Wajo
Prioritas II (3 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar
Prioritas III (10 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru, Kota Palopo, Kota Pare-pare dan Kota Makassar
Prioritas IV (8 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Gowa

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas IV bersama 7 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang masih tinggi dan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI yang sudah tergolong tinggi.

### 5.3.2 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs



Gambar 5.7 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Harapan Lama Sekolah dan *intermediate outcome* meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Harapan Lama Sekolahnya di bawah capaian provinsi dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di bawah rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Wajo.

Diharapkan OPD di bidang Pendidikan hendaknya meningkatkan capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

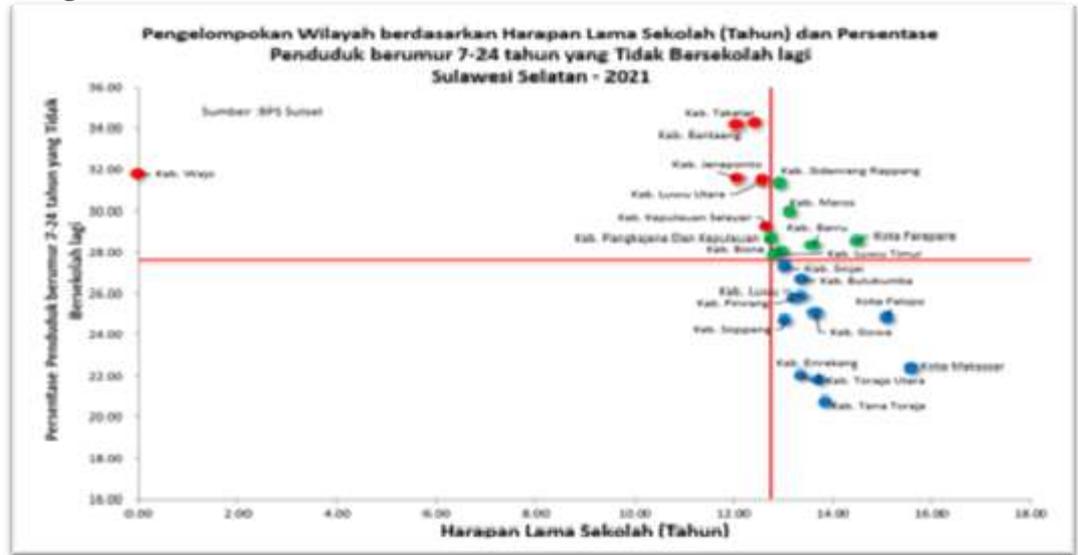
Tabel 5.7

Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas I (4 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto
Prioritas II (1 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Kepulauan Selayar
Prioritas III (6 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pangkep dan Kota Pare-pare
Prioritas IV (13 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kota Palopo dan Kota Makassar

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas IV bersama 12 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang masih tinggi dan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yang sudah tergolong tinggi.

### 5.3.3 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi



Gambar 5.8 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Harapan Lama Sekolah dan *intermediate outcome* menurunnya Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Harapan Lama Sekolahnya di bawah capaian provinsi dan Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi di atas rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Wajo.

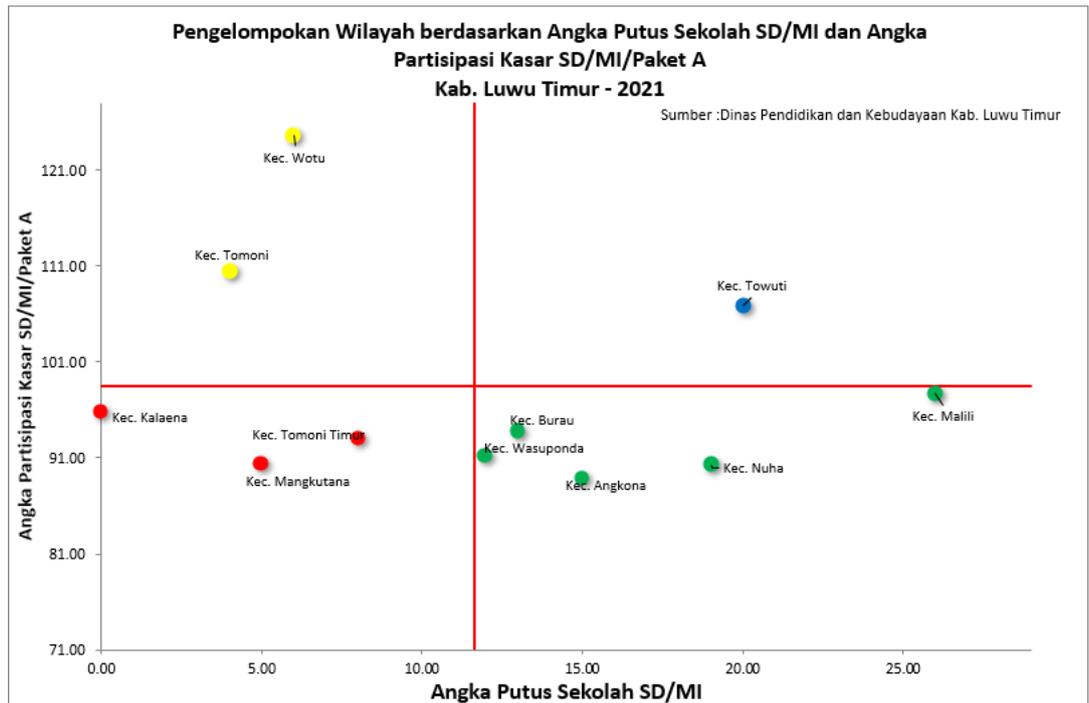
Diharapkan OPD Provinsi di bidang Pendidikan hendaknya meningkatkan capaian Indikator Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.8  
 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Persentase Penduduk  
 Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi Provinsi  
 Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas I (6 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Wajo
Prioritas II (- Kabupaten/Kota)	-
Prioritas III (7 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Parepare
Prioritas IV (11 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kota Makassar, dan Kota Palopo

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas III bersama 6 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang masih tinggi dan capaian Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi sudah tergolong tinggi.

### 5.3.4 Analisis Prioritas Wilayah Angka Putus Sekolah SD/MI dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A



Gambar 5.9 Analisis Prioritas Wilayah Angka Putus Sekolah SD/MI terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Angka Putus Sekolah SD/MI dan *intermediate outcome* meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dengan menyandingkan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, maka dapat ditentukan Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Angka Putus Sekolah SD/MI tinggi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A yang juga rendah, yaitu Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena.

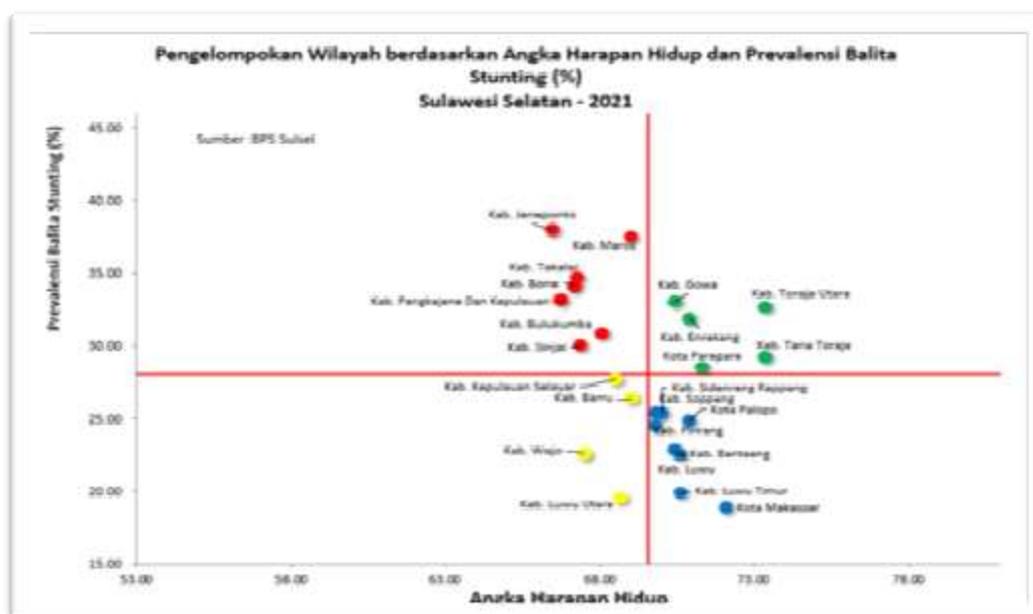
Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.9  
 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah  
 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Prioritas I (3 Kecamatan)	Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena
Prioritas II (2 Kecamatan)	Kecamatan Wotu dan Kecamatan Tomoni
Prioritas III (5 Kecamatan)	Kecamatan Bura, Kecamatan Wosuponda, Kecamatan Angkona, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Malili
Prioritas IV (1 Kecamatan)	Kecamatan Towuti

#### 5.4 Bidang Kesehatan

##### 5.4.1 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Prevalensi balita Stunting



Gambar 5.10 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Prevalensi Balita Stunting

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel angka harapan hidup dan *intermediate outcome* menurunnya Prevalensi Balita Stunting sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang

menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Angka Harapan Hidupnya di bawah capaian provinsi dan Prevalensi Balita Stunting di atas capaian provinsi yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Sinjai.

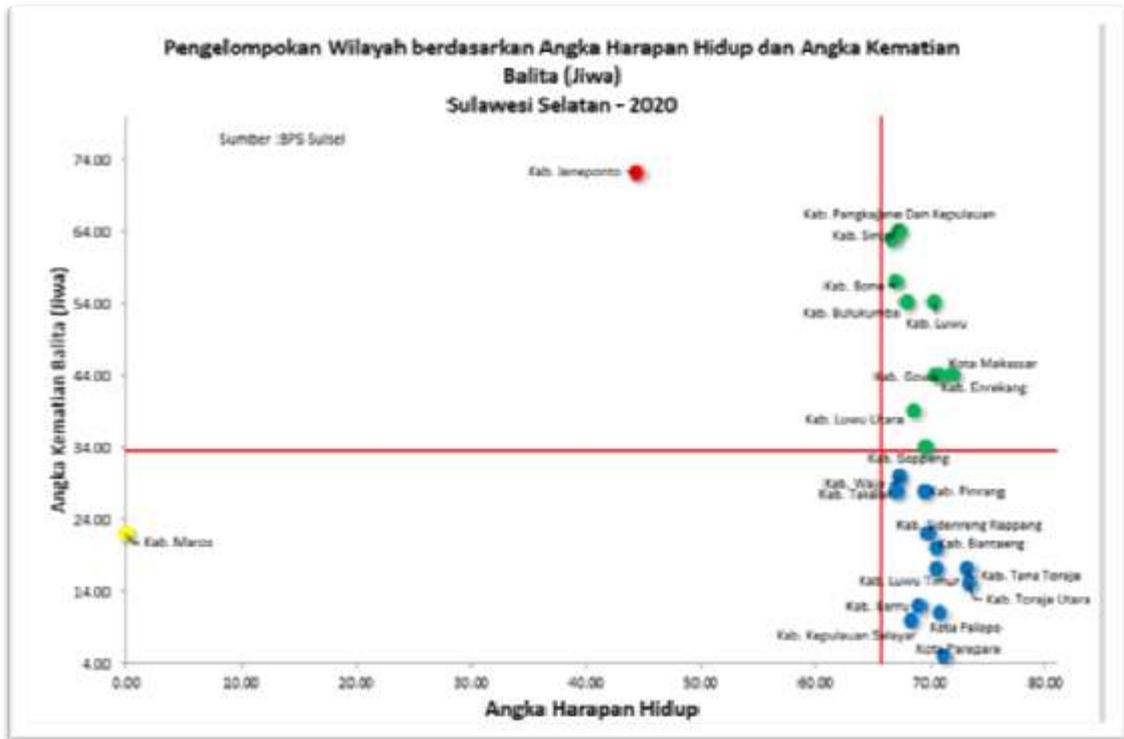
Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penurunan Prevalensi Balita Stunting hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.10  
Prioritas Wilayah untuk Penurunan Prevalensi Balita Stunting Provinsi  
Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas II (7 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.
Prioritas II (4 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu Utara.
Prioritas III (5 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Gowa, Kota Parepare, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara
Prioritas IV (8 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo dan Kota Makassar.

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas IV bersama 7 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang sudah tinggi dan capaian prevalensi Balita stunting sudah rendah.

## 5.4.2 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Angka Kematian Balita



Gambar 5.11 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Angka Kematian Balita

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel angka harapan hidup dan *intermediate outcome* menurunnya Angka Kematian Balita sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Angka Harapan Hidupnya di bawah capaian provinsi dan Angka Kematian Balita di atas capaian provinsi yaitu Kabupaten Jeneponto

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pengurangan Angka Kematian Balita hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

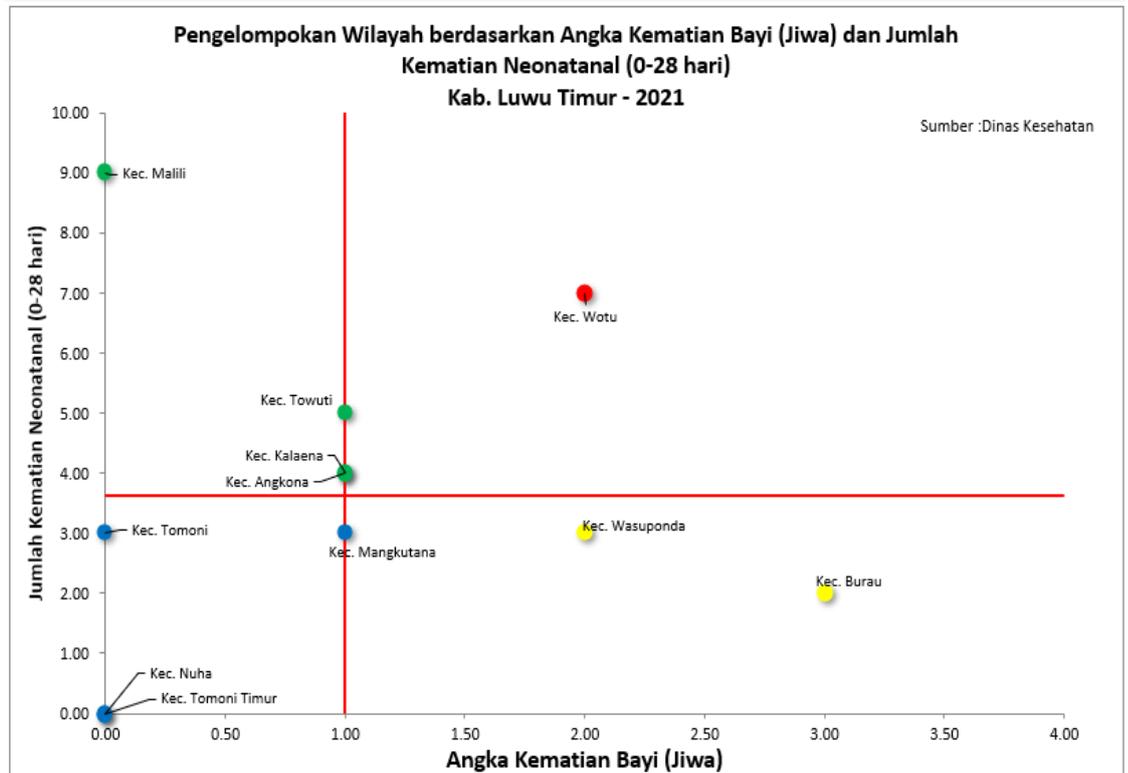
Tabel 5.11

Prioritas Wilayah untuk penurunan Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas I (1 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Jeneponto
Prioritas II (1 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Maros
Prioritas III (10 Kabupaten/kota)	Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang, dan Kota Makassar.
Prioritas IV (12 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Wajo. Kabupaten Takalar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Parepare dan Kota Palopo.

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas IV bersama 11 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang sudah tinggi dan capaian Angka Kematian Balita sudah rendah.

### 5.4.3 Analisis Prioritas Wilayah Angka Kematian Bayi (Jiwa) Terhadap Jumlah Kematian Neonatal (0-28 hari)



Gambar 5.12 Analisis Prioritas Wilayah Angka Kematian Bayi (Jiwa) terhadap Jumlah Kematian Neonatal (0-28 hari) di Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Angka Kematian Bayi (Jiwa) dan *intermediate outcome* menurunnya Angka Kematian Bayi dengan menyandingkan indikator Jumlah Kematian Neonatal (0-28 hari), maka dapat ditentukan Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Angka Kematian Bayi (Jiwa) tinggi dengan Jumlah Kematian Neonatal (0-28 hari) yang juga tinggi, yaitu Kecamatan Wotu.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota yang berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Bayi hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

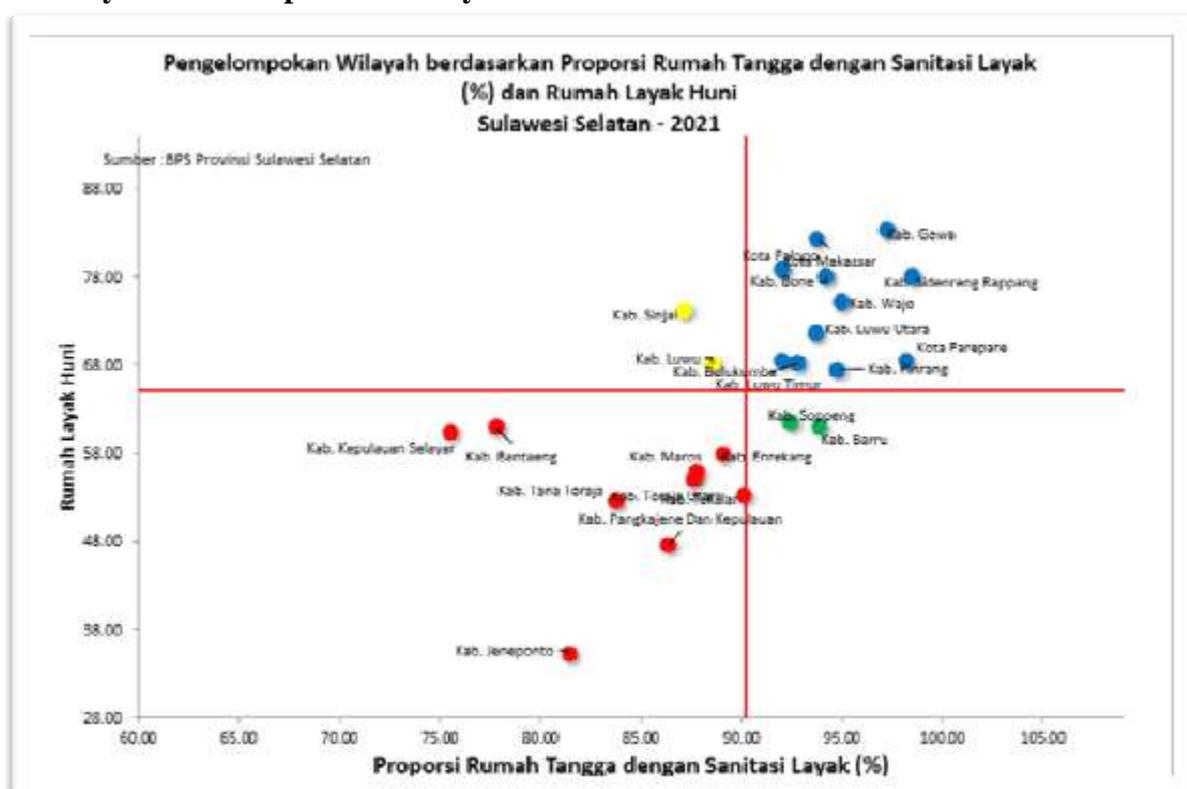
Tabel 5.12

Prioritas Wilayah untuk Penurunan Angka Kematian Bayi Kabupten  
Luwu Timur Tahun 2021

Prioritas I (1 Kecamatan)	Kecamatan Wotu
Prioritas II (2 Kecamatan)	Kecamatan Wosuponda dan Kecamatan Burau
Prioritas III (4 Kecamatan)	Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Angkona dan Kecamatan Kalaena
Prioritas IV (4 Kecamatan)	Kecamatan Tomoni, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Tomuni Timur

5.5 Bidang Infrastruktur Dasar

5.5.1 Analisis Prioritas Wilayah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Terhadap Rumah Layak Huni



Gambar 5.13 Analisis Prioritas Wilayah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak dan Rumah Layak Huni

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak dan *intermediate outcome* meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dengan persentase ruta yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di bawah capaian provinsi dan persentase Rumah Layak Huni di bawah capaian provinsi yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan rumah tangga yang mempunyai akses rumah layak huni hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

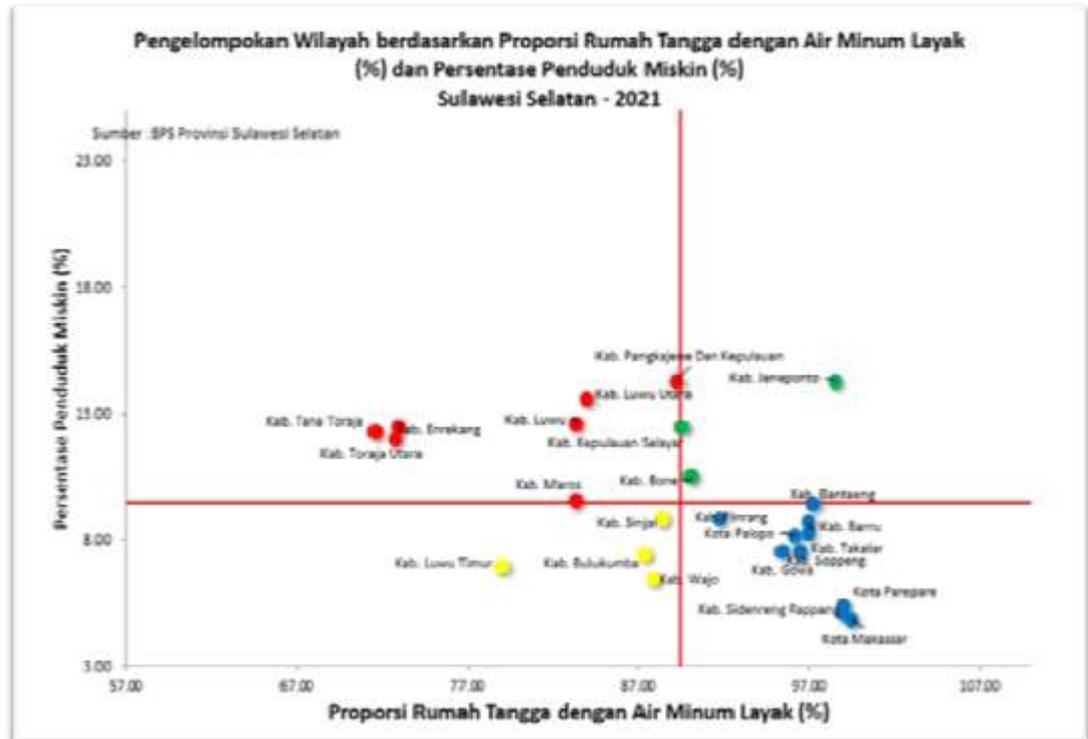
Tabel 5.13

Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Akses Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021

<b>Prioritas I (9 Kabupaten/Kota)</b>	Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara.
<b>Prioritas II (2 Kabupaten/Kota)</b>	Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Luwu
<b>Prioritas III (2 Kabupaten/Kota)</b>	Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru
<b>Prioritas IV (11 Kabupaten/Kota)</b>	Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Parepare, Kota Palopo dan Kota Makassar

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas IV bersama 10 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang sudah tinggi dan capaian Rumah Layak Huni yang juga sudah tinggi.

### 5.5.2 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Laayak



Gambar 5.14 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variable Persentase Penduduk Miskin dan *intermediate outcome* meningkatnya Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Persentase Penduduk Miskinnya di atas capaian provinsi dan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak di bawah rata-rata capaian Provinsi yaitu Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

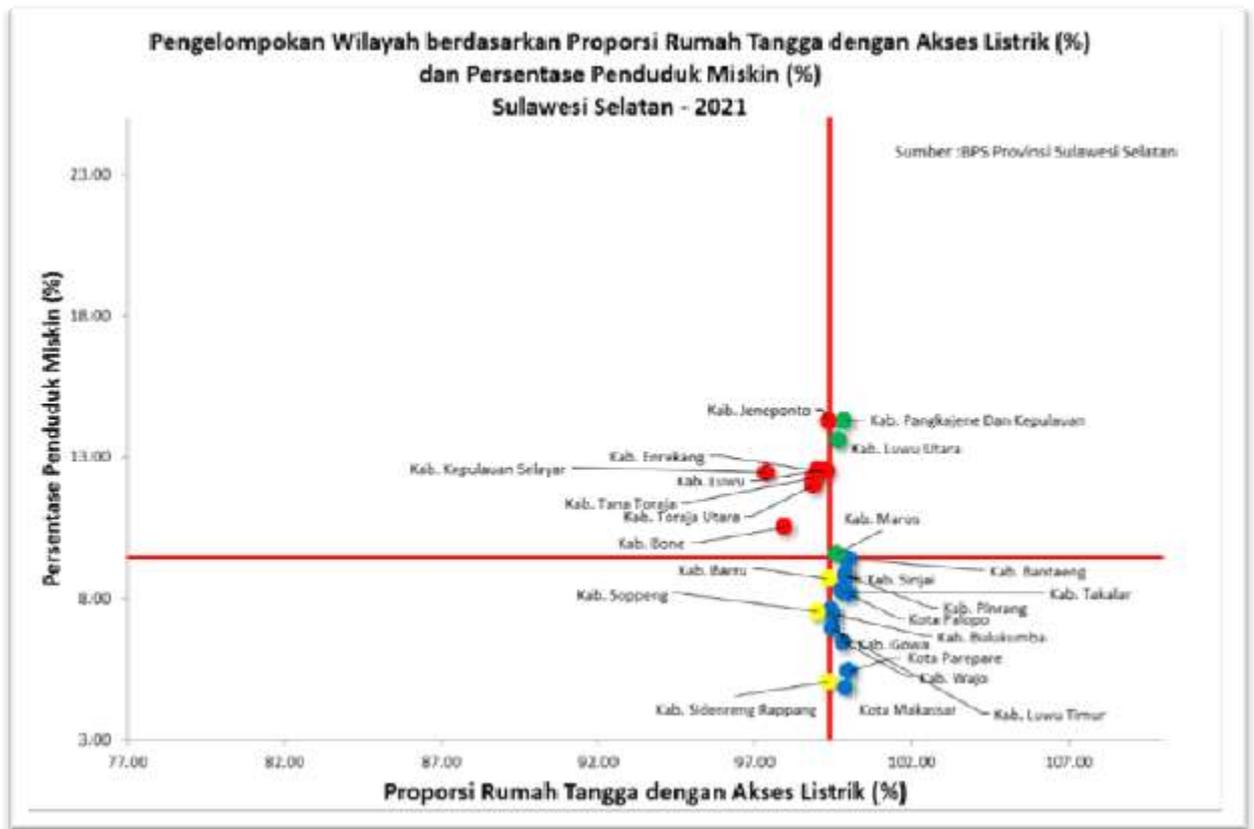
Tabel 5.14

Prioritas Wilayah untuk meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas I (7 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara.
Prioritas II (4 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu Timur.
Prioritas III (3 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Bone.
Prioritas IV (4 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kota Palopo, Kabupaten Takalar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Parepare dan Kota Makassar.

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas II bersama 3 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang sudah rendah dan capaian Rumah Tangga dengan air minum layak yang masih tinggi.

### 5.5.3 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Persentase Rumah tangga dengan Akses Listrik



Gambar 5.15 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Persentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Persentase Penduduk Miskin dan *intermediate outcome* meningkatnya Akses Listrik bagi keluarga miskin dengan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Persentase Penduduk Miskinnya di atas capaian provinsi dan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik di bawah capaian provinsi yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Bone.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan ruta yang memiliki akses listrik hendaknya diprioritaskan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

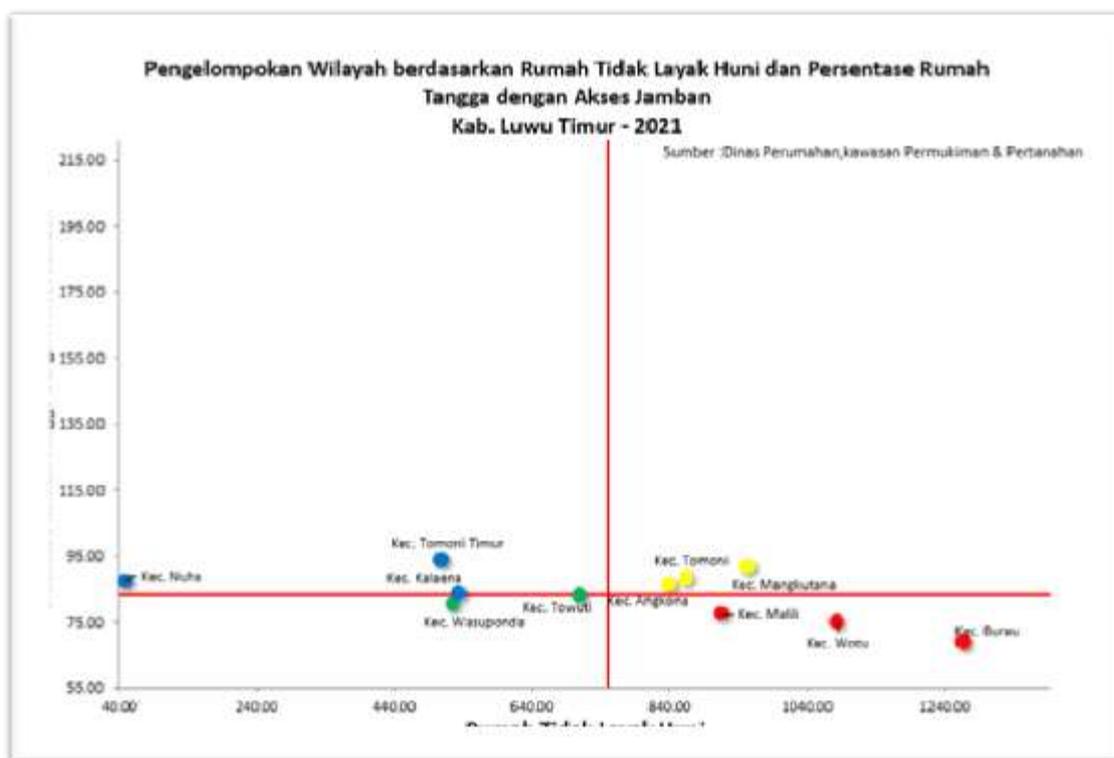
Tabel 5.15

Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas I (7 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Bone.
Prioritas II (3 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
Prioritas III (3 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Maros.
Prioritas IV (11 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, Kota Palopo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Wajo, Kota Parepare, dan Kota Makassar.

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas IV bersama 10 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang sudah rendah dan capaian Rumah Tangga dengan akses listrik yang sudah tinggi.

#### **5.5.4 Analisis Prioritas Wilayah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Rumah dengan Akses Jamban di Kabupaten Luwu Timur**



Gambar 5.16 Analisis Prioritas Wilayah Rumah Tidak Layak Huni terhadap Persentase Rumah Tangga dengan Akses Jamban di Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Rumah Tidak Layak Huni dan *intermediate outcome* meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dengan menyandingkan indikator Rumah Tangga dengan Akses Jamban maka dapat ditentukan Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Rumah Tidak Layak Huni rendah dengan Rumah Tangga dengan Akses Jamban yang juga rendah, yaitu Kecamatan Malili, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

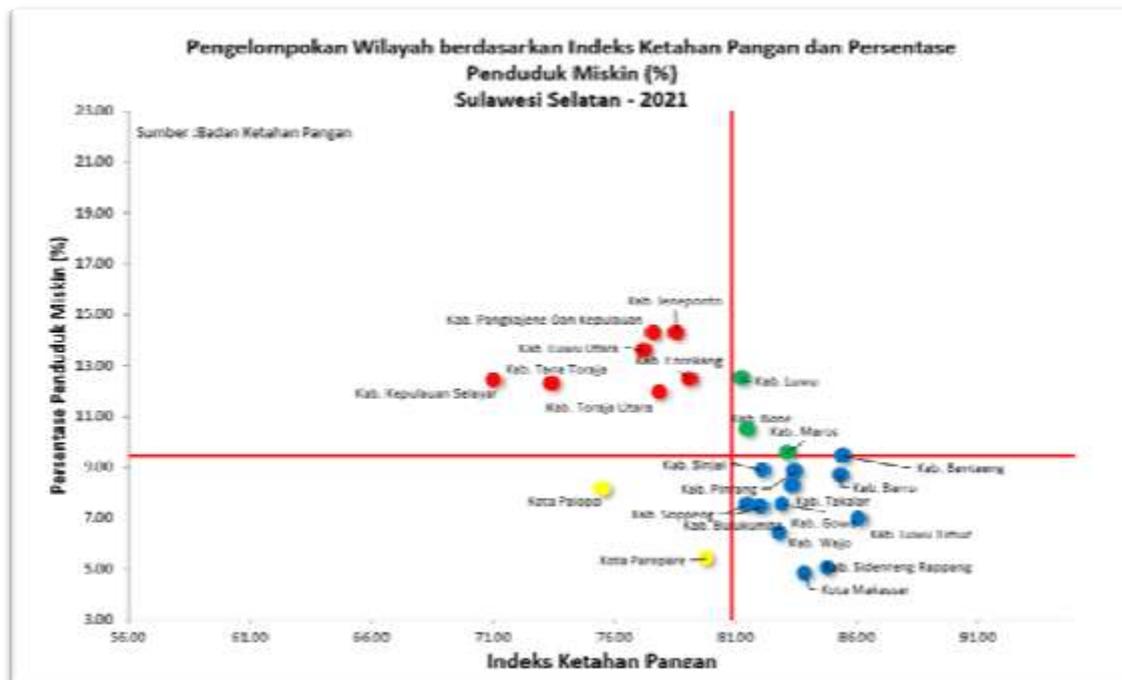
Tabel 5.16

Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Prioritas I (3 Kecamatan)	Kecamatan Malili, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau
Prioritas II (3 Kecamatan)	Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Mangkutana
Prioritas III (2 Kecamatan)	Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Towuti
Prioritas IV (3 Kecamatan)	Kecamatan Nuha, Kecamatan Tomuni Timur dan Kecamatan Kalaena

5.6 Bidang Ketahanan Pangan

5.6.1 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indeks Ketahanan Pangan



Gambar 5.17 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyangdingkan variabel

Persentase penduduk Miskin dan *intermediate outcome* meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Persentase Penduduk Miskinnya di bawah capaian provinsi dan Indeks Ketahanan Pangan di bawah capaian provinsi yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

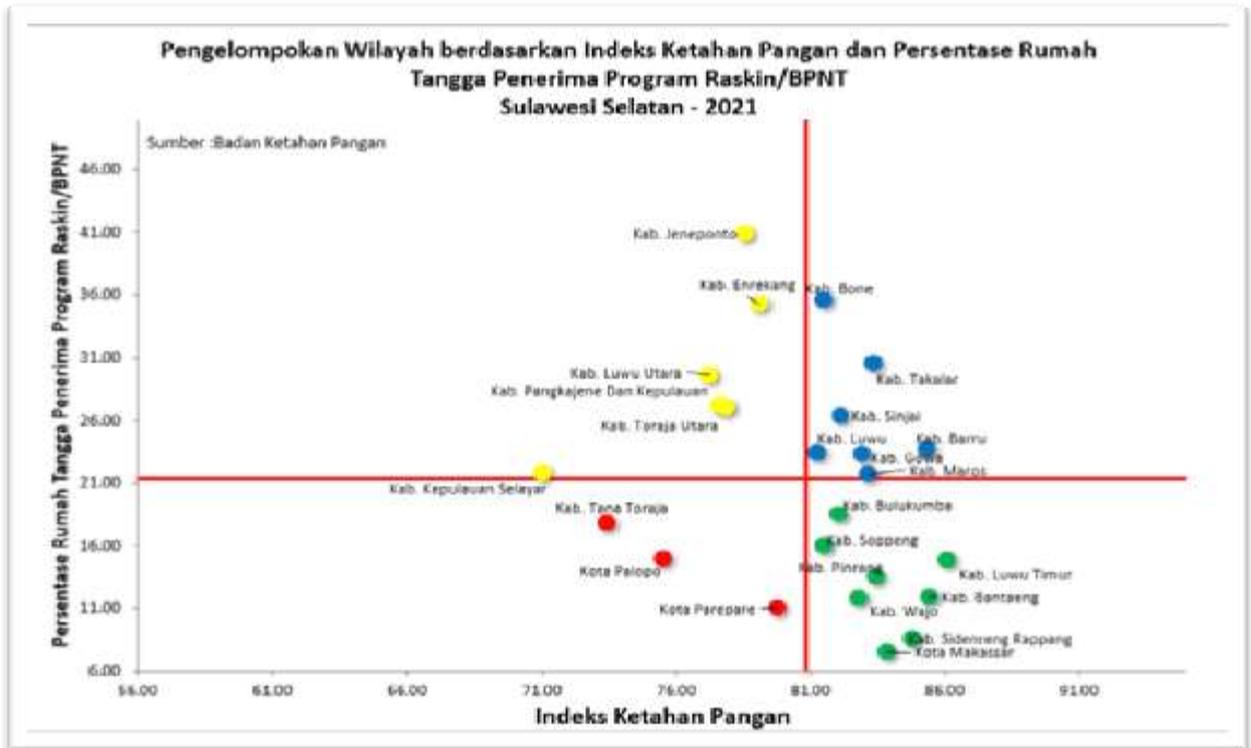
Tabel 5.17  
Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Indeks  
Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi selatan Tahun  
2021

Prioritas I (7 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara
Prioritas II (2 Kabupaten/Kota)	Kota Parepare dan Kota Palopo
Prioritas III (3 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Luwu, Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros
Prioritas 4 (12 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Makassar

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas IV bersama 11 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Persentase Penduduk Miskin di

Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang sudah rendah dan capaian Indeks Ketahanan Pangan yang sudah tinggi.

### 5.6.2 Analisis Prioritas Wilayah Indeks Ketahanan Pangan Terhadap Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT



Gambar 5.18 Analisis Prioritas Wilayah Indeks Ketahanan Pangan Terhadap Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Indeks Ketahanan Pangan dan *intermediate outcome* meningkatnya Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Indeks Ketahanan Pangan dibawah capaian provinsi dan Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT di bawah capaian provinsi yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo. Dan Kota Parepare.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.18  
 Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Persentase  
 Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT  
 Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021

Prioritas I (3 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo. Dan Kota Parepare.
Prioritas II (6 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Prioritas III (8 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Banteng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Makassar.
Prioritas IV (7 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.

Kabupaten Luwu Timur berada pada Prioritas III bersama 7 Kab/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dikelompokkan dalam capaian yang sudah tinggi namun capaian Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT yang masih rendah.

## 5.7 Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 % atau sebanyak 5,8 juta jiwa dan sebesar 1,56% atau sebanyak 139.440 jiwa tersebar di provinsi Sulawesi Selatan (BPS, 2021).

Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi dan menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024. Target ini lebih cepat dari amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030.

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Untuk mendorong keterpaduan dan sinergi program dan anggaran lintas pemerintahan dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, telah ditentukan wilayah prioritas yang secara bertahap diperluas hingga mencakup seluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahun 2021 sebanyak 35 Kabupaten di 7 provinsi;
- b. Tahun 2022 sebanyak 212 Kabupaten/Kota di 25 provinsi (termasuk wilayah prioritas tahun 2021); dan
- c. Tahun 2023-2024 dilakukan perluasan secara bertahap hingga mencakup 514 Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas Maret 2021 menunjukkan:

1. angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,14% dari total penduduk Indonesia;
2. sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga miskin ekstrem, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD;
3. sekitar satu dari tujuh kepala rumah tangga ekstrem adalah perempuan;
4. sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrem memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas;
5. sekitar satu di antara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak; dan
6. sekitar satu di antara tujuh rumah tangga miskin ekstrem tidak memiliki toilet.

### **5.7.1 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Pusat dan Daerah**

Prinsip pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) sebagai berikut:

#### ***1. Tepat sasaran***

Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini.

#### ***2. Pendekatan multidimensi***

Pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan.

#### ***3. Keterpaduan dan Sinergi***

Penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem.

#### ***4. Tersampainya dan Dipahaminya Informasi***

Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE.

#### ***5. Koordinasi dan kerja sama multipihak***

Pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah.

#### ***6. Terpantau dan terkendali***

Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

Mekanisme pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah pusat dan daerah terdiri atas:

1. spesifikasi penargetan program;
2. keterpaduan dan sinergi program;
3. sosialisasi dan edukasi;
4. pemantauan dan evaluasi;
5. pengaduan; dan
6. pelaporan.

Penjelasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

## **1. Spesifikasi Penargetan Program**

### **a. Sasaran Penargetan Program**

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menentukan indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan penduduk miskin ekstrem tercakup dalam sasaran.

#### **1) Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat**

- Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas dalam seluruh program pengurangan beban pengeluaran masyarakat sesuai dengan kriteria program. Sebagai contoh: masyarakat miskin ekstrem menerima kombinasi Program Sembako, PKH, PBI-JKN Kesehatan, PIP, Subsidi LPG 3 Kg, dan Subsidi Listrik secara bersamaan.
- Kementerian Koordinator Bidang PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program kementerian/lembaga dalam upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat.
- Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas antara program pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan program peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

## 2) Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

- Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria dan jumlah target penerima program peningkatan pendapatan.
- Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penilaian kesiapan penerima program untuk memperoleh:
  - (1) Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar;
  - (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - (3) Peningkatan Kapasitas UMKM; dan
  - (4) Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program kementerian/lembaga dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Sasaran program peningkatan pendapatan dapat dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu diarahkan pada masyarakat bukan miskin ekstrem di lokasi Kabupaten/Kota dan desa prioritas yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem dan kondisi usaha sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang lebih baik.
- Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi antara program peningkatan pendapatan dengan program pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

## 3) Program Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

- Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penilaian lokasi program berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur.
- Program untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan termasuk diantaranya melalui perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak

- layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih, dan pemenuhan akses jaringan komunikasi.
- Kementerian Koordinator Bidang PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program kementerian/lembaga dalam upaya penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
  - Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi antara program penurunan kantong kemiskinan dengan program pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat.

#### **b. Mekanisme Penargetan dan Integrasi Program di Daerah**

Mekanisme penargetan dan integrasi program di tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Integrasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah mencakup: (i) program pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) program peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) program untuk penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- Gubernur mengoordinasikan penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrem di wilayahnya.
- Bupati/Wali Kota menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK melakukan sinergitas program dan anggaran dalam menasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran nonpemerintah lainnya.
- Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota melakukan pemetaan program sebagai:
  - a) dasar penargetan dan rujukan program, guna mendorong intervensi lintas sektor yang terpadu dan menyeluruh.
  - b) dasar identifikasi kebutuhan program tambahan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kota/kabupaten dan

desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi bentuk: i) program daerah sebagai perluasan program pusat; ii) program daerah sebagai pelengkap program pusat; dan/atau iii) dapat menambah besaran nilai bantuan (mempertebal) program pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

c) dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

6) Pemetaan program pada poin 5 dijadikan dasar untuk analisis pemenuhan kebutuhan sasaran berdasarkan nama dan alamat.

## **2. Keterpaduan dan Sinergi Program**

Keterpaduan dan sinergi program dalam rangka PPKE lintas Kementerian/Lembaga, OPD, dan para pemangku kepentingan lain dilaksanakan sebagai berikut:

- Keterpaduan dan sinergi dilakukan dari tingkat pusat, dengan cara memastikan keterkaitan antarprogram (*interlinkage*) kementerian/lembaga agar saling melengkapi dan dapat diberikan secara bersamaan;
- Keterpaduan dan sinergi program dan anggaran di tingkat daerah, dengan cara:
  - 1) memastikan keterkaitan antarprogram (*interlinkage*) antar OPD agar saling melengkapi dan dapat diberikan secara bersamaan, dan
  - 2) memastikan keterkaitan antarprogram kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar saling melengkapi.
- Keterpaduan dan sinergi mengacu pada data sasaran dan wilayah yang sama (utamanya difokuskan pada lokus wilayah kantong-kantong kemiskinan yang diprioritaskan); dan
- Keterpaduan dan sinergi yang melibatkan sektor nonpemerintah (swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas) dikembangkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor.

## **3. Sosialisasi dan Edukasi**

Penjabaran sosialisasi dan edukasi upaya PPKE, sebagai berikut:

- Tujuan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE bertujuan untuk:

- 1) memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi dan mekanisme pelaksanaan PPKE;
- 2) memberikan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya penduduk miskin ekstrem mengenai program-program pemerintah yang terkait PPKE; dan
- 3) membangun pemahaman dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak-pihak nonpemerintah untuk bersinergi dalam pelaksanaan PPKE.

- Pelaksana Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, beserta mitra nonpemerintah yang terlibat program PPKE.

- Sasaran Sosialisasi dan Edukasi

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE adalah:

- 1) Kementerian/lembaga terkait;
- 2) Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, perangkat/aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- 3) Lembaga penyalur bantuan pemerintah;
- 4) Pendamping desa dan pendamping program;
- 5) Penduduk miskin ekstrem;
- 6) Pihak nonpemerintah; dan
- 7) Masyarakat umum

- Materi Sosialisasi dan Edukasi

. Materi sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE setidaknya mencakup:

- 1) Arah kebijakan dan tujuan PPKE;
  - 2) Strategi dan program PPKE; dan
  - 3) Mekanisme pelaksanaan PPKE
- Media Sosialisasi dan Edukasi  
Media sosialisasi dan edukasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PPKE di antaranya:
    - 1) Surat yang dikirim oleh pimpinan atau pejabat di kementerian/lembaga kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
    - 2) Pedoman Umum PPKE, yang berisikan informasi antara lain mengenai tujuan, arah kebijakan, strategi dan program, serta mekanisme pelaksanaan PPKE.
    - 3) Pedoman umum dan/atau pedoman/petunjuk teknis berbagai program pemerintah yang terkait pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Lembar panduan bagi penerima manfaat, yang berisikan prinsip pelaksanaan program, informasi mekanisme pemanfaatan dana bantuan, dan pengaduan program PPKE.
    - 4) Audio dan/atau video, yang ditujukan kepada masyarakat umum.
  - Saluran Sosialisasi dan Edukasi  
Saluran sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan PPKE di antaranya adalah:
    - 1) Pertemuan/rapat koordinasi (rakor), seminar, lokakarya, dan diskusi.
    - 2) Komunikasi tatap muka/kelompok, misalnya melalui pertemuan kelompok (P2K2) untuk peserta PKH dan penyuluhan KB oleh PLKB.
    - 3) Media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dan lain-lain).
    - 4) Media elektronik (radio, televisi lokal, *Short Message Service/SMS*, dan lain-lain).
    - 5) Media daring, seperti situs web resmi kementerian/lembaga, Twitter, Facebook, microsite, WhatsApp, Telegram, dan Instagram.

6) Pagelaran seni budaya, misalnya: wayang, ketoprak, lenong, rebab dan lain-lain.

7) Konferensi pers.

#### **4. Pemantauan dan Evaluasi**

- Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PPKE dan untuk mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan program pada seluruh tahapan agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya.
- Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan PPKE dapat dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan.
- Pemantauan dan evaluasi secara terpadu yang melibatkan lintas Kementerian/Lembaga terkait mengenai pelaksanaan PPKE di pusat dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKE di provinsi dan Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.
- Pemantauan dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan (tematik) menggunakan data dasbor, data sekunder (seperti Susenas, Podes, Sakernas), pelaporan, pemantauan lapangan dan kanal pengaduan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.14

Tabel 5.19 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Cara Pemantauan dan Evaluasi	Sumber Data
Pemantauan dan evaluasi melalui dasbor dan data sekunder untuk melihat perkembangan pelaksanaan dan jangkauan program terkait PPKE di tingkat pusat dan daerah.	<input type="checkbox"/> Dasbor yang menampilkan indikator capaian program misalnya yang dimiliki oleh setiap kementerian/lembaga maupun dasbor lainnya. <input type="checkbox"/> Data sekunder misalnya Susenas, Podes, Sakernas.
Pemantauan dan evaluasi melalui pelaporan	Laporan dari kementerian/lembaga dan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan untuk mendalami data dan informasi yang diperoleh melalui dasbor dan mengetahui tantangan dan strategi terkait PPKE di tingkat pusat dan daerah.	Survei, FGD, dan wawancara mendalam yang dilakukan secara berkala oleh pengelola/ pelaksana program di tingkat pusat dan daerah.
Pemantauan dan evaluasi melalui kanal pengaduan	Berbagai kanal pengaduan masyarakat (seperti aplikasi LAPOR!, saluran pengaduan program).

- Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan dapat melibatkan pihak independen, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga lainnya.

- Hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah menjadi bagian dari pelaporan sebagaimana diatur dalam subbab Pelaporan.
- Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan diskusi dan pertimbangan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan, strategi dan mekanisme program.

## 5. Pengaduan

- Pengelolaan pengaduan perlu dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan berbagai program pemerintah terkait PPKE. Melalui pengelolaan pengaduan, pelaksana program dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan program, dan memudahkan kelompok miskin ekstrem dalam memperoleh hak-haknya.
- Pengaduan terkait program PPKE dapat disampaikan melalui:
  - 1) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang menggunakan aplikasi LAPOR! (SP4N-LAPOR!), sebagai aplikasi untuk mengelola pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi, yang dapat diakses melalui situs web ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) dan melalui SMS ke nomor 1708;
  - 2) Saluran pengaduan atau *call center* yang disediakan oleh masing-masing program pemerintah terkait PPKE;
  - 3) Saluran pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  - 4) Saluran pengaduan lainnya terkait pelaksanaan program PPKE.
- Pengelolaan pengaduan menjadi bagian dari bahan pelaporan sebagaimana yang diatur di dalam subbab Pelaporan.

## 6. Pelaporan

- Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan menerima pelaporan dari:

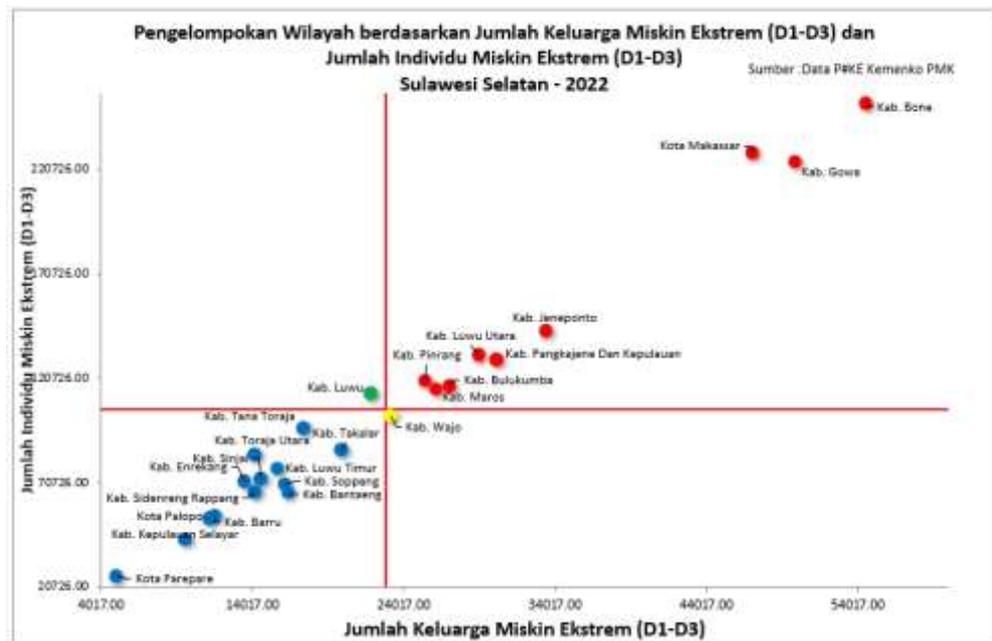
- 1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengoordinasikan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan strategi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
  - 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengoordinasikan strategi peningkatan pendapatan masyarakat; dan
  - 3) Menteri Dalam Negeri yang mengoordinasikan upaya PPKE di daerah.
- Kementerian/lembaga pelaksana program pemerintah yang terkait dengan ketiga strategi PPKE melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Menteri Koordinator yang mengoordinasikan masing-masing strategi secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPKE setiap tiga bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
  - Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPKE setiap tiga bulan sekali kepada Gubernur.

#### **5.7.2 Prioritas Wilayah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Provinsi Sulawesi Selatan**

Tabel 5.20 Data Jumlah Keluarga (D1-D3) dan Individu (D1-D2) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Keluarga				Individu			
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3
<b>Total (24)</b>		<b>547052</b>	<b>185223</b>	<b>179100</b>	<b>182729</b>	<b>2543235</b>	<b>984692</b>	<b>807317</b>	<b>751226</b>
1	Kepulauan Selayar	9543	3154	3171	3218	43549	15857	14508	13184
2	Bulukumba	27078	7335	10295	9448	116791	37004	43348	36439
3	Bantaeng	16418	4000	4890	7528	65711	18492	19792	27427
4	Jeneponto	33468	13120	12722	7626	142575	61287	52437	28851
5	Takalar	19914	5490	6769	7655	85774	26315	29167	30292
6	Gowa	49917	13078	17346	19493	223947	68255	76836	78856
7	Sinjai	14570	5285	4521	4764	72743	29984	21790	20969
8	Bone	54555	22058	17507	14990	251560	115398	76315	59847
9	Maros	26187	8173	9266	8748	115198	40946	39851	34401
10	Pangkajene Kepulauan	30163	12404	9234	8525	129790	60266	37702	31822
11	Barru	11498	3495	3547	4456	54594	18704	16665	19225
12	Soppeng	16188	4610	5220	6358	69958	23751	22235	23972
13	Wajo	23227	7731	7908	7588	102556	39398	33676	29482
14	Sidenreng Rappang	14176	3983	4697	5496	66495	21156	21930	23409
15	Pinrang	25470	8852	7919	8699	119381	47184	36208	35989
16	Enrekang	13484	6394	3993	3097	71334	37243	19824	14267
17	Luwu	21781	9115	6056	6610	113735	54140	29978	29617
18	Tana Toraja	17369	7054	6170	4145	96611	45002	32331	19278
19	Luwu Utara	28982	9997	7723	11262	131554	53250	33985	44319
20	Luwu Timur	15711	4559	4128	7024	76984	25227	20280	31477
21	Toraja Utara	14133	5061	4996	4076	83991	33984	28753	21254
22	Kota Makassar	47046	15653	14873	16520	228596	85461	70104	73031
23	Kota Pare Pare	5022	1600	1708	1714	25908	9226	8708	7974
24	Kota Palopo	11152	3022	4441	3689	53900	17162	20894	15844

Sumber: Data P3KE Kemenko-PMK Tahun 2022



Gambar 5.19 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem (D1-D3) Terhadap Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem (D1-D3) dan *intermediate outcome* Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem (D1-D3) dan Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) menunjukkan angka yang besar yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene & Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pinrang.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem (D1-D3) hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.21  
 Prioritas Wilayah untuk Penurunan Jumlah Penduduk  
 Miskin Ekstrem (D1-D3) Provinsi Sulawesi selatan  
 Tahun 2022

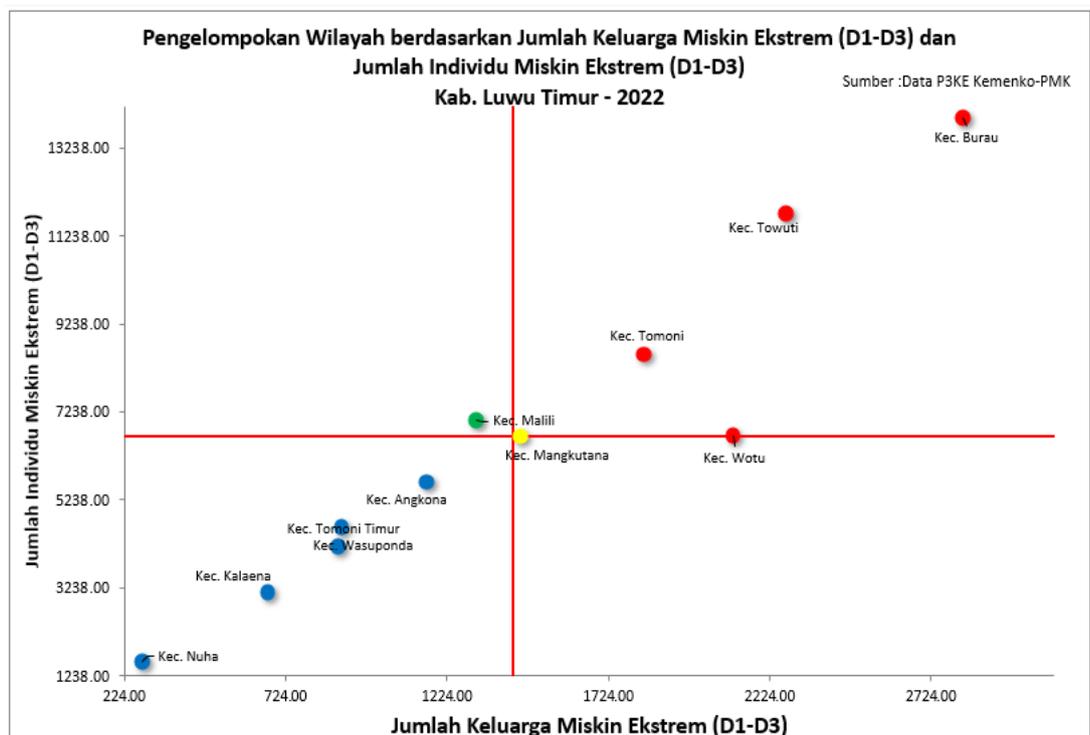
<b>Prioritas I</b> (9 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene & Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pinrang
<b>Prioritas II</b> (1 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Wajo
<b>Prioritas III</b> (1 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Luwu
<b>Prioritas IV</b> (13 Kabupaten/Kota)	Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Takalar, Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Sinjai, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Palopo dan Kota Pare-pare.

**5.7.3 Prioritas Wilayah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Luwu timur**

Tabel 5.21 Data Jumlah Keluarga (D1-D3) dan Individu (D1-D2) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Kecamatan	Keluarga			Individu				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3
<b>Total (11)</b>		<b>15711</b>	<b>4559</b>	<b>4128</b>	<b>7024</b>	<b>73672</b>	<b>25227</b>	<b>20280</b>	<b>28165</b>
1	Mangkutana	1452	383	397	672	6683	1960	1870	2853
2	Nuha	281	58	64	159	1548	372	358	818
3	Towuti	2273	643	612	1018	11713	3741	3154	4818
4	Malili	1315	323	342	650	7060	1907	1861	3292
5	Angkona	1163	322	281	560	5623	1747	1363	2513
6	Wotu	2112	678	568	866	6713	3631	2714	368
7	Burau	2824	930	748	1146	13913	5207	3653	5053
8	Tomoni	1832	501	519	812	8540	2662	2437	3441
9	Tomoni Timur	890	220	222	448	4153	1194	1038	1921
10	Kalaena	671	156	159	356	3119	829	756	1534
11	Wasuponda	898	345	216	337	4607	1977	1076	1554

Sumber: Data P3KE Kemenko-PMK Tahun 2022



Gambar 5.20 Analisis Prioritas Wilayah Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem

((D1-D3) Terhadap Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) Kabupaten Luwu  
Timur Tahun 2022

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem (D1-D3) dan *intermediate outcome* Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan kecamatan yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem (D1-D3) dan Jumlah Individu Miskin Ekstrem (D1-D3) menunjukkan angka yang besar yaitu Kecamatan Burau, Kecamatan Towuti, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Wotu.

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem (D1-D3) hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.22  
Prioritas Wilayah untuk Penurunan Jumlah Penduduk  
Miskin Ekstrem (D1-D3) Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2022

Prioritas I (4 Kecamatan)	Kecamatan Burau, Kecamatan Towuti, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Wotu
Prioritas II (1 Kecamatan)	Kecamatan Mangkutana
Prioritas III (1 Kecamatan)	Kecamatan Malili
Prioritas IV (5 Kecamatan)	Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Nuha

Tabel 5.23 Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

No	Bidang/ Urusan	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator/ Program	Target												Lokasi	Sumber
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	Meningkatkan keajaiban dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (MI)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100		100		100		100		100		100		Luwu Timur	APRO-DINAS PENDIDIKAN
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100		100		100		100		100		100		Luwu Timur	APRO-DINAS PENDIDIKAN
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100	175.985.793,343	100	106.918.821,181	100	171.314.874,297	100	175.214.274,287	100	178.989.793,343	100	178.989.793,343	Luwu Timur	APRO-DINAS PENDIDIKAN
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 19-24 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Keselamatan	100		100		100		100		100		100		Luwu Timur	APRO-DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	Meningkatkan keajaiban dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (MI)	PROGRAM PEMBAHARUAN UPRAYA KESEHATAN FERWANGAN DAN UPRAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	88	143.489.908,295	88	143.489.908,295	100	122.823.954,281	100	128.093.898,283	100	188.185.986,512	100	179.402.787,235	Luwu Timur	APRO-DINAS KESEHATAN
					Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten (%)	80,5	5.995.948.825	80,96	4.748.920.090	81,88	5.104.590.090	82,41	5.893.100.090	83,13	6.853.100.090	86,86	8.853.100.090	Luwu Timur	APRO-DINAS KESEHATAN
					Persentase desa/ Kelurahan stage 401 (%)	100	83.713.380	100	122.823.954,281	100	136.093.898,000	100	188.185.986,512,00	100	179.402.787,235	100	100.076.908,840	Luwu Timur	APRO-DINAS KESEHATAN
					Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten (%)	80	143.888.898,298	80,96	4.748.000.000	81,88	5.104.890.900	82,41	5.893.100.000	83,13	6.893.100.000	86,86	8.893.100.000	Luwu Timur	APRO-DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	Meningkatkan keajaiban dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (MI)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase desa/ Kelurahan stage 401 (%)	100	83.713.380	100	78.900.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Luwu Timur	APRO-DINAS KESEHATAN
					Persentase PMS yang diberikan bantuan BDR (%)	38,74	3.761.140,922	43,78	4.000.000,000	43,93	4.000.000.000,00	44,14	4.000.000.000,00	44,29	4.000.000.000,00	44,36	4.000.000.000,00	Luwu Timur	APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN, PERSEKUTUAN DAN PERUMBUHOOG
					Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,02	481.000,090	2,02	481.000,080	2,01	383.800,080	2	989.700,080	2	480.500,080	2	408.000,000	Luwu Timur	APRO-DINAS PENDIDIKAN, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Angka Prevalensi Komorbiditas Madem (Madem Comorbiditas Prevalensi (RasioCPR) (persen)	29,91	5.817.822,288	28	5.372.487,243	28,8	5.388.488,441	29,7	5.389.454,800	30,3	5.437.980,000	30,6	5.440.713,000	Luwu Timur	APRO-DINAS PENDIDIKAN, PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

10				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KES)	Rata-rata usia Kishor Pertama (Nilai)	20	281.895.089	20	1.025.010.190	21	965.019.015	21	1.023.986.081	21	1.025.968.081	21	1.945.089.700	LUWU TIMUR	APRO-DINAS PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (MI)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi jamah dalam kegiatan olahraga (%) (Pemerit)	96	3.289.658.000	96,9	3.581.254.000	97,22	3.613.470.000	98,83	6.391.433.000	90,45	3.674.542.490	92,07	3.702.278.490	LUWU TIMUR	APRO-DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Indeks Desa Membangun (IDM) (Status Desa )	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (MI)	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pemngkatan Perataan desa (%)	89	147.730.337	78	149.000.000	73	141.000.000	80	141.000.000	85	142.000.000	80	142.500.000	LUWU TIMUR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Indeks Desa Membangun (IDM) (Status Desa )	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (MI)	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pemngkatan Kawasan Transmigrasi (%)	100,00	100,00	100	45.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	LUWU TIMUR	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
14				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Lasi Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	230	230	230	222.900.000	88	268.000.000	85	280.000.000	80	280.000.000	80	280.000.000	LUWU TIMUR	APRO
15				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Masyarakat Transmigrasi yang jilaka (%)	100,00	100,00	100	130.000.000	100	345.000.000	100	345.000.000	100	350.000.000	100	330.000.000	LUWU TIMUR	APRO
16	KECAMATAN	Indeks Desa Membangun (IDM) (Status Desa )	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (MI)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pembedayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	1.342.354.673	100	64.703.724	100	70.987.734	100	70.971.390	100	91.444.903	100	87.337.233	KECAMATAN ANGGREK A	KECAMATAN ANGGREK A
17				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pembedayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	1.342.354.673	100	53.053.555	100	60.345.881	100	60.345.881	100	60.345.881	100	60.345.881	KECAMATAN BURAU	KECAMATAN BURAU
18				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pembedayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	1.342.354.673	100	74.278.860	100	93.698.830	100	109.360.000	100	100.000.000	100	100.000.000	KECAMATAN KALENA	KECAMATAN KALENA
19				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemngkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Kemitraan dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	1.342.354.673	100	328.980.720	100	328.980.720	100	328.980.720	100	328.980.720	100	328.980.720	KECAMATAN MALLI	KECAMATAN MALLI
20				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pembedayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	1.342.354.673	100	60.928.786	100	60.114.521	100	60.904.380	100	91.608.404	100	88.820.141	KECAMATAN MANGKUTANA	KECAMATAN MANGKUTANA
21				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pembedayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	1.342.354.673	100	219.969.693	100	435.441.442	100	435.441.442	100	435.441.442	100	448.441.442	KECAMATAN NUNA	KECAMATAN NUNA
22				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pembedayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	1.342.354.673	100	386.399.117	100	736.038.074	100	736.038.074	100	736.038.074	100	736.038.074	KECAMATAN TOMOH	KECAMATAN TOMOH

23			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	1.342.354.673	100	55.018.530	100	54.904.770	100	54.904.770	100	54.904.770	100	54.904.770	KECAMATAN TOMOHU TIMUR	KECAMATAN TOMOHU TIMUR	
24			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	1.342.354.673	100	103.324.918	100	103.449.915	100	103.272.915	100	103.123.918	100	103.493.915	KECAMATAN TOMOHU	KECAMATAN TOMOHU	
25			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	1.342.354.673	100	48.288.585	100	48.178.133	100	48.178.133	100	48.178.133	100	48.178.133	KECAMATAN WASUPO	KECAMATAN WASUPO	
26			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	1.342.354.673	100	80.379.394	100	84.710.089	100	102.469.915	100	104.446.410	100	104.446.410	KECAMATAN WOTU	KECAMATAN WOTU	
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (M4)	Meningkatkan keaktifan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M)	PROGRAM PENYANGKUTAN WARGA NEGARA MELAKUKAN TINDAK KENYERAN (persentase)	0,03	0	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	LURUWU TIMUR	APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
28				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terantar Atas, Terantar, Luruh Atas, Terantar dan Gelandangan Penderita yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di Luar Panti (Indikator SPH) (%)	30,20	1.184.690.488	100	1.383.320.078	100	1.233.000.000	100	1.269.000.000	100	1.280.000.000	100	1.200.000.000	LURUWU TIMUR	PERLINDUNGAN ANAK, APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (M4)	Meningkatkan keaktifan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M)	PROGRAM PENJAJARAN UTAMA GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	76,92	210.112.039	75,26	287.597.237	74,89	547.000.000	74,95	568.000.000	74,58	600.000.000	74,47	640.000.000	LURUWU TIMUR	APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
					Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	76,92	210.112.039	34,76	25,31	25,35	25,42	25,53					LURUWU TIMUR	PERLINDUNGAN ANAK, APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
30				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Catatan terpenuhi dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan/pengadilan dan upaya tindak lanjut dari pelayanan terpadu (%)	76	683.203.896	72,73	443.226.219	81,82	370.000.000	81,82	328.000.000	81,82	435.000.000	80,91	500.000.000	LURUWU TIMUR	APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
31				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Keterwakilan Data dan Informasi Gender dan Anak di TV, Radio, dan Media (%)	100	21.486.909	100	30.048.809	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	LURUWU TIMUR	PERLINDUNGAN ANAK, APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
32				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHK)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi (%)	93	160.337.894	100	158.156.660	100	160.000.000	100	238.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	LURUWU TIMUR	PERLINDUNGAN ANAK, APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
33				PROGRAM PERLINDUNGAN KHORUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO (%)	100	160.337.894	0	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	LURUWU TIMUR	PERLINDUNGAN ANAK, APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
34				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pendidikan keluarga (%)	0	-	0,08	50.327.249	0,1	160.000.000	0,11	160.000.000	0,13	160.000.000	0,14	170.000.000	LURUWU TIMUR	PERLINDUNGAN ANAK, APRO-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Pertumbuhan FDRD Sektor Unggulan (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas(M2)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALUATAN DAN KEBERKAWAN PANGAN	Cakupan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk ketahanan dan kemandirian pangan yang di kembangkan (%)	25,272.882	889.900.000	100	267.890.000	100	427.320.000	100	427.320.000	100	427.320.000	100	527.300.000	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANAHAN
36				PROGRAM PEMBERKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (%)	930	668.263.287	100	285.776.043	100	349.577.863	100	349.577.863	100	349.577.863	100	349.577.863	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANAHAN
37				PROGRAM PENANSAHAN KETAHANAN PANGAN	Jumlah Kelangkaan Kaduahan Percontohan Mandi Pangan (Kekurangan)	0	0	0		3		3		3		0		LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANAHAN
								13.680.000			280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANAHAN
					Jumlah Desa Berdaya saing pangan (Desa)	0	0	3		2		1		0		0		LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANAHAN
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pertumbuhan FDRD Sektor Unggulan (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas(M2)	PROGRAM BERKEDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, atau penyediaan pengalihan kebagian koperasi (%)	3	0	3,15	20.563.690	4,9	30.563.690	6,64	35.278.880	6,75	36.278.900	6,75	41.243.790	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL USAHA MENENGAH
39				PROGRAM BERKEDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO SUMBER	Persentase usaha mikro yang menjadi menengah (%)	28	90.147.324	48	178.102.694	48	233.216.324	88	251.216.324	85	278.503.624	80	284.482.740	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL USAHA MENENGAH
40				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro (%)	350	231.488.475	2,37	114.481.880	5,88	114.481.880	5,18	128.481.880	6,38	150.482.880	6,18	132.482.880	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pertumbuhan FDRD Sektor Unggulan (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas(M2)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Melayan Tengkap (Ton)	8.075,00	3.288.125.525	10.195,00	2.184.225.525	13.216,00	2.184.225.525	16.207,00	2.184.225.525	10.318,00	2.184.225.525	10.309,00	2.184.225.525	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERIKANAN
42				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	370.900	3.273.963.049	316.989,90	4.947.300.000	316.710,00	4.668.900.000	318.889,90	4.272.000.000	316.116,00	4.220.000.000	318.389,90	4.420.000.000	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERIKANAN
43				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan (Ton)	312	486.936.898	322	1.248.788.000	336	1.280.780.000	346	1.318.880.000	358	1.348.080.000	378	1.380.280.000	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERIKANAN
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA	Pertumbuhan FDRD Sektor Unggulan (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas(M2)	PROGRAM PINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA	Persentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata (Persen)	16	1.734.900.004	32,61	3.940.900.000	36,96	4.038.900.000	43,48	4.163.900.000	50	4.272.400.000	54,38	4.441.780.000	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PARAWISATA, KEPERLUASAN DAN CLAHARA
45				PROGRAM PEMASARAN PARAWISATA	Persentase meningkatnya Pemasaran Perwisata di Luar Timor (Persen)	98	625.478.489	72,75	1.040.900.000	81,82	1.288.900.000	89,91	1.278.900.000	90,91	1.278.900.000	108	1.527.080.000	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PARAWISATA, KEPERLUASAN DAN CLAHARA
46				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	46	113.480.083	31,31	213.900.000	29,31	383.900.000	30,07	682.900.000	40,18	890.600.000	65,07	916.600.000	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PARAWISATA, KEPERLUASAN DAN CLAHARA

47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Pertumbuhan FDRD Sektor Unggulan (Persen)	Mengembangkan pelaksanaan program diarah yang berdaya sang dan berprestasi (KADK)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	859.627,00	896.529,00	946.529,00	996.529,00	1.046.529,00	1.096.529,00	1.146.529,00	1.196.529,00	1.246.529,00	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN	
					Jumlah Produktivitas kelapa sawit (Ton/ Ha)	12,3	12,31	11,96	9,9	9,62	9,9	9,9	9,9	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN		
					Persentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN		
					Jumlah Produktivitas jagung (Ton/ Ha)	9,16	9,21	9,01	9,71	9,81	9,91	9,91	9,91	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN		
					Jumlah Produktivitas padi (Ton/ Ha)	7,11	6,12	7,13	8,479.930.894	7,19	8.963.695.938	7,19	9.223.336.736	7,21	9.550.641.273	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN
					Jumlah Produktivitas lada (Ton/ Ha)	0,95	0,96	0,97	99	1,62	1,62	1,62	1,62	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN		
					Jumlah Populasi ternak Kacang (ekor)	25.112,00	26.492,00	28.492,00	30.492,00	32.492,00	34.492,00	36.492,00	38.492,00	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN		
					Jumlah Produktivitas kakao (Ton/ Ha)	0,78	0,78	0,82	0,96	0,9	0,9	0,96	0,96	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN		
					Jumlah Populasi ternak Besar (ekor)	22.130,00	23.109,00	24.109,00	25.109,00	26.109,00	27.109,00	28.109,00	29.109,00	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN		
48				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Persen)	100	12.025.510,181	1.077.895,239	12.401.377,488	100	12.815.573,861	100	13.289.880,098	100	13.719.741,588	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN
49				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (%)	90	432.527.693	433.800,000	884.299.693	100	794.299.693	100	884.299.693	100	794.299.693	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN
					Persentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular (%)	3	1,9	1,4	1,3	1,2	1	1	1	LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN		
50				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha pertanian (Persen)	0	0							LUWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN		

51			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0	0	100	-	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN	
				Persentase Penyuluhan Pertanian (Persen)	0	0	99,26		99,07		99,07		99,19		99,9		LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PERTANIAN	
							2.785.304.037		3.749.441.100			4.024.304.333		4.385.938.493		4.801.817.047			
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pertumbuhan FDRD Sektor Unggulan (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan (KEM2)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	1,1	45.653.336	100	100		100		100		100		LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA SECI	
53				PROGRAM STABILISASI HARGA DASAR KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	9	321.747.012	15	275.421.383	15	340.421.000	15	355.421.000	15	366.421.000	15	398.615.330	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA SECI DAN MELIBRAH
54				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTPP (%)	5	147.833.575	8,8	345.873.638	8	362.833.638	7,8	412.973.638	7,5	441.873.638	7,5	462.873.638	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA SECI
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Pertumbuhan FDRD Sektor Unggulan (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan (KEM2)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peraturan Bupati (Perbup) keagenan industri yang ditetapkan (Dokumen)	0	0	0	188.857.100	0	188.857.100	0	188.857.100	0	188.857.100	0	188.857.100	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA SECI
56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan (KEM2)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Orang)	188.900	0	158.500,00	-	158.860,00	-	158.000,00	-	158.100,00	850.000,000	188.900,00	-	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS TRANSFORMASI DAN TENAGA KERJA
57				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	75,76	616.604.948	75,8	1.232.900.000	75,7	1.282.900.000	75,75	1.282.900.000	76,08	1.382.000.000	76,59	1.420.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS TRANSFORMASI DAN TENAGA KERJA
58				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (%)	41,87	284.446.432	41,96	294.336.962	42,07	344.900.000	43,07	388.900.000	43,98	390.000.000	43,98	558.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS TRANSFORMASI DAN TENAGA KERJA
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECL, DAN MENENGAH	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan (KEM2)	PROGRAM PEMBERIAN DAN LATIHAN KOPERASISAN	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pendirian dan pelatihan (%)	10,36	168.696.364	10,71	83.448.384	10,18	83.448.384	14,12	83.448.384	16,81	83.448.384	16,81	83.448.384	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA SECI
60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAHISATA	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan (KEM2)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif & Lawa Turun (Persen)	0	0	26	150.000.000	33,33	150.000.000	90,67	150.000.000	90,67	150.000.000	100	150.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PARAHISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan (KEM2)	PROGRAM PENYUKTIAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perluasan akses pedagang pasar ritel yang telah dibangundivulsihase (%)	10	1.218.868.800	10	1.884.450.000	10	2.088.460.176	10	2.265.460.176	10	2.588.460.176	10	3.880.460.176	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA SECI
62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERALTAH URUM DAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (KCI)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jengkal riil (logik)	8,10		8,41		8,64		9,28		9,71		10,14	LJWU TIMUR	APRO-DIMAS PEKERJAAN URUM DAN PENATAAN RUANG	

				Penentase infrastruktur pengendali daya rumah air (%)	45,00		40,00		47,20		40,57		40,00		40,00		LURU TIMUR	APRO-DHAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
63			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penentase Jumlah Kusen Tangga yang menggunakan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan lahan pengumpul perpipaan terintegrasi (%)	70	1.731.370.722	69,40	6.517.102.034	60,70	11.900.000.000	60,69	18.300.000.000	61,57	12.300.000.000	63,13	12.300.000.000	LURU TIMUR	APRO-DHAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
64			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMBAHAN REGIONAL	Penentase infrastruktur persambatan yang dibangun (%)	17,20	54.000.000	18,70	2.083.700.000	84,16	23.100.000.000	70,33	2.250.000.000	85,41	2.250.000.000	100	2.250.000.000	LURU TIMUR	APRO-DHAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
65			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penyediaan pelayanan SPALD-6 Akuisi Aman (%)	0,07	12.421.827.840	0,06	12.303.440.000	0,88	13.710.000.000	1,22	18.900.000.000	1,48	12.710.000.000	1,7	12.710.000.000	LURU TIMUR	APRO-DHAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
66			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)	84,10	3.538.812.584	84,21	5.704.838.500	88,3	2.210.981.900	85,24	2.210.981.900	87,07	2.210.981.900	87,07	2.210.981.900	LURU TIMUR	APRO-DHAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
67	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKOTAAN	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (RI)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penentase Paving Jalan, Jalan Yang dilengkapi Penampang Jalan Umum (PJU) (%)	21,28	22.150.285.000	32,21	1.707.000.000	34,70	1.840.000.000	37,34	1.840.000.000	39,91	1.840.000.000	32,47	1.840.000.000	LURU TIMUR	APRO-DHAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
68			PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni (%)	17,74		10,94		10,94		10,94		10,94		10,24		LURU TIMUR	APRO-DHAS PERUBAHAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANJAMAN	
				Penentase kawasan permukiman rumah dibawah 10 ha yang dibangun (%)	0	41.816.750	34,94	3.623.000.000	10,94	3.623.000.000	10,94	3.623.000.000	10,71	3.623.000.000	30,47	3.623.000.000	LURU TIMUR	APRO-DHAS PERUBAHAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANJAMAN	
69			PROGRAM PERUBAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH	Penentase RTU/ RW yang kawasan permukiman rumah yang dibangun (%)	0	0	2,81	65.000.000	2,88	65.000.000	2,88	65.000.000	3,07	65.000.000	3,16	65.000.000	LURU TIMUR	APRO-DHAS PERUBAHAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANJAMAN	
70			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman dilindungi dengan PSU (%)	21,00	777.150.000	21,00	24.000.000.000	21,00	24.000.000.000	19,3	22.500.000.000	19,3	22.000.000.000	19,3	22.000.000.000	LURU TIMUR	APRO-DHAS PERUBAHAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANJAMAN	
71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAPAN DAN KETERSESUAIAN UMUM SERTA POLIBENCANA MASYARAKAT	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Mm)	Menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (RI)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penentase warga negara yang memperoleh layanan informasi dasar bencana (%)	100		100		100		100		100			LURU TIMUR	APRO-DHAS PENGANGGULAN DAN PENYALAH DANIRAH	
				Penentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	1.046.307.027	100	1.600.244.000	100	2.070.000.000	100	2.200.000.000	100	2.330.000.000	100	2.300.000.000	LURU TIMUR	APRO-DHAS PENGANGGULAN DAN PENYALAH DANIRAH	
				Penentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang regional/gender (%)	100		100		100		100		100		100		LURU TIMUR	APRO-DHAS PENGANGGULAN DAN PENYALAH DANIRAH	

77	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Mia)	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M)	PROGRAM PERAWAAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpapar Reduksi Densitas pada saat dan setelah Tanggapi Darurat Bencana Daerah KabupatenKota (%) (%)	100	281.348.343	100	268.900.000	100	388.900.000	100	388.900.000	100	400.000.000	100	415.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DNAB SOSIAL, PERBEDAAN PERMULIAAN DAN PERMUNGKUN
78	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Mia)	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan lautan/lautan (Persen)	100	388.427.208	1	484.200.407	1	522.536.189	1	560.494.208	1	604.942.877	1	630.197.479	LJWU TIMUR	APRO-DNAB LINGKUNGAN HIDUP
79				PROGRAM Peningkatan FENOMENA RELATIF DAN PENYULIHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang bebas (Persen)	-	0	0	0	0	100	30.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DNAB LINGKUNGAN HIDUP	
80				PROGRAM PEMBANGUNAN PENGADAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)	88	2.280.000	88	10.000.000	88	20.000.000	88	20.000.000	88	20.000.000	88	20.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DNAB LINGKUNGAN HIDUP
81				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang terangkut (Persen)	72	3.584.342.200	72	4.600.000.000	72	4.600.000.000	74	4.701.800.000	76	4.804.832.000	78	4.900.728.840	LJWU TIMUR	APRO-DNAB LINGKUNGAN HIDUP
82	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Mia)	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	100	648.512.231	100	380.852.620	100	400.000.000	100	400.000.000	100	441.000.000	100	463.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DNAB PERTANIAN
83	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	IKM Pelayanan SPW (Mia) (Mia)	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Capaian Pemerintah Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	99,71	0	99,83	435.851.988	99,85	485.953.000	99,87	488.286.175	99,9	493.890.485	99,94	500.049.796	LJWU TIMUR	APRO-DNAB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
84				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Capaian pemerintah akta kelahiran (%)	85,94	182.870.057	86,05	387.420.324	90,55	426.037.000	97,05	434.810.375	97,42	441.310.343	98,02	448.125.800	LJWU TIMUR	APRO-DNAB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
85				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Capaian Pengelolan Informasi Kependudukan yang terintegrasi (%)	66	0	26	70.418.176	45	90.000.000	68	100.000.000	76	110.000.000	108	120.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DNAB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
86	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA, KEOL, DAN MENENGAH	IKM Pelayanan SPW (Mia) (Mia)	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M)	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIFIAN PULSAI	Persentase peningkatan jumlah kopras yang memiliki izin usaha sipan sipan (%)	0	0	0	20.000.000	8,88	30.023.880	12,69	35.023.880	14,72	37.023.880	14,72	38.523.880	LJWU TIMUR	APRO-DNAB PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA SEDI
87	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	IKM Pelayanan SPW (Mia) (Mia)	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M)	PROGRAM PELAYANAN FIDANANAN MODAL	Persentase Kecepatan waktu penyelesaian tzu yang diterbitkan sesuai SOP (%)	100	388.914.983	73	324.181.187	75	363.650.000	77	378.816.000	80	387.916.000	82	396.055.027	LJWU TIMUR	APRO-DNAB PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU KANTOR
88	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	IKM Pelayanan SPW (Mia) (Mia)	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATENKOTA	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali (%)	99	0	0	0	99,9	40.000.000	91,98	40.000.000	92,3	50.000.000	92,3	60.000.000	LJWU TIMUR	APRO-DNAB PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA SEDI
89	SEKRETARIAT DAERAH	IKM Pelayanan SPW (Mia) (Mia)	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESELATANAN SIKYAT	Persentase rekomendasi kegiatan bidang pemerintahan dan kewilayahan rakyat yang ditinjau/audit dan dilaksanakan (%)	100	23.137.806.834	100	28.926.673.222	100	32.015.454.500	100	32.436.962.785	100	34.430.752.481	100	34.512.201.143	LJWU TIMUR	APRO- BERKUALITAS DAERAH

65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Ketertiban dan Kelestarian (MIK)	Mewujudkan ketertarikan dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat(MR)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Andar dari Penegakan Hukum Perda dan Peraturan (Persen)	100		100	100	100	100	100	100	100			
					Persentase Gangguan Tindakan yang dapat dicegahakan (Persen)	100	5.742.036.790	100	6.740.036.790	100	6.284.025.085	100	6.944.081.688	100	10.081.302.988	100	10.352.242.800
					Persentase Pemegakan Perda (Persen)	100		100	100	100	100	100	100	100			
66				PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan penyediaan dan evakuasi korban kebakaran (Persen)	92,77		93,91	85,16		89,38		97,68		98,79		
					Cakupan pelayanan ketahanan kebapakan (Persen)	40,69		45,21	49,73		54,25		58,78		63,3		
					Persentase Desa/Kelurahan siap tanggap kebakaran (Persen)	6,68		17,16	25,78		34,37		42,97		51,58		
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyediaan dan Evakuasi korban kebakaran (Persen)	100		100	100		100		100		100		
							5.554.386.880		6.564.286.880		12.884.123.400		13.434.111.900		14.044.101.300		15.758.900.880
67	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Cakupan penerapan nilai agama dalam masyarakat (%)	Menjalin kebersamaan yang berkeadilan pada agama dan budaya(MR)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT KURUM ADAT	Persentase peningkatan peranconan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat - lembaga ekonomi dan pemberdayaan kelompok sosial guru (%)	85,85	698.911.729	86	1.234.827.437	88	1.284.981.383	78	1.318.875.848	80	1.288.888.848	85	1.338.916.848
68	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Cakupan penerapan nilai agama dalam masyarakat (%)	Menjalin kebersamaan yang berkeadilan pada agama dan budaya(MR)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHAMMUKAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase pertumbuhan perikanan dan pengittangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	88	212.113.088	88	180.000.000	88	180.000.000	98	170.000.000	88	180.000.000	88	180.000.000